POLITIK EKONOMI ISLAM

Analisis Wacana Keislaman Abad VII-XIX M

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Musa Asya'arie

Editor:
Suad Fikriawan, Alvien S. Haerisma

LESFI LEMBAGA STUDI FILSAFAT ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

POLITIK EKONOMI ISLAM

Analisis Wacana Keislaman Abad VII-XIX M

Editor:
Suad Fikriawan
Alvien Septian Haerisma

LESFI LEMBAGA STUDI FILSAFAT ISLAM

POLITIK EKONOMI ISLAM
(Analisis Wacana Keislaman Abad VII-XIX M)

Penulis:
- Ahmad Ibandi
- Suad Fikriawan
- Alvien Septian Haerisma
- Helmy Haris
- Ambo Dalle
- Moh. Nur Hidayat
- Ratih Purbowisanti
- Usman
- Muhammad Tho'in
- Sumadi
- Rusnaena

Editor:
Suad Fikriawan
Alvien Septian Haerisma

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Musa Asy'arie

Cetakan, 2017

Penerbit:
LESFI
Jl. Solo Km. 8, Nayan, No.108A Yogyakarta
E-mail: kksjogja@gmail.com

ISBN: 979-602-xxx-xx

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya buku Politik Ekonomi Islam (Analisis Wacana Keislaman Abad VII-XIX M) sebagai kumpulan makalah diskusi kelas S3 Ekonomi Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga yang sekarang berada di tangan pembaca bisa diterbitkan. Buku ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan Ekonomi Islam yang terasa masih kurang, terutama dalam memahami Ekonomi Islam dalam pespektif sejarah. Hal ini penting untuk melihat bagaimana kebijakan ekonomi Islam dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam yang cukup panjang.

Ekonomi Islam dalam prakteknya selalu berpihak pada rakyat kecil, mereka yang lemah dan mereka yang terpinggirkan. Konglomerasi dapat dikembangkan melalui proses alamiah, bukan konglomerasi yang mendapatkan proteksi kebijakan politik ekonomi yang dilakukan Pemerintah melalui kolusi dan nepotisme di pusat kekuasaan pemerintahan yang ada.

Selama ini perkembangan ekonomi Islam, yang seringkali juga disebut ekonomi syari'ah, lebih ditekankan dalam aspek keuangan dengan tekanan pada lembaga keuangan dan perbankan. Sedangkan sektor-sektor di luar keuangan, kurang mendapatkan perhatian yang memadai, seperti perburuhan, sumber daya alam, industri dan ekonomi digital.

Padahal dalam catatan sejarah pemerintahan Islam dapat dibaca bahwa kebijakan ekonomi Islam tidak hanya diterapkan di sektor keuangan saja, tetapi juga di sektor riil yang meliputi perdagangan, pertanian, industry pengolahan serta distribusinya, wisata, perhotelan dan penyelenggaran peribadatan, terutama haji dan umroh yang

melibatkan bisnis di bidang transportasi, akomodasi, kesehatan dan makanan.

Sudah waktunya ekonomi Islam yang berpihak pada pembelaan dan pemberdayaan kaum yang lemah dan dilemahkan dapat mendapatkan perhatian yang lebih besar, bukan hanya di sektor keuangan saja, tetapi juga disektor riil di mana terdapat kesenjangan yang sangat tajam, sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin dan termiskinkan. Karena itu, ekonomi Islam semestinya harus dapat memperkecil kesenjangan dalam kehidupan masyarakat dengan menerapkan prinsip keadilan ekonomi dan pemerataannya.

Tugas khalifatullah fil ardli sesungguhnya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di muka bumi. Alquran menjelaskannya dalam firman berikut ; Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. [Quran 38:26]. Dalam ayat lain dijelaskan ; Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. [Quran 59:7]

Keberpihakan ekonomi Islam harus dapat diwujudkan dalam kehidupan yang damai tanpa kekerasan, karena konflik kekerasan akan menggerus keperpihakan untuk mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan yang merata. Dalam kenyataannya kapitalisme dan sosialisme dapat diletakkan sebagai alat untuk bisa mewujudkan keberpihakan pada keadilan dan pemerataan. Di situlah sebenarnya substansi ekonomi Islam.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan dapat disusul dengan buku-buku ekonomi Islam berikutnya, amiin.

Klaten, 7 April 2017

Musa Asy'arie

PENGANTAR EDITOR

Sejarah bukanlah sekadar momen-momen *anamnesis* atau kenangan. Sejarah yang demikian hanyalah sekadar *Historie*. Meminjam istilah Martin Heidegger, filosof asal Jerman yang terkenal dengan refleksinya tentang makna menjadi manusia otentik di tengah dunia yang banal ini. Sejarah bukanlah kisah tentang kematian, melainkan tentang sesuatu yang hidup (*Geschichte*), demikian katanya. Daya hidup sejarah itulah yang memampukan kita melampaui (*beyond)* segala rantai kekangan masa lalu sekaligus memberanikan kita untuk tetap menabur imajinasi dan harapan tentang masa depan yang selalu "harus" lebih baik dan lebih beradab. Demikianlah, buku yang ada di tangan pembaca sekarang ini tidak lagi dibaca hanya sebagai pelampiasan naluri manusiawi kita akan kenangan masa lalu. Meski berbicara tentang masa lalu, tetapi kandungan buku ini pada hakikatnya menggenggam tekad para Pahlawan Muslim yang berjuang dengan tidak hanya mempercayai slogan "*Hidup Mulia atau Mati Syahid*" dengan orientasi *Ghanimah* semata, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mereka membebaskan rakyat yang terbelenggu dan terkungkung dalam kegelapan dan kebodohan oleh tirani Penguasa. Memberikan cahaya Islam yang benar dan Agung di Sisi Allah dan meninggalkan ketersesatan hidup di bawah cengkraman kolonial dan rezim yang lalim. Membentuk sebuah peradaban yang cinta akan pengetahuan, keberpihakan pada rakyat, yang berdampak pada kemaslahatan dunia dan akhirat.

Banyak para pemikir kontemporer yang menanyakan perihal sejarah kejayaan Islam ini dengan pertanyaan "apakah ada Negara Islam (*Khilafah*) itu?". Secara legal formal memang Negara Islam (*Khilafah*) hanya terjadi selama pemerintahan *Khulafaur Rashyidin*

pada abad ke VII sampai ke VIII atau berlangsung selama 26 tahun saja, setelahnya tidak ada lagi *Khilafah*. Bahkan penguasa dalam beberapa abad berikutnya memakai sistem Kerajaan (Dinasti) yang dipimpin seorang Raja secara turun temurun bergantian dalam satu keturunan dan silsilah. Namun meski begitu, jejak peradaban yang diwariskan oleh Islam sejak abad VII sampai abad XIX sangat terasa oleh umat manusia. Ilmu Pengetahuan dan Kemajuan teknologi yang berkembang di daratan Eropa dan dunia Barat saat ini tidak terlepas dari kontribusi Islam di masa lalu. Hal ini tentu karena sistem tata negara, kebijakan politik, sosial, ekonomi, yang diterapkan dengan begitu berpihak pada rakyat. Statemen ini mungkin kontradiktif dengan beberapa referensi sejarah Islam yang umumnya menguraikan "keperkasaan" tentara Islam dalam berbagai peperangan merebut wilayah baru yang didudukinya.

Sebenarnya, dibalik "keperkasaan" itu, tersimpan kelemah lembutan dan kecintaan yang jarang di uraikan dalam buku-buku sejarah Islam. Bagaimana ketakutan dan kegelisahan yang dirasakan Umar Bin Khattab saat menerima jutaan Dinar *Ghanimah* dari negeri subur (Persia,Syiria, dan Mesir) sebagai isyarat yang dilihatnya sebagai tanda perpecahan dan melemahnya Umat Islam. Kemudian bagaimana kezuhudan Umar bin Abdul Aziz saat beliau berkuasa dengan menyerahkan seluruh harta bendanya ke *Baitul Maal* sebagai konsekwensi atas dosa menghambur-haburkah harta negara saat beliau menjadi putra mahkota, yang dalam suatu kisah diceritakan bahwa kegemarannya berfoya-foya hampir menghabiskan setengah dari pendapatan *baitul maal* setiap tahunnya. Dan terakhir kita lihat bagaimana seorang Ghazan Khan cucu dari Jengish Khan dari keturunan Khan yang Agung merubah haluan hidupnya dan Agamanya kepada Islam dan berdampak pada tatanan kerajaan Illkhan secara drastis. Pada saat kakeknya melakukan infasi ke negeri-negeri Islam yang berakhir dengan kehancuran besar-besaran kota Baghdad sekaligus kehancuran

Dinasti Islam pada masa itu, Justru cucunya mendapatkan anugerah Islam dan membangun kembali peradaban Islam yang dulu telah dihancurkan kakeknya.

Bila belajar dari sepenggal kisah diatas, secara substantif untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baik (*baldatu thoyyibah*) tidak perlu secara legal formal menjadikan Islam sebagai sistem kenegaraan, akan tetapi cukup dengan adanya *political will* pemerintah yang menyerap nilai-nilai Islam kemudian dielaborasikan dalam konteks sistem ke-negara-an tersebut. Ini pun jika diyakini nilai-nilai Islam itu berdampak pada kemaslahatan bersama. Di samping *political will,* tentu moral pemerintahan harus baik. Kemakmuran suatu bangsa tidak akan terwujud dengan *moral hazard*. Kita telah cukup melihat bagaimana teladan yang dicontohkan oleh para Pemimpin Islam dalam uraian sejarah. Betapa kaya dan makmurnya suatu bangsa, jika pemerintahannya korup dan sarat dengan kecurangan-kecurangan dalam memainkan peran pemerintahan, meski ditopang dengan sistem pemerintahan yang ideal (sistem khilafahkah, kerajaankah, atau republik-kah), tetap kehancuran suatu bangsa tidak bias dielakkan.

Proses penanaman moral itu tidak hanya dilakukan kepada pemerintahannya saja tetapi rakyat juga memerlukan sistem pendidikan moral yang baik. *Political will* dan pendidikan moral yang baik dalam suatu bangsa akan mewujudkan tatanan sosial yang beradab, dan sistem ekonomi yang maju. Kita lihat bagaimana Malaysia sejak akhir abad XIX M pasca terjadinya konflik antar etnis, melakukan reformasi sistem pemerintahan yang berprinsip pada nilai Islam namun tidak menampakkan Islam secara legal formal dengan tetap mengakomodir kepentingan-kepentingan agama lain. Sistem ini kemudian diformulasikan dalam berbagai kebijakan di sektor-sektor setrategis dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Serta membidik potensi lokal yang bisa ditawarkan pada dunia internasional sehingga Malaysia dalam waktu singkat

menjadi negara yang maju dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sosial ekonomi.

Maka, jika kekuasaan adalah pelabuhannya, politik adalah kendaraan yang mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan pemilik kekuasaan itu. Jika politiknya baik, tujuan kekuasaan akan berakhir baik. Sebaliknya jika politik tidak baik, maka kekuasaan akan berakhir pada kehancuran. Dan sebagai kata terakhir, ijinkan saya mengutip sepenggal syair dari sebuah buku tentang Khalifah Umar bin Khattab berikut ini"*Tidak ada keceriaan yang bersemi di wajahnya. Tuhan kan kekal, sedang harta dan anak akan binasa. Ia tidak pernah merasa cukup dengan gudang hartanya yang hina itu. Telah kuupayakan agar tetap abadi, tapi mereka semua takkan abadi. Tidak pula Sulaiman. Padahal angin, manusia, dan jin, tunduk padanya. Kemana kesudahan para raja, di mana delegasi yang dahaga datang dari dari segala penjuru ke danau istana?. Suatu hari nanti, tempat kembali tu pasti akan didatangi, sebagaimana mereka semua mendatanginya".*

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Suad Fikriawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
Prof. Dr. Musa As'ary

PENGANTAR EDITOR vi
Suad Fikriawan, M.A

DAFTAR ISI xi

BAB 1 POLITIK EKONOMI ARAB SEBELUM DAN SEMASA MUHAMMAD SAW 1
Ahmad Ibandi

BAB 2 POLITIK EKONOMI MASA KHULAFAUR RASYIDUN (Kebijakan Khalifah Abu Bakar, Umar Bin Khattab, dan Utsman bin Affan) 23
Suad Fikriawan

BAB 3 POLITIK EKONOMI DINASTI UMAYYAH: Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Nasar bin Sayyar 47
Alvien Septian Haerisma

BAB 4 POLITIK EKONOMI ISLAM DI ANDALUSIA 59
Helmy Haris

BAB 5 POLITIK EKONOMI MASA DINASTI ABBASIYAH: Kebijakan Nizam Al-Mulk 78
Ambo Dalle

Bab 6 POLITIK EKONOMI MASA DINASTI ISLAM DI AFRIKA 100
Moh. Nur Hidayat

Bab 7 POLITIK JALUR PERDAGANGAN ASIA-AFRIKA-EROPA ABAD IX-X MASEHI 115
Ratih Purbowisanti

Bab 8 POLITIK EKONOMI GHAZAN KHAN (1295-1304 M), DAN PEMBARUAN EKONOMI ALAUDDIN KHALJI (1296 -1316M) 128
Usman

Bab 9 POLITIK EKONOMI DINASTI MUGHAL SULTAN AKBAR DAN SULTAN AUGRANGZEB .. 157
Muhammad Tho'in

BAB 10 POLITIK EKONOMI ISLAM DI MALAYSIA DAN BRUNAI DARUSSALAM 169
Sumadi

BAB 11 POLITIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 205
Rusnaena

POLITIK EKONOMI ARAB SEBELUM DAN SEMASA MUHAMMAD SAW

Ahmad Ibandi

A. Pendahuluan

Kemaslahatan suatu bangsa sangat di pengaruhi oleh suatu kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Masa sebelum Islam, khususnya kawasan jazirah Arab, disebut masa *jahiliyah*. Julukan semacam ini terlahir disebabkan oleh terbelakangnya moral masyarakat Arab khususnya Arab pedalaman (badui) yang hidup menyatu dengan padang pasir dan area tanah yang gersang. Mereka pada umumnya hidup berkabilah dan nomaden. Mereka berada dalam lingkungan miskin pengetahuan. Situasi yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan tersebut, mengakibatkan mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan, membunuh anak dengan dalih kemuliaan, memusnahkan kekayaan dengan perjudian, membangkitkan peperangan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Menyembah berhala sebagai Tuhan nenek moyang yang mereka ciptakan sendiri. Suasana semacam ini terus berlangsung hingga datang Islam di tengah-tengah mereka. Sehingga dapat dikatakan *kejahiliyahan* masyarakat Arab pra Islam masa itu lebih didominasi oleh aspek teologis dan tradisi kesukuan

mereka. Sedangkan mereka tergolong bangsa yang maju pada bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan.

Semenanjung Arab merupakan pertemuan antar perdagangan di bebrapa negara di Dunia. Sehingga Bangsa Arab merupakan bangsa yang memiliki keragaman agama; Yahudi, Nasrani, Zoroaster dan Islam. Sebelum Islam datang, kedua agama tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa Arab. Pada masa itu kehidupan masyarakat dunia sangat memprihatinkan, penguasaan Romawi atas bangsa-bangsa menjadikan banyaknya masyarakat terbelenggu dalam kegelapan dan kebodohan. Begitu pula dengan perekonomian masyarakat Arab yang melakukan praktek ribawi yang sangat merugikan tatanan ekonomi masyarakat secara luas. Tentu aspek politik bangsa Romawi yang sangat mempengaruhi tatanan masyarakat dan ekonominya di masa itu. Maka dalam tulisan ini, penting kiranya penulis menguraikan bagaimana politik ekonomi bangsa Arab pra-Islam, dan tatanaPolitik ekonomi masyarakat setelah Islam berkuasa.

B. Politik Ekonomi Arab pra Islam

Pada masyarakat Arab sebelum Islam secara politik dapat dibagi menjadi bua bagian berdasarkan atas batas territorial: Pertama, Penduduk kota (*al-hadharah*) yang tinggal di kota-kota berbasis perniagaan di Jazirah Arabia, seperti Makkah dan Madinah. Kota Makkah merupakan kota penghubung perniagaan Utara dan Selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syiria di Utara. Dan kedua Penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari suatu daerah ke daerah lain, mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba dan unta.

Sebelum datangnya Islam, ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu kekaisaan Nasrani Byzantium, kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta Dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Nasrani Byzantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia kecil, Siria, Mesir dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid (Sasaniyah). Ibu kota Persia adalah *al-Madaa'in*, terletak sekitar dua puluh mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afganistan.

Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama, interaksi dunia arab dengan Kekaisaran Byzantium dan Persia. Kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani dan Zoroaster. Bangsa Arab terdiri beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Tidak jarang, peperangan terjadi antar suku. Seperti perang Fujjar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Pertama perang antara suku Kinannah dan Hawazan, kemudian Quraisy dan Hawazan serta Kinanah dan Hawazan lagi. Peperangan Fujjar terjadi 15 tahun sebelum Rasulullah di utus. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, antara lain kerajaan Kindah, kerajaan Ma'in dan kerajaan Qatban, kerajaan Saba', kerajaan himyar, pendudukan Romawi di Yaman, Pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, kerajaan Hijrah, Kerajaan Ghassan, dan kerajaan Hijaz.

Kehidupan bangsa Arab pra-Islam yang tinggal di perkotaan dikenal sebagai bangsa yang telah memiliki kemajuan ekonomi. Kemajuan itu didasari letak geografis nya yang menjadi pertemuan antara pedagang pedagang besar dari luar jazirah arab. Seperti In-

dia, Yaman, Syiria, dan Persia. Meskipun sult digambarkan secara komprehensif, ciri-ciri tatanan Arab pra-Islam adalah sebagai berikut (Madjid, 1995):

a) Mereka menganut paham kesukuan (qabilah);
b) Memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan;
c) Mengenal hirarki sosial yang kuat;
d) Kedudukan perempuan cenderung direndahkan.

Perlu ditekankan, bahwa pada masa pra-Islam pemerintahan maupun dalam tubuh kabilah yang menjalankannya, mereka para eksekutif harus mematuhi hasil/tugas yang dibebankan oleh Majlis Syura. Saat itu dijumpai dua lembaga tinggi negara, yaitu *al-mala* (semacam DPR sekaang) yang duduk di gedung Daar al-Nadwa. Di sana dibahas tentang hal-hal yang leih kecil dan pelaksanaan pembangunn yang ditugaskan kepada pemerintah oleh lembaga kedua yaitu *Naadi al-Qoum* (MPR sekarang) bersidang di luar/teras Bait al-Allah di mana jumlah anggotanya jauh lebih banyak dari pada yang pertama. Dengan adanya kota suci Mekah, maka masyarakat Mekah memainkan peran penting dalam politik maupun dunia perdagangan.

Adapun perekonomian Arab pra-Islam khususnya di daerah pinggiran adalah pertanian dan peternakan. Sekitar dua ratus tahun sebelum kenabian Muhammad SAW (610 M), masyarkat Arab telah mengenal peralatan pertanian semi-modern seperti alat bajak dan garu serta pembawa tempat air juga sudah dikenal. Mereka telah mampu membuat bendungan raksasa yang dinamakan *Ma'arib*. Bendungan ini sangat vital karena setelah rusaknya bendungan tersebut maka era kesejahteraan dalam erekonomian mereka juga hancur. Masyarakat Arab juga telah menciptakan sistem irigasi buat pengairan ladang mereka, mengembangkan pupuk kandang serta mempraktekkan teknik penyilangan untuk mendapatkan bibit yang unggul.

Ada tiga sistem yang dipakai oleh para pemilik ladang atau sawah dalam mengelola lahan pertanian mereka. Pertama, ialah sistem sewa-menyewa dengan emas atau logam mulia lain, gandum atau produk pertanian lainnya sebagai alat tukar pembayarannya. Kedua, ialah sistem bagi hasil produk, misalnya separuh untuk pemilik lahan dan setengahnya untuk penggrarap, dengan ongkos penggarapan serta bibit dari pemilik. Ketiga ialah sistem *pandego*, yakni seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatannya dikerjakan oleh penggarap. Sawah yang digarap oleh sekelompok budak tani di daerah yang subur. Nasib para penggarap sawah sangat memprihatinkan sama sebagaimana yang terjadi di Semenanjung Iberia (Andalusia) sebelum dikuasai Islam. Mereka tidak memiliki hak kemerdekaan sama sekali, sebagaimana dilukiskan Imamuddin *(The impoverished citizens, the wretched slaves, the miserable serfs, the persecuted jews, all waited for a savior...* (Karim, 2015). Di samping pertanian, perdagangan merupakan unsur pentng dalam perkonomian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Mereka telah lama mengenal pedagangan bukan saja dengan sesama Arab, tetapi juga dengan bangsa selain Arab. Kemajuan perdagangan bangsa Arab sebelum Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang telah maju. Tanda adanya kemajuan perekonomian salah satunya adanya kegiatan ekspor impor yang mereka jalankan. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman saat 200 tahun menjelang Islam datang, telah mengadakan transaksi dengan India (Asia Selatan sekarang), negeri pantai Afrika, sejumlah negeri Teluk Persia, Asia Tengah, dan sekitarnya. Dalam hal ini, komoditas ekspor Arab Selatan dan Yaman adalah dupa, kemenyan, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, anggur, dan barang-barang lainnya. Mereka juga melakukan impor komoditas dari Afrika Timur antara lain; kayu untuk bahan bangunan, bulu burung unta, logam mula, sutra, pakaian, pedang, dan rempah-rempah; serta dari negara lain di Teluk Persia, mereka juga

melakukan peengimporan intan (Karim, 2015).

Perlu dijelaskan, bahwa kota Mekah merupakan kota suci yang setiap tahunnya dikunjungi banyak orang baik dari dalam negeri maupun mancanegara, karena di kota Mekah inilah terdapat bangunan suci Ka'bah. Selain itu, di Ukaz terdapat pasar sebagai tempat pertukaran barang yang datangnya dari bebagai belahan dunia dan tempat diadakannya perlombaan kebudayaan (puisi Arab). Maka dari itu, kota tersebut menjadi pusat peradaban baik politik, ekonomi, dan budaya yang penting. Para pedagang tersebut menjual komoditas itu kepada para pejabat, konglomerat, bangsawan, tentara juga keluarga penguasa, karena komoditas tersebut sangat mahal, terutama barang-barang yang di impor dan harus dikenai pajak yang sangatlah tinggi. Adapun transaksi pembayaran menggunakan media koin yang terbuat dari emas, perak atau logam mulia lain yang ditiru dari mata uang Persia dan Romawi. Sampai kini beberapa koin tersebut masih tersimpan di sejumlah museum di Timur Tengah (Karim, 2015).

Telah disebutkan, bahwa Mekah merupakan jalur persilangan ekonomi internasional, yang menghubungkan dari dan ke mancanegara. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Mekah memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam perekonomian tersebut. Oleh karena itu, dalam bidang ekonomi, bangsa Arab telah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Mekah bukan hanya merupakan pusat perdagan lokal melainkan sebagai pusat perdangan dunia yang sangat penting kala itu, dimana dari sanalah jalur perdagangan yng menghubugkan empat jalur utama tercipta, yaitu, pertama dari Yaman yang menjadi jalur bagian Timur dengan Mekah melewati jalur laut. Kedua, dari Damaskus (Syam) yang menghubungkan Asia Kecil dan Eropa Timur dengan Mekah. Ketiga, dari Irak (dalam perkembangan kemudian Baghdad) yang menghubungkan jalur darat ke Kabul, Kashmir, Singkiang/Sinjiang, sampai Canton dengan Mekah. Dan keempat, dari Habsyi, Ethio-

pia sekarang ke Barat Daya dan pesisir Timur Afrika (*al-Bilad al-Sudan*:wilayah yang didiami oleh masyarakat berkulit hitam), juga dari Mesir yang menghubungkan jalur *al-Tariq al-Sikka* (jalan darat yang menghubungkan antara Alexandaria, Mesir dengan Tangier dan Ceuta, Maroko, kemudian menyeberangi Selat Gibraltar terus ke Semenanjung Iberia di Eropa Barat Daya) dengan Mekah sekitar abad ke VI Masehi. Adapun perdagangan mereka telah dikisahkan dalam al-Qur'an Surat al-Quraisy ayai 1-4 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ۝١ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ۝٢ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٣ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤

Artinya: *Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia. Dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar* (QS. Quraisy: 1-4)

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa tradisi pertanian dan perdagangan di Arab sebenarnya sudah ada jauh sebelum Islam. Walaupun demikian, harus diakui bahwa tradisi pertanian dan perdagangan yang ada tidak memiliki roh atau semangat kemanusiaan seperti keadilan dan persamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana permodalan dikuasai oleh kaum elit-elit pemodal. Sebagai contoh para pedagang meminjam modal pada konglomerat, akan tetapi harus membayar utang tersebut dengan bayaran yang jauh lebih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan sebagian di antara pedagang mengalami kebangkrutan sehingga mereka banyak melarikan diri ke gurun-gurun (Karim, 2015). Oleh karena praktik riba jahiliyah begitu berkembang di masyarakat Arab, maka Allah SWT melalui firman-Nya dalam al-Quran melakukan pelarangan sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan* (QS. Ali Imron: 130)

Karena letaknya Mekah diantara empat jalur internasional, maka masyarakat Mekah memainkan peranan yang sangat penting. Mereka secara totalitas terlibat dan ikut berpartisipasi langsung dalam dunia perdagangan. Mereka terbagi dalam tiga kelompok masyarakat. Pertama adalah para konglomerat yang jumahnya ± 1%, di samping menguasai posisi strategis dalam pemerintahan, mereka juga memiliki saham dalam dunia perdagangan. Kedua adalah para pedagang yang memijam dari kelompok pertama, dan yang terakhir ialah (semula) mereka yang suka merampok dan merampas, golongan ini kemudian berubah menjadi penjamin keamanan dari kafilah-kafilah yang datang melintasi Mekah, dan golongan ini mendapat 10% dari laba hasil perdagangan yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, tepatlah ungkapan, ayat al-Qur'an tidaklah diturunkan dalam suasana gurun pasir melainkan dalam perekonomian yang tinggi.

C. Politik Ekonomi Arab masa Pemerintahan Islam

Pada saat kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya baik di Barat maupun Timur sedang mengalami kekacauan, lahirlah seorang tokoh besar panutan umat sepanjang masa yang membawa risalah Islam sebagai pemberi kabar gembira juga peringatan, dialah Nabi Muhammad SAW. Telah diceritakan, bahwa masyarakan Arab penuh dengan kedzaliman. Mereka menyembah berhala buatan mereka sendiri, mereka memperbudak satu sama lainnya, kondisi perekonomian masyarakat penuh praktik ribawi. Maka diutuslah

Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki dan menyempurnakan tatanan kehidupan masyarakat sesuai aturan syariat Islam.

Pada tahun 571 M atau tahun gajah orang Habsyi (Abysinia) mengalami kekalahan ketika menyerang kota Mekah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat penyerangan, pasukan tersebut mengunakan gajah sebagai alat tunggangnya. Pada tanggal 29 Agustus yang bertepatan tanggal 12 Rabi'ul Awal lahirlah seorng putra bernama Muhammad sang pembawa risalah Islam. Muhammad memiliki seorang ayah bernama Abdullah yang telah wafat sebelum ia lahir, dan beribu bernama Aminah. Ibundanya ini pun kemudian meninggal ketika umur Muhammad menginjak 6 tahun. Kepribadian Muhammad yang berbudi luhur, kuat, rajin dan amanah inilah yang membawanya pada gelar al-Amin (orang yang terpercaya). Kemudian ketika menginjak usia 12 tahun, Muhammad bersama pamannya Abu Thalib mendapat amanah dari Siti Khadijah seorang Saudagar Mekah untuk menjalankan usahanya ke luar Mekah yaitu negeri Syam. Dan pada saat usia Muhammad menginjak 25 tahun, perniagaan yang dijalankannya mendapat keuntungan yang sangat besar untuk majikannya tersebut. Dan di usia tersebut kemudian Muhammad menikahi Siti Khadijah yang kala itu telah berusia 40 tahun.

Di tengah perilaku masyarakat Arab yang menyimpang dari ajaran tauhid yang pernah diajarkan Nabi Ibrahim, hadirlah risalah baru yang bernama Islam sebagai perbaikan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Melihat kondisi masyarakat yang semakin jauh dari nilai tauhid ini, kemudian Muhammad memutuskan melakukan perenungan (kontemplasi). Perenungan yang mendalam ini membuat dadanya sesak dan punggungnya terasa penuh beban, sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝٢ ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

Artinya: *Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, Yang memberatkan punggungmu?* (QS. Al-Insyirah: 1-3)

Yang dimaksud dengan beban di sini ialah kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyampaikan risalah. Kemudian pemuda yang banyak berkontemplasi ini akhirnya diamanahi Allah SWT untuk menjadi Nabi dan Rasul. Penunjukkannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya wahyu Ilahi pada saat berada di Gua Hira, tepatnya ketika berumur 40 tahun. Wahyu yang pertama kali diterimanya adalah Surat al-'Alaq, ayat 1-5 berikut ini:

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣
ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥

Artinya: *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.* (QS. Al-'Alaq: 1-5)

Dengan turunnya wahyu pertama ini, maka Muhammad telah diangkat sebagai Nabi Allah SWT. Pada masa ini, ia belum disuruh menyeru kepada umatnya agar mempercayai kenabiannya. Peristiwa turunnya wahyu ini kemudian diceritakannya kepada sang istri Siti Khadijah terlebih dahulu, kemudian sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib sepupunya serta Zaid Ibn Haritsah, dan merekalah yang kemudian mengimani dan mendukungnya. Dengan demikian, pendukung pertama perjuangan Muhammad adalah keluarganya sendiri. Kehidupan Nabi Muhanmad SAW dapat dikelompokkan dalam dua periode yaitu periode Mekah dan periode Madinah.

Setelah berdakwa diam-diam kurang lebih selama 3 tahun, kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwa secara terang-terangan, sebagaimana telah dilukiskan dalam al-Qur'an surat al-Syu'ara ayat 214:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

Artinya: *Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat*. (QS. Asy-Syu'ara: 214)

Berdasarkan perintah tersebut, kemudian Nabi Muhammad mengajak kaum dari keluarnganya yaitu Bani Hasyim untuk memeluk Islam. Namun usaha dakwah beliau tidak serta merta mendapat dukungan dari kaumnya, bahkan cemohan dan caci maki yang berlebihan setiap saat menghampirinya.

Secara ringkas bila mengutip tulisan Ahmad Sya'labi (dalam Karim, 2015) yang mencatat ada lima faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam itu, yaitu sebagai berikut:

1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka beranggapan, bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abd al-Muthalib, yang tidak mereka inginkan sama sekali.
2. Seruan Nabi yang menyamakan kedudukan bangsawan alias konglomerat dengan hamba sahaya. Sabda Nabi,"kedudukan manusia sama seperti gigi-giginya sisir'..dan sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa..." (Q.S. 49 (al-Hujuraat): 13). Hadist dan ayat tesebut mengandung mkna dan nilai sosial yang tinggi, di mana manusia Arab terbelenggu dengan hegemoni politik kekuasaan dari segelintir orang Mekah yang akhirnya mereka dapat kehidupan kemerdekaan yang membelenggu dari kungkungan politik yang ada waktu itu dan mereka terbebas dari ketertindasan.
3. Para pemimpin mereka tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat.

4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang beakar pada bangsa Arab.
5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka.

Di samping itu, menurut penulis yang paling menggetarkan kaum konglomerat, jika Muhammad berkuasa, maka ekonomi mereka yang sentralistis dan dikuasai segelintir orang akan terancam sekali, karena ekonomi Islam mensejahterakan rakyat banyak.

Misi mulia Rasulullah SAW di muka bumi adalah membangun masyarakat yang beradab. Rasulullah menganjurkan agar manusia saling menghormati dan menyayangi dalam penyelenggaraan hidup sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Secara prinsip Islam menciptakan kemaslahatan dengan membangun prinsip kehidupan bermasyarakat secara baik. Sementara budaya yang baik dari masyarakat terdahulu tidak dihapuskan sama sekali, bahkan diakomodir oleh Islam. Ajaran yang beliau teladankan pada bangsa Arab diantaranya adalah sifat jujur dan menjadi pribadi yang bebas sehingga mampu mengoptimalkan potensi diri. Dalam hal perekonomian, Rasulullah telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Ia selalu memperhatikan rasa tanggungjawabnya terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah saw untuk menjaga agar seseorang dapat berbuat adil dan jujur, yaitu:

1) Larangan *Najsy*

   Najsy adalah sebuah praktik dagang yang mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya menawar barang dengan harga yang tinggi calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Najsy dilarang karena menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli.

2) Larangan *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh*
   Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang yang mana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah melarang praktik semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan.
3) Larangan *Tallaqi al-Rukban*
   Praktik ini adalah dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum tiba dipasar. Rasulullah melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga.
4) Larangan *Ihtinaz dan Ihtikar*
   Ihtinaz adalah praktik penimbunan harta seperti emas, perak dan lain sebagainya. Sedangkan *ihtikar* adalah penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya sangat dilarang dan dicela dalam Islam.

Pemikiran ekonomi Islam di awali sejak Nabi Muhammad dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqh), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (mu'amalah). Adapun pemikiran-pemikiran pada masa itu adalah:

1. Kebijakan Fiskal

Pada zaman Rasulullah, pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada nilai-nilai akidah. Lahirnya kebujakan fiskal di dalam dunia islam dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu faktor sosial, budaya dan polotik termasuk di dalamnya. Adapun beberapa sektor yang menjadi sasaran Fiskal Rasulullah adalah:

a). Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi yang ditetapkan Rasulullah bersumber dari al-Qur'an. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifah-nya. Prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan al-Qur'an adalah:

- Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik kemutlakan atas semua yang ada.
- Manusia hanyalah khalifah di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah rahmat Allah SWT.
- Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba harus dihilangkan.
- Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kakayaan yang dapat melegimitasi berbagai konflik individu.
- Menghilangkan jurang pemisah antara golongan miskin dan golongan kaya.
- Menetapkan berbagi bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun suka rela.

b) Keuangan Dan Pajak

Pada tahun awal sejak dideklarasi sebagai Negara, Madinah hampir tidak memiiki sumber pendapatan ataupun pengeluaran Negara. Seluruh tugas Negara dilakukan secara gotong royong dan sukarela. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala Negara yang juga merangkap sebagai ketua mahkamah agung, mufti besar, panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi Negara. Ia tidak memproleh gaji dari negara maupun masyarakat, kecuali hadiah-hadiah kecil pada umumnya berupa bahan makanan. Dan pada masa itu juga belum ada tentara dalam bentuk formal maupun tetap. Setiap muslim yang

memiliki fisik yang kuat dan mampu berperang bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji tetap tapi diperbolehkan mendapat harta dari hasil rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainya.

Adapun pemasukan negara yang pertama pada masa itu adalah *fa'i* yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa yahudi yang ditinggal di pinggiran kota Madinah. Secara garis besar pemasukkan negara ini digolongkan bersumber dari umat Islam sendiri, non-Muslim, dan umum.

Kemudian catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa Rasulullah memang tidak tersedia, namun tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar.

Harta yang merupakan pendapatan negara yang di simpan di masjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun.

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan penguasa untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan moneter sangat erat kaitannya dengan uang, jadi sebelum kita membahas tentang kebijakan moneter pada masa Rasulullah saw, kita harus mengetahui terlebih dahulu uang (*nuqud*) apa yang berlaku pada zaman Rasulullah saw.

Uang dikenal sebagai sesuatu yang diistilahkan oleh manusia dapat menjadikan barang itu memiliki harga, dan sebagai upah atas

jasa dan pelayanan, baik berbentuk uang logam maupun bukan. Dengan uang pula seluruh barang, usaha dan jasa dapat dinilai. Sebelum manusia mengenal uang, mereka telah melakukan aktivitas jual beli dan tukar menukar barang dengan jasa. Namun, karena pertukaran barang dengan jasa menimbulkan banyak kesulitan, terutama yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, maka mereka berpikir untuk mencari barang dasar yang memiliki nilai intrinsik. Selain itu, bisa memberikan kemudahan dalam peredarannya sehingga dapat dijadikan tolok ukur yang menilai seluruh barang dan jasa. Lalu muncullah mata uang, yang menjadikannya satu satunya tolok ukur. Setelah manusia di masa lalu mengetahui bahwa logam mulia, emas dan perak memiliki nilai intrinsik, maka mereka menjadikan keduanya sebagai mata uang.

Kemudian mereka mencetak dinar dan dirham. Kedua benda tersebut relatif jarang diperoleh (depositnya), tetapi memiliki keunikan (seperti emas) yang tidak hancur ditelan masa.

Kerajaan Romawi dan negeri-negeri pengikutnya telah menjadikan emas sebagai dasar mata uangnya. Dengan emas ini dicetak dinar Hirakliy dalam bentuk dan ukuran tertentu. Demikian juga kekaisaran Persia dan negeri-negeri pengikutnya telah menjadikan perak sebagai dasar mata uangnya. Dengan perak ini dicetak dirham dalam bentuk dan ukuran tertentu. Diketahui bahwa mata uang dinar Romawi hanya dicetak dengan satu bentuk dan ukuran saja, sedangkan dirham Persia dicetak dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Orang-orang Arab sebelum Islam, terutama Quraisy telah melakukan perniagaan dengan tetangga-tetangga mereka dari berbagai tempat dan pelosok negeri: *Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas*. (QS. al-Quraisy [106]:1-2)

Mereka kembali dari Syam dengan membawa dinar emas Kaisar dan kembali dari Irak dengan membawa dirham perak Kisra. Ketika mereka kembali dari Yaman mereka terkadang juga

membawa dirham Hamiriyah, kembali ke Hijaz dengan membawa dinar emas Hirakliy dan dirham perak Sasanid. Akan tetapi, mereka tidak melakukan transaksi dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai satuan (yang dihitung persatuan-peny), melainkan dijadikan sebagai timbangan (dengan lantakan emas/perak-peny). Dengan kata lain, mereka menjadikannya sebagai benda (alat) tukar menggunakan emas dan perak yang tidak dicetak. Mereka belum sampai (berpikir) ke taraf uang cetak, bermacam-macamnya dirham, dan berbeda-bedanya timbangan. Mereka menerima begitu saja berkurangnya (nilai) dinar seiring makin banyaknya yang beredar. Untuk menghindari penipuan mereka bersandar pada timbangan. Dan mereka memiliki timbangan-timbangan khusus yang biasa digunakan, yaitu dengan rithl, uqiyah, nasy, nuwat, mitsqal, dirham, daniq, qirath dan habbah. Mitsqal pada saat itu merupakan timbangan dasar yang populer di kalangan mereka, dimana satu mitsqal sama dengan 22 qirath kurang satu habbah. Ukuran sepuluh dirham pada saat itu sama dengan tujuh mitsqal.

Setelah Islam datang Rasulullah saw menetapkan (dengan taqrir, penggunaan) dinar dan dirham tersebut, dan menetapkannya sebagai mata uang. Rasulullah juga menetapkan timbangan mata uang dinar dan dirham seperti yang telah berlangsung pada Quraisy. Dari Thawus dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda: *Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran maka takaran penduduk Madinah*.

Diriwayatkan oleh al-Baladzuriy dari Abdullah bin Tsa'labah bin Sha'ir: *Dinar Hirakliy dan dirham Persia biasa digunakan oleh penduduk Makkah pada masa Jahiliyah. Akan tetapi mereka tidak menggunakannya dalam jual beli, kecuali menjadikannya (timbangan) lantakan. Mereka sudah mengetahui timbangan mitsqal. Timbangannya adalah 22 qirath kurang (satu dirham) Kisra. Dan timbangan 10 dirham sama dengan 7 mitsqal. Satu rithl sama dengan 12 uqiyah, dan setiap satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Dan Rasulullah saw membiarkan*

hal itu. Begitu pula Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.

Dengan demikian kaum Muslim telah menggunakan bentuk, cetakan dan gambar dinar Hirakliy dan dirham Kisra pada masa Rasulullah saw, Khalifah Abubakar Shiddiq dan awal dari masa Khalifah Umar. Pada tahun ke-20 Hijriyah atau pada tahun ke-8 dari masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau mencetak dirham yang baru berdasarkan dirham Sasanid. Bentuk dan timbangannya tetap mengacu pada (dirham) Kisra, gambar dan tulisannya bermotif Bahlawiyah (Pahlevi). Hanya saja beliau menambah tulisannya dengan menggunakan huruf Arab kufi, misalnya بسم الله (dengan nama Allah) dan بسم الله ربى (dengan nama Allah Rabbku). Kemudian kaum Muslim tetap menggunakan uang dinar yang mengacu pada (bentuk) dinar Byzantium dan dirham Sasanid, hanya terdapat tambahan kata Islam dengan menggunakan huruf Arab. Keadaan ini berlangsung terus sampai masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 75 atau 76 H Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham yang berciri khas Islam, yang mengandung teks-teks Islam dengan menggunakan khath kufi, sedangkan bentuk Sasanid ditinggalkan. Pada tahun 77 H dicetak dinar yang berciri khas Islam, dan terukir di dalamnya teks-teks Islami dengan khath Arab kufi, sedangkan dinar yang berbentuk Byzantium ditinggalkan. Setelah Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham dan dinar yang berciri khas Islam, maka kaum Muslim memiliki mata uang yang berciri khas Islam, dan menanggalkan mata uang lainnya.

Dari penjelasan tentang uang diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mata uang yang berlaku pada masa Rasulullah saw adalah dinar dan dirham. Mata uang ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan mata uang kertas yang beredar sekarang. Nilainya yang relatif stabil merupakan salah satu kelebihan mata uang ini. Jika permintaan uang mengalami kenaikan, maka uang akan diimpor. Jika permintaan uang mengalami penurunan,

maka komoditas akan diimpor. Namun pada masa itu jika terjadi kelebihan uang yang beredar di masyrakat relatif tidak akan terjadi inflasi, karena uang itu diubah menjadi perhiasan.

Selain itu, Islam telah mengkaitkan hukum-hukum syara' dengan emas dan perak, dengan menganggap keduanya sebagai emas dan perak, serta menganggapnya sebagai mata uang, (nilai) harga atas barang dan (nilai) upah atas jasa. Sebagian dari hukum-hukum tersebut adalah:

1. Larangan menimbun emas dan perak. Firman Allah Swt:

   ..... وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

   Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. (QS. At-Taubah [9]: 34)

   Diharamkannya menimbun emas dan perak dalam kedudukannya sebagai (zat) emas dan peraknya, juga selaku mata uang dan alat tukar. Keduanya digunakan untuk menyempurnakan jual beli dan seluruh aktivitas.

2. Mengkaitkan keduanya dengan hukum-hukum tertentu yang bersifat permanen dan tidak akan berubah:
   a) Mewajibkan zakat pada keduanya dengan statusnya sebagai mata uang, dan (nilai) ukuran harga dalam jual-beli, serta (nilai) upah atas jasa. Islam menetapkan nishab pada dinar emas dan dirham perak. Sebagaimana hadits: *Pada setiap 20 dinar (zakatnya) setengah dinar. Dan, pada setiap 200 dirham (zakatnya adalah) 5 dirham*.
   b) Tatkala Islam mewajibkan diyat, maka pembayarannya ditetapkan dengan menggunakan keduanya. Islam telah menetapkan jumlah tertentu (dalam diyat) yakni 1000 dinar

emas, dan 12.000 dirham perak. Dari Ibnu Abbas disebutkan: *Bahwa seorang laki-laki dari Bani 'Adiy telah dibunuh, maka Nabi saw menetapkan diyatnya 12.000.* (HR. Ashhabus Sunan) Maksudnya dari mata uang dirham. Dan dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm, dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Nabi saw telah menulis surat kepada penduduk Yaman, tertulis: *Sesungguhnya pada jiwa diyatnya 100 ekor unta, dan bagi pemilik emas (diyatnya adalah) 1.000 dinar.* (HR. an-Nasa'iy)

D. Kesimpulan

Perekonomian merupakan unsur penting untuk menjalankan tatanan kehidupan. Begitu pula pada masyarakat Arab pra Islam menjadikan perdagangan dan bertani sebagai bentuk kegiatan perekonomian yang mereka jalankan. Mereka telah lama mengenal sistem pertanian yang meliputi; pemupukan, pembibitan, pencakokan benih serta sistem bagi hasil penggarapan. Begitu pula dalam perdagangan, mereka melakukan usaha dagang tidak hanya dengan masyarakat Arab, tetapi juga dengan orang non-Arab. Terbukti dengan menjadikan Mekkah sebagai kota dagang internasional karena letaknya yang sangat strategis.

Pada masa awal ke-Nabi-an Muhammad SAW, sedikit demi sedikit kedzaliman yang selama ini merajalela pada masyarakat Arab mulai terusik dengan adanya cahaya keilmuan yang dibawa Muhammad SAW. Kaum elit Quraisy merasa bahwa risalah Islam yang dibawa akan menjadikan penghalang rezeki mereka terutama pemahat patung tidak akan laku disebabkan risalah tauhid yang diajarkan. Di sampingitu, yang paling menggetarkan kaum konglomerat, jika Muhammad berkuasa, ekonomi mereka yang sentralistis dan dikuasai segelintir orang akan terancam sekali, sedang sistem ekonomi Islam mensejahterakan rakyat banyak.

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad yang menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan serta as-Sunnah sebagai ittiba umat di masa beliau memerintah, maka segala bentuk aspek perekonomian berjalan dengan baik. Adanya sistem ekonomi, keuangan dan pajak, menentukan sumber-sumber pendapatan negara, pencatatan pengeluaran negara serta menjadikan baitul-maal sebagai wadah distribusi keuangan masyarakat yang membutuhkan, menjadikan konsep perekonomian yang dikembang-kan Nabi Muhammad SAW begitu sempurna, sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan makmur (*Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofuur*).

E. Daftar Rujukan

An Nabahan, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.

An Nabhaniy, Taqyudin, Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Aziz, Abdul & Ulfah, Mariyah. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, Bandung: Alfabeta, 2010.

Chaudhry Muhammad sharif, Sistem Ekonomi Islam "Prinsip Dasar", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. manajemen Syariah, Sebuah kajian historis dan kontemporer, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Ismail Yusanto, Muhammad & Karebat Widjajakusuma, Muhammad. Menggagas Bisnis Islami, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Karim, M. Abdul. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Yogyakarta: Bagaskara 2015.

Maududi, Abdul A'la, Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa kini, penerjemah; Abdullah Suhailiu, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.

Madjid, Nurcholish. Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paraadina 1995.

Nawawi Ismail, Ekonomi Islam : Perspektif Teori, sistem, dan aspek Hukum, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

POLITIK EKONOMI MASA *KHULAFAUR RASYIDUN* (Kebijakan Khalifah Abu Bakar, Umar Bin Khattab, dan Utsman bin Affan)

Suad Fikriawan

A. Pendahuluan

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun (*khatami al-anbiya' wa al-mursalin*), tetapi pengganti kedudukan beliau yang kedua sebagai pimpinan kaum muslimin menjadi kebutuhan mendesak saat itu. Pemimpin kedua itulah yang dikenal dengan خليفة (*Khalifah*) artinya yang menggantikan Nabi menjadi kepala kaum muslimin (pimpinan komunitas Islam) dalam memberikan petunjuk ke jalan yang benar dan melestarikan hukum-hukum Agama Islam dengan mekanisme dipilih langsung oleh para sahabat secara demokratis (Karim, 2015).

Kekhalifahan ini penting dan mendesak bagi Umat Islam karena sepeninggal Rasulullah, Islam di Madinah cukup kuat pengaruhnya bagi kota lain di jazirah Arab maupun di luar jazirah Arab (Sistem pemerintahan sentralistik), sedangkan umat Islam di luar jazirah Arab masih labil keimanannya (Haekal, 2003) serta berbagai

kelompok Islam seperti kaum *Muhajirin* dan *Anshar,* masing-masing mempunyai kepentingan politik terkait siapa pengganti Nabi tanpa ada yang menengahi, sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan umat Islam (Karim, 2015). disamping itu pendeklarasian nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab (gelar yang diberikan Nabi setelah melayangkan surat kepadanya) yang ada semenjak nabi masih hidup. Legitimasi sosial para nabi palsu ini cukup kuat dalam memaksakan kehendak untuk diakui umat muslim. Bila dibiarkan, dampaknya cukup berbahaya bagi Umat Islam. Problem berikutnya adalah munculnya pembangkan zakat dengan asumsi zakat hanya diberikan kepada Allah dan Rasul saja (Suhud, 2008).

Maka di tengah problematika tersebut, dipertemukanlah *Muhajirin* dan *Anshar* di sebuah tempat yang bernama Balai *Tsaqifah* dengan dihadiri Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah yang kemudian berpidato dan menentukan masa depan Islam (Hitti, 2005) Setelah pembai'atan dua kali, terpilihlah Abu Bakar sebagai *Khalifatur Rasul* yang pertama (Karim, 2015). Adapun Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintah hanya dua setengah tahun sampai beliau wafat yang kemudian digantikan oleh Umar Bin Khattab yang ditunjuk secara mandataris oleh Abu Bakar. Adapun Umar memerintah selama 10 tahun yang setelah terbunuhnya beliau di tangan Abu Lu'lu'ah seorang kafir dari Persia, pemerintahan digantikan oleh Utsman bin Affan yang dipilih secara Aklamasi oleh tim formatur (Chamid, 2010).

Semasa pemerintahan *Khulafaaur-Rashidun* Islam mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang meskipun di setiap fase kepemimpinan terdapat kemajuan dan kemunduran. Berbagai bidang tersebut mencakup bidang politik sosial ekonomidan pemerintahan serta pertahanan nasional. Maka dalam makalah ini penting kiranya penulis menguraikan bagaimana berbagai kebijakan *Khulafaur Rashidin* diterapkan pada wilayah Islam masa itu. Bagaimana kebijakan sosial politik dan ekonomi Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq khususnya di bidang manajemen Baitul Maal? Apa

kelebihan dan kekurangannya? Bagaimana dengan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab Khususnya dalam bidang Pertanian dan Pertahanan sehingga Islam mencapai masa keemasan di semenanjung Arab dan di luar Arab? Kemudian bagaimana pola kepemimpinan Khalifah Utsman beserta kebijakannya yang pada akhirnya beliau terbunuh oleh para Sahabat yang menetangnya? Berikut penulis mengulasnya pada sub bahasan berikut.

B. Kebijakan ekonomi Abu Bakar Ash-Shiddiq

Nama Abu Bakar adalan Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Kaab bin Lu'ai At-Tamimi Al-Quraisy (Usman, 1976). Beliau lahir pada tahun 573 M. Abu Bakar adalah nama panggilan. Bahkan dalam masyarakat Quraisy sangat terkenal nama panggilan ini, karena terkenalnya sehingga banyak orang yang tidak mengetahui nama yang sebenarnya. Ibunya Abu Bakar bernama Salma binti Sakhor bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah. Nama ini kurang dikenal sebagai nama aslinya, ibu beliau lebih dikenal dengan panggilan Ummul Khair (Suhud, 2008). Dalam hal silsilah, pertalian darah Abu Bakar yang mengalir dari ayah dan ibunya memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad saw (Suhud, 2008). Pertemuan silsilah tersebut adalah pada Kabilah Ta'im bin Murrah bin Ka'ab yang bersambung dengan Adnan (Haekal, 2003). Maka kelahiran Abu Bakar berada pada lingkungan yang sangat berpengaruh dan suku yang melahirkan tokoh-tokoh besar (Abdullah, 2010). Beliau wafat pada tanggal 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah saw.

Pada awal Abu Bakar memeluk Islam sebagai agama baru, peran beliau cukup berpengaruh terhadap dakwah Islam di kalangan Quraisy. Beliau sudah bersama-sama dengan Muhammad melakukan dakwah demi agama Allah. Keakraban masyarakatnya dengan dia, kesenangannya bergaul dan mendengarkan pem-

bicaraannya, besar pengaruhnya terhadap Muslimin yang mula-mula itu dalam masuk Islam itu. Yang mengikuti jejak Abu Bakar menerima Islam ialah Usman bin Affan, Abdur-Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awwam. Sesudah mereka yang kemudian menyusul masuk Islam (atas ajakan Abu Bakar) ialah Abu Ubaidah bin Jarrah dan banyak lagi yang lain dari penduduk Mekah (Haekal, 2003).

Keberanian Abu Bakar ini patut sekali kita hargai, mengingat dia pedagang, yang demi perdagangannya diperlukan perhitungan guna menjaga hubungan baik dengan orang lain serta menghindari konfrontasi dengan mereka, yang akibatnya berarti menentang pandangan dan kepercayaan mereka. Ini dikhawatirkan kelak akan berpengaruh buruk terhadap hubungan dengan para relasinya. Di saat orang lain malu-malu dan sembunyi dengan keislamannya justru Abu Bakar dengan menyatakan terang-terangan keislamannya itu, lalu mengajak orang kepada ajaran Allah dan Rasulullah dan meneruskan dakwahnya untuk meyakinkan kaum Muslimin yang mula-mula untuk mempercayai Muhammad dan mengikuti ajaran agamanya, inilah yang belum pernah dilakukan orang; kecuali mereka yang sudah begitu tinggi jiwanya, yang sudah sampai pada tingkat membela kebenaran demi kebenaran. Orang demikian ini sudah berada di atas kepentingan hidup pribadinya sehari hari. Kita lihat, dalam membela agama, dalam berdakwah untuk agama, segala kebesaran dan kemewahan hidup duniawinya dianggapnya kecil belaka (Haekal, 2003). Demikianlah keadaan Abu Bakar dalam persahabatannya dengan Muhammad, sejak ia memeluk Islam, hingga Rasulullah berpulang ke sisi Allah dan Abu Bakar pun kemudian menggantikan kepemimpinan Beliau.

Beberapa langkah strategis Khalifah Abu Bakar setelah di *bai'at* adalah melakukan berbagai penataan internal dan eksternal, dalam bidang ekonomi beliau memiliki prinsip meningkatkan kesejahteraan umat Islam, namun kebijakan beliau laksanakan masih seperti yang

telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Selama masa khalifahnya Abu Bakar As-Shiddiq R.A. menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut (Amalia, 33):

1. Menegakan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat.
2. Tidak menjadikan ahli badar (orang-orang yang berjihad pada perang badar) sebagai pejabat negara.
3. Tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara.
4. Mengelolah barang tambang (*rikaz*) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara.
5. Menetapkan prinsip kesamaan dalam distribusi kekayaan dan menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristuk daerah kekuasaan masing – masing.
6. Tidak merubah kebijakan Rasullah SAW dalam masalah *jizyah*.
7. Beliau memperhatikan akurasi penghitungan Zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Maal dan langsung di distribusikan seluruhnya pada kaum Muslimin

Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama (632-634 M) merupakan masa transisi Islam menuju kepemimpinan baru pasca Rasulullah. Disebut masa transisi karena problem yang dihadapi Khalifah Abu Bakar adalah seputar masalah dalam negeri seperti meluasnya pengaruh kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat, yang kemudian berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, beliau memutuskan memeranginya yang dikenal sebagai perang *Riddah* (perang melawan kemurtadan) (Karim, 2010).

Di samping melakukan perlawanan melalui perang *Riddah* Khalifah Abu Bakar mengirim ekspedisi Usamah bin Zaid ke luar negeri (Suriah) dan membagi wilayah Arab menjadi dua belas

wilayah, termasuk batalion pimpinan Usamah bin Zaid. Masing-masing batalion yang lain dipimpin oleh seorang Jenderal, termasuk Ali bin Abi Thalib, menunaikan tugas mengamankan ibu kota Madinah yang kacau. Kesuksesan diplomasi Khalifah dengan mengirim Usamah ke luar negeri menimbulkan anggapan diantara musuh-musuh Islam (*super power* Romawi Timur dan Persia) bahwa negeri Islam sudah kuat karena mengirim ekspedisi jauh keluar negeri hanya mungkin dilakukan oleh wilayah Islam seperti yang pernah mereka lakukan dengan mendukung kaum Quraisy Mekah saat menyerang Madinah. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang unggul, dalam kurun waktu dua tahun lebih, Abu Bakar berhasil meyatukan seluruh Jazirah Arab kembali seperti zaman Nabi Muammad saw (Ali, 2014).

Dalam rangka memudahkan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan, Abu Bakar kemudian membagi jazirah Arab menjadi beberapa wilayah yang mirip dengan negara-negara bagian, dan setiap wilayah dikepalai seorang *amir* yang bertugas untuk menegakkan shalat dan menjadi penengah perkara (Pulungan, 1999). Adapun yang ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai amir-amir (semacam jabatan Gubernur) itu adalah: 1) Itab bin Asid untuk Mekkah, dan sudah menjadi *amir* yang diangkat di masa Nabi. 2) Usman bin Abi al-Ash, sebagai *amir* untuk Thaif, juga amir yang diangkat di masa Nabi. 3) Al-Muhajir bin Abi Umayah, sebagai *amir* untuk San'a. 4) Zaid bin Labid, sebagai *amir* untuk Hadralmaut. 5) Ya'la bin Umayah, sebagai *amir* untuk Khaulan. 6) Abu Musa Al-Asy'ari, sebagai *amir* untuk Zubaid dan Rima'. 7) Muadz bin Jabal, sebagai *amir* untuk alJanad. 8) Jarir bin Abdullah, sebagai *amir* untuk Najran. 9) Abdullah bin Tsur, sebagai amir untuk Jarasy. 10) Al-Ula bin al-Hadrami, sebagai *amir* untuk Bahrain, dan 11) untuk Irak dan Syam (Syria) dipercayakan kepada para pemimpin militer sebagai *wulat al-amr.* Para *amir* tersebut bertugas sebagai pemimpin agama, menetapkan hukum dan melaksanakan undang-undang. Artinya

seorang *amir* disamping sebagai pemimpin agama, sebagai hakim dan pelaksana tugas kepolisian (Pulungan, 1999).

Khalifah Abu Bakar juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum Muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggung jawab negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan (Karim, 2015). pada intinya prinsip yang dipakai dalam memanfaatkan dan mendistribusiakan tanah hasil rampasan perang sama rata dan mengutamakan kesejahteraan bersama.

Beliau juga mengembangkan *Baitul Maal,* dikarenakan beliau sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya (Karim, 2015). Dengan ketelitiannya itu, beliau sampai mengangkat seorang *Amil Zakat* yaitu Anas dan penanggung jawab *Baitul Maal* yaitu Abu Ubaid. Perhatiannya terhadap keakuratan perhitungan zakat beliau nyatakan pada suatu peristiwa dimana jika seorang yang harus membayar unta betina berumur satu tahun, sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina berumur dua tahun, hal tersebut dapat diterima. Namun dalam hal ini Kolektor zakat akan mengembalikan 20 *dirham* atau dua ekor kambing padanya (sebagai kelebihan pembayarannya) (Chamid, 2010).

Disamping itu beliau menerapkan konsep *balance budged policy* (Kebijakan anggaran berimbang) pada *Baitul Maal*. Dalam praktiknya, anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin *Baitul Maal* (Chamid, 2010). Beliau menerapkan kebijakan pemrataan dalam distribusi *baitul maal*. Maka diakhir masa pemerintahannya beliau menyerahkan gaji sebesar 8000 dirham

ke *Baitul Maal* dan menjual sebagian besar tanah dan memberikannya ke Baitul Maal untuk pendanaan negara yang saat itu mengalami kekurangan pendanaan. Dan semua fasilitas kekhalifahan beliau alihkan kepada kekhalifahan berikutnya (Karim, 2015).

Berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan Abu Bakar memiliki kelebihan utamanya dalam pengelolaan zakat, jizyah, kharaj, dan tertib administratif pada *baitul maal* namun kekurangannya adalah dalam proses pendistribusian nyaris *baitul maal* tidak memiliki kas sama sekali. Sehingga meskipun rakyat makmur, *agregat demand* dan *Agregat Supply* tinggi di masyarakat, namun Negara tidak memiliki cadangan keuangan yang kuat bahkan cenderung defisit. Sehingga sepeninggal Khalifah Abu Bakar hanya sedikit yang tersisa dari kas negara.

C. Kebijakan ekonomi Umar bin Al-Khattab

Umar Bin Al-Khattab (583-644M) yang memiliki nama lengkap Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, dari marga Quraisy dan *klan* Adiy yang sangat terhormat. Sedangkan *kun-yah* atau panggilannya adalah Abu Hafash atau Abu Hafshah. Karena Hafshah adalah anak tertuanya (Al-Suyuthi dalam Thabrani, 2015). Umar dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian. Jadi lebih muda sepuluh tahun dari Nabi Saw. Sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai orang yang keras, pemberani, berperawakan tinggi besar, dan temperamental. Separuh hidupnya dihabiskan di masa jahiliyyah dan separuhnya lagi di masa Islam. Dalam masa Islam itulah tinta emas sejarah menorehkan namanya sebagai salah seorang pahlawan Islam yang sangat dikagumi dan di kenang dunia. Bahkan Michael H. Hart menempatkannya dalam ranking seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah (Hart, 1978). Dia adalah salah seorang sahabat yang terkenal kebesarannya sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad saw. Kebesarannya terletak pada keberhasilannya, baik

sebagai negarawan yang bijaksana maupun sebagai mujtahid yang ahli, dalam membangun negara besar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw (Abdullah, 2010).

Dalam masa kepemimpinannya selama 10 tahun, Beliau melakukan reformasi dalam pemerintahan. Pertama kali Khalifah Umar meneruskan kebijakan ekspansi wilayah ke Sasania dan Bizantium baik di front timur (Persia), utara (Syam), maupun front barat (Mesir). kebijakan perang ini dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya letak geografis Persia, Syam, dan Mesir adalah wilayah perbatasan dengan pemerintahan Islam. Daerah Bizantium terletak sebelah barat laut dari Arab terdiri dari Syiria, Palestina, Yordania, dan Mesir. Sejak awal mereka memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Islam, diantaranya utusan Nabi Muhammad dibunuh oleh orang Kristen di Syria atas restu Raja Heraklitus. Di samping itu sungai Nil (Mesir) dan Mesopotamia merupakan lahan subur, maka hal ini menarik bagi para prajurit Islam untuk menguasai wilayah tersebut sebagai sentrum perjuangan dakwah di luar Jazirah Arab (Karim, 2015).

Ekspansi wilayah menyebabkan pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat berarti. Dalam rangka mengelola pendapatan tersebut, setelah bermusyawarah dengan sahabat lain (melalui lembaga yang dibentuk Khalifah Umar yaitu *Majlis Syura)*, maka Umar mengeluarkan kebijakan agar pendapatan yang menjadi kas negara tersebut dikelola dengan terencana dan terarah. Lembaga *Baitul Maal* yang telah dicetuskan pada masa Rasulullah, menjadi institusi yang memiliki peran penting pada masanya dalam rangka mengelola tata kelola keuangan negara (Karim, 2010). maka didirikanlah kantor pusat *baitul maal* di Madinah dan kantor-kantor cabang di beberapa wilayah lainnya. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab sangat memperhatikan kemaslahatan bersama secara profesional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai rumusan kebijakan

yang penuh dengan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Sehingga zamannya dikenal dengan zaman yang sarat dengan perubahan, dan tak jarang bertolak belakang dengan apa yang pernah Rasulullah kerjakan (Afzalurrahman, 1995).

Kebijakan dalam bidang ekonomi yang fenomenal adalah kebijakan kepemilikan tanah. Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah taklukan yang dikuasai melalui perjanjian damai. Kronologisnya bermula dari panglima Saat ibn Abi Waqqas ketika mengirim utusan ke Madinah untuk menginformasikan kepada Khalifah, Umar bin Khattab, bahwa umat Islam telah berhasil memasuki ibukota Sasania, *al-Madain*, yang menyimpan harta kekayaan berlimpah yang mereka simpan sejak ratusan tahun silam. Mendengar berita gembira tersebut, Umar I mengucapkan "*astaghfirullah*" sambil mencucurkan air mata langsung sujud dan mengeluh; Ya Allah! Celaka bagi Islam. Umat Muslim akan sibuk mengumpulkan kekayaan jika begitu cara mereka menguasai kota demi kota dan negara demi negara. Mereka akan lupa tujuan utama; menyebarkan asma Allah dengan hadits Nabi Muhammad (Karim, 2014). Maka Penaklulakan ini mememunculkan masalah baru tentang bagaimana cara mengelola tanah secara produktif (Chamid, 2010). Sehingga Umar akhirnya memberi kebijakan untuk mendistribusikan seluruh tanah tanpa menyisakan cadangan, seperti kasus yang terjadi di kawasan *sawad* (tanah subur) (Muammad, 2002). Umar memutuskan untuk tidak mengambil alih tanah taklukan, namun justru diberikan pengelolaan sepenuhnya kepada pemiliknya. Umar menegaskan ketika tanah tersebut diserahkan kepada prajurit Muslim maka pemasukan kas negara akan menurun hingga 80% sehingga negara rugi. Rasionalisasinya tanah yang dimiliki oleh penduduk setempat dan mereka diwajibkan membayar *kharaj* sebesar 50% dan untuk tanah milik muslim sebesar 10% dari penghasilan tanah mereka, maka ketika diserahkan kepada umat muslim tanah tersebut secara keseluruhan, maka hanya terbebani

Ushr sebesar 10% saja. Analoginya jika hasil panen 100 ton maka yang wajib dikeluarkan untuk *jizyah* sebesar 50 ton. Dan jika yang dikeluarkan adalah *ushr* maka besarannya hanya 10 ton. Makabisa dihitung kerugiannya mencapai 40 ton. Kebijakan ini sempat menuai kontroversi pada *majlis Syura* yang menyebabkan dua kali *wal out* para anggotanya dari sidang, yang kemudian pada sidang ketiga kebijakan tersebut disetujui dan dikenal dengan *Kebijaksanaan Pertanahan Umar I* (Karim, 2015). Kemudian Umar memerintahkan Utsman bin Hunaif Al-Anshari untuk mensurvey batas-batas tanah di sawad. Dan berdasarkan hasil survey luas tanah keseluruhan adalah 36 juta *jarib*.[1]

Kebijakan selanjutnya, Umar menetapkan bahwa tanah yang diambil alih Muslim secara paksa dalam peperangan tidak dapat di ganggu gugat, sedangkan tanah yang ditaklukkan dengan perdamaian tetap menjadi milik pemilik sebelumnya selama membayar *kharaj.* Di *sawad* kharaj dibebankan sebesar satu dirham dan satu rifaz

---

[1] Dalam bukunya Imam Al-Mawardi "*Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah'* dijelaskan bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi atas kebijakan pertanahan Umar Bin Khattab. Pertama bahwa saat kaum muslimin melakukan perdamaian dengan orang musyrik atas kepemilikan tanah mereka bahwa tanah tersebut menjadi milik kaum Muslimin. Dengan perdamaian seperti itu maka lahan tanah tersebut berubah status menjadi tanah wakaf dari *daar Islam (wilayah Islam).* Dengan demikian lahan tersebut tidak boleh diperjual belikan atau digadaikan. Pembayaran *kharaj* atas tanah mereka tetap wajib dan tidak gugur dengan keislaman mereka. Jika lahan tanah tersebut berpindah tangan kepada orang lain diantara kaum Muslimin, *kharaj* atas tanah tersebut tetap wajib diambi.

Kemungkinan kedua kaum Muslimin melakukan perdamaian dengan mereka, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tetap menjadi milik mereka tetapi mereka dikenakan *kharaj* atas tanah tersebut. Status *kharaj* di sini sama dengan *jizyah*, maksudnya jika mereka masuk Islam kewajiban untuk membayar *Kharaj* menjadi gugur. Di samping itu tanah tersebut tidak beruba status menjadi *daat Islam* tetapi menjadi *daat 'ahd (*Wilayah perjanjian dengan Islam). karena itu tanah tersebut boleh diperjualbelikan dan digadaikan oleh mereka (lihat Imam Al-Mawardi, *iAl-Ahkam Ash-Shulthaniyyah,* (Kuwait,: maktabah daat Ibn Qutaybah, 1989), 244.

(ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum) dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air. Harga yang lebih tinggi dikenakan pada *ratbah* (rempah dan cengkeh) dan perkebunan. Di Mesir menurut perjanjian Amar, dibebankan dua dinar bahkan hingga tiga *irdabb* gandum, dua *qist* untuk setiap minyak, cuka, dan madu (Chamid, 2010). Sedangkan di Damaskus menetapkan pembayaran tunai pembagian tanah dengan Muslim. Beban per kepala sebesar satu dinar dan beban *jarib* (unit berat/ suatu ukuran lokal) yang diproduksi per Jarib (ukuran) tanah.

Hal lain dari kebijakan ekonomi Umar yang menarik untuk dikaji adalah tentang zakat Kuda. Pada masa awal Islam, penjualan kuda masih sedikit, namun pada masa pemerintahan Umar, bisnis perdagangan kuda semakin merebak dikarenakan kegiatan beternak yang dilakukan masyarakat di Syiria, bahkan pernah diriwayatkan pernah ada seekor kuda Arab *Taghlabi* yang diperkirakan bernilai 20.000 dirham. Sehingga melihat keadaan demikian, maka masyarakat menanyakan kepada Abu Ubayd Gubernur Syiria tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Pada awalnya Umar tidak menyetujui permohonan Abu Ubayd berdasarkan permintaan masyarakat tersebut, namun setelah dikirimkan data-data penjualan maka Umar memutuskan untuk menarik zakat dari bisnis perdagangan kuda tersebut dan membagikannya kepada orang-orang miskin dan para budak (Karim, 2010).

Dari beberapa sumber fiskal yang dikumpulkan oleh Khalifah Umar, selanjutnya beliau mengatur distribusi fiskal tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Kebijakan tersebut terpusat pada *Baitul Maal.* Secara prinsip harta *baitul maal* adalah harta kaum muslim sehingga merupakan tugas Negara memberikan tunjangan secara berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar diyat, membayar utang orang bangkrut, dan sebagainya (Chamid, 2010). Beberapa diantaranya adalah tunjangan sosial kepada kerabat Rasulullah dan

orang-orang yang berjasa dalam membela Islam.

Adalah yang pertama dalam sejarah dunia di mana pemerintah menyandang tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga negaranya. Sistem yang mencampur pensiunan militer dan politik menjadi satu. Dikatakan bahwa bagi sejarawan hal ini adalah keebijakan yang menakjubkan (Muhammad, 2002), tetapi Haikal melaporkan bahwa Hakim bin Hizam mengatakan "*Amirul Mukminin*! Orang Quraisy adalah pedagang dan apabila kau memberi mereka tunjangan, mereka akan meninggalkan perdagangan. Dapat dibayangkan bagaimana nasib mereka" (Haekal, 2002).

Dalam bidang pertahanan Khalifah Umar membuat pangkalan militer di beberapa tempat strategis seperti di basrah dan kufah. Di samping pangkalan, dibentuk pula pos pos militer di wilayah perbatasan. Umar bin Khatab memberikan perhatian yang sangat spesial kepada pasukan-pasukan di wilayah perbatasan. Baginya perbatasan merupakan sebuah pintu atau gerbang. Apabila pasukan di wilayah perbatasan gagal mempertahankan kedaulatan negara, maka musuh akan mudah masuk dan melancarkan aksi-aksinya untuk mengoyak kesatuan negara

Kebijakan kedua adalah membentuk laporan harian pasukan. Setiap saat, Umar bin Khatab meminta panglimanya untuk melaporkan situasi dan kondisi pasukannya di medan perang dan jihad. Tidak hanya itu, laporan tersebut kemudian dianalisa dan diberikan panduan setiap hari, sehingga pasukannya akan bergerak sesuai dengan aba-aba beliau. Ketiga Khalifah umar menetapkan kebijakan penggantian pasukan secara berkala. Hal ini berkaitan dengan kehadiran mereka ditengah-tengah keluarga. Jarak tempuh dan dan waktu pasukan, membuat waktu para pasukan harus berpisah berbulan-bulan dengan keluarga mereka. Umar bin Khatab harus membuat kebijakan untuk pasukannya untuk kembali pulang kepada keluarga secara berkala.

Kebijakan militer selanjutnya adalah menetapkan sistem upah kepada pasukan militer. Tolak ukur sistem upah ini dibuat untuk membuat klasifikasi di tingkatan upah yang ada di zaman Umar. Yang pertama adalah dari tingkatan mereka dengan Rasulullah SAW. Pasukan yang tergabung sejak terjadinya perang badar mendapatkan gaji tertinggi.Pasukan ini mendapatkan 5000 dirham selama satu tahun. Satu dirham sama dengan 2,75 gram perak. Kalau di rupiahkan satu dirham berjumlah sekitar Rp. 70 ribu, sehingga totalnya sekitar 350 juta. Sementara itu mereka yang bergaji rendah adalah pasukan yang bergabung setelah perang Khandasiah. Perang ini terjadi pada masa Umar bin Khatab, saat umat muslim sudah berhasil menakhlukan Persia. Mereka mendapat upah 1000 dirham dalam satu tahun. Jika dirupiahkan nominalnya mencapai 70 juta rupiah dalam satu tahun.

Dan kebijakan terakhir adalah kebijakan wajib militer. Bahkan kebijakan ini masih tetap terjadi dibeberapa negara di dunia. Umar bin Khattab sangat ketat terhadap wajib militer ini. Mereka yang terpilih harus siap moril dan materil. Para panglima di pangkalan militer berhak memilih pasukan dari suku-suku yang dinilai mampu dan siap jiwa raga berjuang ke medan jihad demi memperjuangkan bangsa dan Islam

D. Kebijakan ekonomi Utsman bin 'Affan

Utsman bin Affan atau Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayah bin Umawy al-Quraisyi, dipanggil Abu Abdullah dan bergelar *dzun-nuraini* (pemilik dua Cahaya). Beliau lahir pada 576 M (Karim, 2007) atau dilahirkan pada tahun keenam tahun Gajah. Ia lebih muda dari Nabi enam tahun. Di zaman jahiliah dan di masa Islam ia adalah saudagar pakaian, dan karena kejujuran dan sifat-sifatnya yang lemah lembut menyebabkan perdagangannya maju dan banyak mendatangkan keuntungan. Di samping itu, sifat-sifat pemalu yang sudah dibawanya sejak kecil dan di masa remajanya

ia selamat tak sampai tergelincir bersama gejolak anak-anak muda. Tak pernah terdengar bahwa dia suka berbangga-bangga atau suka berpesta. Secara keseluruhan sumber-sumber menunjukkan bahwa dia berhati lembut, sangat dipengaruhi oleh perasaannya yang halus. Karena sifat lemah-lembut dan perasaannya yang halus itu ia selalu berusaha tidak menyakiti hati orang atau melakukan kekerasan (Haekal, 2002).

Utsman merupakan sahabat Nabi Muhammad yang tergolong pertama masuk Islam. Terdapat suatu riwayat bahwa Utsman masuk Islam karena ingin menikah dengan Ruqayyah putri nabi yang sebelumnya akan dijodohkan dengan Utbah bin Abi Lahab. Ketika itu umur Ruqayyah belum mencapai 20 tahun meskipun ia bukan putri Rasulullah yang tertua, sementara umur Usman ketika itu sudah hampir 40 tahun. Dari Ruqayyah ia mendapat seorang anak laki-laki dan diberi nama Abdullah dan dia pun mendapat julukan demikian. Julukan ini terus melekat kendati anak itu sudah meninggal dalam usia enam tahun (Haekal, 2002).

Setelah hidup dalam beberapa tahun di Mekah dan menjalankan usaha dengan berdagang sambil mengikuti perkembangan turunnya wahyu, sampai suatu hari, ketika Rasulullah tidak tahan dengan tekanan kafir Quraisy, Utsman dan Istrinya diperintahkan untuk hijrah ke Abisinia yang kemudian menetap di Madinah. Usman tinggal di Medinah dengan merasakan kasih sayang Nabi dan menikmati kemudahan hidup dari kekayaannya. Oleh Rasulullah ia dijadikan sekretarisnya dan kadang sebagai penulis wahyu. Tetapi Rasulullah tidak melibatkannya dalam ekspedisinya yang terjadi sebelum Perang Badr. Tatkala Rasulullah berangkat memimpin Muslimin menghadapi Quraisy dalam Perang Badr, Ruqayyah sedang dalam sakit berat. Rasulullah mengizinkan Usman tinggal di rumah untuk merawat istrinya. Tetapi ia tak dapat juga menolongnya; Ruqayyah meninggal dan dimakamkan ketika datang berita tentang kemenangan Muslimin (Haekal, 2002).

Usman merasa sedih sekali dengan kematian Ruqayyah itu. Mengetahui hubungan baik Usman dengan keluarganya, Rasulullah mengawinkannya dengan Um Kulsum, adik Ruqayyah. Tetapi Umi Kulsum juga meninggal ketika ayahnya masih hidup dan alangkah beratnya kesedihan yang harus diderita oleh Usman. Rasulullah menghiburnya dengan mengatakan, antaranya: "Andaikata ada putri kami yang ketiga, niscaya kami kawinkan kepada Anda." Karena pernikahan Usman dengan Ruqayyah dan kemudian dengan Umi Kulsum itulah, maka kaum Muslimin kemudian memberinya gelar dengan D*zun-Nurain* (Haekal, 2002).

Menjelang Usman bin Affan dicalonkan sebagai Khalifah, dibentuklah sebuah tim yang terdiri dari enam orang sahabat yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Thalhah, Zubair Ibn Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman ibn Auf. Khalifah Umar meminta kepada tim tersebut untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Setelah beliau wafat tim ini melakukan musyawarah dan bermufakat menunjuk Utsman bin Affan sebagai Khalifah pengganti Umar bin Khattab. Sebagai catatan, bahwa pemerintahan Utsman bin Affan adalah 12 tahun (tahun 23-35H/ 644-656M) yang di bagi dalam dua periode, yaitu pada periode Kemajuan dan Periode kemunduran sampai terbunuhnya Khalifah Utsman (Karim 2015). Sebagai Khalifah, ia adalah seorang yang jujur dan saleh, tetapi sangat tua dan lemah lembut. Ia adalah seorang terkaya di antara beberapa orang kaya dari sahabat Nabi. Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan khalifah kedua. Tetapi, ketika menemui kesulitan, ia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya (Chamid, 2010).

Periode enam tahun pertama, pemerintah Utsman membawa kemajuan luar biasa, berkat jasa para panglima yang ahli dan berkualitas, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas dan bendera

Islam berkibar dari perbatasan Aljazair (Barqa dan Tripoli, Sypus di front al-Maghribi, di utara sampai di perbatasan Balucistan (wilayah Pakistan sekarang), serta Kabul, dan Ghazni. Pemasukan negara dari hasil zakat, *jizyah* dan *kharaj* semakin besar. Bahkan Khalifah Utsman mendermakan seluruh kekayaannya untuk *Baitul Maal*. Dengan pemasukan yang besar dari wilayah yang baru itu pemerintahan Utsman mengikuti kebijakan Umar dalam menata pendapatan, dan tidak lama kemudian Islam mengakui empat kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan. Selanjutnya tindakan-tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam, aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanami, dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap (Chamid, 2010).

Sampai pada tahun 30 H seiring dengan diizinkannya membuka armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan Gubernur Syiria, pasukan Islam membangun angkatan laut dan kapalnya yang kokoh dan mengahalau serangan-serangan di Laut Tengah (Karim, 2015). serangan pertama pasukan laut Islam adalah wilayah Cyprus dan disusul dengan dikuasainya Rhodes dan Bizantium. Kemudian pada tahun 31 H di Mesir ketika angkatan laut Bizantium memasuki Mesir, kaum Muslimin di bawah perintah Amar mampu mengerahkan dua ratus kapal dan kemenangan peperangan laut yang hebat. Demikian demikian, kaum muslimin membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania, Laodicea, dan wilayah di semenanjung Syiria, Tripoli, dan Barca di Afrika Utara menjadi pelabuhan pertama negara Islam. Sementara biaya pemeliharaan Angkatan Laut dibebebankan pada distribusi *baitul maal* (Chamid, 2010). Demikian beberapa kemajuan dalam bidang ekonomi dan ekspansi wilayah Islam pada masa kekhalifahan Utsman dan selebihnya adalah warisan yang ditinggalkan khalifah kedua.

Namun pada paruh kedua sejak enam tahun pemerintahannya belalu, kepemimpinan Khalifah Utsman mengalami kemunduran

yang luar biasa. Tragedi fitnah terjadi dimana-mana sehingga menyebabkan sekelompok masyarakat Muslim menunjukkan mosi tidak percaya pada kekhalifahan Utsman. Menurut analisis penulis berdasarkan beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ada tiga sebab pemerintahan Utsman hingga mengalami *chaos*. Pertama diawali dengan kontrol pemerintahan Islam yang lemah sejak Utsman telah lanjut usia dan wilayah Islam sangatlah luas menyebabkan banyak kelompok masyarakat menunjukkan secara terang-terangan dendam kesumat yang mereka pendam sejak terkungkung di bawah kekuasaan Islam. Salah satunya Islamnya sebagian orang Persia yang sebelum mereka beragama Majusi dan sebagian lain beragama Yahudi. Pada hakikatnya mereka adalah orang *zindiq* yang menampilkan keislamannya dan menyembunyikan kekufuran dihatinya. Mereka mencemarkan isu nepotisme ditubuh pemerintahan Utsman dan memencemarkan nama baik pegawai dan gubernurnya (Tahqiq, 2000).

Memang pada tahun 33 H Khalifah Umar melakukan kebijakan reformasi birokrasi dengan mengganti gubernur dan pejabat negara dari kalangan keluarganya. Seperti saudara angkatnya Abdullah mantan juru tulis Nabi yang pernah berusaha menyelewengkan Al-Qur'an dan merupakan salah satu dari sepuluh orang yang dikecam Rasulullah pada saat penaklukan Makkah, ditunjuk sebagai Gubernur Mesir. Saudara tirinya Walid bin Uqbah yang pernah menampar Muhammad diangkat sebagai Gubernur Kuffah, serta saudara sepupunya Marwan bin Hakam ditugaskan sebagai pengawas *diwan* yang kemudian pada periode Umayyah menjadi salah satu khalifah yang kemudian memunculkan kesenjangan dan protes di beberapa wilayah oleh tokoh Muhajirin dan Anshar yang berada di Mesir, Bashrah dan Kuffah (Hitti, 2005).

Sebenarnya fitnah terkait isu nepotisme itu menurut hemat penulis tidak bisa sepenuhnya dialamatkan kepada Utsman semata. Namun ini harus dilihat sebagai upaya efisiensi pemerintahan dalam

rangka meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan serta meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan. Kenyataannya orang-orang yang diangkat oleh Utsman kecuali Al-Walid yang diberhentikan, adalah merupakan orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di samping mereka adalah kepala-kepala suku di*kabilah*nya. Sehingga nampak bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang tepat dan dipertimbangkan untuk menyokong kedudukan khalifah, meskipun terbuka untuk disalahtafsirkan. Sehingga isu nepotisme itu perlu untuk dipertimbangkan ulang kembali (Fuadi, 2011).

Sebab kedua adalah semenjak pemerintahan Utsman komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat sehingga semakin sulit menengahi berbagai kepentingan yang ada. Wajar kalau semasa pemerintahan Utsman banyak sekali konflik yang mucul dipermukaan (Chamid, 2010). Jika di masa Umar kebijakan pernahan mampu memberikan keseimbangan pendapatan dan kekayaan antara Pribumi dan Muslim Arab yang *notabene* adalah Muslim pendatang. Aturan jelas dan tegas terwujud dalam *kebijakan pertanahan Umar I*. namun di masa Utsman kebijakan itu tak mampu dijalankan sepenuhnya sehingga banyak Muslim Arab dan kaum kerabat Utsman menguasai tanah taklukan yang baru dan mengambil alih tanah subur di beberapa wilayah yang dulunya dimiliki orang pribumi sedangkan para pejabat masih mendapatkan tunjangan dari negara. Khalifah Utsman juga membagi-bagi tanah hasil taklukan kepada individu-individu untuk reklamasi dan untuk kontribusi pada pemasukan *baitul maal*.[2] Beberapa wilayah taklukan seperti Mesir, Bashrah dan daerah *Sawad* semenjak diganti Gubernur

[2] Dilaporkan bahwa lahan ini pada masa Umar menghasilkan sembilan juta *dirham*, tetapi pada masa Utsman ketika lahan dibagikan kepada individu-individu, penerimaannya meningkat menjadi lima puluh juta *dirham*. Pada periode selanjutnya ia juga mengizinkan untuk menukar lahan tersebut dengan lahan yang ada di hijaz dan Yaman. Sementara kebijakan Umar tidak demikian.

Abdullah bin Sa'ad kewajiban *kharaj,* dan *jizyah* ditingkatnya dua kali lipat (dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar). hal ini mengakibatkan menurunnya produktivitas masyarakat setempat di samping banyak warga pribumi yang kehilangan lahan karena tak mampu membayar kewajibannya. Hingga kesenjangan ekonomi antara si kaya (pegawai dan pejabat pemerintah serta keluarganya) dan si miskin (pribumi) yang semakin nyata (Karim, 2015).

Dengan kondisi seperti ini banyak muncul provokasi-provokasi. Dikisahkan setelah perang *riddah,* banyak kabilah tunduk pada Islam dan membantu peprangan lainnya. Golongan ini dinamakan *Ar Rowadif, A'roob, Mawaali,* dan *Al-'Uluuj.* Golongan ini berjumlah mayoritas dan sifat mereka adalah tunduk pada khalifah namun mereka bodoh dan berperangai buruk. Golongan ini menuntut kenaikan gaji kepada Utsman yang sama besarnya dengan *ahlul badr*. Padahal urusan gaji adalah otoritas Umar bin Khattab. Sehingga ijtihad Utsman yang menolak keinginan mereka dianggap sebagai kemaksiatan dan menentang Al-Quran (Tahqiq, 2002).

Sebab ketiga adalah munculnya fitnah bahwa Khalifah Utsman dan pegawainya tidak mampu mengelola *Baitul Maal* secara hati-hati dan cenderung menghamburkan kas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga khalifah, serta melakukan distribusi *zakat, Kharaj, Jizyah*, dan *Fai* secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi semenjak seluruh kekayaan Utsman disimpannya harta kekayaannya di *Baitul Maal* yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman antara khalifah dengan Abdullah bin Arqam. Kemudian kebijakan Utsman menaikkan tunjangan pensiunan sebesar 100 dirham tetapi tidak ada rinciannya. Dia juga menambahkan santunan dengan pakaian. Selain itu ia juga mengenalkan kebiasaan membagikan makanan di masjid untuk orang-orang menderita, pengembara, dan orang miskin.

Puncak konflik antar kelompok muslim dari Bashrah dan Kufah terhadap pemerintahan Utsman terjadi saat secara terang terangan

mereka bangkit menentang gubernur-gubernur yang diangkat Khalifah Utsman. Bahkan yang lebih hebat lagi di Mesir dengan dimotori oleh hasutan Abdullah bin Saba' muncul fitnah terhadap Khalifah, bahwa Utsman telah melakukan kekeliruan dan kejahatan merampas hak kekhalifahan, inilah yang kemudian menjadi fitnah besar di tengah masyarakat dan bedampak luas (Bakhsi, tt). Di Madinah juga muncul pemberontakan sebagai akibat munculnya isu bahwa Khalifah Utsman mundur dan akan digantikan oleh Marwan bin Hakam. Reaksi dan tanggapan tidak senang datang dari berbagai wilayah yang tak terkendali kecuali di wilayah Suriah yang di pimpin Muawiyah. Keadaan ini memaksa Utsman mengambil tindakan tetapi justru mendapatkan perlawanan dari pemberontak yang didukung rombongan dari Bashrah dan Kufah dengan tujuan yang sama dan jumlah yang sama. Pada saat genting seperti ini sanak kerabat Utsman yang di Madinah justru diperintahkan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing sehingga di kediaman beliau ada yang melindunginya, hingga pada 17 Juni 656 M (35 H) para pemberontak menyerbu rumah Khalifah. Perlawanan terjadi dari pihak anak-anak Ali bin Abi Thalib dan keluarga Utsman namun dapat dikalahkan oleh pemberontak.[3]

---

[3] Oraang yang pertama masuk adalah seorang laki-laki yang bernama Al-Mautul Aswad lalu ia mencekik Utsman dengan sekuat-kuatnya hingga beliau jatuh pingsan dan nafas beliau tersengal-sengal di dada. Lalu ia tinggalkan karena mengira Utsman telah terbunuh. Kemudian masuklah Abdullah bin Abu Bakar lalu ia memegang janggutnya dan tiba-tiba ia menyesal dan keluar. Lalu masuk yang lain dan menebasnya dengan pedang. Dikatakan bahwa orang tersebut memenggalnya sampai putus dan yang lain mengatakan bahwa memenggalnya namun tidak putus. Hanya Utsman berkata, "Demi Allah inilah tangan yang pertama membunuhnya"

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu 'Aun bahwa Kinanah bin Bisyr memukul rusuk dan ubun-ubun Utsman dengan tiang besi hingga beliau tersungkur di sebelahnya. Lalu Saudan bin Humran al-Murady memberikan pukulan lagi dan beliau pun terbunuh. Adapun Amr bin Hamiq melompat ke dada Utsman an pada saat itu beliau menghembuskan nafas terakhirnya lalu

Hingga akhirnya Utsman terbunuh di tangan para pemberontak pada usia 82 tahun dalam masa kekhalifahan 12 tahun kurang 12 hari.

E. Kesimpulan

Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa pada masa kepemimpinan Abu Bakar terdapat beberapa kelebihan dalam pengembangan khilafah islam utamanya di bidang ekonomi adalah penghimpunan zakat dan mengkoordinasikan *baitul maal* dengan manajemen yang lebih baik dan prinsip *balance budged policy* dalam sistem fiskalnya namun kebijakan itu menurut hemat penulis terdapat kekurangannya yaitu tidak ada kas negara yang tersisa untuk dicadangkan bila negara mengalami *force majour*. Kemudian pada masa Umar Bin Khattab merupakan masa keemasan Islam semenjak era Rasulullah di bidang ekonomi yang sangat revolusioner. Umar Bin Khattab membuat kebijakan yang kontrovesial namun relevan dengan situasi saat itu. Dalam beberapa kebijakan tersebut adalah kebijakan pertanahan yang terkenal dengan *kebijakan pertanahan Umar I* yang isinya mengatur tanah hasil rampasan perang hingga muncul konsep *kharaj, Jizyah,* dan *Ushr.* Sedangkan era kepemimpinan Utsman bin Affan kejayaan Islam terjadi pada enam tahun pertama pemerintahan Utsman dengan terbentuknya Armada Laut pertama dalam Islam dan perluasan wilayah sampai daratan Cyprus. Namun enam tahun berikutnya adalah masa kemunduran Islam dan timbulnya fitnah di Ibukota Madinah dan wilayah Kufah, Bashrah, dan Mesir. Beberapa riwayat mengatakan sebab-sebab terjadinya fitnah tersebut tidak terlepas dari kebijakan Utsman dalam melakukan *ressufle* Gubernur di beberapa wilayah

---

ia menikam dengan sembilan tikaman seraya berkata ‘ Adapun tiga aku lakukan untuk Allah dan enam tikaman aku lakukan karena dendam yang ada didadaku (lihat Ibnu Katsir, *Tahdiib wa Tartiib kitab Al Hidayah wa An Nihayah* (Riyadh; Daar Al-Wathon, 2002), 392

dengan melibatkan sanak keluarganya. Kemudian sebab lain adalah luasnya wilayah Islam menyebabkan tak terkendalinya penguasaan atas tanah hasil rampasan perang yang diambil alih oleh pasukan Muslim hingga *kebijakan pertanahan Umar I* di kawasan *sawad* dirubah sedemikian rupa dan diperjual belikan yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan ekonomi antara pribumi dan bangsa arab pendatang yang mayoritas menduduki jabatan di pemerintahan. Sebab ketiga adalah timbulnya pemberontakan di Kufah, Bashrah, dan Mesir kepada Gubernur dan kHalifah yang didorong oleh mosi tidak percaya kepada kebijakan Utsman dan dendam masa lalu yang tidak pernah hilang didalam dada mereka. Hingga akhirnya Utsman terbunuh di tangan para pemberontak pada usia 82 tahun dalam masa kekhalifahan 12 tahun kurang 12 hari.

F. Daftar Rujukan

A. Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010

Abu Suhud, Moh, *Problematika Dakwah Internal Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan upaya Mengatasinya*, Jurnal MD vol 1. No 1. Juli-Desember 2008

Abdul Karim, Muhammad, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta; Bagaskara, 2015

_____, *Geger Madinah (Studi atas Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan,* Hermeneia, Jurnal Kajia Islam Interdisipliner Vol 6 No 1, Januari-Juni 2007

Abdullah, Boedi, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung; Pustaka Setia, 2010

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*.Jilid 1, Yogyakarta : PT Dhana Bakti Wakaf, 1995

Al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, Cairo; Daar Sa'adah, 1980

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah,* Kuwait,: maktabah daat Ibn Qutaybah, 1989

Ali Usman, M., *Sepuluh Sahabat Utama Rasulullah saw Turut Merubah Sejarah Dunia,* Jakarta; Bulan Bintang, 1976

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Klasik hingga Kontemporer.* Jakarta; Granada Press

Chamid, Nur, J*ejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010

Fuadi, Imam, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011

Husein Haekal, Muhammad, *Abu Bakar Ash-Shiddiq, Sebuah Boigrafi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, Jakarta; Litera Antar Nusa, 2003

_____, *Usman bin Affan: "Umatku yang benar-benar pemalu adalah Usman"*, Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 2002K. Hitti, Philip, *History of Arab, ,from the Erliers Times to the Present,* New York; Polgrave Macmillan, 2005

Husaini, S.A.Q, *Arab Administration,* Delhi; Idarah-l Adabiyat-I-, 2009

Katsir, Ibnu, *Tahdiib wa Tartiib kitab Al Hidayah wa An Nihayah*, Riyadh; Daar Al-Wathon, 2002

Khuda Bakhsi, S., *Politics in Islam*,India; Idarah al-Adabiyat (tt),

Muhmmmad Ali, Maulana, *The Early Chaliphate,* Pakistan; The Ahmadiyya AnjumanIsha'at Islam, 1932

Mukti Thabrani, Abdul, *Ijtihad Politik Umar Bin Al-Khattab,* NUANSA Vol 12. No. 2 Juli-Desember 2015

Ibrohim Muhammad, Qutbh , *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*. Jakarta : Pustaka Azam, 2002.

Sayuti Pulungan, J., *Fiqh Siyasah:Ajaran Sejaran dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Qasim Ibn Salam, Abu Ubayd, *Kitab al-Amwal,* Mesir; Daar Al-Haadi, 2007.

Ya'la Tahqiq, Abu, Al-Qadli, *Tragedi terbunuhnya Utsman bi Affan,* Pustakan Al-Haura, 2000.

POLITIK EKONOMI DINASTI UMAYYAH:
Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Nasar bin Sayyar

Alvien Septian Haerisma

A. Pendahuluan

Kajian sejarah yang tidak pernah habisnya diperbincangkan, dengan berbagai aspek dalam kehidupan dapat dikaitkan melalui napak tilas sejarah. Sejarah sebagai laboratorium umat manusia. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi yang meliputinya bersifat individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu sendiri. Perjalanan sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam seperti ini akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam baik klasik maupun kontemporer, hal ini akan memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini. Kedua-duanya akan memperkaya wacana tentang ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas secara konseptual dan aplikatif (Kahf, 1995).

Pertumbuhan historiografi Islam sejak fase-fase awal di balut penuh dengan perkembangan *siyasah* diantara kaum muslimin.

Pertumbuhan historis Islam amatlah jelas terdapat hubungan antara perkembangan politik dan keagamaan dan pembentukan tradisi historiografi Islam (Azra, 2002). Berakhirnya kekuasaan khalifah Ali bin Abi Thalib mengakibatkan lahirnya kekuasan yang berpola dinasti atau kerajaan. Bentuk pemerintahan dinasti atau kerajaan yang cenderung bersifat kekuasaan foedal dan turun temurun, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, adanya unsur otoriter, kekuasaan mutlak, kekerasan, diplomasi yang dibumbui dengan tipu daya, dan hilangnya keteladanan Nabi untuk musyawarah dalam menentukan pemimpin merupakan gambaran umum tentang kekuasaan dinasti sesudah *Khulafaur Rasyidin*.

Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukannya dengan cara menolak pembai'atan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian ia memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Jatuhnya Ali dan naiknya Mu'awiyah juga disebabkan keberhasilan pihak khawarij (kelompok yang menentang dari Ali) membunuh khalifah Ali, meskipun kemudian tampak kekuasaan dipegang oleh putranya Hasan, namun tanpa dukungan yang kuat dan kondisi politik yang kacau akhirnya kepemimpinannya pun hanya bertahan sampai beberapa bulan. Pada akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'awiyah, namun dengan perjanjian bahwa pemilihan kepemimpinan sesudahnya adalah diserahkan kepada ummat Islam. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 661 M / 41 H dan dikenal dengan nama jama'ah karena perjanjian ini mempersatukan ummat Islam menjadi satu kepemimpinan, namun secara tidak langsung mengubah pola pemerintahan menjadi kerajaan. Meskipun begitu, munculnya Dinasti Umayyah memberikan babak baru dalam kemajuan peradaban Islam, utamanya tatanan negara dalam bidang politik dan ekonomi.

Bahasan penulis kali ini tidak lagi mengurai tentang polemik kekuasaan dan peralihan secara turun temurun penguasa dnasti Umayyah, akan tetapi penulis tertarik mengurai bagaimana politik ekonomi Umar bin Abdul Aziz dalam memulihkan kondisi negara yang mengalami krisis ekonomi dan politik mencapai masa paling gemilang sepanjang sejarah kekuasaan Dinasti Umayyah serta kebijakan Gubernur Khurasan Nassar bin Sayyar yang membawa Dinasti Umayyah berakhir dengan kehancurannya.

B. Periodesasi Masa Bani Umayyah

Daulah Bani Umayyah yakni negara yang banyak melakukan perluasan wilayah dan peletak peradaban. Bani Umayyah berdiri pada tahun 40 dan berakhir pada tahun 132 Hijriyah. Dalam rentang waktu ini terdapat tiga masa yang merupakan masa terbaik umat Islam. Tepatnya, masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut-tabi'in. karena masa yang dimaksud diatas tersebut "generasi". Seperti hadits Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW yang mengatakan: *"Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian masa selanjutnya, kemudian masa selanjutnya"* (Qardhawi, 2005).

Dalam literasi atau sumber sejarah perabadan Islam sangatlah banyak terutama tentang periodesasi masa Bani Umayyah. Inilah disebutkan *Period of Dinasti Umayyah*, diantaranya (Latif, 2014):

1. Mu'awiyah bin Abu Sufyan (41-60 H/ 661-680 M)
2. Yazid bin Mu'awiyah (60-64 H)
3. Mu'awiyah bin Yazid (64 H)
4. Marwan bin Al-Hakam (64-65 H)
5. Abdul Malik bin Marwan (65-86 H)
6. Walid bin Abdul Malik (86-96 H)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H)
8. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H)
9. Yazid bin Abdul Malik (101-105 H)
10. Hisham bin Abdul Malik (105-125 H)

11. Walid bin Yazid bin Abdul Malik (125-126 H)
12. Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik (126 H)
13. Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik (127 H)
14. Marwan bin Muhammad bin Marwan (127-132 H)

C. Biografi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Ia bernama Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam bin Abul Ash bin Umayyah bin Abdussyamsi. Ibunya adalah Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin al-Khathab. Umar bin Abdul Aziz adalah anak dari keluarga Umayyah dan Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, dan pamannya adalah Abdul Malik bin Marwan dan keduanya pendiri Bani Umayyah. Ayahnya Umar bin Abdul Aziz akan menikahi ibunya Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin al-Khathab dengan mahar seberat 400 dinar dan keduanya masih keturunan ahli bait (Abdurrahman, 1984). Beliau dilahirkan di Madinah al-Munawwarah. Beberapa silang pendapat tentang tahun lahir Umar bin Abdul aziz antara tahun 59/61/62 H (Latif, 2014). Sebelum menjadi khalifah, dia adalah penguasa di Madinah dan tenggelam dalam kemewahan yang biasa dilakukan oleh Bani Umayyah (Usairy, 2012).

Khalifah lebih mencurahkan energinya untuk membangun dan mengislamkan negara dan rakyat daripada melakukan ekspansi dan mengumpulkan kekayaannya. Beliau menerapkan keadilan dan pemerataan bidang ekonomi dengan menegakkan hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh di daerah dan akhirnya rakyat berduyun-duyun masuk Islam. Saat inilah masa keemasan dakwah Islam di Asia Tengah dan sekitarnya (Karim, 2014).

Sebelum meninggal, beliau meminta kepada anak pamannya Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnul-Abbas yang bermukim di Hamimah Yordania untuk merebut kekuasaan Bani Umayyah dan menyerahkannya untuk Ahli Bait Rasulullah. Sejak itulah, tahun 100 H/718 M., dia mulai merancang rencana ini dengan serius. Umar

bin Abdul Aziz meninggal pada bulan Rajab 101 H/719 M. Dia memerintahkan selama dua tahun lima bulan. Pemerintahannya adalah sebuah nikmat bagi kaum muslimin dan Islam (Usairy, 2012).

D. Politik Ekonomi Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abd Al-Aziz, ketika dinobatkan sebagai khalifah, beliau menyatakan bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini berarti bahwa prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berusaha meredakan ketidakpuasan yang merebak di kalangan muslim baru dengan menata ulang prinsip lama para pendahulunya bahwa seorang muslim, baik Arab maupun *mawla* (Abdullah, 2010). Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, dia berhasil menjalin hubungan baik dengan golongan syi'ah. Dia juga member kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Pajak diperingan, kedudukan *mawali* disejajarkan dengan muslim Arab (Yatim, 1993).

Umar bin Abdul Aziz (Umar II) adalah seorang khalifah yang saleh dan jujur termasuk dalam penegakan hukum dan keadilan. Umar II melaksanakan tugasnya dengan tegas apalagi berhadapan dengan orang-orang pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di zamannya. Contoh ini terbukti dengan kasus penggelapan pajak seorang Gubernur yang kemudian dipecat dan diasingkan ke Pulau Syprus yakni Yazid bin Muhallab di Khurasan. Umar II memusatkan kebijakannya untuk membangun negerinya secara moril. Beliau memberantas KKN dari diri sendiri, keluarga pejabat dan kemudian rakyat yang melakukan tindak kecurangan dan sebagainya (Karim, 2014).

Beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) dalam bidang ekonomi, diantaranya:

1. Memfungsikan kembali Baitul Maal, ketika mendapatkan harta yang diperoleh secara tidak benar khalifah menyitanya dan dikembalikan ke Baitul Maal. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya (Chamid, 2010). Profil seorang umar II adalah pria yang sangat rendah hati, walaupun terkesan sangat mewah seperti kuda-kuda khalifah. Dia memiliki kuda-kuda dari kandang kerajaan dijual melalui lelang umum dan hasil disimpan di Baitul Maal (Mahmudunnusair, 1994).
2. Membebaskan pungutan dari *Jizyah*[1] (upeti) dan *Kharaj*[2] dari orang-orang yang baru masuk Islam (Sholihin, 2010). Tujuan kebijakan ini diharapkan warga yang masuk Islam semakin banyak (Latif, 2014), namun implikasi dari kebijakan tersebut

---

[1] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah.* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), 371. *Jizyah* dapat dimaknai: 1. Pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan. 2. Pembayaran harta yang diwajibkan atas warga Negara non muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 29 yang artinya: (sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk). 3. Hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintahan Islam. Jizyah merupakan harta kaum muslimin yang dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan wajib diambil setelah melewati satu tahun (ditetapkan mulai Muharram sd Dzulhijjah).

[2] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku*, 450. Pengertian *Kharaj* (Pajak Tanah) yaitu pajak yang dipungut dari tanah *kharaj* atau pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki warga non-muslim atau pajak tanah secara umum. Pajak atas tanah (*land tax*), *Kharaj* ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah (*land productivity*). *Al-Kharaj* adalah semacam pajak bumi yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah, hanya saja bedanya *al-kharaj* lebih ringan disbanding PBB yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan pungutan ini juga hanya diberlakukan atas orang-orang nonmuslim yang berdomisili di negara Islam dan mendapatkan izin untuk menggarap/mengolah sebagian dari lahan negara.

adalah gaji bagi tentara berkurang. Akhirnya khalifah mengeluarkan dekrit pada 100 H, yang berisi (Karim, 2015):

a. apabila seseorang yang hendak masuk Islam maka tanahnya wajib diberikan kepada saudaranya yang non muslim, hal ini untuk menghindari mereka guna membayar pajak terhadap negara.
b. Kalau mereka mau menggarap tanahnya sendiri, maka ia tetap dikenakan pajak lima puluh persen.

3. Reformasi keuangan dan administrasi diantaranya bertujuan mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keseimbangan ditengah masyarakat, sehingga tidak ada seorang miskinpun yang membutuhkan sedekah atau zakat.[3]
4. Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Utsman bahwa mereka mengambil zakat harta dari pemberian yang di terima seseorang dari harta negara. Setelah utsman meninggal, pendapatan negara melalui zakat menurun kecuali di zaman Umar bin Abdul Aziz, mereka langsung bersegera membayarkannya melalui negara (ash-Shalabi, 2012).
5. Memaksimalkan kantor-kantor administrasi yang berada dalam kendali pengawasannya, seperti: Kantor surat menyurat, Kantor stempel, Kantor perhubungan dan surat menyurat, Tatanan para juru tulis (ash-Shalabi, 2012).
6. Menerapkan kebijakan otonomi daerah, setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak harus membayar *upeti* kepada pemerintah pusat.

---

[3] Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit*, 224, makna Zakat, merupakan hak Allah SWT tetapkan atas orang-orang kaya bagi orang-orang fakir, miskin dan kekurangan serta kaum musta'bidin, tidak boleh meremehkannya. Umar mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan baik.

7. Sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, ketika stabilitas perekonomian masyarakat membaik (Chamid, 2010).

E. Kegagalan Kebijakan Nasar Bin Sayyar (Gubernur Khurasan)

Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) wafat lalu diganti oleh khalifah Yazid bin Abdul Malik (101-105 H) tidak terjadi ekspansi atau penyebaran Islam di kawasan Asia Tengah yang berarti karena ia sangat lemah sebagai seorang penguasa. Yazid II wafat lalu diganti oleh saudaranya yaitu khalifah Hisham bin Abdul Malik (105-125 H) mulai memiliki semangat baru, ia menguasai kembali daerah-daerah yang hilang sebelumnya. Ia berhasil mengatasi pemberontakan yang terjadi di asia tengah seperti suku-suku Turgesh yang dipimpin Khan Su-Lu dengan bantuan Cina. Dengan bantuan saudaranya, Asad akhirnya Khan Su-Lu bisa ditumpas. Khalifah menerapkan suatu usaha yang sangat baik untuk menurunkan pemberontakan, perdamaian dan serta Islamisasi permanen maupun ekspansi selanjutnya. Cara itu ditempuh dengan asimilasi antara Arab dan pribumi setempat melalui jalur budaya (Karim 2014).

Setelah Assad meninggal, Nasar bin Sayyar diangkat menjadi Gubernur di Asia Tengah yang bermarkas di Khurasan. Para pengganti Hisyam, Walid II dan Yazid II dan Ibrahim tidak ada kemajuan baik dalam ekspansi maupun dalam penyebaran Islam di kawasan Asia Tengah. Khalifah XIV dari dinasti Umayyah, Marwan II mempertahankan Sayyar tetap menjadi penguasa di Khurasan (Karim 2014).

Bahwa semasa menjabat Gubernur Khurasan, Nasar bin Sayyar mencoba memperbarui ekonomi dengan tujuan untuk membendung gerakan anti Umayyah melaluinya yang menerapkan *Kharaj* bagi semua rakyat dengan ukuran yang sama atau merata, naik bagi Muslim Arab, *mawali*, maupun Non Muslim dengan harus

membayar pajak bumi yang sama (50%) (Karim, 2015). Selama inilah diskriminasi pribumi- Arab yang menggoyahkan kedaulatan Umayyah yang sudah diambang kehancuran. Karena pemberontakan Abbasiyah terhadap Umayyah yang dipimpin Abu Muslim Khurasan jauh lebih kuat yang menjatuhkan kekuasaan Sayyar di Khurasan (747 M).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti bani umayah menjadi lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas maka terjadi sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dikalangan anggota keluarga istana (Hitti, 1970).
2. Latar belakang terbentuknya dinasti bani umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi dimasa Ali . sisa-sisa syi'ah (para pengikut Ali) dan Khawarij terus menjadi oposisi, baik secara tersembunyi seperti dimasa pertengaha kekuasaan bani umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah (Yatim, 1993).
3. Etnis antara suku Arabia utara (*bani Qays*) dan Arabia Selatan (*bani Kalb*) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Makin meruncing perselisihan ini mengakibatkan para penguasa bani umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Disamping itu, sebagian besar golongan *mawali* (non arab), terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status *mawali* itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa arab yang diperlihatkan pada masa bani umayyah (Yatim, 1993).
4. Lemahnya pemerintahan daulat bani umayyah juga disebabkan oleh siap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan

tatkala mereka mewarisi kekuasaannya. Disamping itu golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang.

5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti bani umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al Abbas ibn abd al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari bani hasyim dan golongan syi'ah dan kaum mawali yang merasa dikelasduakan oleh pemerintah bani umayyah (Yatim, 1993).

F. Kesimpulan

Umar bin Abdul Aziz (Umar II) adalah seorang khalifah yang saleh dan jujur termasuk penegakan hukum dan keadilan. Umar II melaksanakan tugasnya dengan baik dan tegas apalagi berhadapan dengan orang-orang pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dizamannya.

Beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) dalam bidang ekonomi, diantaranya:

1. Memfungsikan kembali Baitul Maal, ketika mendapatkan harta yang diperoleh secara tidak benar khalifah menyitanya dan dikembalikan ke Baitul Maal. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Profil seorang umar II adalah pria yang sangat rendah hati, walaupun terkesan sangat mewah seperti kuda-kuda khalifah. Dia memiliki kuda-kuda dari kandang kerajaan dijual melalui lelang umum dan hasil disimpan di Baitul Maal.
2. Membebaskan pungutan dari *Jizyah* (upeti) dan *Kharaj* dari orang-orang yang baru masuk Islam.
3. Reformasi keuangan dan administrasi diantaranya bertujuan mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keseimbangan ditengah masyarakat, sehingga tidak ada seorang miskinpun

yang membutuhkan sedekah atau zakat.

4. Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Utsman bahwa mereka mengambil zakat harta dari pemberian yang di terima seseorang dari harta negara. Setelah utsman meninggal, pendapatan negara melalui zakat menurun kecuali di zaman Umar bin Abdul Aziz, mereka langsung bersegera membayarkannya melalui negara.
5. Memaksimalkan kantor-kantor administrasi yang berada dalam kendali pengawasannya, seperti: Kantor surat menyurat, Kantor stempel, Kantor perhubungan dan surat menyurat, Tatanan para juru tulis.
8. Menerapkan kebijakan otonomi daerah, setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri dan tidak harus membayar *upeti* kepada pemerintah pusat.
9. Sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, ketika stabilitas perekonomian masyarakat membaik.

G. Daftar Rujukan

Azra, Azyumardi. Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ek. Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.

Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2010.

Ghazali, Aidit dan Abul Hasan M. Sadeq (Ed). Reading Islamic Economic Thought. Longman Malaysia SDN, BHD. 1992.

Hitti, Philip K. History of the Arabs. London: Macmillan, 1970.

Ibnu Jauzi, Imam Abul Faraj Abdurrahman. Sirah Wamanaaqib Umar bin Abdul Aziz Khalifah. Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1984 M.

Kahf, Monzer. Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1995.

Karim, M. Abdul. Bulan Sabit di Gurun Gobi: Sejarah Dinasti Mongol-Islam di Asia Tengah. Yogyakarta: SUKA Press, Cet I, 2014.

_____. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, Cet.VI, 2015.

Latif, Abdussyafi Muhammad Abdul. Bangkit dan runtuhnya khilafah Bani Ummayyah. Jakarta: Al-Kautsar, Cet I, 2014.

Mahmudunnasir, Syed. Islam its Concepts and History. New Delhi: Kitab Bhavan, 3rd Edition, 1994.

Qaradhawi al-, Yusuf. Distorsi Sejarah Islam. Terj Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Robinson, Neal. Islam A Concise Introduction, T.t: Curzon Press: 1999.

Shallabi ash-, Ali Muhammad. Episode Krusial Sejarah Islam Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Jakarta: Darul Haq, 2012.

_____. Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar bin Abdul Aziz: Ulama dan Pemimpin yang Adil. Jakarta: Darul Haq, Cet. III, 2012.

Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syari'ah. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Usairy al-, Ahmad. Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX. Jakarta: Akbar Media, 2012.

Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.

POLITIK EKONOMI ISLAM DI ANDALUSIA

Helmy Haris

A. Pendahuluan

Perjalanan sejarah Islam telah melalui periode pasang surut yang sedemikian panjang. Pada satu waktu Islam bisa menggapai pincak peradabannya, tapi pada waktu berikutnya Islam terpuruk. Salah satu periode yang bisa disebutkan sebagai puncak kejayaan Islam adalah peradaban Islam di Andalusia (Spanyol). Pada zaman khalifah al-Walid Ibn al-Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, umat Islam mulai menaklukan semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia adalah nama tua untuk wilayah Spanyol dan Portugal. Sejak awal abad 5 Masehi (tahun 406 M), wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandals, maka dinamakan Vandalusia. Namun, sejak tahun 711 M, semenanjung Iberia dan wilayah selatan Prancis jatuh ke dalam kekuasaan Islam, diperintah oleh pembesar-pembesar Arab dan Barbar. Sejak itulah, wilayah ini dikenal dengan Andalusia.

Spanyol merupakan tempat paling utama dan jembatan emas bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam dan hasil-hasil kebudayaan Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, perekonomian, maupun peradaban antarnegara. Orang-orang Eropa

menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada dibawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahan Islam yang berkembang di periode klasik. Pada masa itu, perdaban Islam sangat maju, baik dari tataran politik, ekonomi, sains maupun bidang lainnya. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang muncul pada masa itu yang kemudian dikenal sebagai penemu pondasi ilmu di masing-masing disiplin keilmuannya. Di saat yang sama, pada masa itu bangsa Eropa sedang dalam kondisi terbelakang (*the dark age*).

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menguraikan bagaimana perjalanan perkembangan peradaban Eropa pada masa pemerintahan Islam khususnya Andalusia yang tentu aspek politik dan ekonominya akan menjadi pembahasan khusus pada bab ini. Dari uraian ini diharapkan Pembelajaran sejarah perekonomian Islam dari masa lalu dapat membukakan cakrawala bagaimana model perekonomian yang bagus sehingga peradaban Islam bisa menggapai masa kejayaannya (Kahf, 1995).

B. Islam masuk ke Spanyol

Sebelum Islam Masuk ke Spanyol (Andalusia), masyarakat Andalusia mengalami perpecahan di bidang politik, kemunduran di bidang ekonomi dan kepercayaan. Secara politik Andalus terbagi ke dalam beberapa negara kecil (Yatim, 1993).

Di samping itu, raja Ghothic memaksakan kepercayaannya kepada masyarakat dan orang-orang Yahudi (yang merupakan kepercayaan paling besar masa itu di Andalusia) dipaksa untuk dibabtis menurut agama Kristen. Bagi yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara kejam. Di samping itu, rakyat terkotak-kotakkan dalam sistem kelas sosial, sehingga tiada kesamaan hak (Sanaky, 2008). Sistem elas sosial yang ada pada masa Andalusia pra Islam

tersebut terbagi menjadi tiga; kelas sosial pertama adalah golongan penguasa, yang terdiri dari para pembesar kerajaan seperi raja, pangeran dan pembesar kerajaan lainnya. Termasuk juga dalam kelas sosial pertama ini adalah para pemuka agama dan tuan tanah besar. Kelas sosial yang kedua adalah para tuan tanah kecil. Sedangkan kelas sosial yang ketiga adalah para budak (termasuk budak tani yang nasibnya bergantung pada tanah), pengembala, nelayan, pande besi, buruh dan juga kaum Yahudi (Karim, 2015).

Pada masa itu, terjadi konflik antara raja Roderick sebagai penguasa kerajaan Gothic di Spanyol dengan penguasa Toledo, Witiza. Raja Roderick memindahkan ibu kota kerajaannya dari Seville ke Toledo. Pemindahan ini mengakibatkan penguasa kota Toledo, Witiza tersingkir. Kakak dari Witiza, Oppas dan anaknya Achila mengungsi ke Afrika Utara dan bergabung dengan orang-orang Islam di sana. Hal yang sama juga dirasakan oleh pangeran Yulian, penguasa wilayah Septah. Pangeran Yulian lari ke Ceuta Afrika Utara dan bergabung dengan orang-orang Islam.

Orang-orang Spanyol yang terusir tersebut membujuk penguasa Islam di Afrika Utara, Musa bin Nusair supaya mau menaklukkan dan menguasai Spanyol. Bahkan pangeran Yulian bersedia menyediakan kapal untuk menyeberangkan pasukan Islam dari Afrika utara ke Spanyol (Yatim, 1993).

Dalam penaklukan Spanyol terdapat tiga pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin pasukan kesana. Mereka adalah Tharif Ibn Malik, Thariq Ibn Ziyad dan Musa Ibn Nusair (Yatim, 1993). Musa Ibn Nusair sebagai Gubernur Afrika Utara pada waktu itu mengirim Tharif Ibn Malik sebagai perintis dan mata-mata ke Spanyol. Ia bersama pasukan yang berjumlah lima ratus orang menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan menaiki empat buah kapal. Tharif dalam misinya tidak masuk ke daerah pedalaman, ia dan pasukannya hanya menyusuri pantai. Dalam penyerbuan itu Tharif tidak mendapatkan perlawanan

yang brarti, sehingga mereka memperoleh kemenangan dan kembali ke Afrika membawa harta rampasan yang banyak.

Pada tanggal 19 Juli 711 M. Musa Ibn Nusair kembali mengirim pasukan yang lebih besar ke Spanyol, pasukan ini dipimpin oleh Thariq Ibn Ziyad. Thariq berlabuh di kaki gunung Gibraltar yang kemudian dinamakan Jabal Thariq. Thariq dipandang sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasil perjuangannya lebih nyata. Melihat kemenangan Thariq Musa Ibn Nusair tertarik untuk terjun ke medan perang, maka pada bulan Juni 712 M. ia berangkat menyberangi Selat tersebut, satu persatu kota yang dilewatinya bisa ditaklukan. Setelah pasukannya bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Thariq maka Spanyol pun dapat mereka kuasi sepenuhnya dan dijadikan salah satu provinsi. Gubernur yang pertama kali diangkat di Spanyol adalah Abdul Aziz putra Musa Ibn Nusair pada tahun 716 M.

C. Politik dan Pemerintahan

Islam sebagai kekuatan politik telah memperlihatkan kemampuannya yang luar biasa, sehingga dapat menguasai daerah Spanyol walaupun menghadapi rintangan dan halangan dari orang-orang Kristen dan para penguasa Spanyol.

Semenjak tahun 716 sampai tahun 756, dalam waktu yang pendek (lebih kurang 40 tahun) tidak kurang dari 20 orang Gubernur yang memerintah di Spanyol. Mulai dari Gubernur pertamanya Abdul Aziz Ibn Musa Ibn Nusair sampai Gubernur terakhir Yusuf Ibn Abd. Rahman Al-Fihri dari suku Qays. Dari Gubernur terakhir inilah kekuasaan diambil oleh Abd. Rahman Al-Dakhil sebagai permulaan timbulnya Dinasti Umayyah di Andalus (Firdaus, 2002). Ini menandakan bahwa stabilitas politik di Spanyol belum tercapai secara sempurna, gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis

dan golongan, yakni antara Barbar asal Afrika utara dan Arab. Di samping itu bangsa Barbar tidak diberi kesempatan untuk menjadi Gubernur di Spanyol, padahal Thariq Ibn Ziyad orang Barbar paling berjasa dalam penaklukan Spanyol. Dalam etnis Arab sendiri terdapat dua golongan yang terus bersaing, yaitu suku Qays (Arab Utara) dan Arab Yaman (Arab Selatan). Di samping itu terdapat perbedaan pandangan antara Khalifah di Damaskus dengan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Qairuwan. Masing-masing mereka mengaku paling berhak menguasai daerah Spanyol. Perbedaan pandangan pilitik ini menyebabkan seringnya terjadi perang saudara. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tinggal di daerah pegunungan yang tidak mau tunduk pada pemerintahan Islam. Apabila kekuatan Islam sedang lemah, mereka selalu memberi perlawanan dan memperkuat diri. Gerakan mereka dilindungi oleh orang-orang Perancis. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kontak senjata antara orang Islam dengan orang Prancis. Oleh karena seringnya terjadi konflik internal dan berperang menghadapi musuh dari luar, maka dalam priode ini Islam di Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan (Harun dan Firdaus, 2002).

Ketika Spanyol dalam keadaan tidak tentram datanglah Abdur Rahman Al-Dakhil. Ia adalah cucu dari Hisyam bin Abdul Malik, keturunan bani Umaiyah. Abdurrahman Al-Dakhil mendekati pimpinan Al-Bajl bin Bisri dan suku Kalb. Kedua suku ini dimanfaatkannya untuk merebut kekuasaan dari Gubernur Yusuf Ibn Abdurrahman Al-Fihri melalui kontak senjata di Masarah bulan September 756 M. Akhirnya ia berhasil mengalahkan Gubernur tersebut, Spanyol dapat dikuasainya dan Cordova dijadikannya sebagai pusat pemerintahannya (Nurhakim, 2012). Sejak itu Spanyol menjadi dinasti Umaiyah yang bebas dari pemerintahan pusat di Baghdad. Selama pemerintahan Dinasti Umayyah berkuasa di Spanyol telah melalui beberapa periode:

1. Masa Ke-Amir-an (756-912 M)

Pada masa ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang Amir (artinya panglima, gubernur atau raja kecil), akan tetapi pemerintahan ini tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ada di Baghdad yang dipegang oleh Khalifah Abbasiyah. Ada tujuh amir yang memerintah di Spanyol:

1. Abd. Rahman al-Dakhil (Abd. Rahman I) (138H/756M)
2. Hisyam I bin Abd. Rahman (172H/788)
3. Hakam I ibn Hisyam (180H/796)
4. Abd. RahmanII ibn Hisyam (206H/822)
5. Muhammad bin Abd. Rahman (238H/852)
6. Al-Munzir ibn Muhammad (273H/886)
7. Abdullah bin Muhammad (275-300H/888-912M)

Pada masa ini umat Islam di Spanyol sudah mulai mengalami kemajuan di bidang politik dan peradaban (Yatim, 1993).

2. Masa Kekhalifahan (912-1013M)

Masa ini berlangsung dari pemerintahan Abd. Rahman III yang bergelar An-Nashir sampai munculnya raja-raja kelompok, yang dikenal dengan sebutan *Muluk al-Thawaif.* Pada masa ini Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar Khalifah. Ini bermula dari berita yang sampai kepada Abd. Rahman III tentang kematian Al-Muktadir Khalifah Abbasiyah yang dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Abbasiyah sedang berada dalam kemelut. Maka kesempatan ini digunakan oleh Abdurrahman untuk memakai gelar khalifah, dengan maksud mengembalikan kehalifahan Bani Umaiyyah yang telah hilang selama 150 tahun lebih. Ada pun khalifah-khalifah yang besar memerintah pada saat itu ada tiga orang , yakni Abd. Rahman al-Nashir (912-961M), Hakam II (961-976M), dan Hisyam II (976-1009). Walaupun masih ada khalifah yang memerintah sampai tahun 1013, namun kekuasaannya sudah lemah.

Pada masa kekhalifahan ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, dapat menyaingi kejayaan daulah Abbasiyah di Bagdad. Kehancuran khilafah bani Umaiyah di Spanyol terjadi pada tahun 1013 M, sewaktu dewan menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah terpecah ke dalam banyak Negara-negara kecil (Harun dan Firdaus, 2002).

3. Priode Muluk al-Tawaif (1013-1086)

Pada priode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau *Al-Muluk al-Tawaif.* Yang terbesar di antara kerajaan tersebut adalah Ibadiyah di Seville. Untuk mempertahankan kekuasan kerajaan-kerajan kecil tidak jarang mereka mintak bantuan kepada orang kristen di bagian Utara untuk menyerang dinasti Islam lainnya. Pada masa ini umat Islam Spanyol kembali mengalami konflik intern. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa Islam di sana, orang-orang Kristen mulai mengambil inisiatif untuk melakukan penaklukan kembali terhadap Spanyol. Akan tetapi perlu dicatat meskipun system politik sedang tidak stabil, namun kehidupan di bidang intelektual tetap mengalami perkembamgan. Para sarjanawan dan sastrawan tetap mengembangkan keilmuannya (Harun dan Firdaus, 2002).

4. Reconquesta (Penaklukan Kembali)

Perpecahan politik yang terjadi di kalangan umat Islam membuat orang Kristen berkeinginan untuk merebut kembali wilayah Spanyol. Memang orang-orang Kristen dari awal kedatangan Islam kesana sudah berrmaksud untuk mengusir umat Islam namun niat mereka belum terlaksana. Sentimen orang-orang Kristen juga diungkapkan dalam bentuk pendirian sejumlah biara Benedictine dan kegiatan perziarahan ke Santiago de Compo Stela. Paus Gregory VII menyerukan untuk melakukan gerakan *reconquesta* (penaklukan kembali wilayah Spanyol dari umat Islam).

Paus menjadikan *reconquesta* sebagai kewajiban agama bagi umat Kristen dan sebagai sebuah ambisi teritorial raja-raja Spanyol

Disintegrasi negara-negara muslim pada abad XI mengantarkan pada pesatnya ekspansi sejumlah kerajaan Kristen. Dengan semangat untuk mempersatukan kerajaan Castile, Leon dan kerajaan Galicia, pada tahun 1085, Alfonso VI menaklukan Toledo. Ini merupakan awal terjadinya peperangan umat Islam dengan Kristen. Setelah Spanyol jatuh ke dalam kekuasaan umat Islam. Maka orang-orang Kristen pun membanjiri Toledo. Dalam waktu yang tidak lama kerajaan Aragon merebut Huesca (1096), Saragosa (1118M), Tortosa (1148M) dan Lerida (11149). Pada pertengan abad ke-12 penaklukan telah melembaga (Lapidus, 1999).

5. Masa Dinasti Murabbitun

Murabbitun berasal dari kabilah Barbar Lamtuna yang merupakan cabang kabilah terbesar dari suku Sanhajah, keturunan bangsa Arab dari kabilah Himyar yang datang dari Yaman. Mereka tinggal berkelompok-kelompok. Kelompok ini merupakan perkumpulan spiritual keagamaan yang tinggal di kemah-kemah di bagian Barat gurun Sahara. Perkumpulan ini di pimpin oleh Yahya bin Ibrahim. Ketika ia pulang dari Mekkah tahun 1035 M. ia melihat pengamalan agama kaumnya berbeda dengan yang dilihatnya di Mekkah. Oleh karena itu ia punya maksud untuk memurnikan ajran keagamaan kaumnya dengan mendatangkan seorang alim yang sangat terkenal dari Maroko bermazhab Maliki yang yaitu Abdullah Ibn Yasin. Pada perkembangannya hukum Islam dilaksanakan menurut mazhab Maliki, namun al-Qur'an dan Sunnah tetap dijadikan sumber utama. Karena ketegasan dan kekerasan mereka orang-orang Barbar dan Negro yang ada di sekitar perkampungan mereka tunduk kepada mereka dan masuk Islam (Harun dan Firdaus, 2002).

Setelah Yahya Ibn Ibrahim Wafat, pimpinan Lamtuna dilanjutkan oleh Yahya Ibn Umar. Tak lama kemudian Yahya Ibn Umar

pun wafat dan digantikan oleh saudaranya Abu Bakar Ibn Umar. Dia pun memaklumkan dirinya sebagai raja Dinasti Murabitun pada tahun 448 H/1056M dan Yusuf bin Tasyufin diangkat sebagai panglima.

Pada tahun 1059M Yusuf Ibn Tasyufin bergerak kea rah Utara yautu Maroko dan Afrika Utara. Sewaktu ia kembali dari penaklukan tersebut pada tahun 1061M Abu Bakar, raja dinasti Murabitun pergi ke gurun Sahara, maka pada ketika itu Yusuf bin Tasyufin mengambil alih kekuasaan dinasti Murabitun dan pada tahun 1062M Marakesi dijadikannya sebagai ibukota.

Sewaktu dinasti Murabitun berkembang, dinasti Umaiyah di Andalusia telah terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil yang disebut dengan *Muluk al-Thawaif.* Dalam perkembangannya dinasti Murabitun bisa mencapai kemajuan seperti:

1. Pada masa Yusuf ibn Tasyufin dibangun kota Marakesy sebagai ibu kota dinasti Murabitun dan merupakan pusat pendidikan orang-orang murabitun.
2. Wilayah Islam dapat dipertahankan dari tangan Al-fonso.
3. Di Spanyol didirikan kota Isybiliyah dekat Seville sebagai tandingan kota Cordova yang mulai suram. Di sini muncul Ibn Zuhr (Avenzoar), dia adalah seorang dokter terkemuka di Andalusia (w. 1162M). muncul penyair sufi seperti Ibn Abdun dan Ibn Zaidun (keduanya w. 1134M) dan Ibn Quzman (1087-1160).
4. Penyiaran Islam meliputi daerah-daerah pedalaman guru Sahara di Afrika.

Setelah Yusuf Ibn Tasyufin wafat pada abad 1106 M, dinasti Murabitun mulai memasuki fase kemunduran dan akhirnya kehancuran. Para penggantinya yang memimpin dinasti Murabitun tidak bisa mengendalikan pemerintahan yang baik. Akhirnya datang kekuatan baru dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Ibn Tumart. Ibn Tumart ini dapat mengalahkan dinasti Murabitun dan

mengambil alih kekuasaannya. Pada tahun 541H/1147M penguasa terakhir Murabitun, Ishaq, dapat dibunuh di Markesyi dan menghabisi gubernurnya di Spanyol. Dengan demikian berakhirlah dinasti Murabitun di tangan dinasti Muwahidun (Harun dan Firdaus, 2002).

6. Asal usul Muwahidun

Asal muasal kemunculan muwahidun dapat disarikan dengan catatan singkat sebagai berikut;

a. Adanya kelompok *Mutajassimah* di tengah masyarakat yang berada dalam kekhalifahan Murabitun di Afrika dan Spanyol. Tajassimah yaitu paham yang mengakui bahwa Tuhan mempunyai bentuk seperti tubuh manusia. Menurut sebagian ulama paham yang seperti ituadalah musyrik.
b. Kemudian muncul Ibn Tumart pengikut Asy'ariyah untuk memberantas paham Tajassimah tersebut. Pada akhirnya ia mendakwahkan dirinya sebagai al-Mahdi (juru selamat) dengan konsep muwahidun (orang-orang yang mengesakan Tuhan).

   Ibn Tumart berasal dari kabilah Masmudah. Untuk mengembangkan ajarannya Ibn Tumart membentuk tiga kelompok:

   a) Kelompok sepuluh dipimpin oleh Ibn Tumart yang dinamakan Dewan Menteri.
   b) Kelompok lima puluh dipimpin masing-masingnya oleh Dewan Menteri yang 10 (satu orang untuk lima orang),
   c) Murid Thalabah Ahl ad-Dar, keluarga al-Mahdi, ahli Tainmah, kabilah jadwiyah sampai orang awam.

   Setelah Ibn Tumart wafat tahun 1130 M, digantikan oleh Abdul Mukmin. Pada tahun 1144-1146 mereka berhasil menaklukkan Murabitun dan menjadikan Marakesy sebagai pusat pemerintahannya. Pada tahun 1172 M Muwahidun mampu merebut seluruh wilayah muslim yang ada di Spanyol, akan tetapi kedudukan umat muslim tetap saja dibawah tekanan

pihak Kristen. Sehingga akhirya pada tahun 1212 Muwahidun dapat ditaklukkaan oleh pasukan gabungan Leon, Castile, Navarre dan Aragon dalam perang Las Navas de Tolosa. Dengan kekalahan Muwahidun negara-negara Muslim Spanyol kembali menjadi independen tetapi mereka jadi tidak berdaya menghadapi penaklukan yang dilancarkan pihak Kristen.

7. Berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia

Kemunduran dan kehancuran Andalusia disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal (Suninggar, 2010);

a. Faktor Internal

Ada dua faktor yang mengakibatkan kemunduran Andalusia dari dalam, yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasan dan tidak adanya ideologi pemersatu. Ketidak jelasan peralihan kekuasaan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kerajaan. Hal inilah yang menjadikan keruntuhan Bani Umayyah sehingga muncul al-Muluk al-Tawa'if. Akhirnya Ferdinand dan Isabella memanfaatkan pertikaian itu sehingga dapat merebut Granada yang menjadi pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol. Pada saat Dinasti Umayyah berkuasa, tidak ada jalinan hubungan baik antara penguasa dan Muluk al-Tawa'if akibatnya mereka sering mengadakan pemberontakan dan gerakan yang merugikan sehingga kekuasaan Bani Umayyah mulai melemah. Di samping itu orang-orang non Arab, seperti kelompok Ibad dan Muwaladun dikucilkan. Karena itu,mereka sering mengadakan pemberontakan yang berdampak stabilitas politik kekuasaan Bani Umayyah menjadi goyah.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor dari dalam, kemunduran kekuasaan muslin di Andalusia juga disebabkan dua faktor dari luar, yaitu adanya

serangan dari bangsa Kristen dan timbulnya Renaissance di Eropa. Bangsa Kristen yang merasa dijajah oleh orang Islam berusah untuk melawan dan merebut kekuasaan kembali. Orang-orang Kristen bersatu untuk melawan dan mengusir umat Islam dari Spanyol. Dinasti Umayyah pada saat itu terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil sehingga bangsa Kristen dengan mudah dapat menaklukkannya. Di samping itu gerakan *Renainsance* di Eropa membangkitkan semangat orang-orang Barat untuk merebut kembali kejayaannya. Orang-orang Kristen Eropa mengadakan konsolidasi politik untuk menyusun kekuatan mengusir umat Islam.

D. Ekonomi dan Perdagangan

Secara umum bisa dikatakan, dengan melihat banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan dinasti Umaiyah di Andalusia, bahkan pembangunan bukan hanya ada di kota-kota tetapi juga meliputi ke pedesaan. Itu membuktikan bahwa roda perokonomian pada masa itu berjalan sangat bagus. Masa pemerintahan Abdurrahman I di Andalusia dikenal oleh ahli-ahli sejarah sebagai masa pembangunan besar-besaran. Ia membangun istana yang megah dan Masjid agung yang terkenal di Granada, yaitu Istana Al-Hamra. Selain itu, kemajuan arsitektur di Andalusia juga bisa dilihat dari bangunan-bangunan fenomenal lainnya pada masa itu, seperti; masjid Cordoba, Istana Ja'fariyyah di Saragosa, Tembok Toledo, istana Al-Makmun, Masjid Seville, Istana Al-Gazar dan Menara Girilda yang kesemuanya itu menunjukkan kemegahan arsitektur khas Spanyol Islam (Nurhakim, 2012).

Pada masa dinasti Umaiyah ini juga telah dibangun istana az-Zahra tempat istirahat sang khalifah dengan biaya yang besar dan waktu yang panjang. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bangunan tersebut adalah selama 12 tahun dan jumlah orang yang dipekerjakan untuk membangunnya adalah

sebanya 12.000 orang (Thomson dan 'Ata'ur-Rahim, 2004). Pada masa itu Andalusia terkenal akan kemakmurannya, sehinga orang-orang dari luar Spanyol berduyun-duyun datang untuk menetap di sana.

Sementara itu, kemakmuran hasil pertanian beserta ragam kerajinan dan perusahaan di Andalusia ikut memberikan kemakmuran dagang di Andalusia (Sou'yb, 1984). Hasil produksi yang melimpah baik dari sektor pertanian, kerajinan maupun perusahaan di Andalusia tersebut diekspor ke Perancis dan ke wilayah-wilayah di semenanjung Italia.

Sebagai negara yang berada di wilayah Eropa, Andalusia merupakan wilayah yang cukup dingin, sehingga permintaan akan rempah-rempah menjadi tinggi di Andalusia. Kebutuhan rempah-rempah tersebut dipenuhi dari wilayah Tiongkok, Asia Tenggara dan pesisir India. Hal ini menunjukkan bahwa perdangan di Andalusia sudah sedemikian maju. Permintaan komoditas lainnya yang cukup tinggi di Andalusia adalah sutera, keramik, permadani, wewangian, permata, emas perak dan gading juga didatangkan dari Asia melalui Jalan Sutera (*Silk Road*) maupun melalui Jalan Laut (*Sea Route*) (Sou'yb, 1984). Salah satu kota pelabuhan yang sangat makmur waktu itu karena menjadi pusat transaksi perdangan dari luar Andalusia adalah kota pelabuhan Valencia.

Andalusia pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah II menggantungkan sebagian besar pendapatannya dari bea ekspor dan impor. Seville, salah satu pelabuhan terbesar, mengekspor kapas, zaitun dan minyak. Di samping itu, mengimpor kain dan budak dari Mesir serta para biduanita dari Eropa dan Asia. Barang-barang yang diekspor dari Malaga meliputi kunyit, daun ara, marmer, dan gula.

Selain itu, Andalusia menjadi salah satu daratan di Eropa yang paling makmur dan paling padat penduduknya. Ibukota dipadati oleh sekitar 13.000 tukang tenun dan sebuah industri kulit. Dari

Andalusia, kerajinan seni hias timbul dengan media kulit di bawa ke Maroko. Kemudian dibawa ke Perancis dan Inggris.

Wol dan sutera tidak hanya ditenun di Kordoba, tetapi juga di Malaga, Almeria, dan pusat-pusat kerajinan lainnya. Kerajinan tembikar, yang awalnya dikuasai Cina diperkenalkan oleh kaum muslimin ke daratan Spanyol. Almeria juga memproduksi barang pecah belah dan kuningan. Paterna di Valencia terkenal sebagai produsen tembikar. Jane dan Algave terkenal sebagai produsen emas dan perak, Kordoba sebagai produsen besi dan timah, dan Malaga sebagai produsen batu merah delima.

Dalam kaitannya dengan alat bertransaksi jual-beli, pemerintah mendirikan lembaga pembuat mata uang. Model koin logamnya meniru motif-motif Timur, dengan Dinar sebagai satuan emas, dan Dirham sebagai satuan perak.

E. Sosial Kemasyarakatan

Pada awal kekuasaan Abdurrahman I terjadi perselisihan antara suku yang berbeda-beda, antara bangsa dan etnis yang berbeda-beda, antara Abbasiyah dan Umaiyah, serta antara umat Islam dan umat Kristen. Akan tetapi Abdurrahman dapat menyelesaikan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Andalusia. Semenjak itu Abdurrahman memperoleh rasa hormat dan kekaguman dari rakyat Andalusia, dan semenjak itu terciptalah ketenangan dan kedamaian. Bahkan orang-orang Barbar yang nomadis pun mulai bertempat tinggal secara tetap.

Sepanjang jangka waktu yang lama setelah penaklukan Spanyol, orang-orang Barbar tetap menjalani kehidupan yang nomadis, mengganti tempat tinggal dari satu tempat ke tempat yang lainnya di semenanjung dan membawa serta anak istri mereka. Abdurrahman I adalah orang pertama yang menundukkan kebiasaan mereka mengembara dan membuat mereka mau membangun desa-desa dan kota-kota serta menjalani hidup yang menetap.

Abdurrahman adalah pemimpin yang telah banyak memberikan perubahan terhadap Andalusia sehingga ia dikenal dengan sebutan Elang suku Quraiysh dan Garuda Andalusia. Kaum muslim Andalusia, yang telah lama maupun yang baru memeluk Islam, bersatu dan merasa tentram baik dan menjalani hidup sehari-hari demikian juga dalam melakukan ibadah kepada sang Khaliq (Thomson dan 'Ata'ur-Rahim, 2004).

Secara umum bisa dikatakan bahwa kondisi sosial masyarakat pada masa dinasi Umaiyah tentram dan damai kecuali pada masa Amir ke tiga, yaitu Hakam Ibn Hisyam karena kepemimpinannya yang kurang merakyat dan suka berfoya-foya, sehingga pemerintahannya banyak disibukkan untuk menumpas pemberontakan, perlawanan baik yang datang dari umat Islam maupun yang datang dari kaum Kristen.

Pada masa Amir Hisyam bin Abdurrahman masyarakat hidup dengan tentram. Ia adalah pemimpin yang dekat kepada rakyat dan sangat perhatian kepada orang miskin. Untuk menciptakan ketertiban ia melembagakan jaga malam yang teridiri dari warga-warga yang jujur yang bertugas untuk berkeliling, dan jika ditemukan orang yang merusak ketertiban, ia akan dihukum dan didenda seseuai dengan pelanggarannya, dan dendanya akan diberikan kepada orang-orang miskin seperti orang yang menumpang di dalam masjid saat malam dan hujan (Thomson dan 'Ata'ur-Rahim, 2004). Sehingga Amir Hisyam diberi gelar oleh rakyatnya *ar-Radhi* dan *al-Adl* (pemimpin yang ramah dan adil). Demikian juga pada masa Amir Abdurrahman II masyarakat hidup makmur dan damai sehingga pemerintahannya disamakan orang dengan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.

F. Pendidikan dan Iptek

Perkembangan ilmu pengetahuan di Spanyol bukan hanya pada bidang ilmu-ilmu tertentu, akan tetapi telah mencakup kepada

berbagai bidang ilmu pengetahuan hingga ilmu sains. Sains yang berekembang di Spanyol antara lain adalah ilmu kedokteran, matematika, astronomi, kimia dan lain-lain. Abbas Ibn Farnas adalah yang termashur dibidang kimia dan astronomi. Dia adalah orang pertama menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibn Yahya al-Naqash terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil menemukan tropong Bintang modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad Ibn Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umm al-Hasan binti abi Ja'far dan saudara perempuannya al-Hafids adalah dua orang yang ahli di bidang kedokteran dari kalangan wanita.

G. Pemikiran dan Filsafat

Ilmu filsafat dapat berkembang pada masa Islam di Spanyol. Pada waktu itu Spanyol merupakan slah satu tempat transmisi perpindahan ilmu pengetahuan Islam ke Barat.filsafat mulai dipelajari dan dikembangkan oleh umat Islam di Spanyol pada abad ke 19 M. yakni pada masa pemerintahan Muhammad Ibn Abd. Al-Rahman (832-886 M) penguasa Bani Umaiyah, kemudian berkembang pada masa al-Hakam (961-976 M) pada asa ini banyak buku-buku didatangkan dari daerah Islam di Timur, sehingga buku-buku di universitas-universitas dibanjiri dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat menyaingi perpustakan *Bait al-Hikmah* di Bagdad.

Di Spanyol trkenal para filosof seperti Abu Bakar Muhammad ibn al-Sayigh yang lebih terkenal dengan Ibn Bajjah (w. 1138 M) di Fez. Karyanya yang terkenal *Tadbir al-Mutawahhid.* Abu Bakar Ibn Thufail (w.1185 M) karyanya yang terkenal adalah *Hay bin Yaqzhan.* Di samping filosof dia juga seorang astronomi, kedokteran dan sebagainya. Filosof yang sangat terkenal muncul Ibn Rusyd dari

Cordova (1126-1198 M). karyanya yang sangat monumental adalah *Tahafud al-Tahafud.* Karya ini sebagai tangkisan terhadap kitab falsafah al-Ghazali *Tahafud al-Falasifah.*

H. Kesimpulan

Andalusia, sebuah negeri yang meninggalkan jejak begitu besar di sepanjang sejarah umat Islam pada awal perkembangan Islam di dunia Eropa. Tentu hal ini menyita banyak perhatian besar dari berbagai khalayak umat Islam. Dikatakan demikian, karena penguasaan Islam terhadap semenanjung Iberia lebih khusus Andalusia, telah menunjukkan bahwa Islam telah tersebar ke negara Eropa.

Mulai dari tahapan awal proses masuknya Islam, dimana wilayah Spanyol diduduki oleh khalifah-khalifah dalam setiap dinasti-dinasti yang didirikan dalam setiap periodenya. Tentu, hal ini banyak memiliki peranan yang sangat penting dan besar dalam perkembangan umat Islam. Dimana pada akhirnya Islam pernah berjaya di Spanyol dan berkuasa selama tujuh setengah abad. Suatu masa kekuasaan dalam waktu yang sangat lama untuk mengembangkan Islam.

Namun, di balik usaha keras umat Islam mempertahankan kejayaan pada masa sekian abad itu, umat Islam menghadapi kesulitan yang amat berat. Dimana pada suatu ketika, umat Islam diterpa serangan-serangan penguasa Kristen yang sampai-sampai umat Islam tidak kuasa menahan serangan-serangan penguasa Kristen yang semakin kuat itu. Sehingga pada akhirnya Islam menyerahkan kekuasaannya dan semenjak itu berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol.

Demikianlah Islam di Andalusia, walaupun pada akhirnya berakhir dengan kekalahan, namun islam muncul sebagai suatu kekuatan budaya dan sekaligus menghasilkan cabang-cabang kebudayaan dalam segala ragam dan jenisnya. Banyak sekali

kontribusi Islam bagi kebangunan peradaban dan kebudayaan baru Barat. Sumbangan Islam itu telah menjadi dasar kemajuan Barat terutama dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sains dan teknologi, astronomi, filsafat, kedokteran, sastra, sejarah dan hukum.

Dalam bidang ekonomi khususnya, banyak prosuk-produk yang dihasilkan dari masyarakat, diantaranya sutera, keramik, permadani, wewangian, permata, emas perak dan gading juga didatangkan dari Asia melalui Jalan Sutera (*Silk Road*) maupun melalui Jalan Laut (*Sea Route*) (Sou'yb, 1984). Salah satu kota pelabuhan yang sangat makmur waktu itu karena menjadi pusat transaksi perdangan dari luar Andalusia adalah kota pelabuhan Valencia. Andalusia pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah II menggantungkan sebagian besar pendapatannya dari bea ekspor dan impor. Seville, salah satu pelabuhan terbesar, mengekspor kapas, zaitun dan minyak. Di samping itu, mengimpor kain dan budak dari Mesir serta para biduanita dari Eropa dan Asia. Barang-barang yang diekspor dari Malaga meliputi kunyit, daun ara, marmer, dan gula. Selain itu, Andalusia menjadi salah satu daratan di Eropa yang paling makmur dan paling padat penduduknya. Ibukota dipadati oleh sekitar 13.000 tukang tenun dan sebuah industri kulit. Dari Andalusia, kerajinan seni hias timbul dengan media kulit di bawa ke Maroko. Kemudian dibawa ke Perancis dan Inggris.

I. Daftar Rujukan

Ahmad Thomson dan Muhammad 'Ata' ur-Rahim, Islam Andalusia Sejarah Kebangkitan dan Keruntuhan, alih bahasa Kampung Kreasi (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004)

Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Hujair AH Sanaky, Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta; Modul Kuliah FIAI-Kedokteran UII, 2008)

Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, jilid 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Joesoef Sou'yb, Kekuasaan Islam di Andalusia, Bandung; Firma Madju, 1984)

M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta; Bagaskara, 2015)

Maidir Harun dan Firdaus, Sejarah Peradaban Islam jilid 1, (Padang: IAIN IB Press, 2002)

Moh. Nurhakim, Jatuhnya Sebuah Tamaddun, (Jakarta; Kemenag RI, 2012)

Monzer Kahf, Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Eknomi Islam, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1995)

Suninggar, Perkembangan Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah II di Andalusia, (Makasar; UMI, 2010).

POLITIK EKONOMI MASA DINASTI ABBASIYAH: Kebijakan Nizam Al-Mulk

Ambo Dalle

A. Pendahuluan

Khalifah[1] Abbasiyah merupakan kelanjutan dari *Khalifah*

[1] Menurut bahasa, Khalifah (خليفة Khalîfah) merupakan mashdar dari fi'il madhi khalafa , yang berarti : menggantikan atau menempati tempatnya. Sedangkan dalam pengertian syariah, Khailifah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW (setelah beliau wafat) dalam kepemimpinan Negara Islam.Khalifah juga sering disebut sebagai *Amîr al-Mu'minîn* (أمير المؤمنين) atau "pemimpin orang yang beriman". Hanya saja, para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai kedudukan Khalifah. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan ada banyaknya definisi untuk khalifah (mereka tidak meyepakati satu definisi tertentu untuk khalifah). Beberapa definisi khalifah menurut para ulama: *Pertama,* menurut ***Imam Al-Mawardi*** (w. 450 H/1058 M), Khalifah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. *Kedua,* menurut ***Imam Al-Baidhawi*** (w. 685 H/1286 M), Khalifah adalah pengganti bagi Rasulullah SAW oleh seseorang dari beberapa orang dalam penegakan hukum-hukum syariah, pemeliharaan hak milik umat, yang wajib diikuti oleh seluruh umat. *Ketiga,* menurut ***Imam Al-Juwayni*** (w. 478 H/1085 M), Khalifah adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh (riyasah taammah) sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia.

Umayyah, dimana pendiri *Khalifah* ini adalah keturunan al-abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas (Chamid, 2010). Di mana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan Dinasti Bani Abbas, atau Khilafah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan Dinasti Bani Umayyah. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 H (750 M) sampai dengan 656 H (1258 M). Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya (Chamid, 2010).

Orang Abbasiyah merasa lebih berhak dari pada Bani Umayyah atas *kekhalifaan* Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hasyim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, Orang Umayyah secara paksa menguasai *Khilafah* melalui tragedi peran Siffin, oleh karena itu untuk mendirikan Dinasti Abbasiyah mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap Dinasti Umayyah (Karim, 2015).

Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode (Chamid, 2010):

a) Periode Pertama (32 H/750 M-232 H 847 M), disebut periode pengaruh Persia pertama
b) Periode kedua (232 H/847 M-334 H/945 M), disebut periode pengaruh Turki pertama.
c) Periode ketiga (334 H/945 M-447 H/1055 M), masa kekuasaan Dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua.
d) Periode Keempat (447 H/1055 M-590 H/l194 M), masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah; biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua.

e) Periode Kelima (590 H/1194 M-656 H/125s M), masa bebas dari pengaruh Dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Bagdad.

Pada abad ke-11 berdirilah sebuah dinasti yang didirikan oleh suku Guzz yang bernama Dinasti Saljuk. Saljuk adalah nama keluarga keturunan Saljuk bin Duqaq dari suku bangsa Guzz, Turki yang mana dinasti ini bisa mengusai Asia Barat Daya. Wilayah kekuasaan mereka cukup luas, menandakan awal kekuasaan suku bangsa Turki di kawasan Timur Tengah. Masa kejayaan Dinasti ini adalah saat dipimpin oleh Tughril Beg, Alp Arslan, dan Maliksyah. Di masa mereka dinasti Saljuk dibagi menjadi lima cabang yaitu Saljuk Iran, Saljuk Irak, Saljuk Kirma, Saljuk Asia kecil, dan Saljuk Suriah.

Nizam al-Mulk merupakan wazir yang terkenal pada masa kepemimpinan Alp Arslan dan Maliksyah. Kejayaan-kejayaan yang dicapai Bani Saljuk itu juga tidak terlepas atas sumbangsi kebijakan-kebijakan Nizam al-Mulk dalam pemerintahan. Bukan masalah ekspansi wilayah, tapi dengan keahliannya sebagai administrator yang mengolah ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, pembangunan menjadi berkembang dan maju dengan keahlihannya demi kesejahteraan rakyat. Tidak bisa di elakkan lagi bawah semasa Nizam al-Mulk menjadi wazir Bani Saljuk, segala aktivitas pemerintahan sangat stabil.

Inilah yang harus dperhatikan bagi para sejarawan, bahwa majunya peradaban Islam tidak hanya disebabkan oleh faktor pemimpin saja, tapi para bawahan pun ikut andil dalam kemajuan peradaban Islam. Malah yang menjadi respon pesatnya peradaban itu disebabkan oleh para kaki tangan para penguasa, meskipun memang pemimpin juga menjadi tombak lahirnya suatu peradaban. Dalam makalah ini saya akan sedikit mengulas biografi Nizam al-Mulk yang sukses memberikan kontribusi akan majunya peradaban Islam di masa Bani Saljuk

B. Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan lslam dari pada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dengan Bani Umayah. Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju tersebut, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan di bidang pengetahuan, tetapi juga ilmu pengetahuan agama dalam bidang tafsir dikenal dua metode yaitu pertama, Tafsir bi al-Ma'tsur (interpretasi tradisional dengan bersumber dari Nabi dan sahabat). Kedua, Tafsir bi al-Ra'yi (metode rasional yang lebih banyak bertumpu pada pikiran dari pada hadis dan pendapat sahabat (Chamid, 2010).

Awal kekuasaan Dinasti Bani Abbas ditandai dengan pembangkangan yang dilakukan oleh Dinasti umayah di Andalusia (Spanyol). Di satu sisi, Abd al-Rahman al Dakhil bergelar Amir (jabatan kepala wilayah ketika itu); sedangkan di sisi yang lain, ia tidak tunduk kepada Khalifah yang ada di Baghdad. Pembangkangan Abd al-Rahman al-Dakhil terhadap Bani Abbas mirip dengan pembangkangan yang dilakukan oleh Muawiyyah terhadap Ali ibn Abi Thalib. Dari segi durasi, kekuasaan Dinasti Bani Abbas termasuk lama, yaitu sekitar lima abad. Abu al-Abbas al-Safah (750-754 M) adalah pendiri Dinasti Bani Abbas. Akan tetapi karena kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Dinasti Bani Abbas Pada tahun 762 M, Abu Ja'far a Manshur memindahkan Ibu Kota dari Damaskus ke Hasyimiyah kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat dengan Ctesiphon, bekas Ibu Kota Persia. Oleh karena itu, Ibu Kota pemerintahan Dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia (Chamid, 2010).

Abu Ja far al-Manshur sebagai pendiri Muawiyah setelah Abu Abbas al-Saffah, digambarkan sebagai orang yang kuat dan tegas ditangannyalah Abbasiyah mempunyai pengaruh yang kuat. Pada

masa pemerintahannya Baghdad sangatlah disegani oleh kekuasaan Byzantium. Bani Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan lslam setelah berhasil menggulingka Dinasti Umay pada tahun 750 H.

Istilah Bank memang tidak dikenal dalam khazanah keilmuan Islam. Yang dikenal adalah istilah jihbiz.[2] Pada zaman itu mulai diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya uang yang digunakan adalah dinar (terbuat dari emas) dan dirham (terbuat dari perak). Di zaman itu, jihbiz tidak saja melakukan penukaran uang namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang (Chamid, 2010).

Beberapa Khalifah yang pernah menjadi pemimpin pemerintahan saat Dinasti Abbasiyah (Chamid, 2010)

1) Abu Ja'far Al-Manshur

Karena Abdullah al-Saffah hanya memerintah dalam waktu yang singkat, pembina yang sesungguhnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja far al-Manshur. Pada awal pemerintahan beliau, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya, al- Saffah, banyak menggunakan dana Baitul Maal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Hal tersebut mendorong Khalifah al-Manshur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara, di samping penumpasan musuh-musuh Khalifah, sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan.

Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah al-Manshur memerintahkan para kepala jawatan pos untuk melaporkan harga pasaran dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Jika

[2] Jihbiz berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah jihbiz mulai dikenal di zaman Muawiyah, yang ketika itu fungsinya sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah Sedangkan di zaman Bani Abbasiyah, jihbiz populer sebagai suatu profesi penukaran uang.

mengalami kenaikan yang luar biasa, ia memerintahkan para walinya agar menurunkan harga-harga ke tingkat semula. Di samping itu, Khalifah al-Manshur sangat hemat dalam membelanjakan harta Baitul Maal. Ketika ia meninggal, kekayaan kas negara telah mencapai 810 juta dirham (Karim, 2015).

Dalam zaman permulaan dari Daulah Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak dari uang keluar Kallifah Mansur betul-betul telah meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat bagi ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan Mansur dalam menguatkan dasar Daulah Abbasiyah dengan ketajaman pikiran, displin dan adil, adalah sama halnya dengan Khalifah Umar bin Khatab dalam menguatkan lslam.

Salah satu contoh dari keahlian Mansur dalam soal ekonomi dan organisasi serta ketajaman pandangan jauhnya, yaitu pesannya kepada putra mahkotanya, Mahdi, waktu dia menjelang wafat, yaitu (Chamid, 2015):

> "....telah kukumpulkan untukmu dalam kas negara demikian banyaknya kekayaan, sehingga kalau dalam masa sepuluh tahun engkau memerintah tidak ada uang masuk, cukup untukmu biaya buat menggaji tentara, pegawai dan lain-lain belanja negara. Engkau harus hati-hati benar, jangan sampai engaku memboroskan harta rakyat. Lindungilah rakyat dan hindarkan dari mereka bala bencana Kumpulkan kekayaan negara dan simpan baik-baik. Ingatlah, bahwa para pegawai yang curang adalah bencana zaman. Perlengkapi tentara dan polisi sejauh mungkin. Engkau harus sadar benar, bahwa pekerjaan hari ini jangan ditinggal untuk besok, sehingga bertumpuk- tumpuk tak terkerjakan lagi. Sediakan beberapa petugas di waktu malam untuk mempelajari apa yang akan terjadi besok siang demikian pula sediakan beberapa petugas di waktu siang untuk mempelajari apa yang akan terjadi nanti malam. Haruslah engkau langsung sendiri memeriksa urusan

negara; jangan marah-marah, jangan malas dan pakailah "politik sangka baik" (husnud dhan) pada umumnya, dan terhadap para pegawai, terutama para sekretaris, pergunakan "politik buruk sangka" (suud dhan), agar engkau tetap waspada"

Pada waktu Khalifah Mansur meninggal setelah memimpin negara selama 22 tahun, dalam kas negara tersisa kekayaan sebanyak 810.000.000 dirham. Demikian kas negara yang ditinggalkan Khalifah, sedangkan Khalifah Harun al-Rasyid meninggalkan kekayaan negara dalam kas waktu beliau meninggal sebanyak lebih dari 900.000.000 dirham (Chamid, 2015).

Tentang gambaran bagaimana kecakapan Rasyid memasukkan uang ke dalam kas negara (Bait al-Maal), pernah diberitakan orang, bahwa apabila sedang tidur terlentang memandang awan lalu di angkasa raya, lantas beliau berkata; *"Oh, awan, engkau boleh melayang ke mana saja, pajakamu pasti akan datang kepadaku!"*

Sebabnya maka kas negara demikian kayanya pada permulaan Daulah Abasiyyah, yaitu karena para Khalifah betul-betul memandang soal ekonomi dan keuangan negara sangat penting. Sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi dia pandang soal yang paling penting.

Baik Khalifah Mansur atau Khalifah-Khalifah sesudahnya telah membangun ekonomi negara dengan berhasil sekali, baik dalam bidang pertanian, perindustrian ataupun dalam bidang perdagangan.

2) Harun al-Rasyid

Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan putranya al-Makmun Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya Penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab pun dimulai. Orang-orang dikirim ke Kerajaan Romawi, Eropa untuk membeli "Manuscript". Pada mulanya hanya buku-buku mengenai

kedokteran, kemudian meningkat mengenai ilmu pengetahuan lain dan filsafat. la juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar.

Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab doman mengenai keuangan negara secara syari'ah. Untuk itu, lmam Abu Yusuf menyusun sebuah kitab yang diberi judul Kitab al-Kharaj.

Kestabilan politik dan kekuasan Dinasti Abbasiyah amat kokoh karena didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi. Kota Baghdad menjadi ramai oleh lalu lintas perdagangan antar negara. Dipersatukannya bekas wilayah-wilayah Bizantium dan Kekaisaran Sassaniah ke dalam satu otoritas kekuasaan tunggal Khalifah menyebabkan Baghdad menjadi pusat ekonomi raksasa. Segala kebutuhan penduduk akan barang dan jasa tersedia dan mudah didapat.

Wilayah yang amat luas yang membentang dari Asia Tengah hingga Spanyol menjadi faktor yang amat penting dari bentuk pemikiran ekonominya. Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada masa itu diperoleh dari sektor-sektor yang beragam seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa transportasi, kerajinan, dan pertambangan.

a) Perdagangan Dan Industri

Di samping perhatian yang demikian besar diberikan kepada bidang pertanian dan perindustrian, para Khalifah Daulah Abbasiyah juga memberikan perhatian yang cukup besar pada bidang perdagangan. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan dengan cara memudahkan jalan-jalannya, umpamanya;

1) Dibangunkan sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang.

2) Dibangunkan armada armada dagang.
3) Dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut.

Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Akibatnya, kafilah-kafilah dagang kaum Muslim melintasi segala negeri, dan kapal-kapal dagangnya mengarungi tujuh lautan.

b) Pertanian dan perkebunan

Terbentuknya pemerintahan *kekhalifahan* yang stabil juga menimbulkan dampak-dampak yang dramatis terhadap pertanian diberbagai wilayah, yang pada gilirannya mendorong perkembangan regional. Wilayah Irak, misalnya, sebelum dikuasai kaum Muslim mengalami kemerosotan besar dalam produksi pertanian. Karena terlantarnya irigasi. Puncak dari kemerosotan ekonomi Irak ini terjadi pada tahun 627-628, ketika beberapa kanal dan bendungan sungai Tigris hancur dilanda banjir, sehingga menimbulkan bencana besar terhadap pertanian. Musibah ini diperbaiki setelah kaum Muslim menguasai wilayah ini.

Kota-kota administratif dan tentara Muslim seperti Basrah, Kuffah, Mosul, dan al-Wasit menjadi pusat usaha-usaha pengembangan pertanian. Bahkan rawa-rawa di sekitar Kuffah dikeringkan dan dikembangkan menjadi kawasan pertanian yang subur. Untuk menggarap daerah-daerah pertanian ini, buruh tani didatangkan dalam jumlah besar khususnya dari Afrika Timur, sehingga menciptakan usaha ekonomi pertanian-perkebunan. Perkembangan yang sama juga terjadi di wilayah Persia bersamaan dengan pertumbuhan desa-desa menjadi kota-kota kecil seperti Hamadhan, Isfahan, Rayy. Kebutuhan akan produk-produk pertanian di wilayah ini juga meningkat.

c) Pengembangan Ilmu Pertanian

Berbeda dengan *Khalifah* dari Daulah Umaiyyah yang bersikap menindas para petani dan menggencet mereka dengan beban pajak yang berat, maka para *Khalifah* Daulah Abbasiyah dalam periode permulaan bersikap sebaliknya. Mereka membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka, dan ada beberapa yang dihapus sama sekali.

Di samping itu, sagala usaha untuk mendorong kaum tani agar maju, dtempuh dan dilakukannya, antaranya yaitu:

1) Memperlakukan ahli *zimmah* dan *mawaly* dengan perlakuan yang baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, hingga kembalilah bertani di seluruh penjuru negeri.
2) Mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang belaku kejam kepada para petani,
3) Memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara,
4) Membangun dan menyempurnakan perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat atau pun air,
5) Membangun bendungan-bendungan dan kanal-kanal, baik besar atau pun kecil, sehinggan tidak ada daerah yang tidak irigasi,
6) Dengan tindakan-tindakan ini, maka pertanian menjadi maju sekali, tidak saja di tanah Irak yang disebut dengan "tanah hitam" (maksudnya tanah subur), tetapi juga di seantaro negeri,. Tiap-tiap wilayah mempunyai kekhususan dalam pertanian.

Perkembangan ekonomi pertanian didukung oleh pengembangan ilmu-ilmu pertanian. Dalam batas tertentu, ilmu-ilmu pertanian itu diadopsi dari Yunani melalui penerjemahan buku-buku tertentu. Salah satu panduan pertanian yang paling terkenal adalah al-Filahah al-Rumiyah

(pertanian Romawi) yang merupakan buku panduan pertanian orang-orang Bizantium.

Kemajuan ekonomi yang begitu pesat ini juga dilatar-belakangi oleh para *Khalifah* yang memiliki latar belakang saudagar Mekkah, Seperti diketahui aktifitas ekonomi khususnya perdagangan sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari bangsa Arab, bahkan Nabi sendiri adalah saudagar, demikian juga para sahabatnya.

d) Sistem Moneter

Sebagai alat tukar, para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Mata uang dinar emas digunakan oleh para pedagang di wilayah kekuasaan sebelah Barat, meniru orang-orang Bizantium; sedangkan mata uang dirham perak digunakan oleh pedagang di wilayah Timur, meniru kekaisaran Sassaniah.

Pengunaan dua mata uang ini menurut Azumardi Azra, memiliki dua konsekuensi. Pertama, mata uang dinar harus diperkenalkan di wilayah-wilayah yang selama ini hanya mengenal mata uang dirham. Kedua, dengan mengeluarkan banyak mata uang emas, ini mengurangi penyimpanan emas batangan atau perhiasan dan sekaligus menjamin peredaran mata uang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pengunaan mata uang secara ekstensif mendorong tumbuhnya perbankan. Mata uang, baik emas maupun perak, tidak bisa dibawa menempuh jarak jauh tanpa melibatkan risiko yang besar. Karena itu, para pedagang dan orang-orang yang mengadakan perjalanan jarak jauh memerlukan sistem cek. Bahkan bisa dipastikan bahwa cek yang dikenal dalam sistem perbankan modern berasal dari istilah Arab, hakk. Istilah lain yang tampaknya berasal dari kata Arab adalah traf fic dari kata tafriq artinya distribusi; tarif dari kata tarif artinya cukai; magazine dari kata makhazin artinya toko.

Di dalam situasi dimana kekayaan beredar dengan bebas dan lancar maka bakat, kemauan dan kerja keras lebih menjanjikan untuk mencapai mobilitas sosial dari pada keturunan. Mobilitas sosial yang cepat khususnya di masa Dinasti Abbasiyah semakin mungkin sehubungan dengan penekanan ajaran Islam tentang derajat persamaan seluruh Muslim.

C. Dinasti Saljuk

Nama dinasti Saljuk diambil dari sebuah nama seorang tokoh yang berasal dari keturunan Turki yaitu Saljuk bin Tuqaq. Berasal dari kabilah kecil keturunan Turki, yakni kabilah Qunuq. Kabilah ini bersama dua puluh kabilah kecil lainnya bersatu membentuk rumpun Ghuz. Semula gabungan kabilah ini tidak memiliki nama, hingga muncullah tokoh Saljuk putra Tuqaq yang mempersatukan mereka dengan memberi nama suku Saljuk (Ali, 1996). Negeri asal mereka terletak di kawasana utara laut Kaspian dan Laut Aral (Mughni, 1997).

Saljuk dikenal sebagai seorang orator ulung dan dermawan oleh karena itu ia disukai dan taati oleh masyarakat, dilain pihak istri raja Turki khawatir jika saljuk melakukan pemberontakan, karenanya ada rencana untuk membunuh saljuk secara licik, dan saljuk sendiri mengetahui rencana jahat tersebut lalu ia mengumpulkan pasukannya dan membawa mereka ke kota Janad, mereka tinggal disana dan bertetangga dengan kaum muslimin di negeri Turkistan, maka ketika saljuk melihat perilaku orang Islam yang baik dan berakhalaq luhur ia akhirnya memeluk agama Islam dan kabilah Ghuzpun akhirnya memeluk Islam. Dan sejak itulah saljuk mulai melakukan perlawanan dan peperangan melawan orang-orang Turki yang kafir, akhrinya iapun mampu mengusir bawahan raja Turki dan menghapus pajak atas kaum muslimin. Kaum Saljuk memeluk Islam Sunni sehingga mudah berhubungan dengan negara tetangganya yang telah memeluk Islam. Mereka memeluk agama Islam pada akhir abad ke 4 H / 10 M (Mughni, 1997) .

Periode kekuasaan Thughril (1037-1063), keponakan sekaligus penerusnya, Alp Arslan (1063-1072), dan periode putra terakhirnya, Malik Syah (1072-1092), mewakili periode-periode paling cemerlang dalam masa kekuasaan Saljuk atas dunia Islam di Timur (Hitti, 1970).

Pada masa Sultan Malik Syah wilayah kekuasaan Daulah Saljuk ini sangat luas, membentang dari Kashgor, sebuah daerah di ujung daerah Turki, sampai ke Yerussalem. Wilayah yang luas itu dibagi menjadi lima bagian (Khudhari Bek, 1970);

1) Saljuk besar yang menguasai Khurasan Rayy, Jabal, Irak, Persia dan Ahwas, ia merupakan induk dari yang lain. Jumlah Syekh yang memerintah seluruhnya delapan orang.
2) Saljuk Kirman berada di bawah kekuasaan keluarga Qawurt Bek ibn Dawud ibn Mikail ibn Saljuk. Jumlah syekh yang memerintah dua belas orang.
3) Saljuk Iraq dan Kurdistan, pemimpin pertamnya adalah Mughirs al-Din Mahmud. Saljuk ini secara berturut-turut diperintah oleh sembilan Syekh.
4) Saljuk Syria diperintahkan oleh keluarga Tutush ibn Alp Arselan ibn Daud ibn Mikail ibn Saljuk, jumlah syeh yang memrintah ada 5 orang.
5) Saljuk Ruum, diperintah oleh keluarga Qutlumish ibn Israil ibn Saljuk dengan jumlah syekh yang memerintah seluruhnya 17 orang.

Bukan hanya pembangunan mental spritual, dalam pembangunan fisik juga dilakukan oleh saljuk dan banyak meninggalkan jasa. Maliksyah terkenal dengan usaha pembangunan dibidang yang terakhir ini, ia telah membangun banyak mesjid, jembatan, irigasi dan jalan raya (Nasution, 1985). Pada saat itu ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat pula, diantara tokohnya adalah Umar Khayan, penyair, ahli astronomi dan ahli matematika.

D. Nizam al-Mulk

Beliau lahir tahun 1018 M/ 408 H di Radkan, Tus. Ayahnya adalah seorang pegawai pemerintahan Gaznawi di Tus (Hasan, 2004). Banyak yang menyebut bahwa, Nizam al-Mulk adalah sosok yang taat beragama yang dermawan serta ahli administrasi yang mashur. Beliau juga memiliki pribadi yang suka menyantuni fakir miskin. Kepribadian beliau sangatlah luar biasa baiknya. Dikisahkan dalam al-Kamilfi at-Tarikh dijelaskan bahwa Nizam al-Mulk termasuk penguasa muslim yang dermawan, alim, adil, dan penyayang, suka menjamu para fakirin dan rang papa. Sebuah pendapat mengatakan, "Nizham selalu dalam keadaan mempunyai wudhu, selama mempunyai wudhu dia selalu melakukan shalat sunnah, senantiasa berpuasa hari Senin dan Kamis. Ini menunjukkan bahwa Nizam al-Mulk memang pantas menjadi seorang wazir yang mengatur pemerintahan Bani Saljuk dengan perangainya yang begitu baik ia mempu memajukan peradaban Islam.

Nizam al-Mulk adalah seorang wazir Persia, Wazir Saljuk, dan ahli administrasi yang sangat terkenal. Dia tumbuh dan belajar ilmu Nahwu, menulis dan membuat syair. Dia mengabdi di Ghaznah dan seiring dengan berubahnya zaman, dia diangkat menjadi menteri pada masa pemerintahan Sultan Alp Arsalan dan putranya Malik Syah. Dia mengatur jalannya pemerintahan Malik Syah dengan sebaik mungkin. Kedudukannya sebagai wazir sangat mashur, karena dia suka menyebarkan keadilan, mengendalikan keamanan, membangun madrasah, mesjid, dan saran perhubungan. Pada masa Alp Arslan dan Maliksyah, dialah yang aktif sebagai penguasa. Tidak ada orang yang menjadi mulia atau terhina kecuali dengan perintahnya. Sehingga banyak sahabatnya yang mengatakan bahwa dia mirip dengan wazir Barmaki pada dinasti Abbasuyah I.

Berikut ini beberapa Kebijakan-kebijakan Nizam al-Mulk dalam pemerintahan Bani Saljuk antara lain:

1. Dalam masalah ekonomi, Nizam al-Mulk bersikap bijaksana dengan menghapuskan pajak yang tidak dikenai sanksi syariat.
2. Dalam pembangunan, Nizam al-Mulk memprakarsai perluasan Masjidil Haram di kota Makkah serta meningkatkan fasilitas perlengkapan bagi para jama'ah haji.
3. Dalam pendidikan, Nizam al-Mulk mendirikan madrasah Nizamiyah pada tahun 1067 di Baghdad. Kurikulumnya berpusat pada al-Qur'an, tarikh nabi serta sastra Arab dan ilmu hitung. Namun, karena Madrasah Nizamiyah cenderung menggunakan Fiqih Syafi'i, maka pelajaran ilmu fiqih menjadi prioritas utama. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu dan pengaruhnya yang cukup besar, Nizam al-Mulk meng-ekspansikan madrasah ini ke berbagai penjuru kota seperti Mosul, Basra, Tibristan, dan Balkh. Madrasah ini yang telah menjadi cikal bakal bagi lehirnya tokoh-tokoh Islam dunia sperti Imam al-Ghazali, al-Tabari, dan al-Juwaini.

Dari semua kebijakan yang beliau lakukan selama ia menjadi wazir Bani Saljuk dan kepribadiannya yang mulia, Nizam al-Mulk banyak dikunjungi oleh para ulama serta kalangan muslimin yang menyukai perangai baik dari Nizam al-Mulk.

Selanjutnya pada masa Bani Saljuk yang dipimpin oleh Malik Syah dan wazirnya Nizam al-Mulk, banyak melakukan ekspansi wilayah. Untuk menjaga apa yang diwariska para pendahulunya, Malik Syah dengan panduan dari Nizam al-Mulk berambisi untuk menguasai seluruh wilayah Islam. Di samping itu ia berusaha untuk memperkuat armada militer dan kalau perlu dengan menambah jumlah kekuatan mereka. Dari semua usaha itu Malik Syah dan wazirnya Nizam al-Mulk mampu menguasai wilayah-wilayah seperti: Kirman, Syria, Rum, Asia kecil. Ini menunjukkan bahwa Nizam al-Mulk tidak hanya ahli dalam administrasi saja, tapi juga ahli dalam memberikan nasehat strategi perang.

Penaklukan Malik Syah berlanjut pada wilayah sekitarnya. Ia memimpin ekspedisi militer sendiri tanpa bantuan Nizam al-Mulk untuk menaklukkan bekas wilayah kekuasaan Romawi, Transoksania, Bukhara, dan Samarkand. Dari sini kerja sama antara Nizam al-Mulk dengan Malik Syah akhirnya membawa kebencian bagi mereka yang tidak menyukai kedekatan mereka.

Memburuknya hubungan mereka di akhir persahabatan disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, Nizam al-Mulk sering kali mempekerjakan anaknya, kerabatnya, dan para pengikutnya di Madrasah Nizamiyah dalam urusan pemerintahan, selain itu beliau juga memberikan wewenang kepada mereka terlalu besar, sehingga menimbulkan kemarahan Malik Syah. Kedua, terdapat persaingan antara Nizam al-Mulk dengan Turkan Khatun, istri Sultan Malik Syah, yang mana Turkan seringkali mencampuri urusan antara sultan dengan wazirnya. Selain itu, dengan sembunyi-bunyi, ia menunjukkan kebenciannya kepada Nizam al-Mulk dengan menominasikan putranya Mahmud yang masih anak-anak untuk menjadi putra mahkota, sedangkan Nizam al-Mulk menominasikan Barqyaruk, outra tertua ke tahta kekuasaan. Ketiga, Nizam al-Mulk dikelilingi anyak orang yang iri kepada kepribandiannya. Inilah yang menyebabkan sampai Nizam al-Mulk dibunuh.

Nizam al-Mulk wafat di Sihna pada tahun 1092, akibat pembunuhan kelompok Hasyasyin. Diawali oleh seorang pengikut Bathiniyah yang berpenampilan sebagai seorang sufi mendatanginya. Dia menceritakan sebuah cerita dan Nizham mendengarkannya. Tiba-tiba orang tersebut menikam Nizam dengan sebilah pisau tepat di jantungnya, kemudian dia kabur. Seketika itu Nizam al-Mulk wafat dalam keadaan puasa pada bulan Ramadhan. Mengetahui bahwa wazirnya yang terkenal dengan kebaikannya itu telah dibunuh, ini membuat orang-orang saat itu merasa kehilangan dan ingin mencari si pembunuh Nizam itu. Kata terakhir yang terucap dari mulut Nizham adalah, "Jangan kalian bunuh

pembunuhku. Aku telah memaafkannya. Tiada Tuhan selain Allah. Dari kaliamat yang terucap dari bibir Nizam Al-Mulk itu tidak mengurungkan niat orang-orang yang sangat cinta akan beliau, demi kecintaannya itu mereka menangkap dan membunuh pembunuh Nizham itu pada tahun 485 H di dekat Nuhawand.

Sebelum Nizam al-Mulk wafat, beliau merilis bukunya yang berjudul *Siyaset Name* (Siasat Pemerintahan) tahun 1091. Dalam buku ini termuat tugas pemerintahan dalam menjaga stabilitas kerajaan serta menjaga keutuhan masyarakat dari pecah belah. Nizam al-Mulk merupakan pejabat yang bijaksana dan patut diteladani. Pada masanya peradaban Islam mencapai puncak kejayaan, penggabungan antara kebudayaan Arab dan Persia berhasil dilakukannya. Ibnu Aqil berkata, "Sejarah Nizham telah membuka akal pikiran dengan kebaikan, kemuliaan dan keadilannya. Dia telah menghidupkan panji-panji agama. Hari-harinya dipenuhi dengan orang yang suka ilmu. Dia wafat sebagai raja di dunia dan di akhirat (Hitti, 1970).

E. Kemajuan Peradaban di Era Kekuasaan Dinasti Saljuk

1. Sistem politik dan pemerintahan

a) Saljuq merupakan sebuah kerajaan yang mengamalkan sistem hiererki. Kuasa tertinggi ialah sultan. Sultan dibantu oleh kelompok birokrasi Parsi dan tentara yang berasal dari berbagai bangsa dan keturunan yang dipimpin oleh panglima-panglima Turki dari keturunan budak.

b) Pada masa dinasti saljuk berkuasa, posisi dan kedudukan khalifah menjadi lebih baik, paling tidak kewibawaannya dalam bidang agama dikembalikan setelah beberapa lama dirampas oleh orang-orang syiah (dinasti Buwaih). Meskipun Baghdad dapat dikuasai, Thogril Beg memilih Naisabur dan kemudian Ray sebagai pusat pemerintahannya. Dinasti- dinasti kecil yang sebelumnya telah memisahkan diri, setelah ditaklukan oleh

dinasti saljuk, kembali mengakui kedudukan Baghdad. Bahkan mereka terus menjaga keutuhan dan keamanan Abassiyah untuk membendung Syiah dan mengembangkan madzhab sunni yang mereka anut, Dinasti Saljuk Inilah kekaisaran Islam pertama Turki yang memerintah dunia Islam.

c) Perhatiaan dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana. Malik Syah dengan giat melakukan pembangunan untuk sarana perekonomian, seperti pembangunan jembatan dan perbaikan pelabuhan.

2. Kebijakan Ekonomi dimasa pemerintahan Nizam al-Mulk (Lombard, 1974)

Dalam bidan ekonomi, ada beberapa faktor yang sepenuhnya disadari oleh Nizam Al-Mulk yaitu, kemakmuran, produktivitas dan efisiensi. Mengamankan kesejahteraan dapat meningkatkan lebih besar produktivitas yang diharapkan dan efisiensi. Ia mendemonstrasikan melalui kejadian terkait di bawah ini:

Bahwa pada saat persoalan (*affairs*) Ray telah mengkhawatirkan Nizam Al-Mulk, ia diberitahukan oleh spies bahwa Quthlumus telah meninggalkan Fortress dari Kurd mulai Plundering negeri dan negeri Ray harus diserang, Alp Arslan juga mulai menuju Nishapur dan ia dengan tentaranya mencapai Damghan. Dengan rasa persaudaraan Alp Arslan mengirimkan sebuah pesan Quthlumus memintanya untuk kembali, namun Quthlumus memenuhi tidak menaruh perhatian dan mulai melaukan gangguan ke wilayah sekitar Ray. Qutlumush memenuhi lembaga al-Mith dengan air agar kiriman ke Ray tidak sampai. Situasi ini mengkhawatirkan Alp Arslan, Nizam Al-Mulk berkata (Azra, 2002);

> "sama sekali jangan khawatir, saya telah merekrut serdadu yang tembakannya tidak pernah meleset dari target. Saya telah mengamankan kestiaan Al-Qur'an, ulama, dan sufi dari khurasan, kepadanya telah saya perlakukan dengan kasih sayang. Mereka

semua datang mendoakan untuk kemenangan Sultan. Tentara anda ini adalah pendukung anda yang paling baik".

Setelah mengatakan ini, ia meletakkan senjata dan memberikan uang kepada bala tentara. Sultan membawa membagikan uang kepada bala tentara. Sultan membawa kudanya ke air dan menyebrangi dengan selamat beserta angkatan daratnya. Quthlumush terbunuh. Ketika Sultan kembali ke Ray pada tahun 456 H/ 1063 M, Admid al-Mulk menyambutnya dengan kehormatan militer penuh. Atas kemenangannya ini Alp Aslan sangat berterima kasih kepada Nizam al-Mulk (Azra, 2002). Memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat dipenuhi secukupnya. Negara harus bisa menjamin ketersediaan pasokan yang cukup selama terjadi serangan hama atau gagal panen.

Nizam Al-Mulk menegaskan bahwa persamaan hak dalam kesempatan melakukan kegiatan ekonomi adalah persyaratan awal untuk mencapai persamaan sosial. Upaya ekonomi untuk mencapai tujuan ini mencakup manajemen zakat yang efektif, bangunan pondok dan rumah untuk rakyat miskin, dan tersedianya lapangan kerja bagi rakyat sesuai kapasitas dan imbalannya.[3]

Tentang pajak, Nizam Al-Mulk tidak menyangkal bahwa sistem pajak yang baik menjadi basis keuangan yang sehat. Walaupun demikian, ia percaya bahwa keuangan yang sehat bukanlah segala-galanya untuk menghindari kesulitan nasional. Terkait dengan persoalan pajak tanah, Nizam Al-Mulk merekomendasikan pembatalan dari pembebanan (charge) oleh tuan tanah terhadap petani yang tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dalam pandangannya, tuan tanah hanyalah sebatas pengumpul pajak, bahkan mereka tidak mempunyai hak untuk menetapkan jumlah pajak karena hal tersebut merupakan hak mutlak

[3] https://syukrillah.wordpress.com/2014/04/14/dinasti-saljuk-perkembangan-kemajuan-dan-kemunduran/.

pemerintah. Dalam hal ini, Nizam Al-Mulk ingin mengurangi kekuasaan dan hak mutlak para tuan tanah, dan menjadikan pemerintah menjadi lebih berkuasa (Lombard, 1974).

Madrasah Nidzamiyah yang didirikan oleh Nizam Al Mulk di Baghdad dan madrasah madrasah lainnya dibawah kekuasaan bani Saljuk sudah mempunyai sistem menejemen yang cukup baik. Hal tersebut di atas dilatarbelakangi adanya campur tangan Negara dalam masalah pendidikan pada waktu itu, sehingga masalah pendidikan Islam mulai terencana dengan baik dari mulai tujuan, kurikulum, perekrutan tenaga pendidikan sampai pada pendanaan dan sarana prasarana. Seperti yang diungkapkan Abd.Al Madjid al-Futuh' madrasah Nidzamiyyah merupakan lembaga pendidikan resmi pemerintah terlibat dalam menetapkan tujuan-tujuannya, menggariskan kurikulum, memilih guru dan memeberi dana yang teratur kepada madrasah. Yang menarik dari inovasi pendidikan Nizam Al-Mulk adalah dalam menangani menejemen keuangan madrasah yaitu dengan mengoptimalkan dana wakaf untuk pembiayaan pendidikan. Hal ini dijadikan alternative solusi untuk menciptakan pendidikan massal yang murah bagi rakyat dengan fasilitas yang cukup memadai.

Dengan adanya dana yang memadai, para syaikh (kalau sekarang professor) dan mudarris dapat digaji secara professional atas tugas-tugas pengajaran yang dilakukannya.

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan beberapa indikasi kemakmuran, produktivitas dan efisiensi dinasti saljuk tekanan pada pemerintah Nizam al-Mulk yaitu; *pertama,* menegaskan bahwa persamaan hak dalam kesempatan melakukan kegiatan ekonomi adalah persyaratan awal untuk mencapai persamaan sosial. Upaya ekonomi untuk mencapai tujuan ini mencakup manajemen zakat yang efektif, bangunan pondok dan rumah untuk rakyat miskin,

dan tersedianya lapangan kerja bagi rakyat sesuai kapasitas dan imbalannya. *Kedua,* Dinasti Saljuk pada pemenerintahan Nizam-Al-Mulk merekomendasikan pembatalan dari pembebanan (charge) oleh tuan tanah terhadap petani yang tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak, *ketiga,* Nizam Al-Mulk adalah dalam menangani menejemen keuangan madrasah yaitu dengan mengoptimalkan dana wakaf untuk pembiayaan pendidikan. Hal ini dijadikan alternative solusi untuk menciptakan pendidikan masal yang murah bagi rakyat dengan fasilitas yang cukup memadai.

Sesudah era Malik Syah (465-485/1072-1092 M), Bani Saljuq mengalami kemunduran sebelum kekuasaan mereka di Baghdad pudar sama sekali pada tahun 552/1157. Setelah kematian Malik Syah, sejumlah perang sipil antara putra-putrinya, ditambah lagi dengan berbagai kerusuhan di berbagai wilayah telah melemahkan otoritas Saljuk dan mengakibatkan hancurnya pemerintahan. Setelah Sultan Malik Syah dan Perdana Menteri Nizam al-Mulk wafat, Saljuk besar mulai mengalami masa kemunduran di bidang politik. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga timbul. Setiap propinsi berusaha melepaskan diri dari pusat pemerintah. Konflik-konflik antar anggota keluarga melemahkan dinasti Saljuk itu sendiri, seperti Syahat Khawarizm, Ghuz, dan Al-Ghuriyah. Pada sisi lain, sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah juga kembali, terutama untuk negeri Irak. Kekuasaan dinasti Saljuk diIrak berakhir di tangan Khawarizm Syah pada tahun 590 H/1199 M (Yatim, 2008). Negara-negara yang terpisah itu mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya di berbagai wilayah kekaisaran yang sangat luas, sementara penguasa utamanya, Dinasti Saljuk agung dari Persia, mempertahankan kekuasaan formalnya sampai tahun 1175. Salah satu pecahan utama dari rumpun ini adalah negara Irak Persia (1117-1194). Sementara Dinasti Saljuk Romawi di Iconium digantikan setelah 1300 oleh Turki Utsmani. Kekuasaan bani Saljuq di Asia kecil di beberapa tempat masih ada yang berlangsung sampai abad ke-

14 (di Asia Kecil dan Kirman) bahkan abad ke-15.

Dengan demikian kekuataan dinasti itu tidak ada lagi, maka sewaktu bangsa Mongol menyerang Baghdad, mereka tidak dapat lagi mempertahankan kota itu. Hingga pada tahun 656 H jatuhlah Baghdad ke tangan Hulagu Khan pemimpin pasukan bangsa Mongol.

G. Daftar Rujukan

Al Khudhari, Muhammad Bek. *Muhadharat al-Tarikh al- Umam al Islamiyah*. Kairo: Al Maktabah Al-Kubra, 1970.

Ali, K. *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,Cet I, 2010.

Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. London: Macmillan, 1970.

https://syukrillah.wordpress.com/2014/04/14/dinasti-saljuk-perkembangan-kemajuan-dan-kemunduran/.

Ibnu Jauzi, Imam Abul Faraj Abdurrahman. *Sirah Wamanaaqib Umar bin Abdul Aziz Khalifah,* Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1984 M.

Karim, M. Abdul. *Bulan Sabit di Gurun Gobi: Sejarah Dinasti Mongol-Islam di Asia Tengah*. Yogyakarta: SUKA Press,Cet I, 2014.

_____. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, Cet.VI, 2015.

Lombard M. *The Golden Age of Islam.* Translated by Joan Spencer (North-Holland Publishing Company. Amsterdam. 1974).

Mughni, Syafiq A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid 1*. Jakarta: UI Press, 1985.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

POLITIK EKONOMI MASA DINASTI ISLAM DI AFRIKA

Moh. Nur Hidayat

A. Pendahuluan

Nama Afrika berasal dari bahasa latin, yaitu Africa terra yang berarti tanah Afri. Afrika merupakan benua terluas nomor dua setelah Asia, yaitu 20 % dari seluruh total daratan bumi dan penduduknya mencapai sepertujuh dari seluruh populasi dunia.[1] Sebutan bagi penduduk Afrika biasa dikenal dengan nama Berber dan Negro. Bangsa Negro sangat majemuk, bahkan mendominsi dari jumlah penduduk di benua Afrika, aktifitas keagamaannya sangat beragam yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Afrika adalah tempat bermacam-macam bangsa dan kebudayaan yang banyak sekali. Afrika adalah negeri dengan pertentangan yang sangat mencolok dan keindahan yang liar. Di sana juga terdapat banyak masalah termasuk perang, kelaparan, kemiskinan, dan masalah penyakit. Di Afrika terdapat gurun Sa-

[1] Luas Afrika mencapai 30.224.050 km^2, dan di benua inilah pertama kalinya tempat yang didiami nenek moyang manusia dan awal populasi manusia dimulai hingga berkembang ke semua benua di dunia.

hara yang merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Gurun itu terbentang mulai dari samudra Atlantik di barat hingga laut merah di sebelah timur. Sahara meliputi seperempat dari seluruh benua itu.

Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad ketika kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyi dan mendapatkan sambutan baik dari raja Najjasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab dengan mengutus Amr ibn 'Ash. Pasukan muslim dibawah panglima Amr ibn 'Ash berhasil memasuki Mesir dengan mengelahkan tentara Bizantium yaitu pada tahun 639-644 M, dan mendirikan kota Fusthat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika (Karim, 2015). Pasukan dari Uqbah ini telah memulihkan keadaan di daerah itu menjadi aman dan terkendali sepenuhnya. Namun setelah semuanya berjalan lancar tanpa disangka Uqbah dipecat dan digantikan oleh Abdul Muhajir maka Uqbah pun menghadap kepada Muawiyah dan memprotes pemberhentian dirinya karena ia merasa bahwa ia telah memberikan kemajuan pada kaum Muslim saat itu. Saat Abdul Muhajir berkuasa di Ifriqiyah ia malah menghancurkan Kairawan yang dibentuk oleh Uqbah berikut dengan masjid yang tersohornya pula sealah itu kemudian Ia membangunnya kembali. Dia melakukan hal ini adalah bertujuan agar sejarah mencatat namanya sebagai pendiri kota dan masjid Kairawan. Di Afrika sendiri ada beberapa dinasti kecil yang memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan Islam kala itu.

Awal perkembangan Islam di Afrika dapat dilacak sejak abad ke-7 M ketika Nabi Muhammad SAW menyarankan sejumlah sahabat untuk menghindari penindasan kaum kafir Mekkah dengan hijrah menyebrangi Laut Merah ke Kerajaan Kristen Abisinia (saat ini Ethiopia) yang diperintah oleh al-Najashi. Dalam tradisi Islam, peristiwa ini disebut hijrah pertama. Wilayah Afrika merupakan wilayah pertama yang digunakan oleh kaum Muslimin sebagai

tempat berlindung dan wilayah Afrika juga merupakan wilayah pertama penyebaran Islam di luar semenanjung Arab. Pada awal perkembangannya daerah Afrika Utara menjadi tempat dinasti Idrisiyah yang beraliran syiah di Maroko, Dinasti Aghlabiyah yang beraliran Sunni di Tunisia, Dinasti Rustamiyah yang beraliran Khawarij di Aljazair, Dinasti Ibn Toulun di Mesir, dan lainnya. Pembahasan dalam kajian ini lebih diarahkan kepada peran ketiga dinasti yang berbeda aliran yaitu Syiah, Khawarij, dan Sunni dalam Islamisasi di Afrika Utara. Realitas wilayah Afrika merupakan daerah yang berada dibawah kekuasaan kaisar Romawi. Dalam sejarah dunia, Kaisar Romawi dikenal sebagai penguasa kejam, lalim, dan berdarah penjajah. Namun pada kenyataannya Islam dapat berkembang di Afrika dan populasi penduduk muslimnya mencapai 75 juta dari 300 juta jumlah populasi muslim di dunia masa itu.

B. Peradaban Islam di Afrika Utara

Afrika utara adalah bagian dari daerah di benua Afrika dimana penduduknya berbeda dengan daerah lainnya.ý Afrikaý Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat Berber yang bersifat kesukuan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan patriarkhi. Penduduk Afrika Utara sebagian bedar termasuk ras kulit putih dan merupakan penutur Bahasa Afro-Asia. Sebelum Islam masuk ke daerah Afrika Utara, daerah ini merupaka wilayah kekuasaan Romawi.ý

Secara geografis, Afrika Utara merupakan wilayah bergurun. Dalam terminologi Arab, daerah ifriqiyah merupakan bagian dari Afrika Utara yaitu wilayah Libya, Tunisia, Al-Jazair, dan Maroko. Seluruh wilayah tersebut oleh orang-orang Arab dikenal dengan sebutan Al-Maghribi (Mahmudunnasir, 1994).

Afrika Utara merupakan pintu gerbang penyebaran Islam ke Eropa. Dari Afrika Utara lalu ke Spanyol yang termasuk benua Eropa. Penyebaran Islam ke Afrika Utara sudah dimulai sejak

khulafaurrasyidin, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Pada tahun 640 M Panglima Amr bin Ash berhasil memasuki Mesir. Kemudian pada khalifah Usthman bin Affan penyebaran Islam meluas ke Barqah dan Tripoli. Tapi penaklukan atas kedua kota tersebut tidak berlangsung lama karena Gubernur Romawi berhasil merebut ke dua itu kembali. Karena Gubernur Romawi ini kejam dan memeras rakyat sehingga rakyat (penduduk) meminta bantuan kepada orang – orang Islam. Permintaan itu disanggupi oleh khlalifah Utsman bin Affan. Namun bantuan itu baru bisa terealisasi pada pemerintahan Bani Umayyah yaitu pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan mempercayakan tugas itu pada panglimanya yang bernama Uqbah ibn Nafi al Fihri. Dan Uqbah ibn Nafi al Fihri berhasil menekan suku barbar dan menghalau pasukan Romawi dari daerah tersebut. Mulai sejak itu Afrika Utara dikuasia oleh Bani Umayyah lalu Bani Abbas, Rustamiyah, Idrisiyah, Aglabiyah, Ziridiyah, Hammadiyah kemudian Murabithun dan Muwahhidun.

Islam masuk wilayah Afrika Utara pada saat daerah itu berada dibawah kekuasaan kekaisaran Romawi, sebuah imperium yang amat luas yang melingkupi beberapa Negara dan berjenis – jenis bangsa manusia. Kekhalifahan Umar bin Khatab, pada tahun 640 M, 'Amr bin Al Ash berhasil memasuki Mesir, setelah sebelumnya mendapat ijin bersyarat dari khalifah Umar untuk menaklukan daerah itu

Masuknya Islam ke Afrika Utara merupakan moment penting bagi masa depan Islam secara keseluruhan di benua Afrika dan daratan eropa yang selama berabad-abad berada dibawah kekuasaan Kristen. Dalam peradaban Islam, Afrika Utara tidak dapat dilupakan begitu saja. Hal ini dikarenakan Afrika Utara merupakan pintu masuk dari sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Bukti kemajuan di Afrikaý Utara dalam peradaban Islam adalah dalam bidang arsitektur, seni, dekorasi dan intelektual. Diantara tokoh yang

terkenal dalam bidang intelektual adalah Ibn Batuta (Biologi), Ibnu Khaldun (sosiologi) dan Ibn Zuhr (Muhsin, 2002).

Afrika utara yang meliputi lembah Sungai Nil bagian bawah yang disebut al-Misr (Mesir Modern); wilayah Libya, Cyrenacia, Tripolitania dan Tunisia yang seluruh wilayahnya dikenal orang Arab sebagai wilayah Afrika serta wilayah Aljazair dan Maroko dengan sebutan al-Maghribi. Sebelum Islam datang wilayah Afrika Utara berada dalam kekuasaan bangsa Romawi, sebuah imperium yang sangat besar yang melingkupi beberapa Negara dan berjenis-jenis bangsa manusia. Adapun yang dimaksud dengan Andalusia adalah sebutan bagi semenannjung Iberia periode Islam. Sebutan itu berasal dari Vandalusia artinya negeri bangsa Vandal sebelum mereka diusir oleh bangsa Gothia Barat pada abad V M.

Maroko adalah negeri yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara. Yang tak kalah pentingnya, negeri berjuluk 'Tanah Tuhan' itu merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Eropa. Dari Maroko inilah Panglima tentara Muslim, Tariq bin Ziyad menaklukan Andalusia dan mengibarkan bendera Islam di daratan Eropa.

C. Dinasti-dinasti Islam di Afrika Utara

1. Dinasti Rustamiyah (761-909 M)

Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman ibn Rustam. Ia merupakan pemimpin suku Berber dari jabal Nefusa yang menganut faham Kharijiyah sekte Ibadiyah, berhasil menduduki Tripoli dan Qayrawan. Selanjutnya pada tahun 761 M, ia pergi ke Aljazair barat dan mendirikan basis Kharijiyah yang kemudian dinamakan dinasti Rustamiyah yang beribu kota di Tahert (Al-Jazair). Dinasti ini bertahan sampai tahun 909 M (Muhisn, 2002). Rustamiyah memiliki nilai penting bagi sejarah Islam Afrika Utara yang tidak sebanding dengan masa dan lingkup kekuasaan politis mereka. Mayoritas Berber Afrika Utara menganut sekte Kharijiyah yang radikal, equali-

tarian, dan religio-politis, yang merupakan bentuk protes terhadap dominasi tuan-tuan mereka yang Arab dan ortodok. Sementara di Timur, Kharijiyah merupakan sekte minoritas yang ekstrim dan kasar. Sedangkan di Barat, Kharijiyah merupakan sebuah gerakan massa yang lebih moderat. Dinasti ini bersekutu dengan Bani Umayah di Spanyol karena terjepit oleh Idrisiyah yang Syi'ah di barat dan Aghlabiyah yang Sunni di timur. Namun dengan bangkitnya Fathimiyah yang Syi'ah di Maroko berakibat fatal bagi Rustamiyah (777-909 M) dan berakhirlah dinasti ini sebagaimana bagi dinasti-dinasti lokal lainnya (Bosworth, 1980). Walaupun secara politis Rustamiyah di bawah kekuasaan Fatimiyah, tetapi ajaran Khawarij masih berkembang dan berpengaruh di beberapa wilayah Maghrib seperti Oase Mazb Aljazair, Pulau Jerba di Tunisia, dan Jabal Nefusa hingga kini. Di bawah Rustamiyah, Tahart mengalami kemakmuran material yang luar biasa, menjadi terminal di Utara dari salah satu rute kafilah trans-Sahara, juga merupakan pusat ilmu pengetahuan agama yang tinggi khususnya aliran Khawarij untuk seluruh Afrika Utara dan bahkan di luar wilayah tersebut, seperti Oman, Zanzibar, dan Afrika Timur.

Pemimpin-pemimpin zaman dinasti Rustamiyah:

1. Abdurrahman ibn rustam (160 H/777 M)
2. Abdul wahhab/warits ibn Abdurrahman (168 H/784 M).
3. Abu sa'id aflah (208 H/823 M)
4. Abu bakr ibn aflah (258 H/823 M)
5. Abu hatim yusuf (281 H/894 M)
6. Yaqub ibn aflah (284 H/897 M)
7. Abu hatim yusuf (288 H/901 M)
8. Yaqzan ibn Muhammad (907-909 M)

2. Dinasti Idrisiah (788-974 M)

Di wilayah Maroko, Idris ibn Abdullah setelah gagal melakukan pemberontakan terhadap Abbasiah, ia melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisiah (788-974 M) yang beribu kota di Fas.

Dinasti ini yang pada akhirnya ditaklukkan oleh panglima Ghalib Billah dari dinasti Umayyah di Andalusia. Idrisyah merupakan dinasti Syi'ah pertama dalam sejarah Islam. Idrisiyyah adalah dinasti pertama yang berupaya memasukkan doktrin Syi'ah, meskipun dalam bentuk yang sangat lunak, ke Maghrib. Sebelumnya, wilayah itu didominasi oleh kaum Khawarij. Periode Idrisiyah sangat penting bagi penyebaran kultur Islam di kalangan masyarakat Berber di dalam negeri. Namun selama pemerintahan Muhammad al-Muntashir, berbagai wilayah kekuasaan Idrisiyah terpecah secara politis sehingga menjadi mangsa serangan musuh-musuh mereka yaitu Berber, terutama abad ke sepuluh dengan munculnya dinasti Fathimiyah.

Pemimpin-pemimpin zaman dinasti Idrisiah:

1. Muhammad in idris (172 H/314 M)
2. Iddris II (177 H/793 M)
3. Muhammad al-muntashir (213 H/828 M)
4. 'ali I (221 H/836 M)
5. Yahya I (234 H/849 M)
6. Al-hasan al-hajjam (310-314 H/922-926 M)

3. Dinasti Aghlabiyah di Tunisia (800-909 M)

Ketika Idrisiyah-Syiah meluaskan daerah kekuasaannya di bagian barat Afrika Utara, Aghlabiyah-Sunni juga melakukan hal yang sama di timur. Di luar wilayah yang dinamakan Ifriqiyah (Afrika Kecil, terutama Tunisia), sempalan dari ¯Afrika Latin, khalifah Harun al-Rasyid mengutus Ibrahim ibn al-Aghlab sebagai penguasa Ifriqiyah. Mereka berkuasa secara independen dengan penguasa yang bergelar Amir dan mempengaruhi kawasan Laut Tengah. Pada tahun 800 M Ibrahim diberi provinsi Ifriqiyah (Tunisia Modern) oleh Harun al-Rasyid sebagai imbalan atas pajak tahunan yang besarnya 40.000 dinar dan meliputi hak-hak otonom yang besar (Bosworth, 1980).

Banyak penerus Ibrahim terbukti sama bersemangatnya dengan Ibrahim sendiri. Dinasti itu menjadi salah satu titik penting dalam sejarah konflik berkepanjangan anrara Asia dan Eropa. Dengan armadanya yang lengkap, mereka memorak-porandakan kawasan pesisir Italia, Prancis, Korsika, dan Sardinia. Salah satu dari mereka Ziyadat Allah I (817-838), pada 827 mengirim ekspedisi ke Sisilia Bizantium, yang didahului oleh operasi para bajak laut. Ekspedisi ini, juga ekspedisi-ekspedisi berikutnya, berhasil menaklukkan pulau itu pada 902. Sisilia, sebagaimana akan kita lihat, menjadi basis menguntungkan bagi operasi-operasi melawan wilayah daratan, terutama Italia. Selain Sisilia, Malta dan Sardinia juga berhasil direbut, terutama oleh para bajak laut yang operasinya meluas jauh sampai ke Roma. Pada saat yang sama, para bajak laut muslim dari Kreta terus-menerus menyerbu pulau-pulau kecil di Laut Aegea, dn pada pertengahan abad kesepuluh, mereka menyerang kawasan pesisir Yunani. Tiga prasasti Kufik yang ditemukan di Arena mengungkapkan adanya pemukiman Arab di sana yang diduga bertahan sampai awal abad ke sepuluh. Masjid besar Kaiwaran, yang masih berdiri sebagai saingan bagi masjid-masjid termasyhur, mulai dibangun dibawah kekuasaan Ziyadat Allah dan disempurnakan oleh Ibrahim II (874-902). Tempat berdirinya masjid itu juga merupakan lokasi beridirinya bangunan suci Uqbah, pendiri Kaiwaran. Masjid Uqbah oleh para penerusnya telah dihiasi dengan pilar-pilar marmer yang didapat dari puing-puing Kartago, yang kemudian dimanfaatkan lagi oleh penguasa Aghlabiyah. Menara persegi yang melengkapi bangunan masjid ini, merupakan peninggalan bangsa Umayyah terdahulu, dan termasuk yang paling lama bertahan di Afrika, memperkenalkan bentuk menara ala Suriah kepada masyarakat Afrika barat-laut. Bentuk model menara itu bahkan tidak pernah tergantikan oleh bentuk-bentuk lain yang lebih ramping dan tinggi seperti yang ada dalam peninggalan Persia dan bangungan ala Mesir. Dalam gaya Suriah,

bata digunakan sebagaimana gaya-gaya bangunan lain menggunakan batu. Berkat masjid ini, Qayrawan, di mata kalangan muslim Barat, menjadi kota suci keempat, setelah Mekah, Madinah, dan Yerussalem salah satu dari empat gerbang surga. Dibawah kekusaan Aghlabiyah inilah terjadi perubahan penting di tengah kawasan Afrika kecil. Dari kawasan yang tadinya dihuni oleh para penganut Kristen yang berbicara dengan bahasa Latin menjadi kawasan para penganut Islam yang berbicara dengan bahasa Arab. Bagaikan rumah judi, Afrika Utara yang menopang St. Agustinus dengan lingkungan budayanya- telah runtuh dan tidak pernah bangkit lagi. Perubahan ini mungkin lebih sempurna dibandingkan perubahan yang terjadi di kawasan manapun, karena kawasan ini tidak terlalu disentuh oleh tentara muslim. Pertikaian yang belakangan muncul dipicu oleh suku-suku Berber yang belum menyerah. Pertikaian ini berbentuk sektarianisme muslim yang terpecah belah dan sarat dengan bidah.

Dinasti Aghlabiyah (800-909 M) berpusat di Sijilmasa, bertujuan untuk membendung kekuasaan-kekuasaan luar dengan Abbasiah terutama serangan Dinasti Rustamiyah (Khawarij) dan Idrisiyah. Kedua dinasti ini sama-sama berusaha ekspansi ke al-Maghrib untuk melemahkan kekuasaan Abbasiah di Afrika dan sekitarnya. Periode ini membawa Afrika Utara dan kawasan pesisir Laut Tengah dalam banyak kemajuan. Dinasti ini dilenyapkan oleh Dinasti Fatimiah ketika menguasai ibu kota Sijilmasa, dengan mengalahkan penguasa terakhir Ziadatullah al-Aghlabi III pada 909 M (Karim, 2015).

Pemimpin-pemimpin zaman dinasti Aghlabiyah:

1. Ibrahim I ibn al-Aghlab (800-812 M)
2. Abdullah I (8l2-817 M)
3. Ziyadatullah (817-838 M)
4. Abu 'Iqal al-Aghlab (838-841 M)
5. Muhammad I(841-856 M)
6. Ahmad (856-863 M)

7. Ziyadatullah (863- M)
8. Abu Ghasaniq Muhammad II (863-875 M)
9. Ibrahim II (875-902 M)
10. Abdullah II (902-903 M)
11. Ziyadatullah III (903-909 M)

4. Dinasti Tuluniyah (869-905 M)

Dinasti Tuluniyah berpusat di mesir dan suriah pada tahun (254-292 H/869-905M). Thuluniyah dinisbatkan kepada nama pemimpinnya, yakni Ahmad ibn Thulun. Kiprah Ahmad ibn Thulun pada awalnya adalah sebagai wakil gubernur abbasiah di mesir, kemudian naik pangkat menjadi gubernur, yang mana daerah kekuasaannya sapai ke palesina dan suriah. Ahmad ibn Thulun meninggal pada tahun 884 M, kepemimpinan diwariskan kepada anaknya, Khumarawaih. Namun, pada tahun 904-905 M dinasti abbasiyah menyerang didinasti Thulun karena kepemimpinan khumarawaih yang tidak baik. Di antara kemajuan pada masa dynast ini adalah dibangunnya sebuah armada laut di suriah. Di fusthat dibangun markas militer al-qatha'I, dan juga ada membangun sebuah masjid di mesir.

Pemimpin-pemimpin zaman dinasti Thuluniyah:

1. Ahmad bin tulun (868-884 M)
2. Khumarawiyah (884-895 M)
3. Abu asyakir (895-896 M)
4. Harun bin khumarawiyah (896-904 M)
5. Syaiban bin ahmad (904-905 M).

5. Dinasti Ikhsyidiyah

Berdiri di mesir dan suriah. Berdirinya dinasti ini di usung oleh seorang tokoh yang bernama Muhammad ibn Tughj al-ikhsyid. Dia adalah seorang salah seorang turunan turki yang mengabdi di abbasiyah. Pada tahun 323 H/935 M dia diangkat menjadi guberbur mesir, dan mendapat gelar ikhsyid dari Khaifah ar-radhi. Ia diangkat

menjadi gubernur adalah sebagai hadiah untuknya dati abbasiyah yang telah berhasil mempertahankan daerah sengai nil dari gangguan fatimiyah yang berpusat di afrika utara. Namun pada akhirnya Ikhsyidiyah menyerah kalah terhadap Fatimiyah yang telah menguat di Afrika Utara, dibawah panglimanya, Jauhar as-Siqili.

Pemimpin-pemimpin zaman dinasti Ikhsyidiyah:

1. Muhammad ibn tughj al-ikhsyid (323 H/935 M)
2. Abu nujum ibn ikhsyid (334 H/946 M)
3. Al-kafur (355 H/966 M)
4. Ahmad ibn ali (357-358 H/968-969 M)

6. Dinasti Fatimiah

Berdirinya Dinasti ini bermula menjelang abad ke-X, ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang luas tidak terkordinir lagi. Kondisi seperti inilah yang telah membuka peluang bagi munculnya Dinasti-Dinasti kecil di daerah-daerah, terutama di daerah yang Gubernur dan sultannya memiliki tentara sendiri. Kondisi ini telah menyulut pemberontakan-pemberontakan dari kelompok-kelompok yang selama ini merasa tertindas serta memberi kesempatan bagi kelompok Syi'ah, Khawarij, dan kaum Mawali untuk melakukan kegiatan politik. Dinasti Fathimiyah bukan hanya sebuah wilayah gubernuran yang independen, melainkan juga merupakan sebuah rezim revolusioner yang mengklaim otoritas universal. Mereka mendeklarasikan adanya konsepimamah yakni para pemimpin dari keturunan Ali yang mengharuskan sebuah redefinisi mengenai pergantian sejarah Imam atau mengenai siklus eskatologis sejarah. Kekhalifahan ini lahir di antara dua kekuatan besar yaitu Abbasiah di Baghdad dan Umayyah di Cordova. Dinasti Fathimiyah berkuasa sekitar tahun 909-1171 M atau kurang lebih 3 abad lamanya. Dinasti ini mengaku keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah az-Zahro. Gerakan ini

berhasil merealisir pertama kali pembentukan pemerintahan Syi'i yang eksklusif. Keberhasilan menancapkan doktrin Ismaili, dalam perkembangannya mampu memberi perlindungan imam-imam mereka di Salamiyah, Syria dan telah memudahkan pengorganisasian dakwah Fatimiyah. Meskipun dakwah Fatimiyah ini dimulai sejak dini, namun baru pada masa Abu Ubaidillah Husein, generasi keempat setelah Ismaili, baru mulai berkembang pesat. Ubaidillah merupakan khalifah pertama, ia datang dari Syria ke Afrika Utara menisbahkan nasabnya hingga Fatimah binti Rasulullah, oleh karena dinasti ini dinamakan dinasti Fatimiyah. Dinasti ini semula di Afrika Utara, kemudian di Mesir dan Syria, dimana propaganda Syi'ah telah berkembang dengan pesat. Ia memimpin dakwahnya dengan memenangkan dukungan luas dari daerah-daerah yang kurang diperhatikan oleh Khalifah Abbasiyah. Lewat para da'i, akhirnya berhasil menjadikan kaum Berber sebagai pendukung kepemimpinan Ubaidillah al-Mahdi. Selanjutnya, atas dukungan besar inilah, ia menumbangkan gubernur-gubernur Aghlabiyah di Ifriqiyah dan Rustamiyah di Tahart. Keberhasilan pemerintahan Fatimiyah ini ditandai dengan pindahnya pusat pemerintahan ke Kairo dengan ibu kota baru di Mesir yaitu al-Qohirah serta Masjid al-Azhar sebagai pusat pendidikan para da'i dan Khalifah al Muizz pindah ke ibu kota baru tersebut. Hampir seluruh daerah Afrika Utara bagian Barat dapat dikuasai Fatimi, terutama setelah menaklukan wilayah Maghrib. Dinasti Fatimiyah ini akhirnya makin berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, karena ditopang dengan kekuasaan yang luas dan mampu membangkitkan berbagai macam aksi yang bersifat wacanis (keilmuan), perdagangan, keagamaan, walaupun peralihan kekuasaan ke wilayah timur, berlahan-lahan melenyapkan kekuasaan mereka dibagian Barat.

Pemimpin-pemimpin zaman dinasti Fatimah:

1. Khalifah Ubaidilah Al-Mahdi (909-934), pendiri Dinasti Fatimiyah.

2. Abu al-Qasim Muhammad al-Qa'im bi Amr Allah bin al-Mahdi Ubaidillah (934-946).
3. Isma'il al-Mansur bi-llah (946-952).
4. Abu Tamim Ma'add al-Mu'iz li-Din Allah (952 M – 975) M. Mesir ditaklukkansemasa pemerintahannya.
7. Abu Mansur Nizar al-'Aziz bi-llah (975 M – 996 M).
8. Abu 'Ali al-Mansur al-Hakim bi-Amr Allah (996M – 1021 M).
9. Abu'l-Hasan 'Ali al-Zahir li-I'zaz Din Allah (1021 M – 1036 M).
10. Abu Tamim Ma'add al-Mustanhir bi-llah (1036 M – 1094 M).
11. Al-Musta'li bi-Allah (1094 M-1101 M).
12. Al-Amir bi Ahkam Allah (1101 M – 1130 M)
13. Abd al-Majid (1130 M – 1149 M).
14. Al-Wafir (1149 M – 1154 M).
15. Al-Fa'iz (1154 M – 1160 M).
16. Al-'Adid (1160 M – 1171 M).

D. Kesimpulan

Terjadinya perebutan kekuasaan diantara sesama muslim bukan lantas Islam dianggap sebagai agama yang ditegakkan dan berkembang dengan darah atau pedang, karena anggapan tersebut merupakan anggapan yang tidak obyektif. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh warisan atas kondisi sosio-politik yang berkembang pada saat itu, karena Afrika Utara pernah dibawah kekuasaan Romawi, dan juga pengaruh emperialisme penjajah dan pertikaian antar etnis tidak dapat dikesampingkan sebagai penyebab adanya anggapan tersebut.

Islamisasi di Afrika diawali jauh sebelumnya yaitu pada masa Nabi Muhammad dengan beberapa sahabatnya ketika hijrah ke Habsyi. Perjalanan panjang Islamisasi ke Afrika melalui jalur Afrika Utara yang dilakukan oleh kaum muslim terhadap penduduk setempat. Setelah itu barulah Islamisasi di di Afrika sub-Sahara dilakukan dengan tokoh Uqbah ibn Nafi'. Islamisasi di Afrika sub-

Sahara menggunakan 3 jalur, yaitu melalui ekspansi militer, melalui jalur dakwah, dan melalui jalur perdagangan. Dengan demikian bisa dikatakan jika Islamisasi di Afrika sub-Sahara mirip dengan Islamisasi di Indonesia, yaitu melalui jalur dakwah dan jalur perdagangan.

Keamajuan Peradapan Islam di Afrika Utara:

1. Berkembangnya Qairawan yang dinbangun oleh Uqba ibn Nafi' yand tidak hanya menjadi kota militer semata, tetapi menjadi pusat ilmu dan peradapan yang cemerlang dalam sejarah Islam.
2. Kebijakkan Islami yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan pergaulan.
3. Arsitek Maqhribi yang indah dengan aresemen timur yang kuat dalam bangunan masjid Qairawan dan benteng Raqada serta kediaman para penguasa dinasti Aghlabiah.
4. Daerah Tahart menjadi kemajuan di bidang ekonomi yang menjadi terminal salah satu rute khafilah trans-sahara, sehingga dinamakan "Irak kecil" disamping juga menjadi pusat kesarjanaan.

E. Daftar Rujukan

Boswort, C.E. 1980. *Dinasti-Dinasti Islam*, Terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan.

Hitti, Philip K. 2012. History *of The Arabs, From the Earlest Time for the Present*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Cet. 1. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Imam Muhsin, 2002. Peradaban Islam Pra-Modern di Afrika Utara" dalam Siti Maryam dkk (edit), *Sejarah Peradaban Islam, Dari Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI.

Karim, M. Abdul. 2014. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Bagaskara.

Khoiriyah. 2012. *Reorientasi Wawasan Islam dari Arab sebelum Islam hingga Dinasti-Dinasti Islam*, Yogyakarta: Teras.

Mahmudunnasir, Syed. 1994. *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maryam, Siti, dkk. 2004. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, cet. Kedua. Yogyakarta: LESFI.

Mufrodi, Ali. 1997. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Muhsin, Imam. 2002. "Peradaban Islam Pra-Modern di Afrika Utara" dalam Siti Maryam dkk (edit), *Sejarah Peradaban Islam, Dari Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI.

Sunanto, Musyrifah. 2003. *Sejarah Islam Klasik, Perkembangan Ilmu Pengetahuan*, Bogor : Kencana.

Syed Mahmudunnasir. 1994. *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya, terj. Adang Affandi,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wildan, Muhammad. 2002. "Peradaban Islam di Afrika sub-Sahara" dalam Siti Maryam dkk (edit), *Sejarah Peradaban Islam*, Dari Klasik Hingga Modern, Yogyakarta: LESFI.

http://novanardy.blogspot.com/2010/01/islamisasi-di-afrika-sub-sahara.html

http://id.pandapedia.com.

7

POLITIK PERDAGANGAN ISLAM DI ASIA-AFRIKA-EROPA ABAD IX-X M

Ratih Purbowisanti

A. Pendahuluan

Masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan istilah *"The Golden Age"*. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak Peradaban, baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan kekuasaan. Peran penting ekonomi sangat di sadari oleh para khalifah Dinasti Abbasiyah dalam menentukan maju mundurnya suatu negara. Oleh karena ini, pengembangan sektor ekonomi menjadi perhatian khusus pada periode pertama Dinasti Abbasiyah. Upaya kearah kemajuan ini sudah di mulai sejak masa pemerintahan al-Mansur yaitu dengan di pindahkannya pusat pemerintahan ke Baghdad tiga tahun setelah dia di lantik menjadi khalifah (Hitti, 2008).

Baghdad merupakan sebuah kota yang terletak didaerah yang sangat strategis bagi perniagaan dan perdagangan. Sungai Tigris bisa dilayari sampai kota ini. Begitu juga terdapat jalur pelayaran ke sungai Eufrat yang cukup dekat. Sehingga barang-barang dagangan dan perniagaan dapat diangkut menghilir sungai Eufrat dan Tigris dengan menggunakan perahu-perahu (Hitti, 2008). Kota

Baghdad sebagai kota transit yang menghubungkan lalu lintas perdagangan antara Barat dan Timur (Muhammad, 1981). Akhirnya Baghdad menjadi daerah sangat ramai, karena disamping sebagai ibu kota kerajaan juga sebagai kota pusat perdagangan pada masa itu. Kapal-kapal dagang Arab tidak hanya menjangkau daerah-daerah di sekitar kawasan Abbasiyah, tetapi juga menjangkau sampai ke Sailan, Bombay, Aceh bahkan ke kota pelabuhan Indonesia dan Tiongkok (Hasyimi, 1979). Hal ini menandakan bahwa kemajuan sektor perdagangan pada masa pemerintahan Abbasiyah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Penyebaran agama Islam bukanlah akibat perlakuan atau ekspansi militer kewilayahan-kewilayahan tertentu, melainkan melalui kegiatan secara damai oleh pihak-pihak saudagar muslim dan oleh misi-misi golongan sampai di sisi lain (Watt, 1995). Orang tertarik memeluk agama Islam berkat suri tauladan yang mereka perlihatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sumur-sumur dan terminal tempat peristirahatan para kapilah dagang yang Menempuh rute daratan, kian diperbanyak jumlahnya, demikian juga menara-menara pengontrol. Bagi yang menggunakan rute laut penguasa Abbasiyah menambah jumlah armada lautnya. Kecuali untuk pengamanan pelabuhan-pelabuhan dagang juga untuk mengawal dan mengamankan kapal-kapal yang mengarungi lautan dari gangguan para perampok. Perhatian ini sangat memberi pengaruh besar bagi perkembangan perniagaan muslim yang berskala lokal maupun Internasional.

B. Jalur Perdagangan Islam

1. Bahan Makanan

Pusat pemerintah Dinasti Abbasiyah yang berada di daerah yang sangat subur menjadikan bidang pertanian maju pesat. Daerah rendah di daerah Tigris-Eufrat, yang merupakan daerah terkaya setelah Mesir, dan dipandang sebagai surga Aden, mendapat

perhatian khusus dari pemerintah pusat. Mereka membuka kembali saluran irigasi yang lama dari sungai Eufrat dan membuat saluran irigasi baru, sehingga membentuk kanal-kanal besar[1] yang sangat mendukung pertumbuhan pertanian.

Tanaman asli Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Daerah sangat subur di tepian sungai *Sawad* menumbuhkan sayuran dan beragam buah. Kacang, jeruk, terong, tebu, dan beragam bunga seperi mawar dan violet juga tumbuh subur. Sayur-mayur, tumbuhan polong dan beraneka ragam bahan makanan dari tumbuhan yang merambat serta rempah-rempah melimpah ruah terdapat di Mediterania, sementara di daerah pinggiran gurun, ditanami pohon kurma yang menjadi makanan pokok penduduk miskin saat itu (Lombard, 1975).

Gandum merupakan makanan pokok hampir seluruh kaum muslimin saat itu tumbuh di derah Mediterania dalam waktu yang sangat lama. Syiria megekspor gandum melalui tikungan di Euprates ke Mesopotamia yang berlayar menyusuri Sungai ke Baghdad dan kota lainnya Irak. Jagung dan jelai ditemukan di Maghhreb bagian tengah dan barat, di pantai Atlantik dan pada dataran tinggi Maroko. Jagung Afrika Utara ini diekspor dari Spanyol ke Sahara Barat dan Sudan. Kafilah Berber kemudian mengenalkan jagung ke Sudan pada abad kesepuluh dan kesebelas dengan menggunakan irigasi selama musim kemarau. Padi menyebar di sepanjang sungai Mediterania dari India dan Mesopotamia bagian bawah, dari Mesopotamia bagian bawah menyebar ke semua tempat penduduk muslim di Mediterania. Hal ini disebabkan kondisi yang cocok untuk

[1] Kanal besar pertama disebut Nahr Isa yang menghubungkan aliran Sungai Efrat di Anbar sebelah barat laut dengan Sungai Tigris di Baghdad. Kanal besar kedua adalah Nahr Sharsar yang bertemu dengan sungai Tigris di daerah Madain. Kanal besar ketiga adalah Nahr Al-Milk yang tersambung ke sungai Tigris di bawah Madain.

pertumbuhan beras yaitu daerah yang panas dan dirigasi yang lancar (Daud, 2011).

Di antara Samarkhand dan Bukhara terbentang lembah Sogdiana. Di situ tumbuh subur beragam sayuran dan buah. Kurma, apel, aprikot, persik, prem, lemon, jeruk, anggur, zaitun, almond, delima, terung, lobak, mentimun, mawar, dan kemangi. Semangka berasal dari Khawarizm. Pohon jeruk yang serumpunan dengan sitrun dan lemon berasal dari Melayu yang saat ini menyebar ke Asia Bara, daerah-daerah di sekitar Mediterania dan akhirnya orang arab di Spanyol membawanya ke Eropa. Kemudian tebu dan gula yang berasal dari Suriah diperkenalkan oleh tentara salib ke benua Eropa (Hitti, 2008).

Bunga juga termasuk tanaman yang dibudidayakan, bukan hanya di pekarangan rumah, tetapi juga dalam skala besar untuk diperjualbelikan. Pabrik pembuatan parfum atau sari mawar, air bunga lili, jeruk, violet, dan yang sejenisnya menjamur di Damaskus, Syaraz, Jur, dan kota-kota lainnya. Daerah Jur atau Firubazad di Faris terkenal dengan sari bunga mawar merah, air bunga mawar merah dari Jur dijual hingga ke Cina bagian di sebelah Timur dan maroko sebelah Barat. Faris membayar pajak dalam bentuk 30.000 botol sari mawar merah yang dikirim setiap tahun kepada Khalifah Baghdad. Sabur dan lembahnya menghasilkan 10 jenis parfum terkenal yang diperas dari bunga violet, lili air, narcissus, bunga palm, iris, lily putih, murtle, marjoram, lemon dan bunga jeruk. Diantara semuanya, parfum dari perasan bunga violet adalah yang paling populer di dunia Islam dan mawar merupakan bunga paling disukai di antara semua bunga (Hitti, 2008).

2. Hewan ternak

Perkembangbiakan hewan ternak menjadi hal yang sangat diperhatikan pada masa Dinasti Abbasiyah. Hewan ternak digunakan sebagai bahan makanan dalam bentuk daging, lemak,

mentega dan susu, sebagai bahan baku industri wol dan kulit dan digunakan sebagai sarana transportasi seperti kuda, unta dan keledai. Unta berasal dari dua daerah: Asia Tengah adalah rumah unta berpunuk dua yang disebut Bactrian berada di derah sungai Oxus dan Amu Darya kemudian unta berpunuk satu bersal dari Arab. Pada sekitar abad kedelapan sampai abad kesebelas tempat perkembangbiakan unta berada di Asia Tengah, Iran, Mesopotamia dan Arab (Nejd, Oman, Hadramaut dan Hijaz) (Lombard, 1975).

Terdapat empat jenis kuda pada masa Dinasti Abbasiyah. Kuda Turco Mongol dari Asia Tengah mempunyai ciri-ciri kecil, kuat kokoh dan dapat diandalkan, digunakan sebagai pasukan kuda dalam invasi Asia. Kuda ini berkembang biak dan banyak ditemukan di sepanjang Cina Utara dan sepanjang padang rumput di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Selanjutnya Kuda Iran adalah kuda besar dan kuat yang mampu membawa prajurit berpakaian baja yang berat, kuda ini berkembang biak dan diekspor ke India melalui teluk Persia. Kuda Barber berasal dari Numidia, lebih tepatnya di dataran tinggi dan tepi Sahara. Yang terakhir adalah kuda Syiria, kuda ini diimpor dari Syiria Utara bersama dengan kuda Iran kemudian diekspor ke Timur melalui Teluk Persia dan diekspor ke India dan ke Barat melalui Mediterania (Lombard, 1975).

Domba digunakan sebagai bahan makanan dan bahan wol. Perkembangbiakan domba menjadi hal yang sangat penting sekali bagi pertumbuhan industri wol. Dunia Islam pada masa itu merupakan satusatunya penghasil wol yang memperhatikan kualiatas unggul terutama untuk negara domba yang berada pada dataran tinggi Afrika Utara yang menghasilkan bulu domba yang bagus sekali, padat dan keriting halus. Domba menyebar ke Spanyol ketika bangsa Berber memasuki negara tersebut (Lombard, 1975).

Kerbau merupakan hewan yang kurang berkembang di dunia muslim pada masa itu, karena perkembangbiakannya membutuhkan iklim yang lembab dan vegetasi yang lebih kaya. Perkembang-

biakannya hanya ada di dataran pantai Maroko, beberapa tempat di Aljazair dan dan Spanyol. Adanya kerbau di India bersama dengan migrasi Tzigane yang berada di rawa Delta Indust yang merupakan daerah yang cocok sekali untuk perkembangbiakan kerbau. Kemudian pada abad kedelapan terjadi deportasi dan penduduk India pindah ke Syiria Utara beserta binatangbinatang ternak mereka, sehingga kerbau terbiasa tinggal di rawa-rawa derah Syiria (Lombard, 1975).

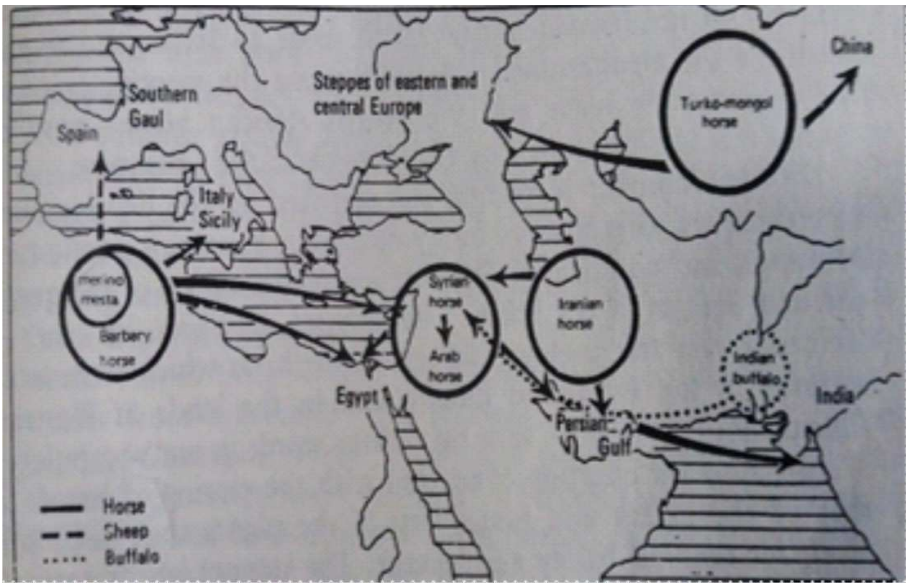

Gambar 1. Jalur perdagangan hewan ternak

3. Tekstil

Komoditi yang menjadi primadona pada masa itu adalah bahan pakaian atau tekstil yang menjadi konsumsi pasar Asia dan Eropa. Sehingga industri di bidang penenunan seperti kain, bahan-bahan sandang lainnya dan karpet berkembang pesat. Orang-orag yang bergerak di bidang tekstil, terhimpun dalam sebuah unit koperasi yang disebut bazzaz (produsen dan penjual kain) yang pekerjanya

penenun, pemintal dan binatu, kekuatan mereka yang begitu besar dan sangat dominan, terutama di kota-kota besar, melahirkan kelompok baru dalam masyarakat, aristokrat kaum pedagang.

Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutera, kapas, kain wol, satin, brokat, sofa, dan kain pembungkus bantal, juga perlengkapan dapur lainnya. Industri tekstil dan tenun terdapat di Myat, Kabul, Transoxiana, Maroko Andalus. Merx dan Mesir sejak awal terkenal dengan pembuatan permadani yang khas, sedangkan kain kepala dari sutra yang hingga kini dikenal dengan sebutan kufiah. Tustar dan Sausa terdapat sejumlah pabrik terkenal dengan kain sulamannya. Damaskus terkenal dengan pembuatan kain Dumas yang disulami dengan benang emas dan kain-kain tirai yang dibuat dari pintalan sutra. Kufah memproduksi kain sutra atau separuh sutra, Tawaaj, Fasa dan kota-kota lainnya di Faris memiliki sejumlah pabrik kelas satu yang membuat karpet, sulaman, brokat dan gaun panjang untuk kalangan atas. Khurasan dan Armenia dikenal dengan dagangannya berupa tilam meja dan kain pembungkus sofa dan bantal. Bukhara terkenal dengan produk sajadahnya. Syiraz menghasilkan rompi dari wol, kain transparan dan brokat. Mesin penganyam Persia dan Irak membuat karpet dan kain berkualitas tinggi (Hitti, 2008).

Pada masa itu, kain tidak hanya digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian saja, melainkan juga digunakan untuk membuat bendera dan tenda. Kain mewah yang mempunyai serat sangat bagus digunakan untuk memperindah upacara-upacara penting. Kain juga dianggap sebagai jenis investasi. Orang menggunakan kain sebagai upah dan hadiah. Jubah bordir, sulaman dan gaun panjang digunakan untuk kalangan atas yang memuat nama sultan atau khalifah yang dibordir diatasnya (Lombard, 1975).

Bahan-bahan utama yang digunakan dalam industri tekstil adalah wol dan kapas. Wol berasal dari Asia Tengah, Afrika Utara, Spanyol dan Mesir dimana tumbuh disepanjang delta dan beberapa

titik di lembah Nil. Tanah Mesir sangat cocok sekali bagi perkembang biakan domba sehingga menghasilkan wol yang sangat bagus. Kapas adalah jenis tekstil baru yang berasal dari India dan diperkenalkan ke Mesopotamia pada abad ketujuh di era Kristen. Pada masa Islam kapas tumbuh luas di dataran tinggi Mesopotamia, Kabur, Harran (terletak antara Sungai Eufrat dan Sungai Tigris). Pada masa kejayaan Islam kapas meyebar ke Mediterania yaitu di Syiria Utara, Aleppo dan Damaskus. Syiria menjadi produsen utama kapas.

4. Metals

Kota-kota yang memiliki sumber-sumber mineral terkemuka di zaman Abbasiyyah yang memungkinkan berkembangnya industri pertambangan dan perhiasan yang amat masyhur adalah Khuarasan di Persia yang memiliki tambang emas, perak, marmer, dan air raksa; Transoxania di utara Persia dengan tambang batu rubi, lapis lazuli, azur, dan asbestos; Kerman di Persia dengan tambang timah dan perak; mutiara di Bahrain; Firus di Nisabur, Persia; dan besi di Libanon. Sumber mineral lainnya meliputi kaolin dan marmer di Tabriz; antimoni di perbatasan Isfahan; batubara dan nafta di Georgia; marmer dan belerang di SuriahPalestina; air raksa dan aspal di Farghanah, Khurasan, dan Armenia; dan tawas di Yaman dan Chad (Hitti, 2008).

Emas masuk ke dunia muslim melalui penaklukan wilayah dari di daerah utara, timur dan selatan. Emas Asia berasal dari Kaukasus, Ural, Altai, Tibet dan Turkestan. Afrika merupakan pemasok emas terbesar ke wilayah Islam. Afrika Timur, emas dibawa oleh kuli tambang emas yang dipekerjakan oleh orang Negro untuk membuat interior rumah orang Muslin sepanjang pesisir Sofala. Afrika barat (Senegal dan Niger), emas dibawa oleh Bangsa Berber pada saat menyeberangi Sahara ke Maghreb. Perak ada diwilayah Kabul Utara dan Spanyol yang kemudian diimpor dalam jumlah besar oleh Mesir (Lombard, 1975).

Selain digunakan untuk perhiasan, emas dan perak juga digunakan untuk mencetak mata uang. Mata uang dicetak dengan bahan perak (disebut dirham) dan bahan emas (dinar) bertuliskan la ilaha illahau wahdah la syarikalah, atau surat al-ikhlas dan ayat-ayat tertentu dari al-Qur'an. Di sisi lain tertulis tempat dan tahun percetakan. Mata uang Islam segera disebarkan ke wilayah-wilayah Islam diberbagai pelosok. Sejak itu mata uang Persia atau romawi tidak lagi digunakan (Yatim, 1997).

5. Budak

Perdagangan budak Arab adalah praktik perbudakan di dunia Arab, terutama di Asia Barat, Afrika Utara , Afrika Tenggara, Tanduk Afrika dan sebagian Eropa (misalnya Iberia dan Sisilia) selama masa penaklukan Arab. Perdagangan ini berpusat di Timur Tengah , Afrika Utara dan Tanduk Afrika (Wikipedia, 2016). Budak yang diperdagangkan beragam ras, etnis, dan agamanya, diantaranya adalah negro, dan sebagian kulit putih-Yunani, Armenia, Slavia, dan Berber dan Turki. Para budak direkrut secara paksa dari kalangan nonmuslim, baik yang ditawan pada masa perang atau yang dibeli pada masa damai. Beberapa. Budak-budak yang bekerja di keputren adalah laki-laki yang dikebiri. Gadis-gadis muda dalam kelompok budak biasanya menjadi penyanyi, penari,dan selir (Hitti, 2008).

Budak Turki memasuki dunia Islam pertama kali di daerah Farghana, ash-Shash, dan Ma Wara' an Nahr, lewat pasar terbesar di Samarkand dan Bukhara yang merupakan rute utama tempat budak Slavia diimpor. Dari wilayah ini ini budak Turki didistribusikan ke semua pasar di Iran, Mesopotamia dan wilayah lain di dunia Islam. Pada waktu pemerintahan Dinasti Mamluk tejadi pembelian besar-besaran terhadap budak Turki yaitu sebanyak 70.000 budak Turki yang menyebabkan pemberontakan di Baghdad dan berpindah ke Samarra. Pembebasan semakin gencar dilakukan, akhirnya banyak budak merdeka yang kemudian menjadi Jendral,

Kapten, tentara dan bekerja di bagian admistrasi negara (Lombard, 1975).

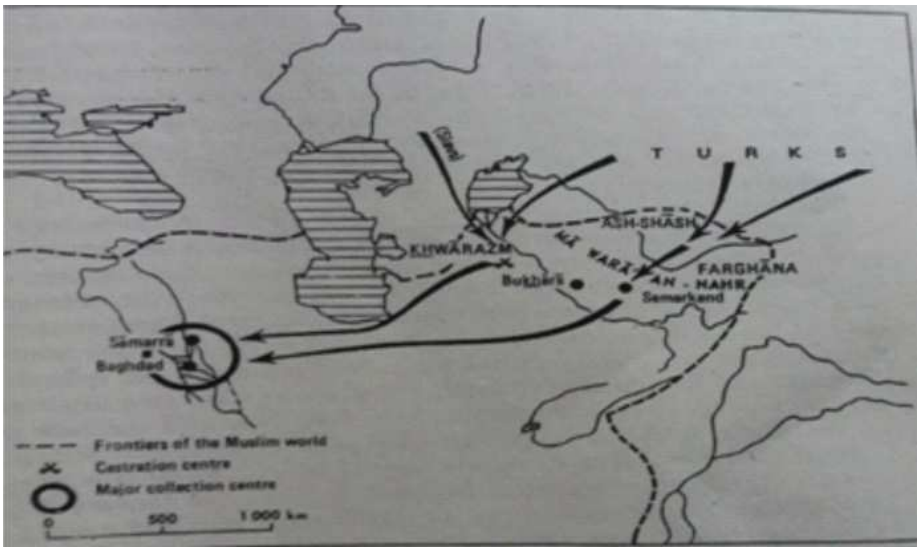

Gambar 2. Jalur perdagangan budak Turki

Dunia Negro adalah sumber budak yang terus menyediakan budak hingga zaman modern. Terdapat beberapa kelompok budak dari Negro; orang Nubia yang berada di atas Nil diimpor melalui Aswan, pintu masuk selatan ke Mesir dimana pusat pengebirian dilakukan, terutama terjadi pada masa kerajaan Kristen, mereka disebut orang Barbara dan sekarang dikenal sebagai orang Barbar atau hamba yang indah. Selanjutnya Etiopia adalah orang Semit yang diimpor sepanjang lembah sungai Nil, atau pelabuhan laut Merah ke Mesir atau Saudi. Selanjutnya Somalia, mereka datag melalui Zayla ke Aden yang merupakan daerah pasar redistribusi terbesar di Aden. Budak pria bangsa Negro sering dijadikan pelayan, tentara atu buruh oleh tuannya, sedangkan budak perempuan diperdagangkan ke negara dan kerajaan Timur Tengah oleh pedagang Arab dan Oriental sebagai selir dan pelayan (Lombard, 1975).

6. Hasil Hutan

Kayu tersebar di Mesopotamia, Arabia, Palestina, Mesir, Cyrenaica, Tripolitania, Ifriqiya dan Sahara. Kayu digunakan sebagai bahan bangunan dan untuk galangan kapal dan pembuatan kertas. Kertas telah lama dikenal orang di Cina. Ketika Samarkhand ditaklukkan kaum muslimin (704 M), di kota ini terdapat pabrik kertas tulis yang diproduksinya sangat halus dan bagus, kertas Samarkand dipandang kertas terbaik dan tidak ada tandingannya pada masa itu. Di Smarkand inilah produksi dan ekspor kertas dimulai. Hal ini mendorong pemerintah pada masa Harun al-Rasyid lewat wazirnya Yahya ibn Barmak mendirikan pabrik kertas pertama di Baghdad sekitar tahun 800 M. Secara bertahap kota-kota lain juga mendirikan pabrik-pabrik kertas. Mesir sekitar 900 M, Maroko sekitar 1100 M, Spanyol sekitar 1150 M. Pabrik kertas juga menghasilkan berbagai macam kertas putih maupun berwarna (Hitti, 2008).

7. Produk dari laut

Bagian timur Dinasti Abbasiyah membentang pantai yang sangat luas sepanjang Laut Merah, Arab Selatan, Teluk Persia. Ikan menjadi makanan penduduk daerah tersebut. Garam juga menjadi hasil produk laut yang sangat dibutuhkan oleh industri pengasinan makanan dan pengolahan kain dan kulit. Garam berkembang di wilayah Negro, Sudan kemudian di bawa ke daerahh Senegal Tiger untuk ditukar dengan emas dan budak. Hasil laut lain yang bernilai sangat mahal adalah karang, mutiara, koral merah dari daerah Mediteraniea kemudian di ekspor dalam jumlah besar ke Teluk Persia yang tidak mempunyai karang. Kemudian diekspor ke India untuk dijadikan permata dan jimat yang sangat diminati oleh warga India. Karang merah adalah item utama dalam perdagangan dan ekspor ke Samudra India (Lombard, 1975).

8. Produk dari batu

Pada masa Dinasti Abbasiyah batu-batu kecil digunakan sebagai relief atau digunakan sebagai tempat wudhu seperti pada Masjid Madina azZahra. Marmer digunakan untuk membangun masjid. Industri lain yang berasal dari bumi adalah keramik. Perdaban Muslim yang sangat tinggi sangat menyukai keindahan. Keramik digunakan untuk vas bunga dan dinding ubin sebagimana gaya dekorasi bangsa Sassanai di Mesopotamia dan Iran. Namun, pada perkembangannya cina memberikan pengaruhnya terhadap keramik umat muslim dengan membawa porselen Cina ditemukan sepanjang Samudra Hindia dan laut Merah. Pusat-pusat pembuatan keramik berada di Iran, Samara, Mesir, Afrika Utara dan Spanyol (Lombard, 1975).

C. Kesimpulan

Perdagangan dan perniagaan menjadi perhatian yang besar bagi Daulah Abbasiyah untuk memegang sentral kekuatan ekonomi negara. Baghdad dan pusat-pusat perdagangan Islam lainnya para pedagang muslim mengirim barang-barang melalui samudera ke timur jauh. Eropa dan Afrika, meliputi hasil-hasil industri makanan, binatang ternak, hasil bumi, hasil laut, hasil hutan hingga menjangkau sampai ke Spanyol, India dan China yang menandakan bahwa kemajuan sektor perdagangan pada masa pemerintahan Abbasiyah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menguasai perdagangan dunia.

D. Daftar Rujukan

Daud, Al-Husnaini M, "Sejarah Sosial Arab-Islam Pada Abad VIII dan X M (Studi tentang Pranata Sosial Era Abbasiah", *Analisis*, Volume XI, Nomor 2, 2011.

Hasyimi, A. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Hitti, Philip K. *History of Arabs Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Lombard, Murice *The Golden Age of Islam*, Amsterdam:North Holland Publishing Company, 1975.

Muhammad, Thaher, *Sejarah Islam dari Andalus sampai Indus*, Cet I, Jakarta: Pusaka Jaya, 1981.

Watt, W. Montgomery, *Islam dan Peradaban Dunia Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995.

www.wikipedia.org/wiki

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

POLITIK EKONOMI GHAZAN KHAN (1295 – 1304 M), DAN PEMBARUAN EKONOMI ALAUDDIN KHALJI (1296 -1316M)

Usman

A. Pendahuluan

Periode saat dan pasca hancurnya Baghdad pada masa khalifah Abbasiah, terjadinya kevakuman pemerintahan tanpa khalifah. Hal ini merupakan awal mulanya masa tansisi Islam dengan diwarnai dua dinasti penting saat itu, yaitu Dinasti Mamluk di Mesir dan Dinasti-dinasti Mongol Islam di Asia Tengah.

Setiap bangsa pastilah memiliki sejarah masa lalunya. Bangsa Mongol pun memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang tidak ternilai sumbangannya terhadap peradaban dunia, pada umumnya dan Islam pada khususnya. Menurut perspekti Barat, Islam tidak lebih dari sebuah sejarah yang diperjuangkan dengan darah dan pedang. Namun berbeda halnya Islam masuk di kalangan Mongol, Islam masuk karena faktor budaya dan kesadaran para pelakunya (penguasa) untuk meyakini Islam sebagai ajaran tuahid yang dianutnya. Khazanah pengetahuan sejarah, dalam hal ini menyatakan, munculnya Bangsa Mongol yang terungkap dalam buku *Chengis*

Khan; The Conqueror Emperor of All Men, dan beberapa sumber Persia dan Cina yaitu pada akhir abad XII dan awal abad XIII M.

Sejarah mencatat, kekaisaran Bangsa Mongol tidak terlepas dari figur sentral pimpinan monarki yang bernama Chengis Khan, sebagai kekuatan Imperium dunia saat itu. Dia menjadi tokoh utama dalam episode yang begitu panjang pada perkembangan bangsa Mongol berikutnya. Namun, dibalik kekejaman mereka ternyata menjadi sebuah puncak cita-citanya membangun imperium dunia. Justru dari darah dagingnya tercatat dalam tinta emas peradaban Islam yang agung dan monumental. Luasnya kekuasaan Bangsa Mongol, yang kurang lebih tiga abad menguasai sebagian besar daratan Asia dan Eropa sebelum dan sesudah bersentuhan dengan Islam. Oleh sebab itu, berkaitan dengan judul pemakalah ini akan mengkaji fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah dinasti-dinasti Mongol Islam keturunan Chengis Khan, Chaghtai, Golden Horde, dan Ilkhan, serta sumbangsih (hasil) dari peradaban Islam Mongol tersebut.

B. Dinasti Ilkhan

Dinasti Ilkhan (1256 – 1363 M) adalah cabang dari Dinasti Mongol[1] di Persia yang didirikan oleh Hulagu Khan (1256 – 1257 M). Dalam bahasa Mongol, *Ilkhan* berarti kepala suku, dalam artian sebagai perwakilan atau gubernur jenderal dari pusat kekuasaan

[1] Dinasti Mongol didirikan pada tahun 1206 oleh Temujin/Temuchin setelah berhasil menyatukan suku-suku Mongolia. Ia kemudian diberi gelar Jengis Khan (raja yang perkasa, penguasan yang agung). Jengis (Chengis) Khan (1162 -1227) kemudian melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, dimulai dari Dinasti Xia Barat di Cina Utara, Dinasti Song di dataran tengah Cina, Dinasti Keen, kemudian ke Manchuria di sebelah timur, hingga aneksasi Kerajaan Khawarezmia di Persia. Ekspansi Jengis Khan juga meliputi sebagian Rusia, sebagian India, Asia Tengah dan Asia Timur. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Mongolia.

http://www. globalmuslim.web.id/2011/07/ sejarah-islam-mongol-bangsa-penghancur.html.

Khan Agung di Karakuram (Karim, 2014). Khan Agung adalah sebutan bagi pemimpin Dinasti Mongol.

Sejarah dari Dinasti Ilkhan bermula dari serangan bangsa Mongol yang dipimpin Chengis Khan ke kerajaan Islam Khawarizm di Persia.[2] Sebagaimana diketahui, bangsa Mongol memanfaatkan ketidakharmonisan hubungan antara Sultan Khawarizm VII, yakni Alauddin Muhammad Shah (1200 -1220) dengan Khalifah Abbasiah Al-Nasheer di Bagdad. Ini sekaligus cermin pertentangan antara syiah dan sunni. Pada 1216 Khalifah al-Nasheer meminta bantuan Chengis Khan. Insiden Utrar tahun 1218 adalah pemicu serangan Chengis Khan pada Alauddin Muhammad Shah. Pada insiden Utrar, Khawarizm Shah mengembalikan hadiah persahabatan dari Chengis Khan. Ia juga membunuh kafilah dagang dan utusan-utusan Chengis Khan yang dianggap sebagai mata-mata. Pemicu serangan lainnya adalah kedua belah pihak sama-sama pemimpin kuat yang berambisi menjadi penguasa tunggal di Asia Tengah.

Perang Utrar pecah pada 1219. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Chaghtai, putra Chengis Khan, berhasil mengalahkan Alauddin Shah, hingga wilayah di sekitar Utrar, Samarkand, Bukhara jatuh ke tangan tentara Mongol (Karim 2014). Selanjutnya, Chengis Khan menyerbu Amu Daria, Kota Balakh, Khurasan, Herat, dan Merv. Pada akhirnya hampir semua wilayah kekuasaan Alauddin Shah dianeksasi oleh Chengis Khan.

Setelah Alauddin Muhammad wafat, puteranya yakni Jalaluddin Manguberdi (1220-1331) pun menggantikan posisi ayahnya sebagai sultan baru. Ia berhasil merebut kembali Ghazni

[2] Kerajaan Khawarizm (1077 -1231) adalah kerajaan independen pada Khilafah Abbasiah yang menempati wilayah Persia atau Iran-Irak-Azerbaijan sekarang ini. Semula merupakan provinsi dari Kesultanan Saljuq, yang kemudian berkembang pesat menguasai hampir seluruh wilayah Saljuq, utamanya pada era kepemimpinan Alauddin Muhammad, yang juga dikenal sebagai Khawarizm Shah.

dari tangan Mongol, dan ini merupakan kekalahan pertama bangsa Mongol di Asia Tengah. Namun demikian, Chengis Khan berhasil membalas kekalahan tersebut, dan memaksa Jalaluddin melarikan diri dan berlindung di Multan[3]. Setelah Chengis Khan wafat[4], Alauddin kembali ke negaranya dan berhasil menyatukan beberapa wilayahnya kembali, termasuk berhasil mengalahkan Baghdad. Namun Mongol di bawah kepemimpinan Oghtai kembali berhasil mengalahkannya. Alauddin kemudian meminta suaka politik kepada Sultan Shammudin Iltutmish di India, dan pada akhirnya ia tewas dibunuh oleh pengikut setia Oghtai. Dengan kematian Alauddin maka berakhirlah Dinasti Khawarizm (Karim, 2014).

Oghtai adalah pemimpin yang kuat sehingga ia juga berhasil menaklukkan banyak daerah di Eropa. Ia meninggal pada tahun 1241, dan jabatan Khan Agung beralih ke putranya bernama Qayuk (Karim, 2014). Qayuk adalah pemimpin yang lemah, sehingga keadaan negara menjadi serba kacau. Ia meninggal pada tahun 1248. Selanjutnya Khan Agung dijabat oleh Mongu Khan (1248 – 1259), cucu Chengis Khan dari anak yang ke-4, yakni Touly. Untuk mempertahankan dan memperluas wilayah, ia dibantu oleh 2 orang saudaranya, yakni: Hulagu Khan untuk wilayah Persia dan sekitarnya (barat), dan Kubilai Khan[5] untuk kawasan di sebelah timur kerajaan. Mereka berdua disebut sebagai *Ilkhan*, yang berarti kepala perwakilan, gubernur wilayah.

---

[3] Multan adalah kota di wilayah Punjab, Pakistan, saat ini. https://en.wikipedia.org/wiki/Multan.

[4] Chengis Khan meninggal pada 1227. Setelah itu, wilayah kekuasaannya dibagi menjadi 4 dan diserahkan kepada keempat anaknya, yakni: Jochi, Chaghtai, Oghtai, dan Touly. Anak ketiga Chengis Khan, yakni Oghtai yang diangkat menjadi Khan Agung menggantikan ayahnya pada periode 1227 – 1241.

[5] Kubilai Khan kemudian menjadi Khan Agung (1259 – 1294) yang terakhir menggantikan Mongu Khan. Pasca Dinasti Mongol, Kubilai Khan mendirikan Dinasti Yuan yang berpusat di Peking.

Hulagu Khan berkuasa sebagai *Ilkhan* di Persia pada periode 1256 1265. Itu adalah dalam masa kepemimpinan Mongu Khan dan Kubilai Khan sebagai Khan Agung. Hulagu dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan lalim. Setelah menumpas kelompok Assasin di Alamut, Irak, pada tahun 1258 Hulagu menghancurkan Baghdad sebagai pusat peradaban umat Islam. Ia membunuh Sultan al-Mu'tasim Billah, sekaligus mengakhiri Dinasti Abbasiah. Di Baghdad, ia pun mendirikan Dinasti Ilkhan sebelum akhirnya memindahkan pusat kekuasannya di Maragha (Karim, 2014).

Selanjutnya, Ilkhan di bawah panglima Ketbuga menyerang Mamluk, Mesir (Sultan Saifuddin Qutuz). Hulagu tidak ikut berperang dan kembali ke Karakuram. Mamluk yang dipimpim oleh Baybars dan dibantu Berke Khan[6] dari Dinasti Mongol Golden Horde (GH) berhasil mengalahkan Ilkhan di Ain Jalut pada September 1260 (Wikipedia, org).

Hulagu Khan meninggal pada tahun 1265, atau 7 tahun setelah kejancuran Baghdad. Ia digantikan putra sulungnya, Abaga Khan pada 19 Juni 1265. Abaga yang dikenal sadis dan sangat membenci Islam sebagaimana ayahnya, adalah pemimpin Ilkhan yang paling lama berkuasa, yakni 17 tahun. Ia bersekutu dengan Yunani untuk menghadapi Mamluk dan GH. Abaga selalu kalah dalam beberapa kali peperangan dengan Mamluk dan Suriah. Ia merasa malu dan kecewa dan akhirnya meninggalkan Baghdad menuju Hamadan. Akhir hayatnya banyak diisi dengan pesta mabuk-mabukan hingga ia meninggal pada tahun 1282 (Karim, 2014).

[6] Berke Khan adalah pengaunut Islam. Ia bersepupu dengan Hulagu Khan, karena ayahnya yang bernama Jochi adalah saudara kandung dengan ayah Hulagu, Touly Khan.

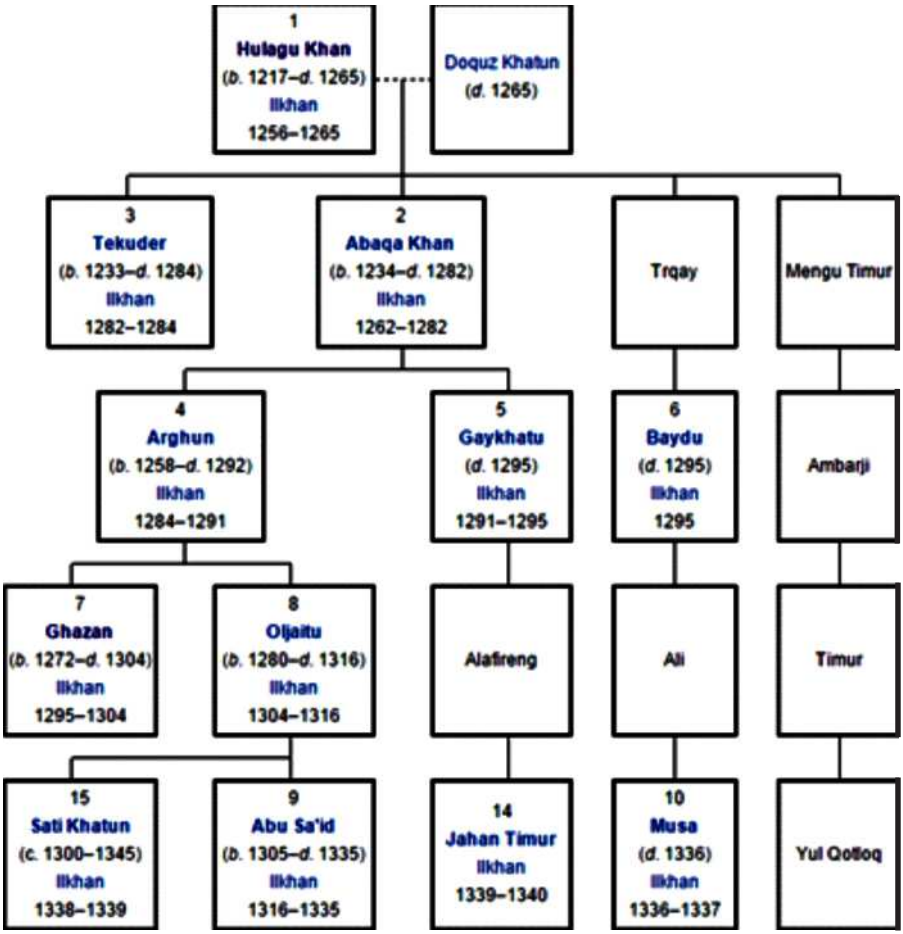

Gambar 1. Pohon Keluarga Dinasti Ilkhan

Selanjutnya, Ilkhan dipimpin oleh adik Abaga, yakni Tagudar[7]. Setelah mememluk Islam, ia mengganti namanya menjadi Ahmad. Jadi, ia adalah pemimpin Dinasti Ilkhan pertama yang memeluk Islam. Pada saat memimpin Ilkhan, kondisi kekayaan kerajaan sudah menipis karena telah dihabiskan oleh para pendahulunya dengan

[7] Beberapa tulisan lain menyebut nama Tagudar dengan Tekuder, Nikudar, Nigudar, dan Tongudar.

sewenang-wenang. Karena memeluk Islam dan membela musuh-musuh para pendahulu Ilkhan, para tokoh Mongol bersekongkol untuk menggulingkannya. Akhirnya Ahmad dijatuhkan dari kekuasaanya dan dibunuh pada Januari 1284. Ia menjadi syuhada pertama dari kalangan Mongol (Karim, 2014).

Sesuai keinginan para tokoh Mongol, Arghun anak Abaga Khan menggantikan Ahmad (pamannya) sebagai pemimpin Dinasti Ilkhan. Argun adalah pemimpin yang kejam sebagaimana ayah dan kakeknya. Ia banyak memecat dan menghukum mati para pejabat istana. Setelah 7 tahun berkuasa, Arghun meninggal dunia pada tahun 1291 (Hasan, 1995), dan digantikan oleh saudaranya Ghaykatu (Gaykhatu).

Ghaykatu adalah pemimpin yang malas, suka foya-foya, dan tidak memperhatikan kondisi negaranya. Di masa kepemimpinannya terjadi krisis keuangan yang hebat. Lalu muncul pemberontakan dari sepupunya, yakni Baydu yang berujung pada terbunuhnya Ghaykatu. Pada 1295 Baydu naik tahta menjadi pemimpin Dinasti Ilkhan. Pada masa pemerintahannya yang singkat, Baydu dihadapkan pada kondisi negara yang sangat buruk, korupsi merajalela, dan pemberontakan di berbagai tempat. Kekuasaan Baydu ditolak oleh Ghazan, karena dianggap tidak mampu memimpin negara. Ghazan melakukan pemebrontakan, dan Baydu terbunuh (Hasan, 1995). Selanjutnya Ghazan Khan naik tahta menjadi Penguasa VII Dinasti Ilkhan.

Masa pemerintahan Ghazan Khan (1295 – 1304) adalah puncak kejayaan Dinasti Ilkhan. Ia menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Ketika ia naik tahta, ia juga melepaskan diri dari ikatan Khan Agung Mongol, sehingga Dinasti Ilkhan menjadi dinasti yang independen.

C. Ghazan Khan

Ghazan lahir pada tanggal 5 November 1271[8] di Abaskun dekat Bandar-e Shah, sebelah tenggara Laut Kaspia. Ayahnya adalah Arghun, penguasan IV Dinasti Ilkhan. Kakeknya adalah Abaga, Penguasa II Dinasti Ilkhan, sedangkan buyutnya adalah si pendiri Dinasti Ilkhan, yakni Hulagu Khan.

Masa kecil Ghazan banyak dihabiskan bersama kakeknya untuk mendalami agama Budha. Ia pun cepat mempelajari dan memahami esensi-esensi agama (Budha). Pada saat berusia 10 tahun, Ghazan ditunjuk sebagai Gubernur Khurasan (wilayah di sebelah timur laut Iran saat ini) oleh ayahnya, Arghun. Ia dibimbing oleh Amir Nawroz (Karim, 2014) yang kaya pengalaman dalam pemerintahan. Selain menguasai ilmu agama (Budha), Ghazan juga mahir dalam ilmu alam, arsitektur, sejarah, metalurgi, seni kerjaninan, dan lain-lain. Ia juga memiliki bakat di bidang pertanian, serta menguasai Bahasa Arab, Cina, Kashmir, Perancis, dan lainnya, hingga total 9 bahasa dikuasainya. Ia juga merupakan pandai besi, dan juga menjahit sendiri baju-bajunya di waktu senggangnya. Ini cerminan sebagai sosok pribadi yang sederhana.

Pada 19 Juni 1295, Ghazan beserta 100.000 orang Mongol (Hamka, 1975), termasuk sejumlah pembesar kerajaan serta para jenderal, mengucapkan dua kalimat syahadah. Setelah masuk Islam, ia merayakannya dengan pesta, dan semua berbondong-bondong turut masuk Islam. Ia membagikan sedekah, mengunjungi masjid, sekolah, makam-makam imam suci, dan sekaligus memperlakukan para sayyed (keturunan Nabi Muhammad), para imam dan syekh (Karim, 2014).

Ada 2 versi mengenai berpindahnya keyakinan Ghazan dari Budha ke Islam. Pertama, Ghazan masuk Islam karena jasa sang

[8] Sebagian penulis menyebutkan tanggal 4 Desember 1271 sebagai tanggal kelahiran Ghazan, sebagaimana Karim, *Bulan Sabit*, 89.

panglima, Jenderal Nawroz, yang membantunya ketika melawan Baydu. Ghazan berjanji jika menang, maka ia akan memeluk Islam. Dan janji itu ia tepati (Karim, 2006). Versi kedua menyatakan bahwa meskipun Ghazan mempunyai pengetahuan ajaran Budha yang mendalam, namun ia terus mencari jalan kebenaran, hingga akhirnya adanya perjanjian di masa Baydu antara Bangsa Mongol yang bersumpah menggunakan emas dengan muslim Persia yang bersumpah dengan Al Qur-an. Selanjutnya, Ghazan bertanya kepada Shekh Sadr al-Din Ibrahim, anak seorang dokter terkenal, yaitu Sadr al-Din Hamawi, tentang doktrin-dotrin Islam secara detil. Setelah menerima penjelasan dari Shekh Sadr al-Din, Ghazan pun masuk Islam.

Ghazan naik tahta sebagai Ilkhan ke VII pada 3 November 1295. Ia pun menambah nama depannya menjadi Mahmud Ghazan Khan. Sejak saat itu, Islam menjadi agama resmi bagi Dinasti Ilkhan. Seiring dengan itu, ikatan dengan Khan Agung Mongol di Peking diakhiri (Lambton, 1988), dan Dinasti Ilkhan menjadi dinasti yang independen.

Ghazan berusaha mengadopsi nilai-nilai Islam dalam pemerintahannya, hingga ia menganggap dirinya sebagai *Ruler by The Grace of God* (Sultan berkat rahmat Ilahi) (Hasan, 1995). Ia menerapkan syariah sebagai hukum negara, dan sekaligus menghapus *Yassa*[9]. Tahun pertama pemerintahan ditandai dengan upaya meredam sejumlah pemberontakan dan intrik internal dari kalangan Mongol, yakni terhadap mereka yang tidak menyukai perpindahan agama Ghazan Khan (Karim, 2014). Ghazan Khan menjalankan pemerintahan dengan tegas dan bijaksana. Ia adalah sosok muda yang bijak, murah hati, taat beribadah, dan pelindung ilmu pengetahuan dan sastra. Ia telah menciptakan kedamian dan

[9] *Yassa* adalah undang-undang sosial Dinasti Mongol yang dibuat semasa Chengis Khan.

keamanan bagi rakyat negerinya maupun bagi negara-negara tetangga. Oleh karenanya seorang orientalis bernama W. Muir mencatatnya sebagai penguasa Ilkhan yang paling dicintai rakyatnya, dan telah membawa Dinasti Ilkhan pada puncak kejayaannya. Semua ini sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah ia lakukan, termasuk kebijakan ekonominya dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Meskipun telah memeluk Islam, perselisihan dengan Kerajaan Mamluk di Mesir terus berlanjut. Perang Mamluk-Ilkhan di Marj al-Saffar membawa kekalahan bagi Ilkhan. Sebelum Ghazan Khan kembali menyerang untuk menaklukan Suriah, ia meninggal dunia, yaitu pada tahun 1304 (Karim, 2014).

D. Kebijakan Pembaharuan Ekonomi Ghazan Khan

1. Latar Belakang Pembaharuan Ekonomi

Kebiajakan ekonomi yang diambil oleh Ghazan Khan tidak terlepas dari kondisi pemerintahan sebelumnya, di mana negara tidak dikelola dengan baik, termasuk masalah ekonominya. Awal Ghazan Khan menjadi pemimpin, tatanan negara dipenuhi oleh pejabat-pejabat yang korup dan sewenang-wenang serta penuh dengan kecurangan untuk memperkaya diri sendiri. Harta yang dikumpulkan Hulagu Khan pada saat penaklukan Baghdad, kelompok Asaasin, dan lainnya banyak dicuri oleh petugas penjaga. Pada masa Arghun, selain pencurian juga masih berlangsung, para penguasa juga banyak menghambur-hamburkan harta. Hal ini dikarenakan negara tidak memilliki badan perbendaharaan, juga tidak ada pencatatan dan pelaporan atas pendapatan dan belanja negara yang semuanya telah membuat negara dalam keadaan hampir bangkrut.

Pada masa Ghaykatu juga tidak banyak mengumpulkan harta. Selain itu, pengelolaan keuangan juga sangat buruk. Ia menerbitan mata uang Chao yang peredarannya telah melumpuhkan kegiatan ekonomi. Ini karena nilainya yang besar namun tidak sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya, sehingga terjadi semacam *economic bubble*.

Di sisi lain, para petugas perpajakan dapat seenaknya melakukan kecurangan-kecurangan sehingga pajak yang dikumpulkan dari rakyat di daerah tidak sampai ke pusat pemerintahan. Sangat banyak provinsi yang dalam kondisi keuangan dan sistem perpajaan yang parah. Ini semua mengakibatkan keuangan negara kosong hingga tidak mampu untuk membayar gaji para pegawai dan tentara tepat pada waktunya[10].

Sebelum Ghazan Khan berkuasa, rakyat merasa ditindas dengan beratnya pajak yang harus ditanggung[11] akibat ulah para petugas pajak yang menaikkannya hingga berlipat-lipat. Pajak *qubchur* (hewan ternak) juga ditarik dengan sangat tinggi hingga para petani meninggalkan rumah-rumah mereka. Kadang-kadang para petani karena tergesa-gesa menghindari kedatangan para petugas pajak, mereka melompat dari atap rumah mengakibatkan kaki mereka patah dan lumpuh. Karena tidak mampu membayar pajak, mereka membakar sawah dan lari ke hutan.

Sebelum Ghazan Khan berkuasa, praktik riba merajalela karena diizinkan oleh para penguasa terdahulu. Setiap peminjaman uang, pengembaliannya disertai dengan *usury* (bunga). Rakyat kecil menjadi semakin sengsara, karena jika tidak mampu membayar pinjaman beserta bunganya, maka bersama anak dan istrinya menjadi budak para rentenir.

Sebagaimana diketahui, sebelum kedatangan Bangsa Mongol, kehidupan masyarakat Persia adalah sebagai petani, mengingat lahannya yang sangat subur. Namun, Bangsa Mongol telah meng-

---

[10] Taufan El Fares, *Ghazan Khan Sang Pembaharu*, Diakses, 11 Oktober 2016, http://taufanlebahmerah.blogspot.co.id/2011/05/ghazan-khan-sang-pembaharu. Html.

[11] Iariputra, *Ghazan Khan: Sang Ekonom Jenius dari Ilkhan,* Diakses 11 Oktober 2016, https://msiuii.wordpress.com/2010/10/24/ghazan-khan-sang-ekonom-jenius-dari-ilkhan/

ubah lahan pertanian yang ada menjadi padang rumput untuk memenuhi kebutuhan pakan kuda militer mereka (Lambton, 1988). Selain itu, pada masa Ilkhan, dinas pajak juga memungut pajak yang sangat tinggi terhadap petani. Sebagai akibatnya, banyak ladang pertanian yang semestinya subur namun dibiarkan terbengkalai, akhirnya irigasi pun menjadi rusak.

Kondisi ekonomi yang buruk telah mengakibatkan penganggur-an dan tingginya angka perbudakan. Pada akhirnya ini berujung pada maraknya aksi pencurian dan perampokan. Dengan kata lain, hampir di seluruh pelosok negeri, kondisinya tidak aman. Para pedagang juga banyak yang melakukan kecurangan, yaitu dengan memberi sukatan (pemberat) pada timbangannya. Dengan demikian upaya mensejahterakan rakyat melalui perbaikan ekonomi akan dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus juga aksi kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa ada 3 aspek yang melatarbelakangi dilakukan pembaharuan ekonomi oleh Ghazan Khan, yaitu: asepk politik, aspek keamanan, dan asepk ekonomi-sosial.

2. Pembaharuan Ekonomi yang Dilakukan Ghazan Khan

Oleh karenanya langkah-langkah yang dijalankan adalah dalam rangka memulihkan kembali perekonomian negara dengan fokus utama pada pertanian. Selain pemulihan ekonomi, Ghazan Khan juga melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus melakukan perbaikan moral bangsa.

Untuk membujuk para petani agar mau menggarap ladangnya lagi, Ghazan Khan membebaskan pajak yang kurang manusiawi. Petani kecil yang tidak mampu membeli benih bagi kebunnya dan makanan untuk ternaknya, maka Ghazan memerintahkan semua gubernur dan petugas pajak harus menyisihkan dari sejumlah uang pajaknya. Hal tersebut digunakan untuk pembelian semua binatang yang digunakan tenaganya, benih-benih, dan keperluan pertanian lainnya (Karim, 2006). Perintah yang dikeluarkannya adalah memberikan pinjaman, memberikan biji-bijian dengan gratis, dan

membebaskan pajak yang kurang manusiawi akibat ulah para dinas pajak. Selain itu, ia juga memberikan peringatan kepada para pedagang untuk tidak menggunakan sukatan sebagai pemberat timbangan, karena hal ini merupakan kecurangan yang merugikan orang lain. Upaya tersebut berhasil, dan petani menjadi aktif kembali menggarap ladangnya (Karim, 2014).

Hal lain yang dilakukan Ghazan Khan adalah upaya menghidupan tanah mati. Ia mendaftar dan mengklasifikasian tanah mati menjadi beberapa kategori menurut kebutuhan airnya. Terhadap klasifikasi tanah yang berbeda, Ghazan Khan menerapkan kebijakan pajak yang berbeda-beda pula. Setiap dua tahun sekali daftar kondisi tanah tersebut diperbaharui (*updated*) untuk keperluan pengendalian.

Pengelolaan hasil pertanian, khususnya penyimpanan dan distribusi juga diperhatikan dengan baik oleh Ghazan Khan. Demikian juga halnya dengan komoditas peternakan. Ini semua agar informasi tentang semua komoditas tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas (Karim, 2006).

Untuk pemulihan di bidang fiskal, Ghazan dibantu oleh Rashid al-Din sebagai penasehat dan juru tulis yang selalu setia mendampingi. Rashid al-Din mencoba memeriksa kembali beberapa sistem keuangan dan perpajakan yang banyak disalahgunakan oleh pemimpin-pemimpin dan petugas-petugas negara sebelumnya termasuk para petugas pajak. Diketahui pula bahwa keuangan tidak dicatat dengan baik, termasuk tidak adanya perincian tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan.

Ghazan melarang pemungutan pajak oleh gubernur, dan sebagai gantinya mengangkat *Sâhib-e Jam* (kolektor pajak) disetiap propinsi serta posko-posko pembayaran pajak di setiap kota. Keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan denda. Ghazan mengirim *bîtikchî* (sekretaris negara) di setiap propinsi untuk mencatat harta milik penduduk, dan menyerahkan datanya kepada *diwan*. Setelah menentukan petugas pajak, Ghazan menetapkan

besarnya pajak yang harus dibayar oleh penduduk. Besarannya ditentukan berdasarkan musyawarah dengan para menteri serta menghadirkan perwakilan penduduk (Lambton, 1988).

Beberapa jenis pajak yang ditetapkan oleh Ghazan Khan adalah (Lambton, 1988):

1. Pajak Penduduk
   Bagi penduduk muslim, pajak ini dikenal sebagai zakat. Untuk non muslim, pajak ini merupakan *jizyah*, yaitu sebagai jaminan keamanan diri.
2. Pajak Tanah
   Pajak ini berasal dari lahan pertanian. Ghazan menetapkan kontrak atas lahan tersebut per tiga tahun.
3. Pajak Hewan Ternak
   Pajak ini dikenal dengan istilah *qubchur*. Sblm Ghazan Khan berkuasa, pajak ini ditarik berkali-kali dalam setahun, bahkan hingga 30 kali. Semasa Ghazan, *qubchur* ditarik secara teratur 2 kali dalam setahun, dan dibebankan kepada penduduk lokal maupun nomaden. *Wazir* Sadr al-Din menghapus *qubchur*bg penduduk kota, dan mengantikannya dengan bea cukai.
4. Bea dan Cukai atas Barang dan Jasa
   Bangsa Mongol mengenal pajak ini dengan sebutan *tamgha*. *Tamgha* ditarik atas dasar aktivitas perkotaan, seperti perdagangan, pajak toko-toko, dan tempat mandi umum.

Pendapatan negara, pada masa sebelumnya didominasi dari hasil rampasan penaklukan wilayah. Namun di masa Ghazan Khan ini pendapatan negara didominasi dari pajak pertanian. Pendapatan negara lainnya berasal dari *qubchur*, *tamgha*, zakat, jizyah, tanah negara, *iqta'*[12], dan wakaf. Sementara itu pengeluaran negara banyak digunakan untuk pembangunan, utamanya infrastruktur

[12] *Iqta'* adalah tanah yang diberikan kepada tentara untuk dikelola sebagai lahan pertanian.

seperti pusat perdagangan dan saluran irigasi. Selain itu juga untuk pembangunan perumahan, jembatan, taman kota, rumahsakit, perguruan tinggi, perpustakaan, dan observatorium. Pengeluaran lainnya adalah untuk gaji pejabat negara dan tentara, serta untuk keperluan militer.

Untuk mengatasai pencurian harta-benda negara oleh petugas penjaga sekaligus memperbaki sistem pencatatan dan pelaporan kekayaan (aset) negara, Ghazan Khan membangun badan perbendaharaan negara yang waktu itu berwujud bangunan tenda-tenda untuk menyimpan harta benda kekayaan negara. Tenda-tenda tersebut dijaga secara ketat dan juga ada buku khusus yang disebut "buku penjaga" (semacam buku kas) untuk mencatat penggunaan uang atau harta (aset) negara.

Dalam hal instrumen keuangan, koin emas dan perak telah digunakan sebelum masa Ghazan Khan. Namun ketika Ghaykatu berkuasa, ia menerbitkan mata uang baru yang disebut Chao. Peredaran uang tersebut telah melumpuhkan kegiatan ekonomi, atau terjadi semacam *economic bubble*. Untuk menstabilkannya, Ghazan Khan kembali menerbitkan koin emas dan perak sebagai alat tukar pembayaran. Tidak hanya itu, mata uang tersebut menggunakan nama Allah di satu sisi dan nama Nabi Muhammad SAW di sisi yang lain. Padahal sebelumnya, sisi mata uang diberi nama Khaqan Raja Agung yang menunjukkan kebesaran raja Mongol. Penggantian ini juga merupakan aspek politik di mana Ilkhan secara tidak langsung mengikrarkan diri menjadi dinasti yang independen, dan tidak lagi terafiliasi dengan Kerajaan Mongol.

Demikianlah Ghazan Khan. Ia telah bekerja keras memperbaiki pemerintahan Dinasti Ilkhan melalui kebijakan ekonominya. Memperbaiki fiskal dengan reformasi manajemen perpajakan, dan memperbaiki sistem moneter dengan membangun lembaga perbendaharaan negara serta penerbitan uang koin emas dan perak. Integritas yang dimilikinya telah menjadikannya teladan dalam

penegakan hukum, utamanya dalam rangka pemberantasan korupsi. Di bawah rezim Ghazan Khan, kemakmuran Kerajaan Ilkhan telah kembali.

E. Kesultanan Delhi dan Dinasti Khalji

Dinasti Khalji (1290 – 1320) di India merupakan dinasti kedua dari Kesultanan Delhi di India. Dinasti pertama adalah Dinasti Aibak (1206 – 1290)[13], sedangkan dinasti-dinasti sesudahnya adalah Dinasti Tughlug (1320 – 1414), Dinasti Sayyed (1414 – 1451), dan diakhiri oleh Dinasti Lodi (145 – 1526). Setelah Dinasti Lodi berakhir, berdirilah Kerajaan Mughal di India pada tahun 1526.

Islam diterima oleh masyarakat di anak benua India melalui jalan perdamaian (Hasan, 1997). Sistem kasta yang dianut agama Hindu di India secara absolut telah mengakibatkan kehidupan masyarakatnya terkotak-kotak. Kasta tertinggi, yakni Brahmana, semakin bertindak keras terhadap kasta di bawahnya. Adanya budaya *sati daho* yang mengaharuskan wanita turut membakar diri saat jasad suaminya dibakar. Ini semua menjadikan kehadiran Islam bagaian cahaya yang menyinari masyarakat anak benua India. Islam datang dengan kebersamaan, toleransi, kesetaraan kedudukan, dan keadilan sosial, hadir ditengah masyarakat Hindu. Mereka terluluh hatinya hingga berbondong-bondong masuk Islam.

Islam masuk ke anak benua India dalam 4 periode, yakni masa Nabi Muhammad SAW, periode Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayah, Periode Dinasti Ghazni, dan periode Dinasti Ghuri (Karim, 2015). Meskipun banyak disebutkan bahwa menjalin kontak politik dengan Islam pertama kali pada saat Muhammad bin Qasim menaklukkan Sind pada tahun 711 (Qureshi, 1944), namun kontak India dengan Islam secara informal telah dimulai pada masa

[13] Sebagian referensi menuliskannya sebagai Dinasti Mamluk, yang berarti budak. Ini karena latar belakang Aibak dan beberapa penerusnya (Shamsuddin Iltutmish dan Balban) mengawali karir sebagai budak.

Rasulullah SAW melalui jalur perdagangan. Banyak pedagang arab yang berasimiliasi melalui perkawianan dengan wanita pribumi. Raja Kadungalur, pantai Malabar, Cheraman Perumal adalah pemeluk Islam dan pernah berkunjung menemui Nabi Muhammad SAW disekitar tahun 630 – 631 (Karim, 2015).

Pada masa Khulafaur Rasyidin, beberapa ekspedisi Islam melalui laut tidak berhasil, dan hingga akhirnya dilarang oleh Umar ibn Khattab. Pada masa Khulafaur Rasyidin hingga masa awal Dinasti Umayah tidak ada ekspansi wilayah yang berarti pada anak benua India. Ekspansi Islam ke India diwali oleh Khalifah Umayah Walid bin Abdul Malik (Al-Walid I), di mana ekspansi ini dipicu oleh drama pembajakan kapal milik orang-orang Islam di wilayah kerajaan Sind. Salah seorang korban pembajakan melaopr kepada Hajaj. gubernur Provinsi Timur, hingga akhirnya Hajjaj mengutus Muhammad bin Qasim untuk menyerang Sind.

Dengan demikian, India pertama kali menjalin kontak politik dengan Islam (Arab) adalah pada saat Muhammad bin Qasim[14], menaklukkan Sind (711 – 713). Selain Sind, ia juga menaklukkan Multan. Muhammad Bin Qasim yang pada saat penaklukan masih berusia 17 tahun (Ali, 1980), kemudian menjadi gubernur di wilayah pendudukan tersebut, hingga akhirnya ia meninggal dengan cara yang tragis. Setelah itu terjadi beberapa kali pergantian gubernur hingga akhirnya datang Dinasti Ghazni.

Dinasti Ghazni muncul setelah pada akhir abad ke-10 kekhalifahan Abbasiah melemah hingga akhirnya bermunculan banyak dinasti-dinasti kecil yang semi independen, seperti Tahirid, Saffarid, dan Samanid. Samanid menguasai Khurasan dan

[14] Muhammad bin Qasim adalah panglima perang muda berusia 17 tahun yang dikirim oleh Hajjaj bin Yusuf untuk menaklukkan Sind yang pada saat itu dipimpin oleh Dahir. Hajaj bin Yusuf adalah gubernur provinsi timur (al-Masyriq) pada masa Khalifah Umayah al-Walid I yang sangat berambisi menaklukkan Sind.

Transoxiana. Raja ke-5 Samanid adalah Abdul Malik dengan nama Turki yaitu Alptigin. Pada tahun 961 ia menaklukkan Ghazni yang saat itu dipimpin oleh Abu Bakr Lawik, dan kemudian mendirikan Dinasti Ghazni yang independen (Ali, 1980). Setelah memimpin Ghazni selama 14 tahun, ia wafat dan digantikan puteranya, Abu Ishaq. Selanjutnya pada 977 Abu Ishaq diganti Sabuktigin[15]. Sabuktigin digantikan puteranya Ismail, yang kemudian digantikan oleh kakak Ismail yang bernama Mahmud. Di masa Mahmud (998 – 1030) ini Ghazni mencapai kejayaan. Ia melakukan 17 kali ekspedisi penaklukan ke India dan kesemuanya berhasil. Oleh Khalifah Abbasiah di Baghdad, al-Qadir Billah, ia diberi gelar *Yaminud Daulah* (tangan kanan raja), dan *Aminul Millah* (orang kepercayaan agama). Pengganti Mahmud berikutnya tidak ada yang sehebat Mahmud (Ali, 1980). Setelah wafat, Mahmud digantikan oleh kedua anaknya, yakni Mas'ud dan Muhammad. Pertikaian antara kedua saudara kandung beserta masing-masing anaknya menjadikan Ghazni semakin lemah hingga tidak mampu bertahan dari serangan Dinasti Saljuk. Jadi, Saljuk berperan besar dalam kehancuran Ghazni. Dinasti Ghazni kemudian digantikan oleh Dinasti Ghuri.

Wilayah kekuasaan Ghuri terletak di antara Ghazni dan Herat, yang dulunya wilayah tersebut ditaklukkan oleh Sultan Mahmud pada tahun 1010. Bermula dari pembunuhan pemimpin Ghuri, Qutbuddin oleh penerus Sultan Mahmud, yaitu Bahram, dan dilanjut dengan pertikaian oleh kedua belah pihak, pada akhirnya saudara Qutbuddin yang bernama Alauddin menyerang dan menghancurkan Ghazni. Setelah Alauddin wafat, ia digantikan anaknya, Saifuddin Muhammad, kemudian digantikan lagi oleh Ghiyasuddin, yakni keponakan dari Alauddin. Ghiyasuddin menganeksasi Ghazni dan menjadikannya sebagai provinsi baru. Ia mengangkat adiknya yang bernama Shihabuddin sebagai gubernur di provinsi baru

[15] Sabuktigin adalah mantan budak dari Alptigin yang kemudian karena dedikasinya yang luar biasa ia menjadi menantunya.

tersebut pada tahun 1173. Shihabuddin inilah yang dikenal dengan nama Muizuddin Muhammad bin Sam yang lebih populer dengan nama Muhammad Ghuri (Ali 1980, dan Karim, 2015). Setelah Ghiyasuddin wafat, Muhammad Ghuri menggantian posisi kakaknya sebagai Sultan Ghuri.

Setelah memperkuat Ghazni, Muhammad Ghuri melakukan sejumlah penaklukan di India, yaitu Multan, Sind, dan Punjab sebagai pintu masuk ke wilayah Hindustan. Ia menguasai seluruh wilayah yang dulunya dikuasai oleh Ghazni. Setelah Muhammad Ghuri wafat, ia digantikan oleh Qutbuddin Aibak[16] menantunya yang sekaligus panglima perangnya saat Ghuri menaklukkan India pada perang Tarain II. Ini karena Ghuri tidak mempunyai anak laki-laki sebagai penerus sehingga petinggi istana mengangkat Aibak sebagai sultan di India pada tahun 1206. Inilah awal berdirinya Kesultanan Delhi. Aibak mendirikan masjid raya Delhi dan membangun menara Qutub Minar yang masih dapat disaksian hingga saat ini.

Setelah Aibak wafat, ia digantikan puteranya, Aram Shah. Karena ia tidak cakap memimpin, para pembesar istana menggantinya dengan seorang raja Islam yang besar bernama Iltutmish (1211 1236)[17]. Iltutmish adalah menantu dari Aibak. Iltutmish melanjutkan kekuasaan Islam ke wilayah utara India. Ia juga dikenal tangguh dalam membendung serangan Mongol yang dipimpin oleh Chengis Khan. Sebelum wafat ia menunjuk puterinya Raziyah untuk menggantikannya. Selanjutnya karena Raziyah perempuan maka digantikan oleh saudaranya bernama Rukunuddin Firuz, kemudian dkembalikan lagi ke Raziyah. Setelah Raziah dijatuhkan, penggantinya adalah saudaranya sendiri lagi, yakni Bahram Shah (1240 – 1242). Namun, seperti Rukunuddin, Bahram tidak cakap memimpin. Akhirnya pamannya yang bernama Nasiruddin Mahmud (1246 –

[16] Aibak dahulunya adalah seorang budak yang lahir dari keluarga merdeka. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu, dan ahli di bidang militer.

[17] Sama seperti Aibak, Iltutmish juga dahulunya seorang budak.

1266) diangkat menjadi Sultan Delhi. Nasiruddin adalah sultan yang saleh dan sederhana. Karena Nasiruddin tidak mempunyai anak laki-laki, maka ia menunjuk Ghiyasuddin Balban (1266 – 1287) untuk menggantikannya (Karim, 2015). Balban memimpin dengan tangan besi. Jasanya yang menonjol adalah keberhasilannya mengusir tentara Mongol yang berusaha menganeksasi anak benua India. Setelah Balban wafat, ia digantikan oleh cucunya yang bernama Muizzuddin Kaiqubad (1287 – 1289). Masa Muizzuddin Kaiqubad berlalu begitu saja, tanpa ada catatan sejarah yang istimewa (Qureshi, 1944). Ia menyerahkan roda pemerintahannya kepada perdana menteri Nizamuddin yang sangat arogan (Ali, 1980). Karena tidak pandai menjalanakan roda pemerintahan, para pembesar istana menjatuhkannya dan mengangkat Kaimurs, anak Kaiqubad yang masih berumur 3 tahun, sebagai sultan Delhi. Ini dengan tujuan agar pemerintahan tidak keluar dari keturunan Balban. Dengan sultan balita, kondisi pemerintahan menjadi kacau hingga berujung pada berakhirnya Dinasti Aibak ini. Tidak ada lagi pemimpin yang setangguh Balban, dan ini juga menandai akhir dari pengaruh kekuasaan Turki di India. Selanjutnya, kesultanan Delhi dikuasi oleh Dinasti Khalji dari Afghanistan.

Sultan Delhi pertama dari Khalji adalah Jalaluddin Firuz Khalji (1290 – 1296). Ia naik tahta setelah berusia 75 tahun melalui peralihan kekuasaan dari Balban[18]. Jalaluddin Khalji bertemperamen halus, tidak tegas, dan tidak percaya diri untuk melakukan reformasi besar-besaran (Ali, 1980). Karena pada dasarnya gagal membendung invasi Mongol, Jalaluddin kemudian dibunuh oleh keponakan yang juga menantunya sendiri, yakni Alauddin Khalji, yang akhirnya menggantikan kedudukannya sebagai Sultan Delhi. Di tangan Alauddin, Kesultanan Delhi mencapai puncak kejayaannya. Setelah Alauddin wafat digantikan oleh Quthubuddin Mubarak Khalji, dan

[18] Peralihan kekuasaan ini dikenal dengan Revolusi Khalji.

selanjutnya oleh Khusru. Akan tetapi kesultanan mengalami krisis akibat ketidakmampuan mereka memimpin negara dengan benar, hingga ahirnya Dinasti Khalji berakhir dan berganti ke ke Dinasti Tughlug (1320 – 1414).

F. Sultan Alauddin Khalji (1296 – 1316)

Alauddin merupakan penguasa ambisius, kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah India, termasuk Deccan yang bahkan penguasa sekaliber Mahmud Ghaznawi, Mu'izzuddin Ghuri dan Balban tidak dapat menembus wilayah tersebut disebabkan kondisi alamnya yang sulit. Oleh karena itu, Alauddin juga dijuluki "sang penakluk Asia".

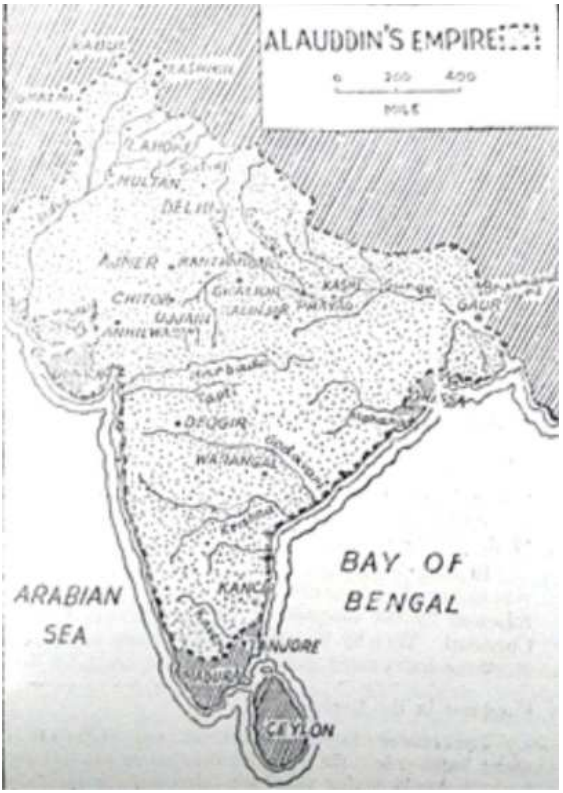

Gambar 1. Wilayah Kekuasaan Alauddin Khalji

Di masa awal pemerintahannya ia banyak disibukkan dengan upaya penumpasan pemberontakan beserta upaya pencegahannya. Ia memaksimalkan divisi mata-mata (intelijen) untuk mengumpulkan informasi penting dari ibukota dan provinsi. Dia berusaha mengekstrak kekayaan sebanyak mungkin dari rakyatnya dengan menuntut pajak penuh dari kepala desa dan meningkatkan pajak untuk petani. Alauddin juga mengeluarkan aturan ketat yang melarang mereka berkumpul atau mengadakan pesta pernikahan tanpa izin kerajaan dalam rangka mencegah munculnya persekongkolan.

Di bidang militer, selain berprestasi melawan invasi Mongol, Alauddin Khalji juga sukses menaklukkan wilayah-wilayah India yang belum tertundukkan kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah India. Selama dua puluh tahun pemerintahannya dipenuhi dengan aktivitas akuisisi kembali wilayah yang sempat lepas dari kekuasaan kesultan Delhi, penyerangan dan penaklukan wilayah baru, dan penundukkan wilayah baru tanpa paksaan. Tujuan utama dari ini semua adalah memperoleh upeti sebanyak mungkin untuk kemakmuran kesultanan Delhi dan sekaligus mengamankan kedaulatannya.

Alauddin adalah sultan pertama yang benar-benar serius merencanakan reorganisasi sistem pendapatan dalam rangka memaksimalkan pendapatan pemerintah. Pada masa Alauddin tradisi Iqta' yaitu pemberian tanah kepada pejabat negara sebagai pengganti gaji diminimalisir hanya untuk posisi-posisi tertentu seperti pejabat negara yang banyak berjasa bagi kesultanan Delhi.

G. Pembaruan Ekonomi di Era Alauddin Khalji

1. Latar Belakang Pembaharuan Ekonomi

Sebelum Alauddin Khalji berkuasa, para penguasa muslim sebelumnya tidak bisa menetralisir perbedaan akarakter antara umat Islam dan hindu, sehingga unsur-unsur lokal dan aspirasi rakyat

terabaikan. Kondisi perekonomian negara dalam keadaan porak poranda.

Semasa Dinasti Khalji dipimpin oleh Jalaluddin Khalji, pusat kota delhi dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak aman. Banyak terjadi aksi-aksi perampokan, kekerasan, dan aksi kejahatan lainnya. Banyak orang-orang Mewat dari belahan utara yang sering menyerang Delhi. Sebagai akibatnya, banyak pedagang dari luar kota dan dari manca negara tidak bersedia berdagang di Delhi karena khawatir akan keamanannya. Terhadap kondisi tidak aman ini, Sultan Jalaluddi memilih memindahkan istananya di Kilughiri, karena kewalahan menghadapi masyarakat yang liar. Di sisi lain, India telah berkali-kali mendapat serangan dari bangsa Mongol.

Kondisi yang demikian ditambah dengan pengalaman Alauddin Khalji menjadi gubernur dan juga pengalamannya dalam menaklukkan sejumlah wilayah, menjadikan ambisinya bangkit untuk mengambil alih kekuasaan Khalji. Setelah Alauddin mulai berkuasa pada tahun 1296 M, ambisinya terus menjadi. Ia ingin menjadi nabi, dan juga ingin seperti Aristoteles menjadi Alexander Agung yang menguasai dunia. Namun kemudian ambisinya tersebut dapat diredam oleh Alaul Mulk, wazirnya. Alaul Mulk menyarankan agar Alauddin Khalji lebih berkonsentrasi melanjutkan penaklukan ke wilayah-wilayah India yang belum ditalukkan.

Di sisi lain, bangsa Mongol tidak henti-hentinya melakukan serangan berupaya untuk menduduki India. Serangan terbesar terjadi pada tahun 1299 di mana pada saat itu lebih dari 200.000 tentara mongol d bawah kepemimpinan Quthluq Khawja mengepung delhi. Saat itu salah satu sahabat Sultan yang juga panglima perang bernama Zafar Khan tewas terbunuh.

Serangan Mongol yang menuntut kewaspadaan dan pertahanan tingkat tinggi, dan program penaklukan wilayah-wilayah Indikator lain, serta upaya untuk menjadikan Delhi dan kota-kota lain di India sebagai kota yang aman untuk menjalankan aktivitas ekonomi,

menjadikan negara membutuhkan tentara dalam jumlah yang besar. Tentara yang loyal dan disiplin tinggi. Pada akhirnya Alauddin Khalji membuat system perekrutan tentara dengan jumlah yang besar. Semua tentara itu mendapat gaji dari pemerintah, sehingga pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar.

Alauddin Khalji berpendapat bahwa jika ingin negara kuat dan rakyat sejahtera maka para pegawai negara (PNS) dan tentara tidak boleh mempunyai uang secara berlebihan dan mereka juga tidak boleh dianakemaskan. Karena jika uang terlalu berlebih maka akan berpotensi memuncukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tentara dan pegawai dalam jumlah besar, semua mendapat gaji dari pemerintah, tidak boleh mempunyai uang berlebihan, namun dituntut loyalitas dan disiplin tinggi. Untuk mempertahanan hal ini, maka rakyat (pegawai dan tentara) harus hidup nyaman dan sejahtera dengan gaji yang mereka dapatkan. Sebagai konsekuensinya, harga-harga barang semua komoditas harus terjangkau bagi mereka. Atas dasar itulah Alauddin Khalji menjalalanka kebijakan untuk pembaharuan ekonominya dengan fokus pada pengendalian harga yang sangat ketat.

2. Pembaharuan Ekonomi yang Dilakukan Alauddin Khalji

Alauddin Khalji adalah pemimpin yang sangat memahami kondisi rakyatnya. Di awal masa pemerintahannya ia dengan gigih memperbaiki sistem politik, ekonomi, dan administrasi negara. Menurutnya ekonomi merupakan faktor utama dalam kemajuan negara, sehingga ia menjadikan reformasi ekonomi sebagai ciri utama dari masa pemerintahannya.

Meskipun mendapat rampasan perang yang melimpah dari daerah Deccan (India Selatan), Alaudin juga membutuhkan biaya yang besar untuk menggaji dan membiayai tentaranya, juga untuk menjalankan roda pemerintahannya. Terlebih lagi setelah beberapa kali mendapat serangan dari Mongol dan juga aksi penundukannya terhadap wilayah-wilayah sekitar kekuasaannya, mengharuskan

Alaudin merekrut tentara dalam jumlah yang besar, memberi gaji, tunjangan dan fasilitas lain yang layak agar mereka hidup tentram. Untuk itulah Alaudin melakukan pembaharuan ekonomi melalui cara yang dikenal dengan sistem pengendalian harga (*price control system*).

Sistem pengendalian harga digunakan untuk mengatur harga kebutuhan pokok seperti gandum dan beras, dan juga terhadap barang-barang kebutuhan sekunder, seperti sayur-mayur, buah-buahan, susu, kain, sepatu, dan lain-lain. Intinya, pendendalian ini untuk menekan inflasi (*war-time*). Alauddin Khalji mengejar biaya kebutuhan hidup yang murah bagi tentara dan seluruh rakyatnya.

Alauddin Khalji mengeluarkan regulasi untuk mengendalikan harga aneka komoditas hingga harganya menjadi tetap murah. Terigu dijual dengan harga 7,5 jital[19] per maund, gandum 4 jital per maund, beras 5 jital per maund, gula 1,5 jital per seer[20], mentega 1 jital per 2,5 seer, garam 5 jital untuk 2,5 maund[21], dan lain-lain. Demikian juga dengan barang dagangan lain, seperti kuda kelas terbaik dijual seharga 120 tanka, susu sapi 4 tanka, dan susu kerbau 6 tanka. Dengan pengendalian ini, tidak boleh ada pedagang yang menaikkan harga secara sepihak. Menaikkan harga yang terlalu tinggi digolongkan sebagai tindakan kriminal (Ali, 1980).

Kebijakkan menetapkan harga kebutuhan masyarakat secara ketat akan menjadi sia-sia bilamana komoditas yang diperdagang-kan dalam kondisi langka atau berlebihan. Untuk mengatasinya Alauddin Khalji membuat program tentang pengendalian kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, Alaudin menunjuk beberapa daerah untuk ditanami biji-bijian, seperti daerah Khalsa atau daerah-daerah pedesaan di Dehli. Sultan Alauddin Khalji tidak hanya mengendali-

[19] Jital adalah nilai uang setara dengan 6 peso.
[20] 1 seer setara dengan 2 kg.
[21] 1 maund setara dengan 40 kg.

kan harga dan suplai kebutuhan, tetapi dia juga mengendalikan tranportasi untuk membawa dan mengirim barang. Setiap pedagang yang membawa barang dari satu daerah ke daerah yang lain harus mendaftarkan diri dan segala macam fasilitas untuk kebutuhan pengiriman atau pengambilan barang disediakan oleh negara untuk mereka. Untuk mengatur antara barang dan kebutuhan, Alauddin Khalji menetapkan rasio penjualan (*rationing system*). Rasio ini untuk mengatasi penjualan barang yang langka dan melimpah. Sebagai contoh, sultan melarang distributor yang terdaftar untuk menjual gandum atau beras dari stok pemerintah melebihi setengah Maund kepada setiap orang. Dalam kondisi darurat, pemerintah akan melarang orang membeli beras dalam jumlah yang banyak (Ali, 1980).

Selain menerapkan sistem pengendalian harga, perbaiakan fiskal dilakukan oleh Alauddin Khalji melalui pembaharuan sistem perpajakan, yaitu dengan menarik pajak rumah, pertanian dll. Ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Alauddin Khalji juga menghukum pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan. Ketika seorang pedagang mencuri timbangan dan tertangkap maka pemerintah memotong daging orang itu seberat timbangan yang dicuri. Implikasi dari aturan ini, para pedagang melebihkan timbangan ketika mereka menjual sesuatu.

Untuk menjalankan program di atas, Alaudin membuat dua lembaga pemerintahan yaitu *Shahana-i-Mandi* yang dipimpin oleh Malik Qabul dan *Diwan-i-Riyasat* yang dipimpin oleh Yaqub. *Shahana-i-Mandi* bertanggungjawab pada pasar kebutuhan pokok, yakni beras, gandum, dan aneka biji-bijian. Sementara itu, *Diwan-i-Riyasat* bertanggungjawab pada masalah sandang dan komoditas umum lainnya. Alauddin Khalji juga menunjuk sejumlah mata-mata yang akan memberikan laporan langsung kepada sultan mengenai kondisi pasar (Ali, 1980). Mata-mata Alauddin Khalji terdiri dari 3 lapisan, yaitu seorang mata-mata kondisi lapangan dimata-matai oleh seorang mata-mata yang lain, dan mata-mata tersebut juga

dimata-matai oleh mata-mata yang lain lagi yang akan memberikan laporan langsung ke Alauddin. Sistem mata-mata inilah yang merupakan faktor kunci keberhasilan pembaharuan ekonomi yang diterapkan oleh Alauddin Khalji.

H. Kesimpulan

Dinasti Abbasiyah termasuk dinasti yang berkuasa lama akan tetapi hancur karena egoisme, rakus kekuasaan, dan menjadikan agama, yang tadinya pondasiutama dalam sebuah pemerintahan sebagai pelengkap semata, terpisah dari sistem kerajaan. Konflik internal dan faktor eksternal (serangan Mongol) juga menghantarkan Dinasti Abbasiyah kepada kehancuran. Reformasi besar-besar dan mengembalikan citra baik Bangsa Mongol muncul tatkala Gazhan Khan menjadi pemimpin dinasti Ilkhaniyah. Bangsa Mongol yang identik dengan perilaku barbar, kekerasan, dan penghancuran, sebagai akibat dari ambisi seorang pemimpin (Jenghis Khan) berubah total setelah bersentuhan dengan islam. Hal ini merubah tradisi suatu bangsa yang dikalahkan cenderung mengikuti budaya bangsa mengalahkan, tetapi Mongol, sebagai bangsa yang mengalahkan mengambil peradaban kaum muslimin yang dikalahkan.

Kebijakan ekonomi Ghazan Khan, fokus pada perbaikan pertanian, baik dalam bentuk memperluas lahan pertanian, maupun perbaikan sistem pajak pertanian. Pajak pertanian akhirnya menjadi sumber keuangan negara yang utama untuk pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Ghazan Khan juga memperbaiki moral sumberdaya manusianya melalui pemberantasan KKN, memperbaiki manajemen pencatatan kekayaan negara, dan membangun lembaga perbendaharaan. Selain memperbaiki fiskal dengan reformasi manajemen perpajakan, Ghazan Khan juga memperbaiki sistem moneter dengan menerbitkan uang koin emas dan perak.

Sementara itu, kebijakan ekonomi Sultan Alauddin Khalji fokus pada pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok maupun sekunder. Itu semua untuk menjamin bahwa semua harga terjangkau oleh tentara dan rakyatnya. Untuk mengawal kebijakan tersebut, Alauddin Khalji juga mengendalikan pasokan hingga distribusinya, sehingga tidak memunculkan kelangkaan dan inflasi. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan negara, Alauddin Khalji memperbaiki sistem fiskal dengan mereformasi praktik perpajakan. Untuk memastikan kebijakannya berjalan dengan baik, Alauddin Khalji menerapkan sistem mata-mata secara berlapis.

Dari kebijakan yang telah diambil oleh Ghazan Khan maupun Alauddin Khalji, dapat disimpulkan bahwa perbaikan ekonomi suatu bangsa harus meliputi semua aspek. Tidak hanya masalah produksi, distribusi, dan konsumsi saja melainkan juga aspek manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia, pengawasan, dan pengendalian, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Itu semua untuk menjamin pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

I. Daftar Rujukan

Ali, K. *History of India, Pakistan, and Bangladesh*. Dacca: Ali Publications, 1980.

Dien (Ad), Hisyam. *Sejarah Islam Mongol, Bangsa Penghancur yang Ditaklukan*. Diakses 9 Oktober 2016. http://www.globalmuslim.web.id/2011/07/sejarah-islam-mongol-bangsa-penghancur.html.

Fares (El), Taufan. *Ghazan Khan Sang Pembaharu*. Diakses, 11 Oktober 2016 http://taufanlebahmerah.blogspot.co.id/2011/05/ghazan-khan-sang-pembaharu. html

Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Terj. Djahdan Humam. Yogyakarta: Kota Kembang, 1997.

Hasan, Masudul. *History of Islam: Classical Period 1206 1900 C.E.* Delhi: Adam publishers & Distributers, 1995.

Hamka. Sejarah Umat Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hatmini. Kebijakan Politik Ekonomi Pemerintahan Sultan Alauddin Khalji Di India (1296-1316M). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga (tidak dipublikasikan), 2005.

Iariputra. *Ghazan Khan: Sang Ekonom Jenius dari Ilkhan.* Diakses 11 Oktober 2016. https://msiuii.wordpress.com/2010/10/24/ghazan-khan-sang-ekonom-jenius-dari-ilkhan/

Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Cet. ke-6. Yogyakarta: Bagaskara, 2015.

_____. *Bulan Sabit di Gurun Gobi Sejarah Dinasti Mongol-Islam di Asia Tengah.* Yogyakarta: SUKA Pres, 2014.

_____. "Ghazan Khan: Pemimpin Besar Mongol Islam (Analisis Historis Atas Sistem Pemerintahan dan Pembaruan", *Jurnal Millah,* Vol. V No. 2, Februari 2006,

_____. *Islam di Asia Tengah: Sejarah Dinasti Mongo-Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, 2006.

Lambton, Ann K. S. *Continuity and Change in Medieval Persia: Aspects of*

Administrative, Economic, and Social History 11th-14th Century. London: I. B. Taurist and Co. Ltd, 1988.

Qureshi, Ishtiaq Husain. *The Administration of The Sultanate of Dehli.* Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1944.

WIKIPEDIA. *Kekasisaran Mongolia.* Diakses 10 Oktober 2016. https://id.wikipedia. org/wiki/Kekaisaran_Mongolia.

_____. *Multan*. Diakses 10 Oktober 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Multan

_____. *Ilkhanate*. Diakses 9 Oktober 20116. https://en.wikipedia.org/wiki/ Ilkhanate #Family_tree.28-House_of-Hulagu.29

http://www. globalmuslim.web.id/2011/07/

POLITIK EKONOMI DINASTI MUGHAL SULTAN AKBAR DAN SULTAN AUGRANGZEB

Muhammad Tho'in

A. Pendahuluan

Politik dan ekonomi dalam kajian kenegaraan selalu berdampingan. Politik akan berjalan dengan baik manakala kondisi ekonomi suatu negara stabil, begitu pula sebaliknya. Sehingga jika kita lihat kepemimpinan dari dulu sampai saat ini yang dinilai memiliki keberhasilan selalu mensinergikan antara keduanya di samping bidang-bidang yang lain. Artinya bahwa politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan terkait dengan kebijakan seorang pemimpin negara (Asy'arie, 2016), baik negara dalam bentuk kerajaan (dinasti) maupun dalam bentuk yang lain.

Dinasti Mughal atau Mogul merupakan dinasti Islam di Anak Benua India yang didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur dari tahun 1526 M sampai dengan tahun 1530 M (Sodiqin, 2003). Zahiruddin Muhammad Babur adalah keturunan dari Timur Lenk, seorang penguasa Islam yang besar dari Mongol. Setelah mengalami pasang surut, kemudian berkembang pesat dengan naik tahtanya Sultan Akbar. Pemerintahannya banyak melakukan ekspansi, sehingga wilayah Dinasti Mughal semakin meluas dari waktu ke

waktu. Penaklukan berbagai wilayah berdampak sangat besar terhadap kemakmuran negara maupun masyarakat, yang dipengarui oleh faktor *ghanimah*. Sultan Akbar tercatat berhasil menstabilkan berbagai bidang antara lain bidang politik, bidang ekonomi, dan sosial serta menjadikan pemerintahannya sebagai masa awal keemasan dinasti ini (Shodiqin, 2003: 184-185).[1]

Setelah Akbar turun tahta, dua sultan yang memerintah kemudian adalah Sultan Jahangir dan Sultan Shah Jahan. Pemerintahan kedua sultan ini lebih memfokuskan pada penyelesaian pemberontakan di berbagai wilayah taklukkannya, sehingga kebijakan-kebijakan dalam bidang yang lain tidak dapat maksimal seperti kebijakan yang dilakukan Sultan Akbar (Robinson, 2002: 82). Sepeninggal Sultan Shah Jahan, kepemimpinan dinasti ini dipegang oleh Sultan Aurangzeb. Aurangzeb merupakan seorang pemimpin selayaknya Umar bin Abdul Aziz yang merupakan Khalifah Umayyah. Pribadi yang tidak gentar menghadapi musuh-musuh dan pekerja keras dalam mencapai tujuannya (Hasan, 1995: 432). Aurangzeb melakukan perbaikan di semua lini, termasuk yang luar biasa adalah pada bidang perekonomian melalui kebijakan-kebijakannya. Karena negara mengalami krisis keuangan yang sangat mengkhawatirkan akibat warisan dari pemimpin sebelumnya. Dalam sejarah, Aurangzeb menjadi sultan terakhir yang membawa dinasti ini pada stabilitas dalam berbagai bidang sebagaimana yang dilakukan Sultan Akbar. Ia mengeluarkan berbagai kebijakan yang berbeda dari pendahulunya.

Oleh karenanya menganalisis upaya Sultan Akbar dan Sultan Aurangzeb dalam menstabilkan perekonomian, kemudian mengkaji kondisi perekonomian India seiring berbagai upaya

[1] Sultan Akbar mengelurkan kebijakan-kebijakan di bidang politik dan pemerintahan serta keagamaan. Dia menerapkan politik *Sulh-e-Khul,* menciptakan *Din-e-Ilahi* dalam bidang keagamaan, serta dalam bidang sosial mendirikan *Mansabdharis* (lembaga *public service).*

menstabilkan ekonomi yang dilakukannya yang berdampak terhadap sektor lainnya serta pembangunan ekonomi.

Di sini muncul pertanyaan: Bagaimana upaya Akbar dan Aurangzeb untuk melakukan stabilisasi ekonomi pemerintahan? dan bagaimana dampak penetapan stabilisasi ekonomi yang dilakukan keduanya terhadap kondisi negara?

B. Sultan Akbar

Sultan Akbar merupakan pengganti raja Humayun yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Akbar merupakan raja Mughal yang paling kontroversial dibandingkan pemimpin pendahulu dan sesudahnya. Tetapi kepemimpinan yang kontroversial tersebut justru menjadikan kerajaan ini mencapai puncak keemasannya. Masa pemerintahan Akbar dikenal sebagai masa kebangkitan sekaligus kejayaan Dinasti Mughal sebagai dinasti Islam yang besar di India. Ketika Akbar menerima tahta kerajaan usianya baru menginjak 14 tahun, sehingga segala permasalahan serta urusan pemerintahan awalnya dipercayakan kepada Bairam Khan yang merupakan penganut aliran Syi'ah. Pada awal masa kepemimpinannya, ia banyak menghadapi pemberontakan dari sisa-sisa keturunannya Sher Khan Shah yang kala itu masih berkuasa di wilayah Punjab. Dari perberontakan-pemberontakan tersebut yang paling mengkhawatirkan serta mengancam kekuasaannya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang mampu menguasai dan menduduki Gwalior serta Agra. Para pasukan pemberontak tersebut berusaha memasuki dan menguasai kota Delhi. Bairam Khan menghadapi pasukan pemberontak tersebut sehingga terjadilah peperangan yang dahsyat yang disebut Panipat II (1556 M). Dalam peperangan tersebut Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian Himu dieksekusi dengan hukuman mati. Dengan demikian, kemenangan ini mengakibatkan Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh di bawah kekuasaan dinasti Mughal.

Setelah Akbar dewasa, langkah pertama yang ia lakukan adalah berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang dinilai sudah memiliki pengaruh kuat dan terlalu memaksakan kepentingan aliran Syi'ah yang dianutnya. Bairam Khan yang mengetahui dirinya akan disingkirkan melakukan pemberontakan, tetapi pemberontakannya dapat dikalahkan oleh Akbar, hal itu terjadi di Jullandur pada tahun 1561 M. Setelah berbagai permasalahan dalam negeri dapat diatasi, Sultan Akbar mulai menyusun berbagai program ekspansi untuk memperluas wilayah Dinasti Mughal. Usahannya ekspansinya tersebut berhasil menguasai banyak wilayah diantaranya; Chundar, Chitor, Ghond, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Bihar, Surat, Bengal, Orissa, Kashmir, Deccan, Narhala, Gawilgarh, Ahmadnagar, serta Asirgah. Wilayah kekuasaannya yang sangat luas diperintah oleh Akbar dalam suatu pemerintahan militeristik. Dimana pemerintah daerah dipegang oleh kepala komandan (*Sipah Salar*), kemudian para pejabatnya wajib melakukan latihan kemiliteran (Yatim, 2000: 149). Keberhasilan ekspansi militernya menandai berdirinya Dinasti Mughal sebagai kerajaan besar di India. Dua gerbang India yaitu kota Kabul sebagai gerbang menuju arah Turkistan, serta kota Kandahar sebagai gerbang menuju arah Persia, dikuasai oleh Dinasti Mughal.

Keberhasilan Akbar tersebut membuatnya ingin mendirikan negara bangsa atau nasional. Maka kebijakan yang dijalankan tidak begitu menonjolkan spirit Islam, tetapi usahanya adalah bagaimana mempersatukan adanya berbagai etnis yang membangun dinastinya itu dapat diayomi semua. Sehingga dalam agama ia menetapkan politik toleransi universal (*Suulkhul*), dimana semua rakyat memiliki kedudukan yang sama dan tidak dapat dibedakan dari segi etnis maupun agama yang akhirnya kerukunan masyarakatnya dapat tercapai (Ali, 1996: 534).

Akbar juga membuat undang-undang kerajaan tentang *Din Illahi* yaitu sikap serta pandangan agama resmi kerajaan dari unsur-unsur agama Islam, agama Hindu, serta agama Persia Kristen serta

agama-agama lain yang harus dianut seluruh masyarakat. Tetapi dalam praktiknya hanya sedikit yang mengikuti langkahnya ini. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi keberhasilannya dalam mengawali masa kemajuan dan kejayaan Dinasti Mughal di India (Syukur, 2002: 142).

C. Kebijakan Politik Ekonomi Sultan Akbar

Sultan Akbar melakukan terobosan dengan kebijakannya menjadikan sektor pertanian atau agraria sebagai salah satu pendapatan negara yang penting. Karena dengan melihat wilayah Dinasti Mughal yang luas ini, Akbar memberikan perhatian besar terhadap sektor ekonomi ini. Saat kepemimpinannya hasil pertanian melimpah, seperti biji-bijian, kacang, padi, tebu, rempah-rempah, sayur-sayuran, tembakau, nila, kapas, serta bahan-bahan celupan (Yatim, tt: 161). Perhatian yang diberikan pemerintah dengan membebaskan pajak pertanian, terutama petani miskin, pemerintah mempermudah dan memberikan fasilitas irigasi air, dan memberikan bantuan bibit serta pupuk bagi para petani, bahkan petani yang tidak mempunyai modal untuk menggarap sawah diberikan modal oleh negara dengan menggantikannya saat panen, jika tidak panen negara membebaskan pinjaman modal tersebut.

Hasil pertanian yang melimpah tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga diekspor ke beberapa negara seperti negara-negara Eropa, Afrika, Arabia, serta negara-negara di Asia Tenggara. Tidak hanya hasil pertaniannya saja yang diekspor tetapi hasil kerajinan masyarakatnyapun juga diekspor, seperti kain tipis bahan gordiyn dan pakaian tenun yang banyak diproduksi di Bengawan dan Gujarat. Sehingga perdagangan Dinasti Mughal menjadi perdangan dengan jangkauan internasional, yang menyebabkan pendapatan kas negara semakin banyak.

Kebijakan ekonomi yang lain yang diterapkan Akbar untuk menstabilkan perekonomian dan mensejahterakan rakyatnya

adalah, dengan reformasi suulkhulnya atau toleransi universal, antara lain (Thohir, 2009: 206):

1. Melakukan penghapusan *Jizyah* atau pajak per kapita yang diberikan dari penduduk non-muslim. Sehingga masyarakat non-muslim merasa lebih sejahtera dan aman saat pemerintahan Akbar. Dengan keadaan ini masyarakat baik muslim maupun tidak mendapat perlakukan yang sama.
2. Akbar memberi dan menambah pelayanan serta fasilitas pendidikan dan pengajaran yang sama setiap masyarakat tanpa pandang etnis, agama dan lain-lain, hal tersebut dilakukannya melalui pendirian berbagai madrasah serta memberikan tanah-tanah wakaf untuk lembaga-lembaga sufi yang berupa *iqtha* atau *maddad ma'asyi.* Dengan banyaknya masyarakat yang dapat bersekolah menyebabkan pola kerja masyarakatnya menjadi lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat Mughal meningkat.
3. Akbar membentuk suatu undang-undang perkawinan baru, isinya antara lain yaitu melarang masyarakat kawin muda, berpoligami bahkan yang sangat kontroversial menggalakkan kawin campur antaragama. Hal ini ia lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas, kesejahteraan, serta integrasi antara masyarakat muslim dan masyarakat non-muslim.
4. Melakukan penghapusan terhadap pajak-pajak pertanian yang dinilai memberatkan masyarakat, terutama bagi para petani miskin baik petani muslim maupun non-muslim. Dengan pajak pertanian dihapus, para petani semakin bersemangat dalam menjalankan aktivitas pertaniannya, sehingga menyebabkan hasil pertanian melimpah dan menyebabkan perdagangan khususnya dari hasil pertanian semakin baik.
5. Melakukan penghapusan terhadap tradisi perbudakan yang berasal dari tawanan perang serta mengatur khitan bagi anak-anak.

D. Sultan Aurangzeb

Selain Sultan Akbar salah satu sultan atau raja Dinasti Mughal yang mengantarkan kerajaan ini kepada keemasan dan kejayaan adalah Abul Muzaffar Muhyiddin Muhammad Aurangzeb Alamgiratau yang sering dikenal dengan nama Sultan Aurangzeb. Aurangzeb memerintah selama 47 tahun yaitu dari tahun 1659 sampai tahun 1707 M. Banyak prestasi yang dicapai pada masa kepemimpinannya terutama dalam menyelamatkan negara dari kehancuran perekonomian. Sehingga kepemimpinannya mampu menorehkan tinta emas bagi sejarah Dinasti Mughal seperti yang dilakukan oleh Sultan Akbar.

Aurangzeb memiliki gelar Abu al-Muzafar Muhyi al-Din Muhammad Aurangzeb Bahadur Alamghir Padshah Ghazi. Masa pemerintahannya dinilai oleh W. H. Moreland, menandai adanya sejarah baru bidang perekonomian India pada abad XVII M. Ia membangun hubungan dagang dengan para pedagang dari Eropa seperti Portugis, Inggris, serta Belanda untuk memajukan perekonomian. Perdagangan sangat memegang peran sentral karena wilayah India sebagian besar merupakan jalur perdagangan internasional dan wilayah perniagaan yang maju (Moreland, 1994: 14). India kaya akan berbagai hasil pertanian menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah dalam mengembangkan bidang perniagaan guna menyokong perekonomian negara (Moosvi, 1993: 323).

E. Kebijakan Politik Ekonomi Sultan Aurangzeb

Di masa pemerintahannya, bubuk mesiu dari Bihar, kain dari Madras, gula dari Bangla, serta kain Moslin sebagai kebanggaan pengrajin Bangla menjadi produk unggulan pasar Eropa (Edwardess dan Garret, 1980: 269).

Kebijakannya yang sangat menonjol di bidang ekonomi ialah membebaskan masyarakat dari pajak yang tidak sesuai dengan

hukum Islam dan memberatkan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, meskipun sumber pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak-pajak itu (Elliot dan Dawson, 1877: 247). Upayanya tersebut dimulai tahun 1659 M, ketika munculnya kelaparan akibat kurangnya hujan serta peperangan yang terjadi terus-menerus (Fuhaidah, 2004: 78), tetapi ia berhasil menjaga stabilitas perekonomian negara. Aurangzeb menghapus sekitar 80 pajak yang tidak manusiawi, seperti *rahdari* atau pajak transportasi serta *padari* atau pajak atas sewa tanah dalam berdagang yang diperoleh dari pedagang, pengrajin, dan barang tenun. Kemudian pajak lainnya yang dihapus adalah *charai* atau tanah penggembalaan, *tuwa'an* atau pajak dari perayaan agama Hindu, dan *jatra* atau pajak atas rumah judi, lokalisasi dan lain sebagainya.

Selain berbagai kebijakan di atas, Aurangzeb mengembangkan sektor perdagangan dengan memanfaatkan letak strategis India sebagai bandar internasional dan sebagai jalur perniagaan baik dari Asia maupun dari Eropa (Dargupta, 1982: 417). Ia juga memperbanyak armada khususnya angkatan laut untuk perdagangan dengan para pedagang asing.Pemerintah memperoleh peningkatan pendapatan Negara yang sangat signifikan melalui sektor ini dari £19.000.000 pada akhir pemerintahan Sultan Akbar menjadi lebih dari £40.000.000 pada masa kejayaannya (Lane-Poole, 1995: 122). Hal ini tentunya sangat menarik untuk dikaji mengingat bahwa kebijakan Aurangzeb banyak berbeda dari kebijakan-kebijakan pendahulunya, karena kebijakan itu membawa dampak yang sangat signifikan di berbagai bidang termasuk ekonomi.

F. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa keadaan perekonomian Dinasti Mughal pada saat kepemimpinan Akbar banyak mengalami kemajuan, terutama di sektor pertanian, dengan dihapukannya pajak-pajak pertanian terutama bagi para petani

miskin baik petani muslim maupun non-muslim menyebabkan para petani semakin bersemangat dalam menjalankan aktivitas pertaniannya, sehingga hasil pertanian melimpah dan menyebabkan perdagangan khususnya dari hasil pertanian semakin baik.

Akbar melakukan terobosan dengan menjadikan sektor pertanian atau agraria sebagai pendapatan negara. Karena dengan melihat wilayah Dinasti Mughal yang luas ini, Akbar memberikan perhatian besar terhadap sektor ekonomi ini. Saat kepemimpinannya hasil pertanian melimpah, seperti biji-bijian, kacang, padi, tebu, rempah-rempah, sayur-sayuran, tembakau, nila, kapas, serta bahan-bahan celupan.

Hasil pertanian tersebut di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga diekspor ke beberapa negara seperti negara-negara Eropa, Afrika, Arabia, serta negara-negara di Asia Tenggara. Tidak hanya hasil pertaniannya saja yang diekspor tetapi hasil kerajinan masyarakatnyapun juga diekspor, seperti kain tipis bahan gordiyn dan pakaian tenun yang banyak diproduksi di Bengawan dan Gujarat. Dengan kegiatan ekspor ini menjadikan perdagangan Dinasti Mughal maju pesat bila dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya.

Politik ekonomi Aurangzeb, dimana keadaan perekonomian menjelang kepemimpinannya banyak mengalami kesulitan, dimana dinasti mengalami defisit keuangan yang mengawatirkan. Hal tersebut terjadi akibat biaya perang serta ambisi raja Syah Jahan membangun berbagai monumen arsitektural. Pemberontakan yang terjadi semasa pemerintahan Shah Jahan tidak dapat terselesaikan sehingga menimbulkan biaya perang yang sangat banyak. Pemasukan kas negara jauh di bawah biaya yang dikeluarkan. Pembangunan Taj Mahal saat pemerintahan Syah Jahan dengan menggunakan kas negara menjadikan tambah melemahnya keadaan perekonomian. Usaha Shah Jahan untuk memperbaiki birokrasi ekonomi serta upaya mendorong sektor pertanian belum berjalan baik, sehingga

permasalahan perekonomian saat pemerintahannya belum selesai hingga ia turun tahta digantikan oleh Aurangzeb.

Aurangzeb melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan stabilitas ekonomi negara. Aurangzeb menyempurnakan dan meneruskan sebagian kebijakan-kebijakan pendahulunya, sekaligus menetapkan berbagai kebijakan yang dapat menstabilkan perekonomian. Kebijakan serta usaha Aurangzeb tersebut antara lain; pertama, Aurangzeb memperbaiki sistem serta tata kelola administrasi perekomian, dimana struktur Diwan atau kementrian ekonomi dinasti yang telah dibentuk masa pemerintahan Akbar dengan menambah Departemen Waqf serta Departemen industri. Kedua, Aurangzeb melakukan penyempurnaan sistem pendapatan negara dengan melakukan perketatan berbagai indikator pengukuran lahan yang telah ditetapkan oleh Todar Mal serta mengembangkan sistem Raiyatwari guna memudahkan pembayaran pajak sampai pada tingkat desa. Ketiga, Aurangzeb menetapkan kebijakan dalam pengendalian sektor fiskal maupun sektor moneter. Ia melakukan pembatasan atau mengurangi pengunaan koin emas, dan menggantinya dengan koin perak dan koin perunggu sebagai mata uang resmi Dinasti Mughal. Aurangzeb mendorong peningkatan pada sektor produksi komiditi ekspor, bahkan membuat kebijakan pengurangan beban pajak personal dengan menghapus sekitar 80 macam pajak yang dinilai memberatkan pada 1664 M untuk meningkatkan daya konsumsi serta peluang kerja bagi masyarakat yang mengakibatkan perekonomian negara semakin membaik.

Kebijakan Aurangzeb menjadikan berbagai aktivitas produksi lebih aktif dibandingkan aktivitas produksi pendahulunya. Keadaan ekonomi masyarakatnya lebih stabil sehingga merangsang adanya iklim politik yang kondusif. Tidakhanya sampai disitu saja, ia berhasil menambah wilayah kekuasaan dan menambah berbagai fasilitas para tentara. Dampaknya terhadap bidang agama yaitu terhapusnya pajak ritual serta memberikan kebebasan dalam melakukan ritual

kegiatan kegamamaan. Aurangzeb membuat kebijakan penetapan gaji untuk imam dan muadzin, membentuk badan sensor moral yang pendanaannya dibiayai dari kas negara. Beberapa fasilitas publik yang ada di wilayah-wilayah tertentu dibangun untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Kemudian bukti sejarah yang dapat disaksikan sampai saat ini ada dibangunya Bâdshâhi Masjid di Lahore. Fasilitas-fasilitan pendidikan ditingkatkan terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat pendidikan pada masa kepemimpinannya, sepertri Aurangzeb daerah Delhi, daerah Sialkot, daerah Jaunpur, serta daerah Thatta atau Sind.

G. Daftar Pustaka

Ali, K, *Sejarah Islam Tarikh Pramodern,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Asy'arie, Musa, Prof. Dr., *Disampaikan dalam Focused Group Discussion Matakuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pascasarjana (S3 Ekonomi Islam) UIN Sunan Kalijaga, Kamis, 15 Desember 2016.

Dargupta, A. "Indian Merchants and the Trade in The Indian Ocean C. 1500-1750, dalam Tapan Raychauduri and Irfan Habib, ed., *The Cambridge Economic History of India, Vol. I: C. 1200-1750.* London: Cambridge Univerity Press. 1982.

Editor, Tim, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.

Edwardess and Garret, *Mughal Rule in India.* London: Oxford University Press. 1980.

Elliot, H. M. and Dawson, John.. *History of India as Told by its Own Historian Vol. VII: From Shah Jahan to The Early Years of The Reign of Muhammad Syah.* London: Trubner and Co. 1877.

Fuhaidah, Ulya. "Kebijakan Keagamaan Sultan Aurangzeb di India (1658-1707M)". Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan. 2004.

Hasan, Masudul. *History of Islam,* Vol. II. Delhi: Adam Publisher and Distributer. 1995.

Moosvi, Shireen. "Mughals: Economy and Internal Commerce" dalam C.E Bosworth, ea., ed. *The Encyclopedia of Islam,* Vol. VII. Leiden: E.J Brill. 1993.

Moreland, W. H *From Akbar to Aurangzeb: A Study in Indian Economic History.* Delhi: Low Price Publication. 1994.

Poole, Stanley Lane. *Aurangzib and The Decay of The Mughal Empire.* Delhi: Low Price Publications. 1995.

Robinson, Francis."Mughal Emperor",dalam Elposito, John L. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern,* Vol. IV, Terj. Tim Mizan. Bandung: Mizan. 2002.

Sodiqin, Ali."Peradaban Islam di Asia Selatan dan Imperialisme Barat", dalam Siti Maryam, dkk., ed., *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik Hingga Modern.* Yogyakarta: LESFI. 2003.

Syukur, Fatah, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

Thohir, Ajid, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2000.

, *Sejarah Peradabab Islam*, Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, tt..

POLITIK EKONOMI ISLAM DI MALAYSIA DAN BRUNAI DARUSSALAM

Sumadi

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam sebagaimana yang kita ketahui mengalami perkembangan yang cukup luas di Asia Tenggara. Ekonomi Islam merupakan bagian dari ajaran Islam, dimana agama Islam adalah agama yang pada saat ini sudah menyebar ke seluruh Benua dan Negara yang ada dipermukaan bumi ini. Karena memang di dalam ajaran Islam itu sendiri menuntut kepada orang yang memeluk agama Islam untuk menyebarkan atau mendakwahkanya kepada umat-umat yang lainnya yang belum mengenal Islam, di dalam Islam pun ajaranya mudah dimengerti sesuai rasional dan juga banyak bukti-bukti ilmiyah bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Maka orang Islam yang berakhlak baik memudahkan dalam penyebaranya agar penduduk sekitar yang non Islam mau menerima, mengikuti, dan masuk agama Islam.

Dalam historiografi Asia Tenggara, diterima secara luas bahwa sejarah Asia Tenggara pada umumnya dibagi menjadi dua periode yaitu, Asia Tenggara yang ter-India-kan dan periode Asia Tenggara yang ter-Islam-kan sebelum datangnya era Kolonial. Penyebaran

Islam ke Kepulauan Asia Tenggara di mulai sekitar akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14. Kedatangan Islam menandai awal penelusuran *lanskap sosio-politik* dan *kultural indigenous* di dunia melayu sebelum penetrasi budaya hindu serta asal-usul dan proses akulturasi dari pengaruh Hindu dan Islam di kawasan Asia Tenggara.

Masa prasejarah kepulauan Asia Tenggara tidak terlalu jelas. Orang-orang dari kepulauan yang menggunakan rumpun bahasa *Autronesia* itu mengawali migrasi ke arah selatan dari daratan Asia menuju kepulauan Asia Tenggara antara 3000 SM hingga 1000 SM. Riset yang dilakukan oleh para antropolog, arkeolog dan pakar linguistik, menyebutkan bahwa penduduk kepulauan Malaya ini berpindah tempat dari Cina Selatan menuju pulau-pulau yang sekarang dikenal sebagai Filipina sekitar tahun 2500 SM dan kemudian menyebar ke Malaysia dan Indonesia. Penduduk awal Asia Tenggara menganut Animisme sebelum masuknya Hinduisme yang datang dari anak benua India. Agama-agama asli orang *austronesia* adalah *Shamanisme* atau *Animisme* yang mengakui bahwa manusia, binatang, pohon, tumbuhan, batuan, arus sungai dan gunung, mengandung kekuatan spritual yang sangat kuat.

Teori yang berasal-usul Arab ini sangat populer dikalangan orang Eropa, khususnya sarjana-sarjana belanda tahun 1860-an. *Drewes* menguraikan dasar pemikiran aliran ini: "*adalah jelas bahwa di masa lalu, penyebaran Islam di Indonesia dan semenanjung Melayu seharusnya dianggap berasal dari orang Arab. Mengingat Islam berasal-usul tanah Arab, tampaknya masuk akal untuk mencari kaitan antara agama ini dan kehadiran orang-orang arab di mana pun orang arab dan Islam berada. Di Indonesia dan Semenanjung Melayu, orang-orang Arab dapat ditemukan dibanyak tempat. Jadi, tampaknya mereka adalah orang-orang yang membawa Islam ke kawasan Asia Tenggara".*

Aka tetapi dalam bab ini, penulis mencoba secara lebih konkrit mengurai bagaimana aspek poitik ekonomi Islam berkembang dan berperan hingga saat ini khususnya di wilayah Malaysia da Brunai Darussalam.

B. Politik Ekonomi Malaysia

1. Kilasan Sejarah Malaysia

Islam sebagai suatu kekuaan yang diperhitungkan di masa pra kolonialisme dan dalam batas tertentu perjuangan kemerdekaan dalam abad dua puluh, kekuatan dan sumbangan Islam bagi perubahan sosial politik selama ini sering diabaikan, sehingga mucullah pergolakan-pergolakan di dunia Islam mengalami kebangkitan termasuk di Malaysia. Pada awalnya, Malaysia[1] adalah kerajaan federal di Asia Tenggara yang terletak di semananjung Malaka dan sebagian Kalimantan Timur yang penduduknya mayoritas Islam dan konstitusi sebagai agama resmi negara, sehigga syarit Islam ditegakan dengan baik dan benar. Munculnya Islam di Malaysia berkat jasa para pedagang yang mempunyai semangat yang tinggi dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam dari Arab melalui Malaka (Hodgson, 1997). yang saat itu sebagai pusat perdagangan. Karena memang jalur perdagangan merupakan salah satu media yang efektif dalam mengembangkan dan menyiarkan ajaran Islam.

Malaysia dominan masyarakatnya muslim, tampak kelihatan sangat heterogen terutama bila dilihat dari segi etnis, suku dan ras mereka. Karena itu, di Malaysia dapat dijumpai sejumlah kelompok masyarakat muslim Indo-Melayu, bahkan suku Bugis dan Makassar, banyak di sana. Walaupun Malaysia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya dominan muslim, namun tentu masih saja menimbulkan pertanyaan mengenai tempat asal datangnya

[1] Merupakan bagian dari Kepulauan Nusantara yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat pada sekitar abad ke-9, bersamaan dengan masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara. Pengaruh Barat masuk bersamaan dengan mendaratnya para pelaut Portugis di pesisir Malaka pada tahun 1511. Dari sini, mereka meluaskan koloninya ke Kepulauan Nusantara yang kemudian dikenal sebagai Indonesia.

Lihat http://www.al-shia.org/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Malaysia.htm

Islam di sana dan bagaimana pola perkembangannya.

Perkembangan Islam di Malaysia ditandai dengan tumbuhnya institusi-institusi dengan baik hal ini peningkatan kesadaran beragama dalam sosial keagamaan, politik, ekonomi dan lain-lainnya, sebagai contoh sebuah oposisi Islam berkembang yaitu organisasi Kesatuan Nasional Melayu (UMNO) berusaha menyokong oposisi keagamaannya sendiri melalui perekrutan tokoh-tokoh agama dan berjanji memperjuangkan kepentingan Islam dan *Pan-Melayu Islamic Party* (P.M.I.P) yang menjadi juru bicara bagi permusuhan komunitas Muslim terhadap warga cina dan India. Orientasi keislaman P.M.I.P tidak hanya kepudulian ekonomi tetap juga kepedulian terhadap Perkembangan Islam (Lapidus, 1999). Malaysia dewasa ini semakin menunjukkan adanya pluralitas keberagamaan yang dapat memberi perlindugan bagi masyarakat non melayu yang pada umumnya menganut agama non Islam, sehingga mereka hidup berdampingan satusama lain tanpa menimbulkan gejolak

Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan paro barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957. Singapura, Sarawak, Borneo Utara, dan Federasi Malaya bergabung membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Tahun-tahun permulaan persekutuan baru diganggu oleh konflik militer dengan Indonesia dan keluarnya Singapura pada 9 Agustus 1965 (Wikipedia.org, 2009).

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an,

rata-rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka, perdagangan internasional berperan penting di dalam ekonominya. Pada suatu ketika, Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Malaysia merupakan negara yang mempunyai peranan strategik di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan dunia pada umumnya. Di samping berada pada kedudukan geografik yang menjadi laluan perdagangan antarabangsa sejak zaman dahulu. Negara Malaysia adalah negara berkembang dan masih digolongkan pada negara yang berpenghasilan menengah kebawah, tetapi beberapa sektor mendapat prestasi dunia yang telah dicapai Malaysia yaitu record kembar Petronis tertinggi di dunia, selain itu posisi mata uang ringgit cukup tangguh.

Gambar 1: Peta Kepulauan Malaysia

Terletak di semanjung Malaka Asia Tenggara Malaysia yang ibu kotanya Kualalumpur mempunyai luas wilayah 332.370 Km2

atau 2,5 kali pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas wilayah berada 1.036 Km menyeberangi laut China selatan tepatnya di utara pulau Kalimantan dan lainnya ada di pulau Penang. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Malaysia berkisar 22.229.040, bahasa resminya bahasa Melayu. Sedangkan agama mayoritas Islam (53 %), Budha (17 %), Kong Fu Chu, Tao, Chinese (11 %), Kristen (8,6 %) dan Hindu (7 %) (Esposito, 1995). Namun data yang terakhir penulis temukan bahwa sejalan dengan waktu perkembangan jumlah penduduk dan penganut agama semakin meningkat dengan rata-rata 2,0 %. Geografi daerah : 329.748 kiometer persegi (127.315 mil persegi) agak lebih besar dari Meksiko, Ibukota Kuala Lumpur, kota-kota lainnya, Penang, Ipoh, Malaka, Johor Baru, Shah Alam, Klangtan, Kucing, Kota inabalu, Kota Baru, Kuala Trengganu, Petaling Jaya. Malaysia dengan penduduk tahun 2008 populasinya 27,5 juta jiwa, laju pertumbuhan 2,0 % kelompok etnis terdiri atas: melayu 53 %, cina 26 %, asi 11,8 %, indian 7,7 % lainya 1,2 %. Bahasa terdiri bahasa melayu resmi, Cina dialek Inggris, dan Tamil asli.[2]

Malaysia terdiri dari dua bagian, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan sebuah semananjung yang tepanjang di dunia, di bagian tengahnya membujur pegunungan dari utara ke selatan. Pegunungan tersebut tediri dari beberapa rangkaian sejajar. Daratan rendah utama adalah daratan rendah Kedah di utara, daratan rendah Selangor di Barat, daratan rendah Johor di Selatan dan daraytan rendah Kelantang dan Pahang di Pantai Timur, daratan rendah di pantai Timur makin ke Selatan makin melebar (Ensiklopedia Islam, 1994).

---

[2] Menurut data dari *US Departement of State,* jumlah keseluruhan penduduk Malaysia pada tahun 2008 adalah 27.5 juta orang. 60,4% (16,2476 juta) adalah penganut Islam, 19,2% (5,1648 juta) adalah Budha, 9,1% (2,4479 juta) adalah Kristen, 6,3% (1,6947 juta) adalahHindu, 2,6% (0.6994 juta) adalah Konfusiu, 0,8% (0,2152 juta) adalah agama kaum pribumi, 0,4% (0,1076 juta) adalah lain-lain dan 1,2% (0,3228 juta) tidak diketahui agamanya, lihat http://www. State gover pabgn, 2777 htm diakses pada tanggal 18 Juni 2009.

Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan oleh Laut Cina Selatan Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Malaysia terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah Yang di Pertuan Agong dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminister. Berikut ini dapat dilihat dalam peta semenanjung Malaysia Barat dan Timur. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Penduduknya sebagian besar atau 61 % terdiri dari suku Melayu pribumi, pendatang terdiri dari orang muslim dan non Muslim yaitu orang muslim dari Indonesia (Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, Mandailing) dan orang muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia dan Turki, Sedangkan orang non muslim adalah Cina dan India. Mayoritas penduduknya adalah muslim Suni peng-ikut Mazhab Syafií, Islam agama resmi (Ensiklopedia Islam, 1994).

2. Proses masuknya Islam dan perkembangannya di Malaysia

Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak bisa terlepas dari kerajaan-kerajaan Melayu, jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan ini dikenal dalam sejarah sebagai Kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat melalui daerah kerajaan tersebut mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad kesembilan. Dari sini kemudian dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ketujuh[3] Berdasarkan keterangan ini, maka asal usul masuknya Islam ke Malaysia berdasar pada yang dikemukakan Azyumardi Azra bahwa Islam datang dari India, yakni

[3] Memang abad ke-13 M disebut-sebut masa awal mulai masuk Islam ke di Indonesia. Tetapi ditemukan juga data-data kuat bahwa Islam masuk ke

Gujarat dan Malabar.

Sebelum Islam datang wilayah Asia Tenggara, Malaysia adalah berada di jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan di Arab dan India dengan wilayah China, dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting (Abdullah, 1990). Maka tidak heranlah jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya pelbagai keyakinan dan agama (a cross-roads of religion) yang berinteraksi secara kompleks (Perry, 1949). Agama dan keyakinan itu pun telah mempengaruhi susunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ini. Menurut Prof. DR. Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) bahwa ada tiga isu masuknya Islam di Malaysia yaitu Perbincangan tentang proses yang membawa kepada penyebaran Islam ke Alam Melayu akan melibatkan perbincangan yang membabitkan tiga isu. Isu-isu tersebut ialah bila tarikh sebenar Islam diperkenalkan kepada orang Melayu, dari manakah asal-usul pendakwah yang menyebarkan agama tersebut dan bagaimanakah proses ini boleh berlaku dengan begitu berkesan sekali. Dalam menghuraikan ketiga-tiga isu ini kelebihan yang terdapat dalam hujah yang diberikan oleh beliau telah mempelopori

---

Indonesia ke-7. Lihat Sidi Ibrahim Boechari, *Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau* (Jakarta: Gunung Tiga, 1981), h. 32. Lihat juga Hasbullah, *Searah Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 17. Seminar masuknya agama Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyimpulkan sebagai berikut :(1). Islam pertama kali datang di Indonesia pada abad ke-7 M (abad ke-1 H), dibawa oleh pedagang dan muballig dari negeri Arab; (2) Daerah yang pertama dimasuki ialah pantai Barat Sumatera yaitu di daerah Baros, tempat kelahiran ulama besar bernama Hamzah Fansyuri. Adapun kerajaan Islam yang pertama ialah di Pase; (3) Dalam proses pengislaman selanjutnya, orang-orang Islam bangsa Indonesia ikut aktif mengambil bagian yang berperan dan proses itu berjalan secara damai; (4) Kedatangan Islam di Indonesia ikut mencedaskan rakyat dan membina karakter bangsa. Uraian lebih lanjut, lihat Zuhairini, *et all*, *Sejarah Pendidikan Islam* (Cet. II; Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), h. 133.

pendekatan yang memberikan perspektif tempatan tentang proses yang membawa kepada penyebaran Islam ke Alam Melayu.

Isu pertama yang menimbulkan perbincangan tentang penyebaran Islam di Alam Melayu adalah berkaitan dengan bilakah tarikh tepat agama Islam mula disebarkan di rantau ini. Dalam tulisannya, Hamka cenderung berpendapat bahawa agama Islam telah diperkenalkan di rantau ini pada awal abad Hijrah (abad ketujuh Masihi). Pendapat yang beliau kemukakan ini adalah berdasarkan kajian yang lakukan dengan merujuk sumber Cina (Hamka, 1997). Pendapat yang dikemukakan juga adalah dengan bersandar kepada tulisan oleh seorang sarjana Barat, yaitu T.W. Arnold yang mengaitkan penyebaran agama Islam dengan peranan yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Arab. Dalam kajiannya, T.W. Arnold mendapati bahawa pedagang-pedagang Arab telahpun menjalin hubungan perdagangan dengan rantau sebelah timur sejak sebelum abad Masihi lagi. Pada abad kedua Sebelum Masehi hampir keseluruhannya perdagangan di Ceylon berada di tangan orang Arab. Menjelang abad kesembilan Masehi kegiatan perdagangan orang Arab dengan Ceylon semakin meningkat apabila meningkatnya hubungan perdagangan antara orang Arab dengan China. Menurut rekaman sejarah, menjelang pertengahan abad kedelapan Masehi pedagang-pedagang Arab dapat ditemui dengan ramainya di Canton. Dari abad ke-10 hingga abad ke-15, sebelum kedatangan Portugis, orang Arab merupakan pedagang yang unggul dan hampir tidak tersaingi dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan Timur.

Berdasarkan pandangan yang diberikan oleh T.W Arnold ini, Hamka berpendapat bahwa sudah semestinya apabila orang Arab memeluk agama Islam mereka akan berusaha menyebarkan agama tersebut di kawasan-kawasan di mana mereka menjalankan kegiatan perdagangan. Namun begitu, statemen yang dikemukan ini sulit untuk dibuktikan karena ketiadaan bukti bertulis yang konklusif untuk mendukung pendapat yang diberikan. Lantaran itu, dari segi

rekam jejak mereka, Hamka setuju dengan pandangan yang umumnya disepakati, termasuklah oleh sarjana Barat bahawa Samudera-Pasai (abad ke-13-14) adalah merupakan kerajaan Melayu-Islam yang pertama yang diwujudkan di rantau ini. Islam masuk ke Malaysia pada abad pertama Hijrah dibawa oleh para pedagang India, Persia, dan juga Arab melalui suatu proses damai dan secara cepat diterima oleh masyarakat kerana mampu berbaur dengan adat dan kebudayaan masyarakat tempatan (Arnold, 1981).

Isu kedua para penyebar Islam tersebut menurut T. W. Arnold (1981). tidak datang sebagai penakluk dengan menggunakan kekuatan pedang untuk menyebarkan Islam, sebagaimana yang terjadi di wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Mereka juga tidak menguasai hak-hak penguasa lokal untuk menekan rakyat, sebaliknya mereka hanya sebagai pedagang yang memanfaatkan kepintaran dan peradaban mereka yang lebih tinggi untuk kepentingan penyebaran Islam dengan memperkenalkan toleransi dan persamaan antara manusia. Bagi penganut Hindu, yang agama mereka mengajarkan sistem kasta dalam masyarakat, agama Islam yang baru mereka kenali adalah amat menarik perhatian, khususnya di kalangan pedagang yang cenderung kepada orientasi kosmopolitan (Abdullah, 1991). itulah sebabnya penerimaan orang Melayu terhadap agama Islam adalah berkait erat dengan keluhuran agama tersebut.

Isu ketiga suatu proses perubahan kebudayaan tidak akan berlaku jika tidak ada titik-titik kesamaan yang saling menghubungkan, begitu juga yang terjadi pada Islam dan kebudayaan Malaysia. Seandainya Islam dengan serta merta menghapuskan segala kebudayaan dan tradisi yang wujud sebelumnya, mungkin ia sama sekali tidak akan menemukan tempat untuk memasuki pulau-pulau di kawasan ini. Islam sebenarnya telah masuk di pelbagai wilayah Malaysia berabad-abad sebelum pengislaman besar-besaran dimulai. Para pedagang asing telah lama menetap di bandar-bandar dan kerajaan-kerajaan Islam pertama yang terdapat di Sumatera bagian Utara dan

Pantai Barat Semenanjung sejak lebih kurang Abad ke-13, atau mungkin lebih awal daripada itu. Akan tetapi, menurut Harry J.Benda (1987) pada Abad ke 15 dan 16 agama Islam menjadi kekuatan kebudayaan dan agama utama di kepulauan Nusantara. Perubahan yang mendadak ini mungkin disebabkan semakin meluasnya ajaran sufisme (mistik Islam) oleh para sufi yang berperanan sebagai pendorong gerak maju agama ini (Yahaya, 1998). Ajaran mistik Islam ini ternyata menemukan banyak titik kesamaan dengan ajaran Hindu dan banyak disebarkan oleh orang daripada India yang beragama Islam. Melalui pelbagai hubungan titik persamaan ini, Islam ternyata mempunyai banyak kesesuaian dengan budaya masyarakat tempatan. Oleh itu unsur tasawuf menjadi aspek yang lebih dominan dalam proses Islamisasi di wilayah ini (Johns, 1995).

Menurut ahli sejarah Malaysia, Islam masuk ke semenanjung ini sebelum abad ke-12 berbeda pendapat penulis barat yang mengatakan sekitar abad ke-13 atau 14. Penulis Malaysia didasarkan pada mata uang dinar emas yang ditemukan di Klantang tahun 1914, bagian pertama mata uang itu bertuliskan al-julus kelatan dan angka arab 577 H, yang bersamaan dengan tahu 1161 M, bagian kedua bertuliskan al-Mutawakkil, gelar pemerintahan Kelantang. Dan jika kita lihat batu nisan tua tertulis arab ditemukan ke Kedah tahun 1963 pada makam Syekh Abdul Kadir bin Syekh Husen Shah Alam (w. 291 H), abad ke-9 merupakan awal perkembangan Islam di kawasan selat Malaka dan kawasan-kawasan yang menghadap ke laut Cina Selatan, sebagaimana diakui Dinasti Sung (960-1279), bahwa masyarakat Islam telah tumbuh di sepanjang pantai laut Cina Selatan (Ensiklopedia Islam, 1994).

Sekitar tahun 1276 M di masa Sultan Muhammad Syah bertahta di Malaka, datang sebuah kapal dagang dari Jeddah yang dipimping kapten kapal yang bernama Sidi Abdul Aziz, yang juga seorang ulama Islasm, Sidi Abdul Aziz lalu menganjurkan raja Malaka saat itu yang telah di Islamkan untuk menukar namanya menjadi Sultan Muhammad

Syah. Dalam sejarah negeri Kedah disebutkan bahwa Islam masuk ke Kedah pada tahun 1501 M, pada suatu hari datanglah seorang alim bangsa Arab di Kedah yang bernama Syekh Abdullah Yamani yang kemudian mengislamkan raja dan pembesar serta anak negeri Kedah. Raja Pramawangsa akhirnya dianjurkan oleh Syekh Abdullah menukar namanya etelah masuk Islam menjadi sultan Muzafar Syah. Syekh Abdullah mendapat kiriman Al- Qurán dari sahabatnya pendakwah di Aceh yaitu Sykh Nuruddin Makki (Syamsu, 1999).

Kedatangan Islam dan proses islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang muslim dan mubaliq dari Arab dan Gujarat, para dai' setempat dan penguasa Islam. Sejak awal abad ke-7 semananjung Malaka dan nusantara merupsakan jalur perdagangan utama antara Asia Barat dan Timur jauh serta kepulauan rempah-rempah Maluku, semananjung tidak dapat dipisahkan dari gugusan pulau-pulau nusantara, mereka juga singgah di pelabuhan-pelabuhan semenanjung (Ensiklopedia Islam, 1994).

Bahwa proses islamisasi di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam adalah ulama atau pedagang dari jasirah Arab, yang pada tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami perkembanga dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegitan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan Internasional yaitu Musabaqh Tilawatil Al-Qurán yang selalu diikuti oleh Qari dan Qariah Indonesia (Ensiklopedia Islam, 1994). Negara Malaysia yang menganut agama resmi Islam menjamin agama-agama lain dan oleh pemerintah diupayakan menciptakan ketentraman, kedamaiaan bagi masyarakat, walaupun pemegang jabatan adalah pemimpn-pemimpin muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak, sebagai konsekuensi semua masyarakat termasuk non muslim harus menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi negara kebangsaan Malaysia.

Azyumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia, sedikitnya ada tiga teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab (Hadramaut). Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Benggali (kini Banglades) (Azra, 1994). Sedangkan mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia dapat kita merujuk pada pernyataaan Ahmad M. Sewang bahwa, penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elite penguasa kerajaan. Kedua, Islam diterima langsung oleh elite penguasa kerajaan, kemudian disosialisasi-kan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola pertama biasa disebut bottom up, dan pola kedua biasa disebut *top down* (Sewang, 2005). Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia.

Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial dan keagamaan. Di tengah komunitas yang majemuk ini tentu saja terdapat tempat mereka berkumpul dan menghadiri kegiatan perdagangan termasuk dirancang strategi penyebaran agama Islam mengikuti jaringan-jaringan emporium yang telah mereka bina sejak lama. Seiring itu pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa dimana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial, dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan, kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim.

Sisa-sisa peninggalan sejarah yang juga membuktikan perkembangan Islam di Malaysia dapat dilihat sesudah abad ke X, pada abad ke XV misalnya dan ketika itu Brunei masih bergabung dengan

malaysia, Salah satu sumber dari cina menyebutkan ada enam masjid di Malaysia dan ditemukan batu nisan silsilah keturunan raja-raja Brunei. Sultan Brunei ketika itu adalah Abdul Djalil Jabar tahun 1660, isterinya adalah putri sultan Sukadana dari Sambas. Kemudian pada tahun 1852 ada masjid jami dibangun di daerah Kucing, pada tahun 1917 dibangun madrasah di Malaysia yang disebut Madrasah Al-Mursyidah. Fakta-fakta sejarah ini mengindikasikan bahwa Islam di Malaysia terus mengalami perkembangan yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam semakin mengalami kemajuan.

Memasuki awal abad ke-20, bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Orang-orang muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi, dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama (mahkamah syariah) yang diketua hakim agama. Bersamaan dengan itu, juga ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan dengan didirikannya perguruan tinggi Islam dan dibentuk fakultas dan jurusan agama (Thahir, 2002). Perguruan tinggi kebanggaan Malaysia adalah Universitas Malaya yang kini kita kenal Universistas Kebangsaan Malaysia.

Memasuki masa pasca kemerdekaan, jelas sekali bahwa pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa (*top down*). Sebab, penguasa atau pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Warisan undang-undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam yang berdasarkan konsep Qur'aniy berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada juga undang-undang warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang

berjumlah 68, hampir identik dengan hukum mazhab Syafii (Thahir, 2002). Pelaksanaan undang-undang yang berdasarkan Al-Qur'an, dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan paham Syafii di Malaysia sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang signifikan.

Dengan adanya proses islamisasi di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam adalah ulama atau pedagang dari jazirah Arab yang pada tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiaan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan intenasional yaitu Musabaqah Tilawatil Al-Qur'an yang selalu diikuti qari' dan qari'ah Indonesia (Thahir, 2002). Selain tersebut perkembangan Islam di Malaysia makin bertambah maju dan pesat, dengan bukti banyaknya masjid-masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkemabangan Islam di Malaysia, tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan, ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di kelantan, hukum *hudud* (pidana Islam) telah diberlakukan sejak 1992. Namun demikian Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain dan oleh pemerintah diupayakan menciptakan ketentraman, kedamaian bagi masyarakat walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin-pemimpin muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak, sebagai konsekwensi semua masyarakat termasuk non muslim harus menghargai dan menjunjung tingi konstitusi negara kebangsaan Malaysia.

3. Perkembangan Politik Ekonomi di Malaysia

Dalam konstitusi Malaysia, orang Melayu merupakan warganegara Malaysia yang mempraktikkan adat Melayu, menggunakan Bahasa Malaysia, dan beragama Islam. Sedangkan

25% penduduk Malaysia merupakan Tionghoa, dan 7% lagi terdiri atas India. Hampir 85% ras India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. Lebih dari setengah populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah terdiri atas kaum pribumi non-Melayu. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Selain itu, Malaysia juga mempunyai penduduk yang berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Kepadatan penduduk Malaysia tidak terdistribusi merata, dengan 17 juta dari 25 juta rakyat Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional yang menganut sistem demokrasi parlementer, dan perdana menteri serta para menteri utama dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang berlangsung secara reguler setiap lima tahun. Yang Dipertuan Agung (YDPA) saat ini merupakan yang ke-12 sejak kemerdekaan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1957 .

Ketika baru merdeka, Malaysia terdiri atas 11 negara bagian dan disebut Persekutuan Tanah Melayu (Federasi Malaya). Kemudian pada tahun 1963 negara Sarawak dan Sabah bergabung ke dalam Federasi Malaysia. Malaysia yang dikenal sebagai negara multi-etnis dan kaya khazanah budaya itu memiliki kurang lebih 30 kelompok etnis.2 Kurang dari 8 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan sebelum krisis ekonomi tahun 1997; tingkat kemampuan baca tulis di atas 85 persen dan harapan hidup warga masyarakatnya setara dengan negara-negara maju. Malaysia memiliki sistem parlemen bikameral, yakni Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Anggota Dewan Rakyat dipilih melalui pemilu, sedangkan para anggota Dewan Negara diangkat oleh negara-negara bagian atau langsung ditunjuk oleh YDPA berdasarkan masukan dari perdana menteri.

Kemudian kekuasaan eksekutif ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan Konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat, yang menurut pendapat Yang Dipertuan Agung, mendapat dukungan

mayoritas dalam parlemen. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Parlemen terbagi atas Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Negara mempunyai 70 orang senator (panggilan yang diberikan kepada anggota Dewan Negara). Pemilihan anggotanya bisa dibagi dua: 1). 26 anggota dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai perwakilan 13 negara bagian (setiap negara bagian diwakili oleh dua orang anggota). 2). 44 anggota yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, termasuk dua anggota dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu anggota masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dewan Rakyat mempunyai 222 anggota, dan setiap anggota mewakili satu konstituen. Mereka dipilih atas dasar dukungan banyak pihak melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat memegang jabatan selama lima tahun, dan setelah itu pemilu yang baru akan diadakan. Kekuasaan yudikatif dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

Dalam bidang ekonomi, Setelah kerusuhan etnis pada 13 Mei 1969, kontroversi Kebijakan Ekonomi Baru dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Dari kebijakan ekonomi baru Malaysia menjaga keseimbangan politik-etnis yang lunak, dan mengembangkan peraturan yang unik menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan aturan politik yang menguntungkan bumiputera (sebuah grup yang terdiri dari etnis Melayu dan kaum pribumi) dan warganegara Malaysia yang menganut agama Islam. Antara 1980-an hingga awal 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah pimpinan Dr. Mahathir bin Mohammad, Perdana Menteri keempat Malaysia. Dalam periode ini terjadi peralihan dari ekonomi berdasarkan agrikultur menjadi

produksi dan industri dalam bidang komputer dan barang elektronika rumahan .

Pada akhir 1990-an, Malaysia diguncang krisis finansial Asia. Oposisi ke beberapa aspek dalam sistem yang ada membawa jatuh pemerintah. Oposisi dari sosialis dan reformis sampai partai yang mengadvokasikan pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr. Mahathir, Perdana Menteri yang menjabat terlama di Malaysia, mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan kepada Abdullah Ahmad Badawi. Pemerintahan baru mengadvokasikan pandangan moderat negara Islam yang didefinisikan oleh Islam Hadhari.

Malaysia merupakan sebuah negara berpendapatan sederhana, berubah dari sebuah negara penghasil bahan mentah seperti getah, bijih timah dan sebagainya. Pada tahun 1971, menjadi negara multisektor melalui Kebijakan Ekonomi Baru. Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.

Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif. Selain getah dan kelapa sawit yang banyak di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak juga kaya akan sumber alam seperti kayu balak, minyak bumi dan gas alam .

C. Politik ekonomi Brunei Darussalam

1. Kilasan sejarah Brunai Darussalam

Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah adalah sultan yang kini memangku jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15 M, diturunkan dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Baginda Sultan dinasehati oleh beberapa majelis dalam sebuah kabinet menteri, walaupun baginda sebenarnya merupakan pengendali pemerintahan tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Brunei Darussalam wilayahnya terletak di Barat Daya pulau Borneo (Sabah). Luas wilayahnya ±5.765 Km2 dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Brunei merdeka dari jajahan Inggris di bawah negara persemakmuran Inggris tanggal 1 Januari 1984. Brunei didiami oleh beragam etnis yang mayoritas dua pertiganya etnik Melayu (90%) muslim; 1/5 etnik Cina dan sisanya etnik India. Filosofi politik Brunei adalah penerapan yang begitu ketat terhadap Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar, yaitu: pertama, Islam sebagai *Guiding Principle*, dan kedua Islam sebagai *Form of Fortification*. Dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai keIslaman kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu: Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafi'i – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab *Ahl Sunnah wal Jamaah* – dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja. Untuk menerapkan Melayu Islam Beraja ini maka pemerintah menunjuk tim untuk menyusun materi secara cermat

dan lengkap untuk dimasukkan dalam kurikulum pelajaran dari pendidikan terendah sampai tertinggi (Awang: 21).

Dilihat dari status sosial ekonomi masyarakatnya, Brunei merupakan negara kaya berkat sumber daya alamnya seperti minyak bumi dan gas alam.Selanjutnya pembangunan berbagai fasilitas publik terus digalakkan demi memanjakan rakyatnya. Fasilitas umum seperti telpon, air, listrik, angkutan umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain semuanya berada dalam tanggungan pemerintah atau gratis. Tidak ada kewajiban penduduk membayar pajak perorangan, dan yang ada hanya kewajiban membayar pajak bagi perusahaan (minyak). Kebutuhan hidupnya secara ekonomi sebagian besar dipenuhi melalui impor, baik makanan maupun alat-alat elektronik dari negara jiran seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, termasuk dari Jepang, Amerika dan Inggris. Sementara ekspor andalan dari Brunei adalah minyak bumi dengan tujuan Amerika, Singapura dan Korea, dengan surplus devisa yang sangat besar. Kesultanan Brunei Darussalam berdiri sekitar tahun 1402 M dengan dipimpim oleh raja atau sultan yang telah menduduki hingga sekarang. Adapun beberapa raja yang punya peran penting bagi pengembangan Islam di antaranya; 1) Sulthan Muhammad Syah sultan ke-1 (sebelum masuk Islam ia lebih dikenal dengan Awang Alak Betatar).Ia memerintah sejak tahun 1402-1408. pada masanya terjadi pengislaman pejabat dan perangkat kerajaan Brunei Darussalam 2) Sulthan Bolkiah (1485-1524) sultan ke-5. Pada masa kepemimpinannya Islam disebarkan secara intensif hingga masuk ke kawasan Borneo (Kalimantan) termasuk wilayah kesultanan Sulu (Filipina) 3) Sulthan Abdul Mubin (Momin) sultan ke-12, memerintah tahun 1852-1885. Pada masanya dilakukan penetapan mazhab secara resmi sebagai mazhab di kerajaan, yaitu untuk fiqih bermazhabkan syafi'i dan kalam bermazhabkan *Ahli sunnah wal jamaah*. Hal ini dilakukan karena sering terjadinya perselisihan masalah agama dalam masyarakat dan 4) Sulthan Hasanul Bolkiah sultan ke-

19 memerintah dari tahun 1968 hingga sekarang. Pada masanya ditetapkan filosofi kerajaan Brunai sebagai tonggak pemerintahan, yaitu dikenal dengan MIB (Melayu Islam Beraja).

Setelah Brunei merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkiah Mu'izaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Penduduk Brunei seluruhnya, baik secara kultural maupun psikologis mampu mengatasi keragaman yang ada. keragaman etnik mayoritas warga Melayu meliputi Melayu lokal, dusun, murut, kedayan, bisayah, dan etnik Melayu lain dari Malaysia dan Indonesia. Kedua, adanya proses birokrasi dalam pembentukan negara modern, dan harus dipahami serta dipatuhi oleh masyarakat. Ketiga, adanya fenomena yang tampak perlunya membangun ideologi nasional dan mengartikulasikannya dalam budaya nasional di tengah-tengah ideologi yang ada di wilayah Asia Tenggara atau belahan dunia lain. Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai hukum, ketertiban, kesejahteraan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi mendominasi kehidupan rakyat. Proses sosial ini menjadikan penduduk Brunei mampu memiliki pola hidup yang toleran, harmonis, dan hidup bersama. Melayu Islam Beraja (MIB) pada dasarnya berkaitan erat dengan evolusi adat istiadat dan tradisi Melayu Brunei serta acaraacara upacara keagamaan yang banyak tertera dalam kalendar muslim yang memberikan wawasan tentang bagaimana caranya ideologi nasional diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*Form of Courtesy of Brunei Darussalam, 1991*). Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk ditelaah lebih mendalam tentang Islam dalam hubungannya dengan politik di Brunei Darussalam.

2. Masuk dan berkembangnya Islam di Brunei

Islam telah masuk Brunei Darussalam diperkirakan mulai pada tahun 977 M melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina, tetapi pada saat itu Islam belum berkembang secara meluas. Namun, ada pula teori yang mengatakan Islam masuk Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-13 M dilanjutkan dengan masuk Islamnya Raja Awang Alak Betatar pada tahun 1368 dan berganti nama dengan Muhammad Shah (Funston, 2001: 11).

Dua teori tersebut sebenarnya memiliki benang merah dengan masuknya Islam secara menyeluruh di kawasan Nusantara sebagaimana telah banyak diperdebatkan oleh para sejarawan. Para sejarawan berbeda pendapat dan hingga kini belum tuntas mengenai masuk dan datangnya Islam di Asia Tenggara, meski dalam beberapa sisi sudah ada titik temu. Hal ini berkaitan dengan tiga masalah pokok, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya. Perbedaan ini muncul karena kurangnya informasi dari sumber-sumber yang telah ada (Abdul Aziz Thaba, 1998: 115), termasuk adanya sebagian sejarawan maupun penulis sejarah yang mendukung atau menolak teori tertentu (Azyumardi Azra, 1999: 24). Azyumardi Azra lebih lanjut menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan kuat suatu teori tertentu menekankan hanya aspek-aspek khusus dari tiga masalah pokok, sementara mengabaikan aspek-aspek lainnya. Karena itu, kebanyakan teori yang ada dalam sisi-sisi tertentu gagal menjelaskan kedatangan Islam, kapan konversi agama penduduk lokal terjadi, dan proses-proses islamisasi yang terlibat di dalamnya. Bahkan bukannya tidak bisa jika suatu teori tidak mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tandingan yang diajukan dari teori-teori lain (Azyumardi Azra, 1994: vi).

Penelaahan secara kritis tentang masuknya dan berkembangnya Islam di wilayah Asia Tenggara termasuk di Brunei, fokusnya pada wilayah asal pembawa Islam, para pembawa Islam, dan waktu

kedatanganya ke Asia Tenggara dan Brunei. Tempat Asal Kedatangan Islam Pada umumnya ahli sejarah mengemukakan ada dua teori tentang daerah asal yang membawa Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat dan Mekah. Tetapi terdapat pula sejarawan yang menyatakan tiga teori seperti Azyumardi Azra yang menyatakan ada tiga asal masuknya Islam ke Indonesia yaitu Mekah, Gujarat, dan Benggal. Berbeda dengan A.M. Suryanegara yang juga mengemukakan tiga teori, yaitu dari Mekah, Gujarat, dan Persia.

3. Politik Islam di Brunei Darussalam

Istilah negara dalam kajian ilmu politik mengandung banyak sekali pengertian. Salah satu makna terminologi negara dikemukakan oleh Roger F. Soltau bahwa *"The State is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community"* (Soltau,1982: 1). Maksudnya negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dalam terminologi tersebut paling tidak ada bebesrapa aspek yang tercakup dalam negara di antaranya: memaksa, artinya agar undang-undang yanag diterapkan pemerintah untuk mengatur masyarakat dapat dilaksanakan, terutama apabila sebagian masyarakat yang menentang undang-undang tersebut (anarki), dan hal ini perlu ada tindakan tegas dari pemerintah; ada pula unsur all encompasing, artinya undang-undang yang akan diterapkan harus mencakup semua orang tanpa kecuali, yaitu tidak mengenal perbedaan suku, ras, keturunan, dan agama.

Dalam memahami hubungan antara Islam dan negara, terdapat tiga teori yang menarik untuk dimunculkan sebagaimana dikemukakan Munawir Syadzali. Ia mengelompokkan hubungan ini menjadi tiga aliran yang memiliki pandangan berbeda-beda satu dengan lainnya. Pertama, Islam dianggap bukanlah sematamata ajaran dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan

manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna untuk segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan negara. Tokohtokoh aliran ini antara lain Hasan alBanna, Sayyid Qutb, dan Al-Maududi. Kedua, Islam dipandang sebagai agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad dipandang sebagai seorang rasul biasa, seperti rasul lainnya, tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh aliran ini antara lain Ali Abdul Raziq; dan Thaha Husein. Kemudian aliran ketiga menolak pandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, termasuk di dalamnya memiliki sistem kenegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam dalam pengertian Barat, yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kelompok ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh aliran ini antara lain Moh. Husei Haikal, Komaruddin Khan dan Muhammad Imarah (Munawir Syadzali, 2004: 1-2). Kedudukan dan hubungan antara Islam dan sistem politik pemerintahan Brunei Darussalam amat jelas dapat dikelompokkan pada aliran: pertama, yaitu dalam perundang-undangan Islam yang mengatur sendi kehidupan negara dikendalikan oleh sultan, namun dalam praktiknya Undang-undang Dasar Islam ini masih terbatas dan belum menggambarkan kewenangan negara terhadap Islam. Namun begitu, kedudukan Sultan sebagai pemimpin agama amat kuat, ia dibantu oleh Perdana Menteri, menteri-menteri, dan jabatan strategis lainnya. Mereka yang dilantik oleh Sultan sebagai pembantu-pembantunya diharuskan berlatar dari etnik Melayu yang beragama Islam dan lebih khusus harus bermazhab Syafi'i dari segi fiqih dan Ahli sunnah wal jama'ah dari sisi aqidahnya (Perlembagaan Brunei 1959, Bab 5, 1984). Untuk menunjukkan identitas ideologi Negara Brunei, sultan dalam beberapa kesempatan mengeluarkan dekrit yang isinya: Membuat garis pemisah antara Islam pribumi

dan Islam luar, terutama kaum fundamentalis, termasuk gerakan al-Arqam dari Malaysia; Sultan mengharuskan warga Melayu mampu membaca al-Qur'an dengan mengeluarkan dana 2 juta dolar Brunei untuk merealisasikan kebijakan ini; Memerintahkan pentingnya pengajaran bahasa Melayu dalam aksara Jawi (Arab-Melayu), agar masyarakat memahami hubungan antara bahasa Melayu dengan warisan budaya Islamnya; Pemerintah juga melarang jual beli minuman keras di toko-toko atau hotel. Penetapan Mazhab Syafi'i (fiqh) dan Mazhab Ahl Sunnah wal Jamaah yang termaktub dalam MIB sebenarnya dilatarbelakangi beberapa faktor historis yaitu: a. Sekitar abad ke-17 dan 18 M sampai masa abad ke-20-an di Kesultanan Brunei dijumpai kitab-kitab yang dijadikan standar kurikulum cenderung mengarah ke Mazhab Syafi'i dan *Ahl Sunnah wal Jama'ah*, seperti: Sabilul Muhtadin (karya Daud Fatani); al-Mukhtasar dan Siratal Mustaqim (karya ar-Raniry); Ghayatut Taqrib fil Irthi wat-Ta'shib, dan lainlain. b. Mazhab Syafi'i juga menjadi pegangan para ulama Brunei dan kebanyakan ulama nusantara. Karena umumnya kitab yang dikarang berbahasa Arab Melayu. c. Pada tahun 1930-an s/d 1940-an terdapat pergesekan atau konflik dalam masyarakat, antara kelompok "bergondol" (tidak berkupiah) karena alasan modern dengan kelompok berkupiah. Dalam masyarakat ada yang saling mendukung dan menolak. d. Untuk menetralisir perselisihan dalam masyarakat dari berbagai kelompok yang ada, maka sejak Sultan Abdul Momin (raja ke-12 tahun 1852-1885) kerajaan terlibat menjadi pendukung salah satu mazhab yaitu Syafii dan Ahl Sunnah wal Jamaah.

Adat di Brunei dijadikan undangundang tetapi berakulturasi dengan ajaran Islam. Undang-undang ini telah menjadi pegangan hidup masyarakat sebelum kedatangan Inggris ke Brunei. Apabila orang Melayu menganut Islam, maka undang-undang Islam telah diterima dan adat Melayu mulai disesuaikan dengan Islam supaya tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Sungguhpun

adat tidak menjadi suatu sumber undangundang Islam, tetapi Islam membolehkan adat diterima dan diikuti oleh pemeluk Islam, selama adat itu tidak bertentangan dengan undang-undang Islam. Adat yang dianggap baik, bermanfa'at dan tidak bertentangan dengan Islam dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi pemeluk Islam (Ibrahim & Othman, 1988: 1). Di Brunei Darussalam adat yang menjadi rujukan masyarakat ialah Adat Istiadat dan Resam. Misalnya Adat Istiadat Diraja Brunei, di antaranya mengandung beberapa hal terkait tentang sultan, panggilan nama kehormatan, susunan dan adat istiadat pembesarpembesar negara, adat kesopanan, adat menggelar, ciri, susunan duduk, dan adat dalam Majlis kerajaan, alat-alat dan perhiasan-perhiasan kebesaran diraja dan peraturan memberi penghormatan kepada sultan dan pembesarnya. Sedangkan pemberlakuan dan perlaksanaan hukum syarak lebih menonjol di zaman pemerintahan Sultan Syarif Ali (Salim, 1995: 65). Pada saat Sultan Syarif Ali diangkat menjadi raja, baginda mulai membuat undang-undang yang didasarkan pada hukum syara'. Pemakaian hukum syara' sebagai pegangan dan undangundang dilaksanakan secara berangsurangsur. Sultan Syarif Ali di awal pemerintahannya berusaha mengukuhkan ajaran Islam dan ia juga membina masyarakat yang berbasis pada masjid. Hukum Kanun Brunei diyakini telah ditulis dan dikukuhkan pada zaman pemerintahan Sultan Hassan. Sultan Hasan adalah sultan Brunei ke 9. Ia memerintah sekitar tahun 1598-1659 M. Pada masa pemerintahan baginda telah mengamalkan dan melaksanakan beberapa adat istiadat, peraturanperaturan negara dan Hukum Kanun. Namun, ada kemungkinan besar penulisannya telah dimulai sultan sebelumnya tetapi belum ada bukti kukuh mengenainya. Walau bagaimanapun pelaksanaan dan pelaksanaan Hukum Kanun sudah berlaku sejak zaman dahulu lagi. Dalam hal ini, jelas bahwa sebelum kedatangan Inggris, kesultanan Brunei telah diperintah berdasarkan Undang-undang Hukum Kanun Islam Brunei yang

berdasarkan hukum syara'. Pemakaian dan perlaksanaan Hukum Konun Islam berlaku meluas dan menyeluruh di wilayah kekuasaan Sultan (Othman, 1988: 26). Setelah diteliti dan dikaji berkaitan tentang Hukum Kanun Brunei itu dan dibandingkan dengan ajaran Islam, maka dapat dipahami bahawa Hukum Kanun

Brunei itu sebagian besarnya berdasarkan ajaran Islam, apalagi dalam persoalan perkawinan dan perceraian, jinayah dan mahkamah, demikian juga dalam hal jual beli dan riba. Sedangkan sebagian yang lainnya terdapat pula hukum yang bersandar pada adat, seperti yang dinyatakan dalam mukaddimah Hukum Kanun tersebut. Setelah masuknya Inggris di kawasan Brunei Darussalam tahun 1847 M untuk menjalin hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan. Maka pada tahun 1888 M Brunei resmi masuk sebagai negara-negara dalam wilayah Perlindungan atau persekutuan Inggris. Perjanjian kerjasama kedua belah pihak di kemudian hari memberikan pengaruh dalam pesnyelenggaraan kekuasaan Sultan. Pada tahun 1906 M beberapa perjanjian lagi ditandatangani yang dinamakan Perjanjian Tambahan, yang mengangkat seorang Residen dari pihak Inggris. Nasehat Residen perlu diperoleh dalam semua hal kecuali yang berkaitan dengan agama Islam. Sedangkan sistem kerajaan pihak Inggris tidak boleh melakukan intervensi sebagaimana terjadi di negeri-negari Melayu termasuk Semenanjung Malaya Malaysia juga berada dalam naungan Inggris. Kemudian pada tahun 1959 Brunei telah mempunyai perlembangan tersendiri. Dalam perlembagaan itu telah memberikan kedudukan istimewa mengenai agama Islam. "*The religion of Brunei Darussalam shall be the Muslim Religion according to the Shafei Sect of that religion: Provided that all other religions may be practised in peace and harmony by the persons professing them in any part of Brunei Darussalam.The Head of the Religion of Brunei Darussalam shall be His Majesty the Sultan and Yang Dipertuan"* (Perlembagaan Brunei 1959, Bab 3, 1984). Dengan dijadikannya agama Islam sebagai agama resmi negara,

pengembangan Islam dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya ke dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, pendidikan, politik maupun lainnya. Sehingga agama Islam dapat dijadikan tonggak dalam pembangunan negara. Meskipun kedudukan agama Islam begitu jelas dalam Perlembagaan negara tetapi undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar masih sangat terbatas dan belum menggambarkan Negara Islam yang sebenarnya. Kedudukan Sultan yang begitu absolut di dalam negara dan pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Agama tentulah mempunyai peran istimewa dalam Perlembagaan negara. Apalagi bila terjadi pergantian kepemimpinan seperti perlantikan Perdana Menteri, menterimenteri, dan Pejabat negara, kesemuanya berada di bawah kendali Sultan (Pindaan Perlembagaan tahun 1984). Mereka yang dilantik untuk menduduki jabatan tersebut disyaratkan mesti orang yang berbangsa Melayu, beragama Islam yang bermazhab Syafi'i dari aspek pemahaman fiqih dan *Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah* dari aspek pemahaman akidahnya (Perlembagaan Brunei 1959, Bab 5, 1984). Selanjutnya memasuki akhir periode sistem residensi dalam persekutuan Inggris pada tahun 1959 M di Brunei, maka selanjutnya otonomi internal diberikan pada Brunei dan Sultan diberikan kekuasaan eksekutif. Dibuatlah Undang-undang baru mulai diberlakukan pada tahun 1959 yang menjadi dasar pembentukan Dewan Legislatif yang anggotanya sebagian dipilih berdasarkan pemilihan (B A Hussainmiya, 1995). Partai Rakyat Brunei (PRB) kemudian memenangkan semua kursi untuk Dewan Legislatif berdasarkan hasil pemilihan. Tetapi, adanya perlawanan bersenjata yang diprakarsai oleh PRB pada tahun 1962 terhadap rencana persatuan Brunei dan Malaysia menghambat para kandidat terpilih untuk memulai tugas mereka secara resmi. Perlawanan bersenjata tersebut, walaupun dengan cepat dikendalikan oleh Inggris, merupakan suatu peristiwa penting di dalam sejarah politik Brunei; peristiwa tersebut menyebabkan perasaan tak berdaya dan tidak aman yang masih

bertahan sampai sekarang. Peristiwa tersebut juga menyediakan alasan bagi Omar Ali Saifuddin III, yang kemudian menjadi Sultan Brunei, dengan alasan untuk memberlakukan peraturan-peraturan darurat, untuk menunda perubahan konstitusi dan juga mempengaruhi keputusan sultan untuk menolak penggabungan Brunei dengan Malaysia. Menolak untuk mengalah pada tekanan Inggris untuk mengadakan perubahan konstitusi, Sultan mengundurkan diri pada tahun 1967 dan menyerahkan tahta kerajaan pada putranya, haji Hassanal Bolkiah (Saunders,1994: 147). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kolonialisasi Inggris memberi nafas kehidupan bagi kesultanan yang telah melemah dan terpecah-pecah, dan mengubahnya menjadi suatu sistem kekuasaan yang masih terpusat pada kekuasaan Sultan. Bila ditinjau dari sisi sistem politik modern, bahwa sistem pemerintahan kerajaan yang absolut tidak akan mampu bertahan melawan tekanan negara modern. Para penguasa kerajaan dihadapkan pada dilema sistem pemerintahan yang sentralistik, sementara sistem politik modern berusaha mengurangi kekuasaan dan otoritas para Raja, dan mengharuskan para raja untuk berbagi kekuasaan dengan beragam kelompok sosial baru, seperti kelas menengah urban, yang tumbuh dengan pesat sebagaimana model Montesque, yaitu terpisahnya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, uniknya Brunei telah berhasil menghambat kemungkinan ini dan justru berkembang dan tumbuh sebagai negara neo-tradisional yang konservatif. Mereka menggunakan suatu formula legitimasi yang dilandaskan atas dasar agama, budaya, dan tradisi, untuk mengikuti perkembangan sosial ekonomi yang pesat. Pemerintah Brunei telah mampu mengembangkan sistem legitimasi kekuasaan yang bisa mengambil hati rakyat sehingga mampu mensejahterakan rakyatnya di bidang ekonomi yang didukung oleh program kesejahteraan yang melimpah (Roberts and Lee Poh Onn, 2009: 74). Konsepsi tentang politik pemerintahan Islam Brunei Darussalam tentu amat berbeda

dengan yang banyak dilontarkan oleh para pemikir Islam seperti Abu A'la al-Maududui, Hasan alBanna, Ali al-Nadvi, Sayyid Kutub, dan lainnya. Pandangan mereka tentang hubungan Islam dan negara amat berbeda dengan pemikir-pemikir muslim lain seperti Muhammad Imarah dan Qomaruddin Khan. Kelompok terakhir ini lebih memahami Islam dengan tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kekuasaan kaum muslimin yang menjadi penguasa di suatu negeri. Lebih lanjut Muhammad Imarah menjelaskan bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin, karena logika tentang kesesuaian agama Islam untuk sepanjang zaman dan tempat menuntut agar persoalan-persoalan yang selalu berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia untuk memikirkannya, dibentuk untuk kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip umum yang telah digariskan oleh agama (Imarah, 1980: 76-77; Bakhtiar Efendi, 2005: 13). Hal senada juga dikemukakan oleh Qomaruddin Khan (1992: 75-76), bahwa ada pandangan yang salah dalam pikiran sebagian kaum muslimin dewasa ini yang menganggap al-Qur'an berisi penjelasan yang menyeluruh tentang segala sesuatu.

Kesalahpahaman ini disebakan pemahaman keliru terhadap ayat yang artinya "*Dan kami turunkan kepadamu kitab suci untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri*" (QS. 16: 89). Ayat ini dimaksudkan untuk mengatakan bahwa al-Qur'an mengandung penjelasan tentang segala aspek panduan moral. Dan bukan mengatur secara sistemik segala aspek kehidupan manusia. Ada beberapa perubahan terjadi dalam sistem politik di Brunei Darussalam setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984. Brunei dihadapkan pada tugas yang sulit untuk membentuk institusi pemerintahan. Sultan memiliki kekuasaan mutlak, tapi pada saat yang sama ia memahami pentingnya pengembangan institusi profesional milik pemerintah yang akan membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan untuk memerintah

dalam sistem politik negara modern. Suatu bentuk pemerintahan kabinet diumumkan pada tahun 1984. Tetapi, di dalam kabinet tersebut, Sultan masih memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ia berfungsi sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri pada saat yang bersamaan, disamping sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Kerajaan (Leake, 1990: 68). Untuk membangun komunikasi kepada semua golongan lapisan masyarakat, sultan memperkerjakan golongan elit baru masyarakat yang berpendidikan tinggi di dalam pemerintahan yang ia bentuk dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpuasan di antara beragam kelompok sosial yang baru muncul. Dengan menjalin persekutuan dengan para kelompokkelompok elit baru dalam masyarakat ini, Sultan juga berhasil mengurangi ketergantungannya pada keluarga kerajaan dan golongan elit tradisional. Golongan masyarakat elit berpendidikan tinggi diberikan posisi yang penting di dalam pemerintahan yang dibentuk oleh Sultan. Putra sultan, pangeran haji Al-Muhtadee Billah, diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 1998 dan dipromosikan sebagai menteri senior pada tahun 2005. Selama dekade terakhir, ia telah diberi peran yang lebih penting lagi, Dalam event-event penting kerajaan, ia mewakili sultan, menghadiri acara publik dan menyambut tamu-tamu penting dari negara asing untuk menjamin terjadinya transisi kekuasaan yang berjalan mulus. Sejak kemerdekaan, jarang sekali ada upaya untuk memperkenalkan perwakilan pemerintah dengan posisi penting, dan kekuasaan tersentralisasi pada sultan.

D. Kesimpulan

Malaysia pada awalnya merupakan bagian dari Malaka, sebagaimana Indonesia, Malaysia dalam sejarahnya pernah dikuasai oleh Inggris, namun pada akhrnya Malaysia mendeklarsikan kemerdekaannya pada tanggal 13 Agustus 1957, Singapuara dan Brunei ketika tu masih tegabung Malysia. Setelah taun 1965

Singapura memisahkan diri dengan Malaysia dan pada tahun 1971 Brunei juga memisahkan diri. Akan tetapi Malaysia merupakan negara sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara yang bisa memulihkan perekonomiannya tanpa bantua dana monoter internasional (IMP). Islam masuk pertama kali di Malaysia dibawah oleh pedagang Gujarat sekitar abad kesembilan dengan pola penerimaan bottom up yang selanjutnya mengalami perkembangan melalui proses pola top down. Dalam bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi, Setelah kerusuhan etnis pada 13 Mei 1969, kontroversi Kebijakan Ekonomi Baru dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Dari kebijakan ekonomi baru Malaysia menjaga keseimbangan politik-etnis yang lunak, dan mengembangkan peraturan yang unik menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan aturan politik yang menguntungkan bumiputera (sebuah grup yang terdiri dari etnis Melayu dan kaum pribumi) dan warganegara Malaysia yang menganut agama Islam. Antara 1980-an hingga awal 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di bawah pimpinan Dr. Mahathir bin Mohammad, Perdana Menteri keempat Malaysia. Dalam periode ini terjadi peralihan dari ekonomi berdasarkan agrikultur menjadi produksi dan industri dalam bidang komputer dan barang elektronika rumahan .

Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif. Selain getah dan kelapa sawit yang banyak di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak juga kaya akan sumber alam seperti kayu balak, minyak bumi dan gas alam .

Kemudian masuknya Islam di Brunei dapat diketahui berdasarkan bukti sejarah Brunei, berupa batu nisan Cina muslim di Ranggas, Tutong Bandar Sri Begawan bertuliskan Cina bernama P'ukung Chih-mu meninggal 1264 M, ia adalah keturunan dari Dinasti Sung Selatan yang telah banyak memeluk Islam. Brunei didiami oleh beragam etnis yang 2/3 etnis Melayu muslim; kemudian 1/5 etnik Cina dan sisanya etnis India Ideologinegara yang dibangun pemerintahan Brunei, yaitu Melayu Islam Beraja (MIB) yang terdiri dari 2 dasar, yaitu: pertama, Islam sebagai Guiding Principle, dan kedua Islam sebagai Form of Fortification. Dua dasar ini kemudian membentengi penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan (pengekalan) tiga konsep, yaitu Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafii – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja. Kedudukan agama Islam begitu jelas dalam Perlembagaan negara tetapi undang-undang Islam sebagai undang-undang dasar jabarannya masih sangat terbatas dan belum menggambarkan Negara Islam yang sebenarnya. Kedudukan Sultan yang begitu absolut di dalam negara dan pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Agama mempunyai peran istimewa dalam Perlembagaan negara.

Brunei adalah negara kecil tapi kaya dengan luas 5765 km persegi. Menurut sensus penduduk tahun 1991, ada 71.000 atau 27% pekerja migran karena penduduk Brunei tidak cukup untuk menyediakan semua sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan-tujuan pembangunannya. Di sisi lain, menurut Survei Angkatan Kerja, pengangguran meningkat dari 3,6% pada tahun 1981 menjadi 4,7% pada tahun 1991 dan 4,9% pada tahun 1995. Hal ini menjadi pemicu diperlukannya diversifikasi sektor ekonomi, tidak hanya untuk ketergantungan pada minyak dan gas, tetapi juga untuk memberikan peluang lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tumbuh di antara warga negara.

E. Daftar Rujukan

Abdullah, Abdul Rahman Haji, Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Alian, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Azra, Azyumardi, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Geakan, Cet. I; Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Abdullah , Taufik, dkk., Sejarah Ummat Islam Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991)

Arnold , Thomas W, Sejarah Da'wah Islam, diterjemah A. Nawawi Rambe, (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1981),

Benda , Harry J, Kontinuitas dan Perubahan Dalam Islam di Indonesia, dalam Taufik Abdullah (ed.), Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia, 1987),

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam Jilid III, (et. III; Jakarta Ictiat BaruVan Hoeve, 1994.

Esfito, Jhon L, Islam and Development : Religion and Sociopolitecal Change, diterjemahkan oleh Warda Hafidz dengan judul Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang, Cet. I; Yokyakarta : PLP2M, 1985.

HAMKA, Sejarah Umat Islam, (edisi baru), (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd, 1997).

http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia, disadur tanggal, 18 Juni 2009

http://www. State gover pabgn, 2777 htm diakses pada tanggal 18 Juni 2009

http:www.ai-shia.com/html/id/service/Info-Negara Muslim/Malaysia.

http:www.ai-shia.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/ Malaysia. htm.

http://urniasih.blogspot.com/2005/06/travel-Malaysia-Kuching.html

http:www.ai-shia.com/html/id/service/Info-Negara-Muslim/Malaysia. htm.

Johns , A. H., Sufism as a Category in Indonesian Literature and

History, Journal of Southeast Asian History, 2 (2), 1961, h. 10-23; A. H. Johns, "Sufism in Southeast Asia: Reflections and Reconsiderations," Journal of Southeast Asian History, 26 (1), 1995

Kenneth Perry Landon, Southeast Asia: Cross-roads of Religion, (Chicago: University of Chicago Press), 1949

Lapidus, Ira M, A History of Islamic Societies, dterjemahkan Ghufron A Masádi dengan judul Sejarah Sosial Umat Islam Bagian Ketiga, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Mahayudin Haji Yahaya, Islam di Alam Melayu, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998)

Muhammad Syamsu AS, Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya, Cet. II; Jaskarta: PT. Lentera Basritama, 1999.

Sewang, Ahmad M. Islamisasi Kerajaan Gowa. Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

A. Hasymy. (1994). Sejarah Masuk dann Berkembangnya Islam di Indonesia. Bandung: Al Maarif. Abdul Aziz Thaba. (1998).Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru. Jakarta: Gema Insani Press. Ahmad Mansur Surya Negara. (2002).

Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.

_____.(2010). Api Sejarah. Bandung: Salamadani. Azyumardi Azra. (1994). Perspektif Islam di Asia Tenggara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____. (1999). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII M. Bandung: Mizan.

Bakhtiar Efendi. (2005). Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.

B A Hussainmiya. (1995). Sultan Omar Ali Saifuddin III and Britain: The Making of Brunei Darussalam. Kuala Lumpur: OxfordUniversity Press.

Deliar Noer. (1986). Bunga Rampai dari Negeri Kangguru Australia.

Jakarta: Panji Masyarakat. Funston, John (ed.). (2001).
Imarah,Muhammad. (1980). Al-Islam wa al-Sulthah al-Diniyah. Kairo: Daral Saqafah al-Jadidah.
Khan,Qomaruddin. (1992). Political Consepts in The Quran. Lahore: Islamic Book Foundation.
Leake, David. (1990).Brunei:The ModernSoutheast Asian of Islamic Sultanate. Kuala Lumpur: Forum. Mahmud Saedon Awang Othman. Perlaksanaan dan Pentadbiran Undang-undang Islam di Negara Brunei Darussalam: Satu Tinjauan.
Marwati Djuneid & Nugroho Noto Susanto. (1988). Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka.
Munawir Syadzali. (2004). Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Perlembagaan Brunei 1959. Pindaan Perlembagaan Brunei tahun 1984.
Saifuddin Zuhri. (1984). Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: al-Maarif.
Saunders, Graham. (1994). A History of Brunei.Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Selamet Muljana. (1968). Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dann Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara. Jakarta: Bhatara.
Siti Zaliha Haji Abu Salim. "Perkembangan Undang-undang Di Brunei Sebelum Sistem Pemerintahan Beresiden". dalam Jurnal Beriga, April-Jun 1995. Soltau,
Roger F. (1982). An Introduction to Politics. London: Longmans. Taufik Abdullah. (1994). Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

POLITIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Rusnaena

A. Pendahuluan

Perkembangan bank Islam di Indonesia sebenarnya relatif terhambat jika merujuk pada perkembangan bank Islam di negara-negara lainnya. Hal ini sangat terkait dengan kondisi politik nasional yang secara umum kurang responsif terhadap kelembagaan yang berlabel ke-lslam-an. Meskipun sejak tahun 1940-an satu persatu negara muslim mulai merdeka dari jaman penjajahan, namun arahnya pembentukan sebuah negara Islam dengan pelaksanaan syariat Islam mengalami banyak kemdala. Di antaranya karena faham nasionalisme sekuler yang ditanamkan oleh para penjajah dan dijadikan alat perjuangan oleh pendduduk negeri-negeri muslim itu kini menjadi bumerang. Umumnya para pemimpin yang muncul pasca penjajahan adalah pemimpin yang sebelumnya dididik dengan pemahaman sekuler, sehingga tidak melihat kaitan agama dengan negara dalam membina masyarakat. Agama difahami sebagai urusan individu, sedangkan yang berurusan dengan sosial politik agama tidak boleh ikut campur. Hal ini difahami karena pemahaman agama dalam dunia barat tempat mereka belajar adalah tradisi

Judeo-Kristian yang telah terkalahkan oleh pemikiran sekuler. Para pemimpin pasca penjajahan inilah yang kemudian menjadi penghalang bagi bangkitnya kembali politik Islam.[1]

Bank-bank yang berdiri pada masa kemerdekaan, adalah Bank Rakyat (BRI) yang berdiri pada 22 Februari 1946. BRI merupakan bank nasionalisasi dari De Algemenevolks Crediet Bank Syomin Ginko. Kemudian berdiri pula Bank Negara Indonesia, BNI '46 yang beroperasi pada tanggal 5 Juli 1946. Akan tetapi bank Islam belum dikenal pada waktu itu karena belum didukung oleh kondisi politik bangsa Indonesia yang baru merdeka. pada saat *booming* bank Islam di negara-negara Islam, Indonesia masih berjuang dalam pembangunan ekonomi politik Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Albert Widjaja menjelaskan Indonesia yang mewarisi ekonomi penjajah yang memelihara sistem ekonomi dualistis, maka terdapat sektor modern yang berorientasi pada ekspor yang dikuasai oleh elit kota dan perusahaan asing. Terdapat juga, sektor tradisional yang berorientasi pada pertanian yang masih bersifat subsistem. Kekayaan alam (minyak, besi, timah, karet dan sebagainya) di-eksplorasi untuk mempercepat modernisasi, tapi rakyat yang menderita kemiskinan (Ahmad, 1994).

Sedangkan sejak 1980-an, pada saat Indonesia mulai mapan dalam proses-proses ekonomi, kondisi politik belum juga mendukung secara positif dalam pendirian bank Islam. Pada masa 1980-an banyak kerusuhan yang disinyalir bernuansa agama (SARA), seperti kerusuhan Tanjung Priok dan Situbondo. Dalam analisis yang berbeda, M, Dawam Rahardjo melihat bahwa pergeseran politik antara pemerintah Orde Baru dengan Islam, seperti peristiwa

[1] Khursyid Ahmad menyebut mereka dengan "bom waktu" atau" ranjau"yang ditinggalkan para penjajah di negeri muslim. Lihat makalah-nya"Economic Development in *slamic Framework" dalam Studies in Islamic Economic, Leicerter: The Islamic Fundation,1994.*

berdarah Tanjung Priok 1981 pada dasarnya bisa juga dikarenakan kesenjangan hak-hak ekonomi. Kebijakan rasionalisasi buruh pelabuhan yang berdampak pada pengangguran, plus "penggusuran" petani kebun (Rahardjo, 1999). Tahun 1983 suatu kebijakan deregulasi perbankan oleh pemerintahan Orde Baru telah berdampak pada dunia perbankan. Kebijakan deregulasi perbankan memberi peluang para pengusaha dan individu-individu yang dekat kekuasaan untuk mendirikan bank bukan untuk pemberdayaan lembaga keuangan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial (kerakyatan).

Pada awalnya pembentukan bank syariah memang banyak diragukan, oleh sebab:

1) Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interst free)* adalah suatu yang tak mungkin dan tak lazim.
2) Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.

B. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Ide pendirian bank Islam di Indonesia tidak terlepas dari adanya wacana yang begitu intens tentang pendirian bank-bank Islam di negara-negara Islam yang menurut Dawam Rahardjo mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada awal tahun 1970-an. Namun demikian, sebenarnya para ahli banyak yang sepakat, sebagaimana dikutif dari Syafi'i Anwar, ide bank Islam merupakan fenomena 1960-an. Namun pada dekade ini kondisi tidak memungkinkan untuk merealisasikan pendirian bank-bank Islam (Anwar, 2001).

Pada tahun 1963 bank tabungan Myt-Ghamr di Mesir adalah eksperimen pertama dalam merealisasikan ide tentang bank Islam. Sebuah bank yang permodalannya dibantu oleh mendiang Raja

Faisal dari Arab Saudi ini, mencoba menggabungkan gagasan bank tabungan Jerman, dengan dasar-dasar perbankan untuk kawasan pedesaaan yang tentu saja berlandaskan pada tuntutan syariah Islam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat warga pedesaan yang terkenal dengan sikap religiusnya agar mau menginvestasikan modal mereka, karena pada saat itu pada umumnya masyarakat menganggap bahwa bank adalah riba karena membungakan uang.

Sayang bank ini pada tahun 1967 ditutup karena persoalan politik, padahal mempunyai prospek yang cerah karena memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dan telah membuka sembilan kantor cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Akan tetapi walupun bank Myt-Ghamr ditutup tidak menyurutkan minat umat Islam untuk mendirikan bank Islam, bahkan usaha kearah itu lebih diperluas lagi. Umat Islam membuka bank yang tidak hanya untuk kepentingan penabungan uang saja, tapi juga begerak dalam bidang investasi serta mencakup masyarakat perkotaan, terutama investasi dalam sektor riil. Sektor inilah yang sangat cocok bagi pengembangan perbankan Islam yang tidak mengenal konsep bunga.

Maka pada tahun 1971, di Mesir didirikan bank Islam untuk kawasan perkotaan, Bank Sosial Nasser. Bank yang mulai beroperasi pada tahun 1972 ini lebih diarahkan pada fungsi sosial selain fungsi ekonominya; seperti memberikan pinjaman keuangan bebas bunga untuk proyek-proyek kecil atas dasar bagi hasil, juga memberikan pinjamanterhadap para mahasiswa yang tidak mampu meneruskan studinya ke perguruan tinggi (Anwar, 2001).

Ide pendirian bank Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai keputusan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun pandangan dari para Intelektual Islam di Indonesia. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang banyak memutuskan perhatian pada kondisi sosial, pendidikan dan ekonomi umat Islam pernah mengeluarkan seruan untuk mendirikan bank

Islam di Indonesia. Ketika Majelis Tarjih melakukan sidang tentang hukum bunga pada tahun 1969 di Sidoarjo, Jawa Timur, salah satu kepetusan penting yang berkaitan dengan pendirian bank Islam di Indonesia yaitu para peserta Majelis Tarjih menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan sesuai dengan kaidah Islam.

Keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tersebut tidak terlepas dari perbedaan pandangan dikalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia tentang bunga bank. Ide pendirian bank Islam merupakan suatu solusi bagi penyelesaian perbedaan pandangan atas bunga bank. Sikap yang serupa juga dilakukan NU melalui *Lajnah Bahsul Masa'il*-nya. Karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama NU tentang bunga maka pendirian bank Islam, atau paling tidak mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam menjadi suatu keharusan.

Perbedaan itu pula yang menyebabkan Muhammadiyah memandang bunga bank termasuk dalam persoalan *mutasyabihat*. Maka dengan adanya bank Islam disamping mengakomodasi kepentingan bagi umat Islam yang memandang bunga bank sebagai riba untuk dapat mengembangkan ekonominya melalui perbankan Islam, juga akan menghapus pandangan bagi sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa kehalalan hukum bunga bank disebabkan oleh keadaan darurat. Di mana pada saat tidak ada lembaga keuangan yang menjalankan sistem operasional dengan prinsip non bunga.

Keputusan sidang Majelis Tarjih tahun 1969 tersebut di atas dipertegas lagi ketika Majelis itu melakukan sidangnya pada tahun 1972 di Wiradesa Pekalongan. Dalam sidang itu kembali Majelis Tarjih di Sidoarjo tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian Islam, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Bahkan para peserta sidang Majelis Tarjih mendesak kepada pimpinan Muhammadiyah agar mengajukan konsepsi tentang

perbankan Islam pada Muktamar Muhammadiyah.

Demikian juga pada sidang Lajnah Bahsul Masa'il 1982 di Lampung, organisasi Nahdlatul Ulama membuat beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan ide penerapan sistem syariah dalam bidang eknomi dan pendirian bank Islam. Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa NU adalah organisasi massa yang cukup besar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, yang memiliki potensi sangat besat dalam pembangunan nasional dan kehidupan ekonomi (Antonio, 2001). Apalagi warga NU pada umumnya adalah masyarakat pedesaan yang memiliki potensi yang cukup besar harus dikembangkan. Berkaitan dengan ide penerapan sistem syariah dalam bidang ekonomi dan pendirian bank Islam, Lajnah Bahsul Masa'il NU memutuskan mengambil untuk langkah-langkah strategi sebagai berikut:

Pertama, sebelum tercapai cita-cita pendirian bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank tanpa bunga, hendaknya sistem perbankan yang sedang berjalan sekarang ini segera diperbaiki atau disesuaikan dengan prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, perlu diatur hal-hal yang berkaitan:

1. Penghimpunan dana masyarakat yang menggunakan sistem *al-wadiah dan al-mudhrabah.*
2. Penanaman modal dan kegiatan usaha baik bagi pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan, atau pemberian jasa, dilakukan atas dasar usaha patungan atau *profit and loss sharing*
3. Untuk pembiayaan proyek, sistem pembiayaan dapat menggunakan sistem mudharabah, murabahah, ijarah, dan prinsip lain yang sesui dengan syariah.
4. Bank dapat membuka L/C dan menerbitkan surat jaminan, dimana pengaplikasiannya menggunakan konsep musyarakah, mudharabah, dan lainnya.

5. Untuk jasa-jasa perbankan seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli mata uang dilakukan dengan prinsip tanpa bunga.

Hal penting ain yang diputuskan adalah para anggota Munas Lajnah tersebut sepakat mendukungg dan menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Oleh sebab itu, dipandang perlu oleh para anggota Munas untuk merekomendasikan kepada pimpinan Pusat Nahdatul Ulama (PBNU) yang akan berdiri tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam (Mashuri, 1997). Hal yang sama juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada akhir dasawarsa tahun 1980-an. MUI semakin intensif membicarakan gagasan pendirian bank Islam di Indonesia, bahkan pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI melaksanakan sebuah lokakakrya Nasional yang bertema "Bunga bank dan perbankan" adalah sebuah upaya mendorong terbentuknya bank Islam di Indonesia. Lokakarya yang menjadi cikal bakal lahirnya bank Muamalat Indonesia dengan mengundang berbagai bangsa, termasuk pemerintah dan Bank Indonesia (Wahid, 1995).

Kesimpulan penting yang diambil dari hasil lokakarya adalah keinginan umat Islam untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari hasi rumusan tentang perbankan bebas bunga.

1. Dalam rangka memantapkan pengerahan dana pembangunan tersebut perlu digerakkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan. Untuk pengerahan dana masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan tersebut perlu diusahakan adanya sistem atau prosedur–prosedur perbankan yang dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga kepada nasabahnya.
2. Sistem atau prosedur-prosedur perbankan tersebut yang dalam operasinalnya tidak menggunakan bunga dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan perbankan yang berlaku (Wahid, 1995).

Intensifnya ide pendirian bank Islam, terutama yang disponsori MUI pusat, tidak terlepas dari kondisi sosial politik dan ekonomi yang berkembang pada saat itu. Kedua aspek itu sangat terkait erat dengan adanya gagasan bank Islam, utamanya pertimbangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang lesu, akibat adanya resesi ekonomi dunia, membawa dampak kurang baik bagi proses kurangnya bantuan luar negeri yang menjadi salah satu tumpuan bagi pembangunan Indonesia. Kondisi ekonomi yang demikian, memaksa pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang tidak mengendalikan bantuan luar negeri sebagi tumpuan pembangunan. Pemanfaatan potensi dan kemampuan masyarakat Indonesia menjadi alternatif bagi kelangsungan pembangunan.

Pemanfaatan potensi dalam negeri menjadi penopang pembangunan bangsa dapat dilihat pada kebijakan yang memberlakukan pada tanggal 1 juni 1983. Kebijakan itu pada satu sisi memang sebagai upaya penghimpunan dana masyarakat untuk proses pembangunan bangsa, namun pada sisi yang lain, terutama yang berkaitan dengan gagasan pendirian bank Islam, merupakan "angin segar" bagi terwujudnya bank tersebut.

Paket 1 Juni 1983 tersebut pada prinsipnya mengizingkan bank-bank untuk menentukan sendiri tingkat bunga deposito/tabungan dan pinjaman (Purwaatmaja, 2006). Sebuah regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dalam rangka kemandirian dan efektifitas kerja perbankan nasional. Sebab, sebelum deregulasi itu dikeluarkan perbankan nasional sangat bergantung pada tersedianya kredit likuiditas bank Indonesia, dan besarnya bunga pinjaman dan kredit ditentukan oleh pemerintah. Namun demikian, sebenarnya Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok perbankan sedah ada peluang bagi umat Islam, tapi pemerintah belum tegas memberikan otoritas kepada bank-bank nasional untuk menentukan suku bunga pinjaman dan tabungan.Dengan adannya deregulasi 1 Juni 1983 itu,

umat Islam dapat saja mendirikan sebuah bank yang dikelolah berdasarkan tingkat bunga 0% (tanpa bunga) dan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan atas hukum perjanjian murni antara bank dengan nasabahnya. Namun kesempatan itu tidak dapat digunakan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan modal untuk merealisasikan pendirian sebuah bank Islam, sebab pemerintah tidak memberikan kebijakan untuk mendirikan bank-bank baru (Purwaatmaja, 2006). Alternatifnya umat Islam mendirikan lembaga keuangan yang berprinsip syariah dalam bentuk koperasi. Maka di Jakarta dikenal dengan koperasi Ridha Gusti, Baitul Tanwil Teknosa di Bandung, dan beberapa bentuk yang serupa diberbagai daerah di Indonesia.

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988, dikenal dengan PAKTO 1988 dan ketentuan lanjutannya pada tanggal 29 Januari 1990. Ketentuan tersebut memberikan peluang mendirikan bank-bank swasta baru, cabang-cabang pembantu bank asing baru, termasuk *joint ventura* bagi perwakilan bank asing yang telah ada dengan bank domestik. Tidak terkecuali kebijakan ini lebih memberikan peluang kepada umat Islam untuk mendirikan bank dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kondisi tersebut pula membangkitkan gairah umat Islam Indonesia untuk merealisasikan rencana tersebut. Usaha ke arah itu misalnya dilihat dari usaha Andi Rally Siregar, seorang pimpinan Bank Susila Bakti untuk membuka Islamic Window dari bank yang dipimpinnya. Di samping merintis kerjasama dengan *Islamic Development Bank (IDB)* untuk mendirikan *Joint Ventura Bank* (Bank Islam Campuran) (Purwaatmaja, 2006).

Respon yang serupa terjadi pada tingkat Bank Perkreditan Rakyat, tercatat bahwa umat Islam di Lombok, sebagai yang pertama kali mengajukan permohonan untuk mendirikan BPR Islam dengan nama BPR Islam Al-Azhar. Kemudian menyusul BPR berkah Amal Sejahtera. Dana Mardhatillah, dan BPR Amanah

Rabbaniah, ketiganya di Bandung. Dan terakhir BPR Hereukat yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1991. Semuanya adalah BPR yang lahir sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia (Purwaatmaja, 2006).

C. Politik Perbankan Syariah di Indonesia

Secara formal era bank Islam di Indonesia dimulai pada saat kelahiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Rentang waktu panjang dari 1973 pada saat IDB didirikan. Padahal Indonesia merupakan negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan berpenduduk muslim terbesar di dunia. Gagasan untuk mendirikan bank Islam di Indonesi sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 (LSIK) dangah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 (LSIK) dan Yayaasan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat ide ini (Sudarsono, 2012), diantaranya:

1) Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku, yakni UU No 14/1967.
2) Konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, dan karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3) Masih di pertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam *ventura* semacam itu; sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988 di saat Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Okober (Pakto) yang berisi liberalisasi Industri perbankan. Para Ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas

bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja meetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsug di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar. Pada tanggal 3 november 1991, dalam acara silaturrahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar 106.126.382.000,- Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bakti Pertiwi , PT PAI, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi (Sudarsono, 2012).

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang (UU) No 7 tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut , pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkereditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No

119 tahun 1992.

Secara tegas pasal 6 PP No 72 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

1. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenangkan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank umum aau Bank Perkereditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenangkan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil (Wahid, 1995).

Dalam menjalankan perannya, bank Syariah berlandaskan pada UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1995 yang pada pokoknya menetapkan hak-hak antara lain (Wahid, 1995):

1) Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkereditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah
3) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil memiliki Badan Pengawas Syariah.
4) Bank umum atau bank perkereditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenangkan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya, Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanyatidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPR Syariah). Namun demikian, keberada-

an dua jenis lembaga keuangan tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wat-tamwi* (BMT). Setelah 2 tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori berdirinya Asuransi Islam, Serikat Takaful Indonesia (STI) dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian, yaitu tahun 1997, Bank Muamalat Indonesia mensponsori lokakarya ulama tentang reksa dana syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya Reksadana syariah oleh PT Danareksa Investment Management.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai peletak dasar sistem perbankan Islam yang berlaku di Indonesia, walaupun disadari bahwa di dalam UU tersebut tidak menyebut dan menjelaskan secara langsung bank Islam itu sendiri. Namun dalam Peraturan Pemerintah No 72 tentang Bank Indonesia, bahwa prinsip bagi hasil dan istilah bank Islam baru dijelaskan.

Bank Islam yang dimaksud dalam Undang-undang No 7 tahun 1992 dan PP No 72 tahun 1992 adalah bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi dalam dua peraturan yang dikeluarkan tdak menyebutkan bank Islam atau bank syariah , namun hanya sebagai bank dengan prinsip bagi hasil. Istilah itupun dalam undag-Undang No. 7 tahun 1992 hanya disebut dua kali yaitu dalam pasal 6 huruf (m)[2] dan pasal 13 huruf (c) yang mengatur bank perkreditan rakyat.

Pada tahun 1998 muncul Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan

[2] Pasal ini mengatur usaha-usaha yang dilakukan bank umum, salah satunyya adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Lihat, pasal 6 huruf (m) Umdang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan

perbankan syariah. Pemberlakuan UU No. 10 tagun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui ijin pengembangan cabang syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pada era sekarang, regulasi dan perkembagaan kelembabagaan bank Islam di terus mengalami situasi yang kondusif. Perangkat perundang-undangan sebagai acuan dalam praktik perbankan telah diperkuat dengan kelahiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

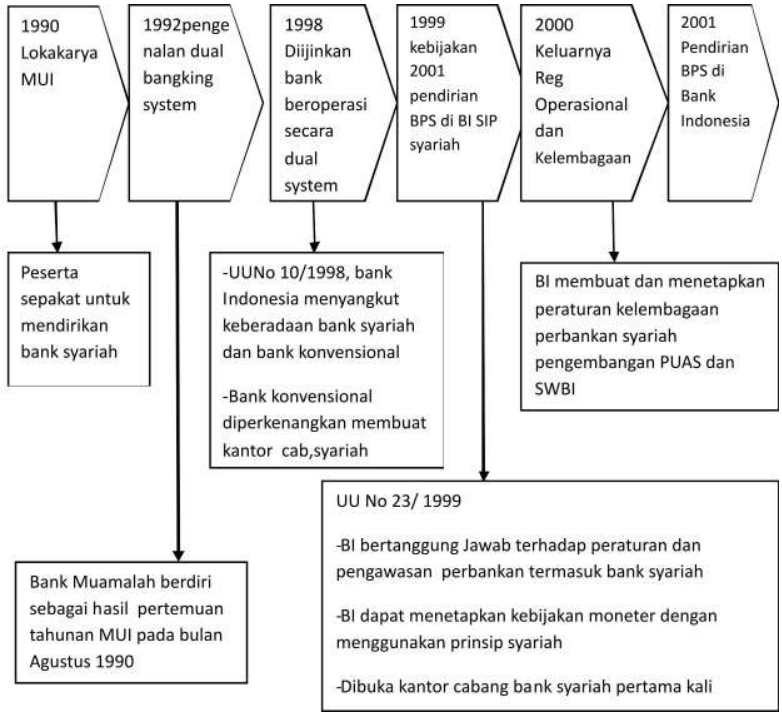

Gambar 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Dengan UU No 10 tahun 1998 maka telah ditetapkan landasan hukum yang kuat serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank Syariah. Ketetapan trsebut adalah sebagai berikut:

1) Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank syariah sebagaimana yang termaktub dalam pasal1 ayat 3 UU No 10 tahun 1998. Pasaal tersebut menjelaskan bahwa bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konnvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang syariah. Sedangkan BPR konvensional atau syariah. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
   - Peembentukan unit usaha syariah
   - Memiliki Dewan Pengawas syariah yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional(DSN) , dan
   - Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan lain-lain berkaitan dengan kegiatann operasional maupun non Operasional KCS.
2) Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan UU No 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan berdasarkan prinsip syariah, maka tugas dan fungsi BI perlu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, maka tugas dan fungsi BI perlu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihaat dalam pasal 10(2) yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas BI dibidang pengendalian moneter

dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, dalam pasal 11 ditentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas BI dibidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasarkan prinsip prinsip syariah. Selain itu, dalam pasal 11 ditentukan bahwa dalam fungsinya sebagai *the lender of the last resort* BI dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, BI telah menyusun ketentuan yang berkaitan dengan operasionalisasi bank syariah, yaitu :

- Ketentuan giro wajib minimun (GWM) bagi bank konvensional yang membuka KCS.
- Ketentuan Kliring
- Ketentuan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).
- Ketentuan *wadiah* BI

Untuk mendukung kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank serta pelaksanaan PUAS , transaksi pembayaran dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro pada BI. Bila dalam pelaksanaan kliring saldo bank menjadi kurang dari GWM maka bank atau kantor cabangnyadikenakan sanksi kewajiban membayar (Rosly, 2005). Apabila saldo menjadi negatif maka bank yang bersangkutan termasuk cabangnya akan dikenakan sanksi penghentian peserta kliring ditambah dengan sanksi kewajiban membayar.

Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Bila terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga bank memperoleh keuntungan. Sebaliknya, bila mengalami kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Bagi bank syariah yang mengalami

kekurangan dana dapat menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank (IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bagi bank syariah maupun bank konvensional. Untuk menjaga stabilitas moneter, BI menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah Melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang didasarkan atas prinsip titipan amanah(wadiah). Dari sisi bank syariah piranti tersebut merupakan sarana/penempatan kelebihan likuiditas sementara, sebelum dana yang dikelola dapat disalurkan untuk pembiayaan (Nizar, dalam *www.Financeinislam. com)*.

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diatas tidak berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan perbankan Islam di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lain:

1) Keberadaan lembaga-lembaga tersebut masih dalam konteks lokal, seperti BPR al-Azhar yang hanya meliputi pulau lombok, BPR Mardatillah, dan lainnya mereka tidak memiliki jaringan luas yang mencakup kota-kota lain di Indonesia.
2) Tidak profesional dalam manajemen pengelolaan, maksudnya belum ada format baku yang menjadi acuan dalam operasional, semuanya masih bersifat eksperimen.
3) Sumber daya manusia tentang perbankan syariah yang tidak memadai,, maksudnya yang memiliki kemampuan perbankan secara profesional dan pemahaman yang baik dalam syariah belum muncul.

Hal lain yang menyebabkan perkembangan yang kurang menggembirakan bagi bank Islam, yaitu :

1) Rendahnya pengetahuan dan kesalah pahaman masyarakat mengenai bak Islam
2) Belum tersedianya ketentuan pelaksana terhadap operasional bank Islam
3) Terbatasnya jaringan kantor perbankan Islam
4) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang perbankan Islam (Bank Indonesia, 2001)

Terlepas dari perkembangan yang kurang menggembirakan dari perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu 1992-1998, namun dibandingkan dengan bank konvensional, Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah membuktikan dirinya mampu bertahan dari krisis keuangan yang menyebabkan bangkrutnya sebagian bank-bank konvensional di Indonesia.

Kemampuan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia turut memberi faktor bagi pemerintah untuk merevisi Undang-Undang No.7 tahun 1992 dengan UU No. 10 tahun 1998. Pemerintah dengan UU baru lebih mengakomodasi sistem perbankan Islam diterapkan dalam sistem perbankan nasional, dengan memberi peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank Islam di Indonesia.

D. Kesimpulan

Semenjak perdebatan di pemerintahan tentang perbankan Syariah (Islam) pada tahun 1946 sampai awal 1990 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang signifikan bagi munculnya regulasi yang mengatur tantang Perbankan Syariah (Islam) di Indonesia. Dan pada akhirnya Perbankan Syariah berdiri pada tahun 1992 yang dipelopori Bank Muamalat, meskipun sudah agak terlambat dibandingkan negara lainnya. Hal ini karena sistem politik yang kurang mendukung berdirinya Bank Syariah. Sampai saat ini pun regulasi tersebut masih setengah hati, yang terbukti dengan kosistensi Pemerintah Indonesia dalam mengamankan asset dan Pendapatan Negara pada bank Konvensional, dampaknya pun cukup signifikan bagi pertumbuhan asset Bank Syariah yang jauh dibawah Bank Konvensional, belum lagi dengan dihadapinya tantangan perlambatan Pertumbuhan Aset Bank Syariah sejak tahun 2012 dan tantangan Pasar Bebas Asia Tenggara yang diberlakukan sejak tahun 2015.

Namun dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Iindustri perbankan syariah akan memberikan dampak positif kepada perkembangan perekonomian nasional kita ke depan, terutama pada sektor riil dan juga usaha kecil dan menengah (UKM). Tentu saja dengan harapan perbankan syariah harus lebih berani mengambil risiko dan juga mengutamakan produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai senjata pamungkas di masa yang akan datang. *Wallahu 'alam Bissawab.*

E. Daftar Rujukan

Asya Finance', 2004, dan Clement M. Henry dan Rodney Wikon (ed), The Politics of Islamic Finance (Edinburgh: Edinburgh University Press.

Compton,N. Eric. 1991. Principle of Banking (terjemahan Alexander Oey. Jakarta:Akademia Pessindo.

Djumhana, 2000 Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bhakti –Fuady Munir 2001 Perbankan Modern, Buku kedua (Tingkat Advance) Bandung: Bandung citra aditya bhakti.

Sudarsono, Heri , Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Illlustrasi, cet 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012) 33.

Mas'eod "Ekonomi-Politik Pemberdayaan Rakyat", dalam Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Cet ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.

Rahardjo Dawam. M, Tantangan Indonesia sebaga Bangsa (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 19.

F Baskan,Filiz -The Political Economy of Islamic Finance in Turkey: The Rob of Fethullah Guleand

Mallarangeng Rizal, Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992, terj.: Martin Aleida (Jakarta: Gramedia, 2002) . 36-37.

Widjaja, Albert ,, Budaya Politik, hlm. 98. Lihat juga Joseph A. Faffaele, The Economic Development of Nations (New Random House, 1971), hlm. 203.

Sumawinata, Sarbini, Politik Ekonomi Kerakyatan (Jakarta: Gramedia, 2004),. 9-11.

Husain Pontoh,Coen "Kata Pengantar", dalam Coen Husain Pontoh (ed), GerakanMassa Menghadang Imperialisme Global (Yogyakarta: Resist Book, 2005), . viii

M.Sadeq,Abu Hasan, Islamic Economics; Some Selected Issues (Lahore, Pakistan: Islamic Publication, 1989).

Bank Islam (on-line), "about BIMB" (http://www.bankislam.com.my/bm/ Pages/PersonalBanking.aspx), diakses 27 Juni 2011.

Haryono,Endi Dilema Mahathir; Kebijakan Ekonomi Politik Malaysia dalam Menghadapi Krisis Ekonomi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 2-3. William Case, "Malaysia: Semi Democratic Paradigm" dalam Asian Studies Review, Juli 1993, Harokl Crouch, Government and Society in Malaysia (Sidney: AIEn & Unwin, 1996).

M,C, Rickle'fs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, terj.: Satri Wahono dkk, Cet Ke-3 (Jakarta: Serambi ilmu Semesta, 2007), 587-588.

Pohan, Aulia, Potret Kebijakan, hlm. 111 dan 152. Lihat juga Rizal Mallarangeng Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992, terj.: Martin Aleida (Jakarta: Gramedia, 2002), 85.

Islamic Devebpment Bank (on-line), "about TDB", (http// www.isdb.org/ irj/ portal/anonymous), diakses 10 noov 2016.

PROFIL PENULIS

- **Ahmad Ibandi**., alamat e-mail: ahmad.ibandi@ yahoo. com.
  Pendidikan Formal: S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta Jurusan Ekonomi Akuntansi, S2 Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung konsentrasi Ekonomi Islam.
  Pekerjaan tetap sebagai Wiraswasta

- **Suad Fikriawan.**, alamat e-mail: suad.fikriawan @gmail.com.
  Pendidikan Formal: S1 UIN Maliki Malang Jurusan Ekonomi Manajemen, S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam.
  Pekerjaan tetap sebagai dosen Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo

- **Alvien S Haerisma**., alamat e-mail: alvien nizam @ yahoo.co.id.
  Pendidikan Formal: S1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Ekonomi Perbankan Islam, S2 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam.
  Pekerjaan tetap sebagai dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

- **Helmi Haris.**, alamat e-mail; helmi.solo@ gmail. com.
  Pendidikan Formal: S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah.

Pekerjaan tetap sebagai dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

- **Ambo Dalle**., alamat e-mail; alle.bohari@ gmail.com.
  Pendidikan Formal: S1 UIN Alauddin Makassar Jurusan Ekonomi Islam, S2 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam.
  Pekerjaan tetap sebagai direktur pemasaran Industri UD. Hamzah (Penggilingan Padi) Makasar.

- **Moch. Nurhidayat**., alamat e-mail: moch nurhidayat@ yahoo.com.
  Pendidikan Formal: S1 Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Jurusan Teknik Industri, S2 Universitas Brawijaya Malang konsentrasi Manajemen Strategik.
  Pekerjaan tetap sebagai dosen Universitas Tribuna Tungga Dewi Malang.

- **Ratih Purbowisanti**., alamat e-mail; ratihp33@ gmail.com.
  Pendidikan Formal: S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Keuangan Islam, S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Syariah.
  Pekerjaan tetap sebagai dosen Universitas Alma Ata Yogyakarta.

- **Usman**., alamat e-mail; usmandachlan usman @gmail.com.
  Pendidikan Formal: S1 Universitas Diponegoro Jurusan Matematika, S2 Institut Teknologi Bandung Jurusan Rekayasa Sistem Perusahaan.
  Pekerjaan tetap sebagai dosen Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Muhammad Tho'in., alamat e-mail; thoinsyakira@yahoo.com.
Pendidikan Formal: S1 IAIN Surakarta Jurusan Ekonomi Islam, S2 IAIN Surakarta Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah.
Pekerjaan tetap sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)-AAS Surakarta.

Sumadi., alamat e-mail; sum_1924@yahoo.com.
Pendidikan Formal: S1 UNS Surakarta Jurusan Ekonomi Manajemen, S2 Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam.
Pekerjaan tetap sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)-AAS Surakarta.

Rusnaena., alamat e-mail; nena.amin05@gmail.com.
Pendidikan Formal: S1 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar Jurusan Muamalah, S2 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar Konsentrasi Ekonomi Islam.
Pekerjaan tetap sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

Politik. Ekonomi ISLAM

Banyak para pemikir kontemporer yang menanyakan perihal sejarah kejayaan Islam ini dengan pertanyaan "apakah ada Negara Islam (Khilafah) itu?" Secara legal formal memang Negara Islam (Khilafah) hanya terjadi selama pemerintahan Khulafaur Rashyidin pada abad ke VII sampai ke VIII atau berlangsung selama 26 tahun saja, setelahnya tidak ada lagi Khilafah. Bahkan penguasa dalam beberapa abad berikutnya memakai sistem Kerajaan (Dinasti) yang dipimpin seorang Raja secara turun temurun bergantian dalam satu keturunan dan silsilah. Namun meski begitu, jejak peradaban yang diwariskan oleh Islam sejak abad VII sampai abad XIX sangat terasa oleh umat manusia. Ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang berkembang di daratan Eropa dan dunia Barat saat ini tidak terlepas dari kontribusi Islam di masa lalu. Hal ini tentu karena sistem tata negara, kebijakan politik, sosial, ekonomi, yang diterapkan dengan begitu berpihak pada rakyat. Statemen ini mungkin kontradiktif dengan beberapa referensi sejarah Islam yang umumnya menguraikan "keperkasaan" tentara Islam dalam berbagai peperangan merebut wilayah baru yang didudukinya.

Secara substantif untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang baik (*baldatu thoyyibah*) tidak perlu secara legal formal menjadikan Islam sebagai sistem kenegaraan, akan tetapi cukup dengan adanya *political will* pemerintah yang menyerap nilai-nilai Islam kemudian dielaborasikan dalam konteks sistem ke-negara-an tersebut. Ini pun jika diyakini nilai-nilai Islam itu berdampak pada kemaslahatan bersama. Di samping *political will*, tentu moral pemerintahan harus baik. Kemakmuran suatu bangsa tidak akan terwujud dengan moral hazard. Kita telah cukup melihat bagaimana teladan yang dicontohkan oleh para Pemimpin Islam dalam uraian sejarah. Betapa kaya dan makmurnya suatu bangsa, jika pemerintahannya korup dan sarat dengan kecurangan-kecurangan dalam memainkan peran pemerintahan, meski ditopang dengan sistem pemerintahan yang ideal (sistem khilafahkah, kerajaankah, atau republik-kah), tetap kehancuran suatu bangsa tidak bias dielakkan.

Maka, jika kekuasaan adalah pelabuhannya, politik adalah kendaraan yang mampu mewujudkan tujuan yang diinginkan pemilik kekuasaan itu. Jika politiknya baik, tujuan kekuasaan akan berakhir baik. Sebaliknya jika politik tidak baik, maka kekuasaan akan berakhir pada kehancuran. Selamat membaca!

LESFI LEMBAGA STUDY FILSAFAT ISLAM